



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 58 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2018-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, disebutkan bahwa untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan Pihak terkait lainnya.
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Gubernur menetapkan RAD TPB dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional maka diwujudkan dalam Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Kalimantan Tengah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);



11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018-2021.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2018 sampai tahun 2021.
6. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya di singkat dengan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Tengah adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB/SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.

10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RAD TPB/SDGs serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
12. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan RAD TPB/SDGs.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Tengah dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) RAD TPB/SDGs, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen perencanaan yang berisi tentang penjabaran target indikator, program dan kegiatan, serta indikatif anggaran.
- (3) TPB/SDGs berisikan 17 (Tujuh Belas) tujuan yang meliputi:
  - a. Tanpa Kemiskinan;
  - b. Tanpa Kelaparan;
  - c. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
  - d. Pendidikan Berkualitas;
  - e. Kesetaraan Gender;
  - f. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
  - g. Energi Bersih dan Terjangkau;
  - h. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
  - i. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
  - j. Berkurangnya Kesenjangan;
  - k. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan;
  - l. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan;
  - m. Penanganan Perubahan Iklim;
  - n. Ekosistem Lautan;
  - o. Ekosistem Daratan;
  - p. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh;  
dan
  - q. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

## **BAB III SISTEMATIKA**

### **Pasal 3**

- (1) Dokumen RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan sistematika sebagai berikut:
  - Bab I Pendahuluan
  - Bab II Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan SDGs

Bab III Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs  
Bab IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan  
Bab V Penutup  
Matriks I, II, III dan matriks Kabupaten/Kota.

- (2) Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs.
- (2) Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang diatur dalam RAD TPB/SDGs ini.

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 27 Desember 2018

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 27 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**FAHRIZAL FITRI**

Pemutakhiran Dokumen. Dokumen RAD TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji ulang secara bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik, baik secara daring (online) dan luring (offline). Pemutakhiran dokumen setiap enam bulan sejalan dengan jadwal pelaksanaan pemantauan.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**



**SUGIANTO SABRAN**

## KATA PENGANTAR

Indonesia berkomitmen melaksanakan agenda SDGs melalui Peraturan Presiden Nomor: 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) yang merupakan komitmen Global dan Nasional yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pangan, perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar, kesenjangan antar daerah, kelompok pendapatan dan gender, akses terhadap keadilan, perbaikan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan yang inklusif dan cara pelaksanaannya. Indikator *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN), sehingga target pencapaian *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) juga merupakan bagian dalam pencapaian target pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Aksi Daerah (RAD) *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Provinsi Kalimantan Tengah telah terintegrasi dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, yang dalam pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/159/2018 tentang Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2021.



Laporan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) ini merupakan laporan yang memuat mengenai capaian keberhasilan, keadaan dan kecenderungan serta upaya penting dalam percepatan pencapaian SDGs sampai dengan posisi tahun 2018, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kegiatan yang diperlukan agar sasaran/target SDGs dapat dicapai.

Akhirnya Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan Laporan SDGs ini, dengan harapan semoga Laporan ini memberikan kontribusi berharga dan bermanfaat serta menjadi bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai target SDGs yang akan datang.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



SUGIANTO SABRAN



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	III
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. KESELARASAN <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i> (SDGs) TERHADAP NAWACITA .....	1
1.2. TUJUAN <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i> (SDGs) .....	24
1.3. KOMITMEN PELAKSANAAN PENCAPAIAN TPB/SDGs .....	26
1.4. PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN SDGs .....	28
1.5. SISTEMATIKA RAD .....	31
<b>BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN SDGS (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) .....</b>	<b>33</b>
2.1 TANPA KEMISKINAN.....	33
2.1.1. <i>Persentase Penduduk Miskin</i> .....	33
2.1.2. <i>Jumlah Penduduk Miskin Kalimantan Tengah 2013-2017</i> .....	36
2.1.3. <i>Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Kalimantan Tengah Maret 2013-2017</i> .....	37
2.1.4. <i>Tingkat Kedalaman Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Kalimantan Tengah Maret 2013 - 2017</i> .....	38
2.2. TANPA KELAPARAN .....	39
2.3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA .....	42
2.3.1. <i>Angka Kematian Bayi (AKB)</i> .....	42
2.3.2. <i>Angka Kematian Ibu (AKI)</i> .....	44
2.3.3. <i>Angka Usia Harapan Hidup</i> .....	48
2.3.4. <i>Jumlah dan Jenis Rumah Sakit</i> .....	50
2.3.1. <i>Persentase RFT Rate Kusta</i> .....	51
2.3.2. <i>Persentase Keberhasilan Pengobatan TB</i> .....	52
2.4. PENDIDIKAN BERKUALITAS.....	55
2.4.1. <i>Angka Partisipasi Sekolah (APS)</i> .....	55
2.4.2. <i>Angka Putus Sekolah - SMA/MA/SMK</i> .....	56
2.4.3. <i>Angka kelulusan sekolah SMA/SMK dan PKLK kualifikasi minimal S1/D4</i> .....	56
2.4.4. <i>Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan PK-LK kualifikasi Minimal S1/D4</i> .....	57
2.4.5. <i>Angka Partisipasi Murni (APM)</i> .....	57
2.4.6. <i>Rata-rata Lama Sekolah</i> .....	58
2.4.7. <i>Angka Harapan Lama Sekolah</i> .....	59
2.4.8. <i>Angka Partisipasi Kasar (APK) - SMA/MA/SMK</i> .....	60
2.5. KESETARAAN GENDER.....	63
2.6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK.....	66
2.6.1. <i>Sanitasi dan Air Minum</i> .....	66
2.6. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU .....	68
2.7.1 <i>Kondisi Kelistrikan</i> .....	68
2.7 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI .....	69
2.8.1 <i>Pertumbuhan PDRB</i> .....	69
2.8.2 <i>Laju Inflasi</i> .....	72
2.8.3 <i>Jumlah Karya Seni Budaya Yang Mendapatkan Penghargaan Nasional Seni Budaya dan Olahraga</i> .....	74
2.8.4 <i>Persentase pertumbuhan sub kategori perikanan terhadap PDRB</i> .....	76
2.8.5 <i>Pertumbuhan sektor pariwisata</i> .....	76
2.8.6 <i>Pertumbuhan Sub Kategori Tanaman Pangan</i> .....	77
2.8.7 <i>Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan</i> .....	78

2.8.8	<i>Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan</i> .....	79
2.8.9	<i>Pertumbuhan industri</i> .....	80
2.8.10	<i>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</i> .....	80
2.9	INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR .....	84
2.9.1	<i>Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik/Mantap</i> .....	84
2.9.2	<i>Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer</i> .....	84
2.9.3	<i>Persentase Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial</i> .....	86
2.10	BERKURANGNYA KESENJANGAN .....	87
2.11	KOTA DAN PERMUKIMAN BERKELANJUTAN .....	88
2.11.1	<i>Persentase capaian infrastruktur dasar perumahan dan pemukiman</i> .....	88
2.12	KONSUMSI DAN PRODUKSI BERKELANJUTAN .....	91
2.12.1	<i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)</i> .....	91
2.12.2	<i>Indeks Kualitas Air</i> .....	92
2.13	PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM .....	93
2.14	EKOSISTEM LAUTAN .....	97
2.15	EKOSISTEM DARATAN .....	98
2.15.3	<i>Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan</i> .....	98
2.15.4	<i>Indeks Tutupan Hutan</i> .....	98
2.16	KRIMINALITAS .....	100
2.17	KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN .....	103
2.17.1	<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i> .....	103
<b>BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGS</b> .....		<b>105</b>
3.1	TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN .....	105
3.2	TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN .....	109
3.3	TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA .....	111
3.4	TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS .....	114
3.5	TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER .....	117
3.6	TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK .....	120
3.7	TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU .....	123
3.8	TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI .....	127
3.9	TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR .....	134
3.10	TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN .....	139
3.11	TUJUAN 11 KOTA DAN PERMUKIMAN BERKELANJUTAN .....	144
3.12	TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI BERKELANJUTAN .....	147
3.13	TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM .....	150
3.14	TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN .....	157
3.15	TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN .....	160
3.16	TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH .....	164
3.17	TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN .....	169
<b>BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN</b> .....		<b>175</b>
4.1	MEKANISME PEMANTAUAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) .....	176
4.2	MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENAKSI PIHAK NONPEMERINTAH .....	177
4.3	JADWAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENCAPAIAN TPB/SDGS 2017-2019 .....	179
4.4	PUBLIKASI HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI .....	180
<b>BAB V PENUTUP</b> .....		<b>181</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

SDGs (Sustainable Development Goals) merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDGs adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. SDGs ini diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan perogram sebelumnya yaitu MDGs (Millennium Development Goals) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh banyak negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jadi kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang sebelumnya menggunakan konsep MGDs sekarang diganti dengan SDGs.

SDGs merupakan hasil dari proses yang bersifat partisipatif, transparan, dan inklusif terhadap semua suara pemangku kepentingan dan masyarakat selama 3 tahun lamanya. SDGs akan mewakili sebuah kesepakatan yang belum pernah ada sebelumnya yang terkait dengan prioritas-prioritas pembangunan berkelanjutan di antara 193 Negara Anggota.

Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, SDGs (Sustainable Development Goals) mempunyai 17 tujuan dengan 169 target, dimana tujuan dan target-target dari SDGs ini bersifat global serta dapat diaplikasikan secara universal yang dipertimbangkan dengan berbagai realitas nasional, kapasitas serta tingkat pembangunan yang berbeda dan menghormati kebijakan serta prioritas nasional. Tujuan dan target SDGs tidaklah berdiri sendiri, perlu adanya implementasi yang dilakukan secara terpadu.

### 1.1. Keselarasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap Nawacita

Agenda pembangunan Indonesia tahun 2015-2019 merupakan penjabaran operasional dari Nawacita. Sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden RI, jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dilakukan melalui Nawacita yang merupakan arah untuk meneguhkan kembali jalan

ideologis supaya Indonesia terus mampu bertahan terhadap berbagai deraan gelombang sejarah dan menyongsong perubahan.

Nawacita atau Sembilan Cita tersebut meliputi :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawacita secara lebih operasional diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang diluncurkan pada 8 Januari 2015 dengan landasan hukum Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. RPJMN 2015-2019 dirumuskan dengan memperhatikan elemen strategis yang salah satunya adalah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini selanjutnya dijabarkan ke dalam bidang-bidang pembangunan yang relevan dengan agenda pembangunan nasional.

Pada kurun waktu yang bersamaan dengan perumusan RPJMN 2015-2019, pada tingkat global di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, para pemimpin 193 negara anggota PBB pada akhir September 2015 mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka



panjang yang dikenal dengan Agenda 2030. Agenda 2030 mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrim sebagai tantangan utama di tingkat global, merupakan persyaratan mutlak untuk pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan meliputi tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang saling terkait dan selaras. Kemudian Presiden melalui Menteri PPN / Bappenas terus terus memantau pelaksanaan TPB/SDGs dari Tim koordinasi TPB Pusat, Provinsi sampai dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten. Substansi dalam pencapaian TPB/SDGs sekaligus menjadi tolok ukur tercapainya agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan. Langkah kongkrit Pemerintah Pusat dalam mendukung SDGS dengan melakukan Sosialisasi diawali pada Bulan Oktober 2017. Mandat Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah Pemerintah Daerah wajib mendukung penuh pencapaian TPB/SDGS sampai tingkat Daerah. Disisi lain, TPB/SDGs diselaraskan dengan Nawacita yang diterjemahkan ke dalam RPJMN 2015-2019 sampai dengan RENJA K/L untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong untuk mencapai cita-cita luhur bangsa. Selanjutnya diselaraskan ke Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota dalam RPJMD, RKPD sampai dengan RENJA OPD.

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, pada pasal 2 ayat (3) huruf b menyebutkan bahwa RPJMN berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJMD dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJMN dan Surat Edaran Bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas RI dengan Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk pelaksanaan penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Pendekatan strategi pembangunan nasional yang menggariskan 3 (tiga) dimensi pembangunan yang meliputi dimensi pembangunan manusia dan

masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan dan dimensi pemerataan dan kewilayahan. Penyelarasan strategi pembangunan nasional ke dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menempatkan 3 (tiga) dimensi pendekatan pembangunan dalam RPJMN sebagai tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Tengah.

Adapun Sepuluh agenda utama / tujuan pembangunan daerah Kalimantan Tengah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 yang dijabarkan kedalam prioritas dan arah kebijakan umum yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan Kesesuaian Tata Ruang Wilayah Yang Berkualitas
  - 2 Meningkatkan Infrastruktur Yang Berkualitas
  - 3 Meningkatkan Pembangunan Sumber daya air, Daerah Pesisir dan Pantai
  - 4 Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah
  - 5 Meningkatkan Perekonomian Masyarakat secara Konsisten
  - 6 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
  - 7 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
  - 8 Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata
  - 9 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
  - 10 Meningkatkan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan
- Pemecahan masalah dalam rangka percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

#### **I. Meningkatkan Kesesuaian Tata Ruang Wilayah Yang Berkualitas**

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan secara berkesinambungan. dari masa ke masa. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap kesesuaian antara program pembangunan dengan rencana tata ruang, ternyata pemanfaatan rencana tata ruang untuk program pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah masih belum seperti yang diharapkan/direncanakan.

Sehingga sangat perlu untuk meingkatkan kesesuaian tata ruang, karena kesesuaian dengan tata ruang akan menjadi instrumen penapis awal sebelum dokumen Amdal dinilai oleh komisi Amdal. Menjadi sangat penting

menyetarakan pemahaman tentang tata ruang bagi semua pemangku kepentingan Amdal, termasuk Komisi Amdal yang berada di Provinsi Kalimantan tengah. Guna **meningkatkan kesesuaian Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah yang berkualitas**, maka **sasaran pembangunan** yang harus dicapai adalah:

- a. Terwujudnya perencanaan tata ruang yang akomodif dan konsisten, dengan indikator persentase kesesuaian rencana tata ruang wilayah terhadap kebutuhan ruang.

## **II. Meningkatkan Infrastruktur yang berkualitas**

Indikator kemakmuran dan kemajuan suatu daerah salah satunya adalah penyediaan fasilitas infrastruktur yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas dan ketercukupan energi yang merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Pembangunan infrastruktur juga kerap dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh kabupaten dan kota se- Provinsi Kalimantan Tengah dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber-sumber ekonomi produktif maupun modal sosial lainnya.

Guna **meningkatkan infrastruktur yang berkualitas** di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka **sasaran pembangunan** yang harus dicapai adalah:

- a. Meningkatnya konektivitas antar daerah, dengan indikator persentase jalan mantap dan persentase konektivitas jalan.
- b. Meningkatnya ketercukupan energi, dengan indikator meningkatnya rasio desa berlistrik dan Rasio elektrifikasi.

## **III. Meningkatkan Pembangunan Sumber daya air, daerah Pesisir dan Pantai**

Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek

lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut.

Peranan pemerintah daerah sangat penting dalam meningkatkan pembangunan daerah. Peranan yang diberikan selain dalam bentuk sarana dan prasarana baik yang

berupa sarana fisik maupun subsidi langsung, pemerintah daerah juga harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri prasarana dan sarana untuk mendukung upaya percepatan pembangunan daerah serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya. Daerah juga perlu mendorong terjadinya koordinasi dan kerjasama antar wilayah yang melibatkan dua atau lebih wilayah yang berbeda.

Peningkatan sumber daya air di Kalimantan Tengah, antara lain melalui pengembangan sistem jaringan pengelolaan sumberdaya air, meliputi: wilayah sungai, danau, daerah irigasi, daerah rawa dan tambak, termasuk pengamanan pantai, pengendalian banjir dan longsor tebing dalam rangka menunjang peningkatan produktivitas sektor pertanian tanaman pangan, terutama padi, yang berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Terkait dengan pengelolaan daerah pesisir dan pantai, dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan, melalui peningkatan fasilitas sarana dan prasarana, akses permodalan dan pasar teknologi. Selain itu juga pengadaan stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk para nelayan pada sejumlah kabupaten atau daerah-daerah yang letak geografisnya sangat strategis.

**Guna meningkatkan pembangunan sumber daya air, daerah pesisir dan pantai di Provinsi Kalimantan Tengah, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:**

- a. Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, dengan indikator produktivitas padi, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan.



#### **IV. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah**

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan daerah dengan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu daerah. Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya meningkatkan daya saing ekonomi daerah menjadi tujuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini. *Untuk meningkatkan kualitas daya saing perekonomian masyarakat maka perlu untuk dilakukan penggalangan partisipasi masyarakat secara aktif dan membuka pintu kemitraan yang berbasas “win-win solution”.*

Guna mewujudkan **kualitas perekonomian daerah**, maka **sasaran pembangunan** yang harus dicapai adalah:

- a. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator tingkat kemiskinan dan laju pertumbuhan ekonomi.
- b. Meningkatnya daya beli masyarakat, dengan indikator Laju Inflasi dan pendapatan perkapita

#### **V. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat secara konsisten**

Salah satu wujud kesejahteraan dari suatu daerah adalah tingkat perekonomian yang baik dan konsisten. Karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus berusaha menciptakan upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus menunjukkan konsistensi yang baik hingga kini. Namun, masih dibutuhkan upaya dalam menekan angka pengangguran serta meningkatkan perekonomian masyarakat serta mengembangkan tatanan perekonomian daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing serta berkeadilan, melalui optimalisasi potensi sumber daya alam secara umum dan sistem perdagangan yang adil untuk menopang kemajuan industri, mempromosikan

investasi, mengembangkan pariwisata yang tangguh, mengembangkan kemitraan antar-pelaku ekonomi, pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal lainnya, melibatkan seluruh masyarakat secara partisipatif dalam kerangka peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pengurangan penduduk miskin serta ketahanan pangan masyarakat.

Guna meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten, maka **sasaran pembangunan** yang harus dicapai adalah:

- a. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi hijau, dengan indikator Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB
- b. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, dengan indikator Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dan tingkat pengangguran terbuka.

## **VI. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik**

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka pemerintah harus menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di samping itu, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus melibatkan peran masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, guna **mewujudkan tata pemerintahan yang baik** yang merupakan prasyarat bagi kemajuan sebuah daerah, maka **sasaran pembangunan** yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- a. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator opini BPK.
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- c. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, dengan indikator hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
- d. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan, dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah dan predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **VII. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bidang urusan terpenting. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh, baik dalam taraf nasional maupun internasional. Kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menata, mengolah dan membangun provinsi Kalimantan Tengah secara kreatif dan produktif dengan memanfaatkan potensi daerah yang berkualitas sehingga mampu berdaya saing dalam semua aspek kehidupan untuk menekan tingkat ketergantungan anggaran dalam proses pembangunan.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, tentunya tidak terlepas dari peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan. Hal ini ditempuh melalui berbagai upaya, antara lain: 1) peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan proses dan bidang pembangunan di tingkat nasional maupun di daerah; 2) Penerapan Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) diberbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; 3) Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender; 4) peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), melalui a) Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender; b) Penguatan mekanisme koordinasi antar Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG; c) Penguatan lembaga/jejaring PUG di Pusat dan daerah termasuk Perguruan Tinggi, pusat studi wanita/gender dan organisasi masyarakat.

Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Tengah secara menyeluruh, maka **sasaran pembangunan** yang harus dicapai adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indikator IPM, rata-rata lama sekolah dan angka harapan usia sekolah
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator angka harapan hidup

### **VIII. Meningkatkan peran Sektor Pariwisata**

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan berbelanja, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan pasar barang dan jasa.

Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik. Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki pemandangan alam yang indah sangat mendukung bagi berkembangnya sektor industri pariwisata di Indonesia.

Guna meningkatkan kontribusi sektor pariwisata di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka **sasaran pembangunan** yang harus dicapai adalah:

- a. Terpasarkannya destinasi wisata, dengan indikator jumlah kunjungan wisatawan.



## **IX. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup**

Lingkungan yang nyaman merupakan cita-cita bagi setiap Pemerintah daerah termasuk Provinsi Kalimantan Tengah. Seiring majunya tingkat pemikiran masyarakat serta kemajuan teknologi di segala bidang kehidupan, maka tingkat kesadaran untuk memiliki lingkungan dengan kondisi bersih seharusnya ditingkatkan dari sebelumnya. Pembangunan harus memerhatikan kelestarian lingkungan hidup. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah digunakan dan menjadi instrumen pendukung dalam penyusunan RPJMD yang mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini tercermin antara lain dalam usulan perbaikan rumusan visi misi dan rekomendasi penyempurnaan Kajian Rencana Program (KRP) pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Guna **meningkatkan kualitas lingkungan hidup** di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka **sasaran pembangunan** yang harus dicapai adalah menurunnya degradasi lingkungan, dengan indikator peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

## **X. Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan**

Setiap daerah diberikan hak untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang dapat mendorong perkembangan dan pembangunan Daerah termasuk Provinsi Kalimantan Tengah.

Otonomi Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintah untuk mendorong peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, merubah tatanan kehidupan ekonomi masyarakat yang masih rendah kearah yang lebih baik, serta mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sebagaimana konsep dasar dari otonomi daerah adalah pemberian wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dan mereka butuhkan sehingga perlu peningkatan kemandirian pembiayaan pembangunan agar otonomi daerah yang diberikan kepada Daerah provinsi Kalimantan tengah dapat berjalan optimal. Selain itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggerakkan segala kemampuan

yang dimiliki dalam menciptakan serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang dapat menjadi sumber pembiayaan di daerah.

Guna meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

Meningkatnya pendapatan asli daerah, dengan indikator persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, persentase PAD terhadap total pendapatan transfer dan persentase belanja langsung (BL) terhadap APBD.

Sinergi Nawa Cita, RPJMD 2016-2021 dan TPB/SDGs

Nawa Cita Presiden 2014-2019	Misi RPJMD 2016-2021	SDGs
-	Misi 1: Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi	T11 Kota dan permukiman yang berkelanjutan
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.	Misi 2: Pengelolaan Infrastruktur	T17 Kemitraan untuk mencapai tujuan T9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur T11 Kota dan permukiman yang berkelanjutan
-	Misi 3: Pengelolaan Sumber Daya Air, daerah Pesisir & Pantai	T14 Ekosistem Lautan
Nawa Cita 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.	Misi 4: Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan	T1 Tanpa Kemiskinan T2 Tanpa Kelaparan T10 Berkurangnya kesenjangan T12 Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab
Nawa Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik		
Nawa Cita 2: Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Misi 5: Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah	T6 Air bersih dan sanitasi layak
Nawa Cita 4: Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.		

Nawa Cita Presiden 2014-2019	Misi RPJMD 2016-2021	SDGs
Nawa Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	Misi 6: Pendidikan, Kesehatan & Pariwisata	T3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
Nawa Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik		T4 Pendidikan berkualitas
Nawa Cita 8: Melakukan revolusi karakter bangsa		T5 Kesetaraan Gender
Nawa Cita 9: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia		T6 Air bersih dan sanitasi layak
Nawa Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	Misi 7: Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam	T8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Nawa Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik		T7 Energi bersih dan Terjangkau
	Misi 8: Pengelolaan Pendapatan Daerah	T13 Penanganan Perubahan Iklim
		T15 Ekosistem Daratan
		T7 Energi bersih dan Terjangkau

Bilamana kita melihat persandingan antara tujuan pembangunan SDGs (Sustainable Development Goals) dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah maka terlihat dengan jelas bahwa sebenarnya tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) telah dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2016-2021 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berlangsung dalam proses pembangunan di Kalimantan Tengah lima tahun. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Disamping hal tersebut, seluruh pelaksanaan pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah diupayakan mampu menjaga keselarasan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Sasaran selama lima tahun yaitu :

1. Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Kebutuhan Ruang
2. Prosentase jalan mantap
3. Persentase konektivitas jalan
4. Rasio desa berlistrik (%)
5. Rasio elektrifikasi (%)
6. Produktivitas padi (kw/ha)
7. Nilai Tukar Petani (NTP)
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
9. Kontribusi PDRB Kalimantan Tengah dalam pembentukan PDRB Kalimantan (%)
10. Laju pertumbuhan ekonomi(%)
11. Tingkat kemiskinan (%)
12. Laju inflasi (%)
13. PDRB perkapita (Juta Rp.)
14. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB (%)
15. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)
16. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
17. Opini BPK
18. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
19. Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
20. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
21. Predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah
22. IPM
23. Rata-rata Lama Sekolah
24. Angka Harapan Usia Sekolah
25. Angka Harapan Hidup
26. Jumlah Kunjungan Wisatawan
27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (nilai)
28. Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah (%)
29. Persentase PAD terhadap total pendapatan transfer (%)
30. Persentase belanja langsung terhadap APBD (%)

Indikator kinerja tersebut merupakan buktinya atas kinerja pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mengimplementasikan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kalimantan Tengah 2016-2021, “Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)” tersebut, ditempuh melalui delapan misi.

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiridengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Mengacu pada permasalahan dan isu-isu strategis, serta visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, maka **misi pembangunan daerah jangka menengah** sebagai berikut:

#### **Misi Pertama: Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi**

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pemantapan perencanaan pembangunan daerah dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang terintegrasi dengan pembangunan sektoral adalah pemantapan tata ruang wilayah. Pentingnya pemantapan penataan ruang didasarkan pada semakin meningkat dan dinamisnya kegiatan pembangunan serta gerakan masyarakat yang telah meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang oleh aktivitas-aktivitas yang satu sama lain sering tidak sesuai. Hal ini dapat menimbulkan konflik pemanfaatan ruang yang kian rumit dan sulit diatasi, selanjutnya dapat menjadi pemicu timbulnya berbagai masalah sosial budaya.

Prinsip penataan ruang adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, efektif dan efisien, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Adapun penataan ruang bertujuan untuk terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengeturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, dimana pola ruangnya didasarkan pada SK Menteri Kehutanan Nomor: 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 yang telah *diupdate*, terlihat bahwa kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) sekitar  $\pm$  18 persen, sedangkan kawasan hutan  $\pm$  82 persen. Beberapa permasalahan terkait dengan RTRWP antara lain masih banyak desa, prasarana wilayah, ruang kelola masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan. Untuk mengakomodir rencana pembangunan sarana dan prasana wilayah, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya perlu ruang yang cukup dan memadai yang didasarkan pada analisis dan kajian teknokratik sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk itu RTRWP Kalteng perlu dilakukan perbaikan guna mengatasi permasalahan kawasan tersebut di atas.

Penataan ruang perlu dimantapkan karena merupakan instrumen demi terwujudnya pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang serasi, selaras, dan berkesinambungan, baik antara pemerintah pusat maupun daerah. Untuk itu, pendekatan penataan ruang diharapkan mampu menghasilkan rencana-rencana yang mempunyai daya antisipasi tinggi terhadap perkembangan dan tidak kalah cepat dengan kebutuhan pembangunan. Selain itu, harus bersifat realistis operasional dan benar-benar mampu berfungsi sebagai instrumen koordinasi terhadap program-program pembangunan dari berbagai sumber pendanaan. Penataan ruang adalah merupakan kegiatan lintas sektor dan wilayah, dengan demikian faktor penting yang harus menjadi perhatian adalah perlunya optimalisasi peran kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Kualitas perencanaan tata ruang sangat ditentukan pula oleh ketersediaan data dan informasi yang akurat dan *up to date*, baik pemanfaatan ruang secara eksisting maupun data-data dasar sehingga peningkatan ketersediaan data dan informasi juga terus dilakukan.

### **Misi Kedua: Pengelolaan Infrastruktur**

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauhmana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur dan aksesibilitas secara merata. Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi



dan daya saing. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah.

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, sertaantisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyediaan jalan, permukiman, perhubungan darat, laut, udara dan perkeretaapian yang terintegrasi sebagai simpul moda transportasi yang efektif dan efisien, serta peningkatan infrastruktur kelistrikan. Peningkatan jalan mantap dilakukan melalui rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pada jalan nasional, provinsi, kabupaten maupun jalan-jalan strategis yang menuju outlet produksi dan distribusi. Peningkatan elektrifikasi dilakukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga uap, gas, bayu dan mikrohidro, maupun perluasan jaringan transmisi.

### **Misi Ketiga: Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai**

Kalimantan Tengah memiliki garis pantai sepanjang 750 km yang menghadap ke laut Jawa dan terdapat pada 7 (tujuh) kabupaten, yakni: Sukamara, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas. Garis pantai pada umumnya merupakan tempat bagi para nelayan untuk mencari penghidupan.

Sumber daya air, pesisir dan pantai merupakan potensi penting dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah di masa depan, mengingat luas wilayah laut Indonesia adalah 62% dari luas wilayah nasional. Dengan berbagai kekayaan keanekaragaman hayati dan lingkungan, sumber daya pesisir dan lautan mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi. Guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta memberikan manfaat yang serbesar-besarnya kepada seluruh *stakeholders* terutama masyarakat pesisir, dan menimbulkan dampak serta konflik yang berpotensi terjadi.

Daerah pesisir merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional melalui kegiatan masyarakat seperti perikanan laut, perdagangan, budidaya perikanan (aquakultur), transportasi, pariwisata, pengeboran minyak dan sebagainya. Manfaat ekosistem pantai sangat banyak, namun demikian tidak

terlepas dari permasalahan lingkungan, sebagai akibat dari pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pantai. Permasalahan lingkungan yang sering terjadi di wilayah perairan pantai, adalah pencemaran, erosi pantai, banjir, inturusi air laut, penurunan biodiversitas pada ekosistem mangrove dan rawa, serta permasalahan sosial ekonomi.

Oleh karena itu di dalam pengelolaan daerah pesisir diperlukan suatu kajian keruangan mengingat perubahan ini bervariasi antar suatu tempat dengan tempat lain. Banyak faktor yang menyebabkan pola pembangunan sumber daya pesisir dan kelautan selama ini belum optimal dan berkelanjutan.

Pengelolaan terpadu Wilayah Pesisir dan pantai adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pantai antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan pantai juga harus diperhatikan upaya pengendalian kerusakan pantai. Selain itu harus diperhatikan juga upaya pengawasan, serta pengendalian kerusakan pantai sebagai upaya untuk mencegah, menanggulangi, serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak yang disebabkan oleh alam dan manusia. Pengendalian kerusakan pantai yang dapat merugikan kehidupan dilakukan secara menyeluruh, mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Upaya pencegahan dilakukan melalui perencanaan pengendalian kerusakan pantai yang disusun secara terpadu dan menyeluruh.

#### **Misi Keempat: Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan**

Stabilitas inflasi merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Inflasi yang tinggi menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat juga turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin bertambah miskin. Selain itu, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan masyarakat

dalam melakukan investasi, dan memproduksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan *agregat (demand management)* relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespon kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan yang bersifat sementara (*temporer*) yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu.

Untuk mendorong perekonomian rakyat, paket-paket deregulasi dapat secara langsung membantu atau mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat, sekaligus untuk mengatasi kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah. Untuk itu, selain perlu peranan pemerintah, pengembangan keswadayaan masyarakat juga penting. Pengembangan keswadayaan masyarakat selain memerlukan kebijakan publik yang menyentuh kepentingan masyarakat, inisiatif dari bawah, yang berasal dari masyarakat, juga diperlukan. Program perkreditan, seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), dan program perkreditan lainnya merupakan bagian dari usaha menggerakkan ekonomi rakyat. Namun hal tersebut masih perlu dikembangkan dan masih memerlukan kajian, terutama yang menyangkut efektivitasnya.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi serta inflasi yang rendah dan stabil, maka masyarakat akan meningkatkan pendapatannya secara riil, sehingga jumlah masyarakat miskin secara otomatis menjadi berkurang.

Pembangunan daerah akan lebih efektif apabila bertumpu pada kompetensi dasar dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki Kalimantan Tengah. Seluruh aspek kegiatan ekonomi harus dilakukan secara seimbang untuk mencapai suatu keadaan ekonomi yang stabil. Untuk menghindari berhentinya kreatifitas masyarakat, kegiatan produksi harus ditingkatkan. Upaya peningkatan aktivitas perekonomian yang dilakukan berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung dunia usaha, serta meningkat dan berkembangnya koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

### **Misi Kelima: Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah**

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh

aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, adil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah provinsi. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

### **Misi Keenam: Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata**

Keberhasilan suatu bangsa atau daerah sangat erat kaitannya dengan keunggulan sumberdaya manusia, yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya masyarakatnya. Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Tengah yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.

Kualitas pendidikan diukur dengan beberapa indikator yakni angka melek huruf (%) dan angka rata-rata lama sekolah (tahun). Hal tersebut dipengaruhi masalah keterjangkauan dan akses penduduk terhadap prasarana pendidikan. Dalam 5 tahun ke depan APK, APM, Rasio guru terhadap murid, persentasi guru berkualifikasi D4/S1 dan bersertifikasi dalam semua jenjang pendidikan akan ditingkatkan menjadi diatas rata-rata nasional, meningkatkan mutu dan kesejahteraan pendidik dan kependidikan, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan peningkatan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

Selama periode pemerintahan 2016-2021, aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pendidikan akan terus ditingkatkan di seluruh pelosok Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, tersistem, bertahap dan berkelanjutan. Dengan demikian, tenaga pendidikan dan kependidikan, sarana dan prasarana, infrastruktur akan terus dibenahi dan ditingkatkan. Kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi berupa peningkatan mutu pendidikan secara merata di Provinsi Kalimantan Tengah, baik pendidikan formal maupun informal. Sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup dalam pembangunan daerah, karena diperlukan juga sumber daya manusia yang dapat membentuk identitas dan karakter manusia berkualitas. Sehingga diharapkan SDM Kalimantan Tengah harus mampu mengelola sumber daya daerah guna mendongkrak pendapatan daerah.

Pemuda adalah tiang negara, pada saatnya nanti para pemuda harus mampu menerima tongkat estafet kepemimpinan dalam berbagai hal. Mengingat penting dan strateginya peranan pemuda ini maka pemerintah wajib untuk melakukan pembenahan dan pemberdayaan dalam proses pembangunan melalui organisasi kepemudaan.

Olahraga memiliki peran penting dan sentral dalam kehidupan manusia, mengingat pentingnya hal ini maka pembinaannya harus dilakukan sejak dini. Kalimantan Tengah pernah jaya dalam beberapa cabang olahraga antara lain dayung. Pembinaan, pengembangan beberapa cabang olahraga ke depan menjadi prioritas.

Dalam bidang kesehatan, seluruh masyarakat Kalimantan Tengah harus mempunyai akses yang mudah terhadap sarana prasarana kesehatan. Untuk itu keberadaan sarana prasarana kesehatan harus didekatkan kepada masyarakat di seluruh pelosok Kalimantan Tengah. Saat ini sudah ada 2 Rumah Sakit tipe B rujukan yakni Sampit dan Pangkalan Bun dan 1 Rumah Sakit tipe B pendidikan yakni RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya. Untuk wilayah Timur yakni daerah Barito, RSUD Muara Teweh akan ditingkatkan menjadi RSUD tipe B rujukan.

Dalam 5 tahun ke depan berbagai program kegiatan akan terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, akses terhadap sarana prasarana kesehatan. Demikian pula rasio dan prasarana kesehatan per satuan balita/penduduk, rasio dokter dan tenaga medis per satuan penduduk akan ditingkatkan. Indikator lain yang juga terus diperbaiki/ditingkatkan adalah umur harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian ibu, prevalensi gizi buruk dan sebagainya.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, maka angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah juga akan mengalami perbaikan. Bahaya Narkoba di Indonesia sudah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan yakni darurat narkoba, sehingga penanganannya harus dilakukan secara terpadu, terencana, terukur, dan komprehensif. Untuk menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan perang terhadap Narkoba di Kalimantan Tengah. Berbagai upaya baik berupaya mencegah, penindakan dan rehabilitasi dilakukan secara simultan, baik di kota maupun di desa.

Kalimantan Tengah memiliki objek wisata yang sangat beragam, mulai dari ekowisata, wisata religi kuliner, wisata susur sungai, wisata religi ziarah, wisata orang hutan, wisata pantai dan danau, dan lain sebagainya.

Seni dan Budaya merupakan identitas yang harus tetap terpelihara dan terjaga serta dikembangkan dimasa yang akan datang melalui sanggar-sanggar, padepokan dan organisasi. Berbagai event yang telah terjadwal selama ini tetap diteruskan, baik untuk tujuan wisata maupun dalam rangka pelestarian budaya. Dalam hal pengembangan wisata, di Kalimantan Tengah berpotensi juga untuk pengembangan "wisata religius" karena banyaknya daerah-daerah yang sakral atau di sakralkan.

Dengan melihat potensi dan sumberdaya daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pariwisata dan seni budaya merupakan salah satu kekayaan daerah yang mampu menarik wisatawan lokal ataupun mancanegara untuk berkunjung. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam sektor pariwisata, sehingga perlu adanya pengembangan dan pengelolaan yang cukup intens. Secara tidak langsung dengan berkembangnya sektor pariwisata, maka akan banyak aspek lain yang ikut bergerak secara positif. Misalnya apabila sektor pariwisata berkembang, akan banyak wisatawan yang berkunjung sehingga PAD akan meningkat. Pengembangan pariwisata dan seni budaya secara terencana, terpadu, dan sistematis merupakan salah satu upaya dalam peningkatan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian masyarakat mempunyai peluang untuk dapat berpartisipasi mengembangkan sektor pariwisata sehingga pendapatan masyarakat bertambah, kriminalitas menurun karena masyarakat mempunyai pekerjaan dan kegiatan yang positif. Dengan ini diharapkan sektor pariwisata dapat menjadi sektor yang mampu menopang dan mendukung berkembangnya sektor ekonomi, yang akan mampu mendongkrak pendapat asli daerah (PAD).



### **Misi Ketujuh: Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam**

Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Lingkungan hidup sendiri memiliki arti kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah harus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kerusakan lingkungan sesuai dengan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintahan sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya alam buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Upaya perlindungan sumber daya alam tidak hanya mencakup beberapa obyek saja melainkan di bidang yang luas termasuk perlindungan flora dan fauna. Dalam proses pengelolaan lingkungan hidup tentu perlu adanya keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan lingkungan dengan sebaik mungkin. Masyarakat merupakan peranan terpenting, karena pengelolaan lingkungan hidup di peruntukkan bagi masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan keseimbangan dalam berinteraksi dengan alam.

### **Misi Kedelapan: Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Pengelolaan Pendapatan daerah dimaksudkan agar penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah didapatkan secara maksimal untuk memenuhi berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan dalam rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas. Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi

daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pengelolaan pendapatan daerah di sini lebih diarahkan untuk peningkatan pendapatan asli daerah, dalam rangka memperbesar volume APBD. Banyak persoalan mengenai pendapatan daerah yang terasa sekali sangat kurang mendapatkan perhatian. Sementara di sisi lain belum banyak komponen warga masyarakat yang mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan pendapatan daerah, sedangkan hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui warga masyarakat, yakni hal pengelolaan pendapatan daerah. Diperlukan suatu transparansi pengelolaan pendapatan daerah dengan menumbuhkan sikap kejujuran dan tanggungjawab moral dari pengelola pendapatan daerah (pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah) dalam melaksanakan tugas pengelolaan pendapatan daerah. Hal lain yang perlu dilakukan adalah memunculkan kesadaran dari warga masyarakat agar ikut aktif merasa bertanggung-jawab atas pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, yang harus diperhatikan dalam peningkatan pendapatan daerah ini adalah terkait SDM pengelola pendapatan daerah yang kompeten dan profesional dalam melakukan terobosan-terobosan dan bekerja secara profesional untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

## **1.2. Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)**

Tujuan dari SDGs (Sustainable Development Goals) yang dikutip dari Litbang Depkes RI antara lain sebagai berikut:

1. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
4. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
5. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.

6. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjangkau, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
9. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
10. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
11. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
12. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
13. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
14. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
15. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
16. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
17. Melindungi, memperbaiki, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

Indonesia tidak hanya berkomitmen melaksanakan, namun bertekad menjadi pelopor (pioneer) dan teladan (role model) dunia pelaksanaan TPB/SDGs dalam upaya transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai perwujudan pelaksanaan kebijakan bebas dan aktif di kancah dunia. Hal ini mengingatkan bahwa pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs

tidak hanya sangat penting bagi rakyat Indonesia yang terefleksi dari sinergitas antara Nawacita dengan SDGs, namun juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global. Lebih lanjut, TPB/SDGs juga menjadi instrumen untuk peningkatan Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular sebagai perwujudan Indonesia yang telah termasuk dalam kategori lower-middle income country atau negara berpenghasilan menengah bawah. Komitmen tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tersebut menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memimpin sendiri pelaksanaan TPB/SDGs sebagai Ketua Dewan Pengarah dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana. Dalam Sidang Kabinet bulan Desember 2015, Presiden RI mengarahkan untuk mengoptimalkan peran koordinasi Kementerian PPN/BAPPENAS dengan melibatkan semua pihak (pemerintah, parlemen, ormas & media, filantropi & bisnis, pakar & akademisi) untuk bersinergi sesuai peran, fungsi dan kemampuan para pihak, serta menggunakan kelembagaan yang ada agar dapat langsung bekerja, baik secara strategis maupun operasional. Kementerian PPN/BAPPENAS akan mengkoordinasikan penyusunan Peta Jalan TPB/SDGs sebagai dokumen tahapan strategi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs untuk tahun 2016-2030, penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs yang merupakan dokumen lima tahunan dari pelaksanaan kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, dan memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagai dokumen perencanaan lima tahunan TPB/SDGs di tingkat daerah. Perpres Nomor 59 Tahun 2017 memandatkan penyusunan Rencana Aksi Nasional diselesaikan dalam kurun waktu enam bulan semenjak Perpres disahkan, dan penyusunan Rencana Aksi Daerah serta Peta Jalan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

### **1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs**

Sebagai negara yang berkomitmen kuat menjalankan SDGs, Indonesia juga mengupayakan semaksimal mungkin berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan SDGs, baik yang bersifat konvensional maupun berbagai

skema yang bersifat inovatif (*innovative financing*). Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari:

**Optimalisasi Penerimaan Negara.** Penerimaan negara yang berasal dari pajak, cukai, pendapatan bukan pajak, hibah (*grant*), retribusi, dll akan terus dioptimalkan. Sumber-sumber pembiayaan itu bahkan menjadi salah satu indikator TPB/SDGs pada Goal 17 untuk memastikan sarana pelaksanaan TPB/SDGs (*means of implementation*). Optimalisasi pendanaan dari pajak kini menjadi tumpuan utama pembiayaan karena Indonesia masuk kategori sebagai negara pendapatan menengah bawah (*lower-middle income country*), sehingga lebih sulit untuk mendapatkan bantuan luar negeri.

**Sumber Pembiayaan Nonpemerintah dari Masyarakat.** Kedermawanan masyarakat Indonesia sangatlah tinggi, bahkan survei Gallup (2016) menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakat kedua paling dermawan di dunia setelah Myanmar. Kegiatan filantropi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang ditunjukkan dengan makin banyak institusi yang bertujuan berderma dan menolong sesama, baik berbasis keagamaan dan keluarga. Dana sosial keagamaan misalnya melalui Zakat, Infaq, Shadaqah, Perpuluhan, Kolekte dan Dana Punia, mempunyai potensi yang sangat besar.

Kedermawanan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) kini juga terus berkembang, CSR ini juga akan makin berkembang dan terarah dengan adanya “ISO 26000 : *Guidance Standard on Social Responsibility*” yang menjadi standar pedoman bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial institusi, serta terkait dengan SDGs.

**Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat.** Pembiayaan inovatif kini juga dikembangkan untuk pembiayaan TPB/SDGs misalnya melalui PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah), KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha), pembiayaan melalui pasar modal (mis: Kehati Index) dan pasar uang (*green bond*), pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dll), mekanisme *debt swap to SDGs*, mekanisme *impact investing*, *crowd financing*, serta pembiayaan inovatif melalui *blended finance* (Pemerintah, Swasta, Filantropi).

Salah satu skema pembiayaan yang dapat ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah adalah skema KPBU. Terdapat 19 sektor KPBU yang

mendukung pencapaian TPB/SDGs khususnya untuk pencapaian 9 Tujuan TPB/SDGs. Sebagai contoh, sektor ketenagalistrikan, migas dan Energi Baru Terbarukan serta konservasi energi mendukung pencapaian Tujuan.

Komitmen pelaksanaan SDGs di Indonesia diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tanggal 04 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai wujud implementasi di daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen melaksanakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur yang sedang disusun tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2021.

Kemudian akan disusun tim koordinasi pelaksanaan SDGs Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana dan kelompok kerja. Tim Pengarah diketuai oleh Gubernur, Tim Pelaksana diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Tim Pokja dibagi berdasarkan pilar pembangunan SDGs. Sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip inklusif SDGs, Tim Koordinasi SDGs Provinsi Kalimantan Tengah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang meliputi unsur pemerintah, pelaku usaha, filantropi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan untuk membantu tugas dan fungsi Tim Koordinasi SDGs Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **1.4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan SDGs**

Beranjak dari pengalaman semua negara dalam melaksanakan pencapaian target-target MDGs yang belum optimal, disepakati perlunya penyempurnaan paradigma untuk kelanjutan MDGs menjadi TPB/SDGs. TPB/SDGs dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal, tidak hanya dilaksanakan oleh negara kurang berkembang dan negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia.



TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*No one left behind*" atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal". Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda.

Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB/SDGs. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam pemantauan dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan melaksanakan pengabdian masyarakat.

TPB/SDGs tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber

pembiayaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Indonesia berketetapan untuk menjadikan TPB/SDGs sebagai suatu “gerakan bersama” dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAN TPB/SDGs ini juga telah melibatkan sejauh mungkin seluruh platform yang tercermin pada Matriks Rencana Aksi baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Non pemerintah.

Pembentukan kelembagaan pelaksanaan SDGs dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang diawali melalui upaya membangun pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan pembangunan terhadap pentingnya keterlibatan dan kontribusi seluruh aktor untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan di dalam kerangka hasil SDGs. Adapun detail proses pembentukan kelembagaan pelaksana SDGs Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

#### a. Sosialisasi SDGs

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua kali yaitu pada tanggal 08 Oktober 2018 dan tanggal 07 Desember 2018 bertempat di Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengambil tema “Sosialisasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs (RAD-TPB/SDGs) dan Finalisasi Dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals”. Secara keseluruhan, kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari unsur pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta peserta dari unsur non-pemerintah.

Hasil dari kegiatan ini adalah adanya kesepahaman dan kesepakatan semua pihak untuk dibentuknya kelembagaan pelaksanaan SDGs yang melibatkan semua unsur baik pemerintah maupun non pemerintah dengan bentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan SDGs yang dipimpin oleh kepala daerah dengan legalitas berbentuk Keputusan Gubernur. Untuk mengaktualisasi gagasan tersebut, selanjutnya Bappeda menyusun konsep kelembagaan pelaksanaan SDGs Provinsi Kalimantan Tengah.

## 1.5. Sistematika RAD

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs terdiri atas lima bagian, sebagai berikut:

**Bab pertama** tentang pendahuluan menjelaskan mengenai keselarasan TPB/SDGs dengan Nawacita, bagaimana TPB/SDGs menyempurnakan MDGs dan juga komitmen Daerah dalam melaksanakan TPB/SDGs. Bab ini menjabarkan pula platform partisipatif dalam pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia sesuai dengan perannya masing-masing dan pembiayaan TPB/SDGs serta potensi pembiayaan lainnya. Proses penyusunan RAD juga menjadi satu bagian penting yang dibahas di bab pertama.

**Bab kedua** menjabarkan tentang kondisi pencapaian, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi Indonesia untuk beberapa indikator utama dari setiap Tujuan. Bab ini menjadi gambaran akan data dasar (*baseline*) dan capaian hingga tahun 2016 yang menjadi tolak ukur dalam penentuan target, program dan kegiatan untuk pencapaian setiap indikator TPB/SDGs hingga tahun 2021.

**Bab ketiga** merupakan bab yang menunjukkan target dan arah kebijakan pemerintah Indonesia yang terdapat pada RPJMN 2015-2019 dan RPJMD 2016-2021 yang selaras dengan setiap Tujuan TPB/SDGs. Berdasarkan pada arah kebijakan ini, maka pemerintah menetapkan program-program pembangunan untuk pencapaian setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Bab ini juga menjelaskan garis besar dari program-program nonpemerintah yang secara lebih rinci tertuang dalam matriks yang ada di lampiran RAD ini.

**Bab keempat** menerangkan tentang mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan tanggung jawab masing-masing platform partisipatif serta waktu pelaksanaan RAD TPB/SDGs 2017-2019. Bab ini berisi mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pemerintah dan nonpemerintah. Mekanisme bagi pemerintah mengacu pada PP No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sedangkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pihak nonpemerintah dilakukan berdasarkan *self-assessment*. Kedua mekanisme ini

nantinya akan disinergikan dan digabungkan sehingga menjadi satu kesatuan laporan atas pencapaian seluruh target dan indikator TPB/SDGs Indonesia.

**Bab kelima** merupakan penutup yang berisi tentang kaidah pelaksanaan TPB/SDGs, serta upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAD. Bab ini juga menerangkan tentang kesempatan kaji ulang dari dokumen RAD TPB/SDGs khususnya untuk keterlibatan nonpemerintah yang tertuang pada program dan kegiatannya.

## BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN SDGs (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)



### 2.1 Tanpa Kemiskinan

#### 2.1.1. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll

Tabel 2.1.1.  
Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Tengah dan Nasional

Persentase Penduduk Miskin	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kalimantan Tengah	6.19	6.23	6.07	5.94	5.66	5.37
Nasional	11,66	11,47	10,96	11,13	10,70	10,12

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Angka kemiskinan di Kalimantan Tengah selama lima tahun terakhir (2012-2017) menunjukkan trend penurunan. Pada tahun 2012 angka kemiskinan sebesar 6,19 persen dengan jumlah penduduk miskin 145.082 ribu jiwa, kemudian terus menurun hingga tahun 2017 menjadi 5.37 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 139,161 ribu jiwa. Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah daerah mengurangi penduduk miskin diantaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomiannya

maupun penciptaan pemerataan ke pembangunan serta meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan data BPS, pada Tahun 2017 (maret) persentase kemiskinan tertinggi masih di dominasi oleh wilayah pedesaan. Kabupaten/Kota yang memiliki persentase kemiskinan terendah adalah Kabupaten Sukamara (3.36%) , Kabupaten Lamandau (3.52 %) dan Kota Palangka Raya (3,62%). Sedangkan Persentase Kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Seruyan (7,46 %) dan Kabupaten Barito Timur (7,17 %).

Tabel 2.1.2  
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Kal-Teng

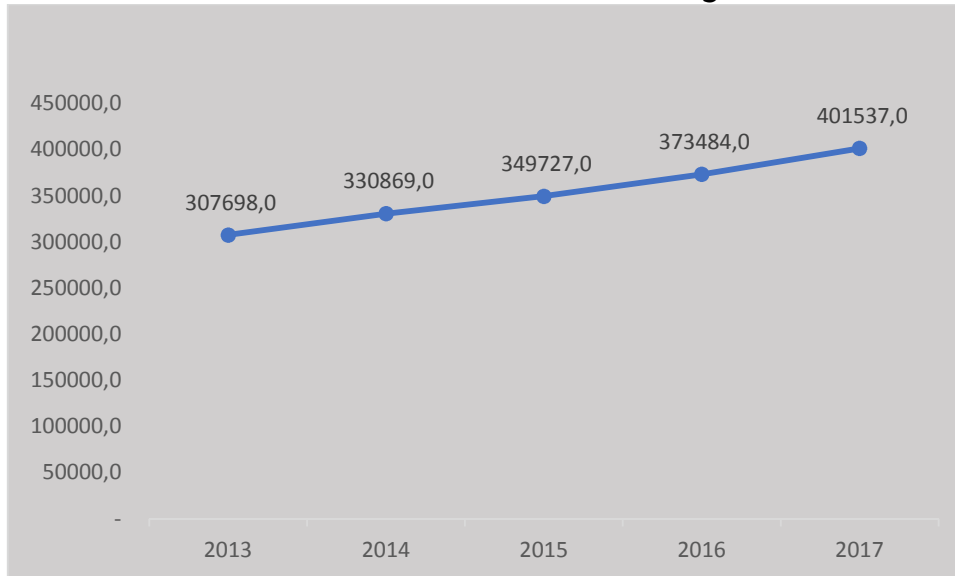
No.	Kabupaten/Kota	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kotawaringin Barat	5.44	5.27	5.07	4.96	4.52
2	Kotawaringin Timur	6.85	6.67	6.42	6.32	6.24
3	Kapuas	6.19	6.12	6.03	5.70	5.32
4	Barito Selatan	6.26	6.13	5.07	4.58	4.44
5	Barito Utara	5.98	5.88	5.93	5.38	5.21
6	Sukamara	4.56	4.29	4.32	3.73	3.36
7	Lamandau	4.87	4.66	3.95	3.80	3.52
8	Seruyan	8.77	8.39	8.50	8.08	7.46
9	Katingan	6.55	6.42	6.53	6.23	5.78
10	Pulang Pisau	5.45	5.35	5.65	5.49	5.19
11	Gunung Mas	6.90	6.70	6.17	5.85	5.83
12	Barito Timur	8.83	8.55	8.41	7.64	7.17
13	Murung Raya	6.44	6.24	6.57	6.32	5.88
14	Kota Palangka Raya	3.94	3.81	3.91	3.75	3.62
<b>Kalimantan Tengah</b>		<b>6.23</b>	<b>6.07</b>	<b>5.94</b>	<b>5.66</b>	<b>5.37</b>

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah (survei sosial ekonomi Nasional Maret 2013-2018)

Berdasarkan data BPS dalam kurun lima tahun terakhir (Year on Year) Garis Kemiskinan Kalimantan Tengah terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 Garis Kemiskinan Kalimantan Tengah sebesar 330.869 (RP/Kapita/Bulan) atau naik Rp. 23.171,- dibandingkan dengan tahun 2013 dimana Garis Kemiskinan sebesar 307.698 (RP/Kapita/Bulan). Pada tahun 2015 Garis Kemiskinan Kalimantan Tengah sebesar 349.727 (RP/Kapita/Bulan) atau naik RP 18.858,- dibandingkan dengan tahun 2014 dimana Garis Kemiskinan sebesar 330.869 (RP/Kapita/Bulan). Pada tahun 2016 Garis Kemiskinan Kalimantan Tengah sebesar 373.484 (RP/Kapita/Bulan) atau mengalami kenaikan Rp. 23.757 dibandingkan dengan tahun 2015 dimana Garis Kemiskinan sebesar 349.727 (RP/Kapita/Bulan).

Pada tahun 2017 Garis Kemiskinan Kalimantan Tengah sebesar 401.537 (RP/Kapita/Bulan) atau naik Rp. 28.053,- dibandingkan dengan tahun 2016 dimana Garis Kemiskinan sebesar 373.484 (RP/Kapita/ Bulan).

Grafik 2.1.1  
Garis Kemiskinan Kalimantan Tengah



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 2.1.3.  
Daftar Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan, Maret 2017

Perkotaan		Perdesaan	
Komoditi	%	Komoditi	%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Makanan</b>			
Beras	21,04	Beras	28,05
Rokok kretek filter	13,32	Rokok kretek filter	12,42
Daging ayam ras	5,27	Gula pasir	4,33
Telur ayam ras	4,40	Daging ayam ras	4,18
Gula pasir	3,40	Telur ayam ras	3,58
Mie instan	3,40	Mie instan	3,45
Kue basah	2,84	Kue basah	2,71
Cabe rawit	2,08	Bawang merah	2,38
Bawang merah	2,08	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,86
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,71	Cabe rawit	1,83
<b>Bukan Makanan</b>			
Perumahan	8,19	Perumahan	8,09
Bensin	3,49	Bensin	1,70
Listrik	2,69	Listrik	1,17
Pendidikan	1,85	Perlengkapan mandi	1,23
Perlengkapan mandi	0,89	Pendidikan	0,80

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah



## 2.1.2. Jumlah Penduduk Miskin Kalimantan Tengah 2013-2017

Secara umum, Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan secara bertahap namun konsisten. Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 149.38 ribu yang pada tahun berikutnya menurun menjadi 148.82 ribu. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, penduduk miskin secara konsisten menurun landai hingga akhirnya pada tahun 2017 mencapai 139.16 ribu.

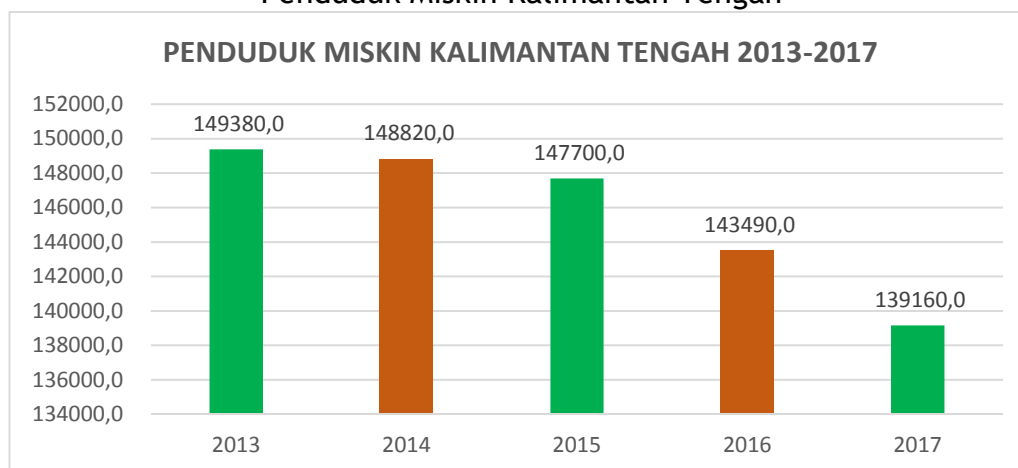
Jika dilihat menurut kabupaten/kota pada tahun 2013 hingga 2017 jumlah penduduk miskin secara keseluruhan mengalami penurunan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.4.  
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Kal-Teng (dalam ribu 000)

NO	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kotawaringin Barat	14.33	14.33	14.01	14.11	13.27
2	Kotawaringin Timur	27.96	27.94	27.26	27.39	27.70
3	Kapuas	21.19	21.18	20.90	19.96	18.80
4	Barito Selatan	8.11	8.03	6.66	6.09	5.95
5	Barito Utara	7.51	7.45	7.53	6.90	6.72
6	Sukamara	2.35	2.30	2.37	2.12	1.99
7	Lamandau	3.42	3.37	2.90	2.88	2.74
8	Seruyan	14.24	14.21	14.92	14.57	14.04
9	Katingan	10.20	10.16	10.41	10.10	9.51
10	Pulang Pisau	6.73	6.65	7.04	6.88	6.54
11	Gunung Mas	7.28	7.24	6.75	6.55	6.67
12	Barito Timur	9.55	9.52	9.51	8.88	8.56
13	Murung Raya	6.81	6.76	7.20	7.10	6.75
14	Kota Palangka Raya	9.71	9.68	10.25	9.96	9.91
<b>Kalimantan Tengah</b>		<b>149.38</b>	<b>148.82</b>	<b>147.70</b>	<b>143.49</b>	<b>139.16</b>

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Grafik 2.1.2  
Penduduk Miskin Kalimantan Tengah



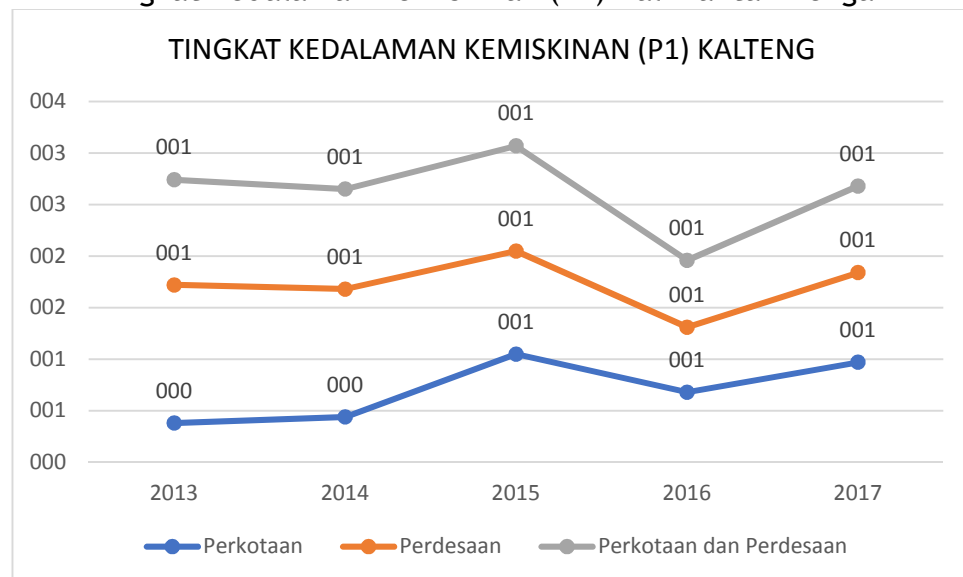
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah

### 2.1.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Kalimantan Tengah 2013- 2017.

Penanggulangan kemiskinan bukan hanya menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin tetapi lebih dari itu yang terpenting adalah bagaimana mengatasi kedalaman kemiskinan Kalimantan Tengah. Kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Pada tahun 2013 tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Kalimantan Tengah sebesar 1.02 sedangkan pada tahun 2014 tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Kalimantan Tengah sebesar 0.97 atau turun sebesar 0,05 poin. Sedangkan pada tahun 2015 tingkat kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 1.02 atau naik sebesar 0,05 poin dibanding dengan tahun 2014. Pada tahun 2016 tingkat kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 0.65 atau turun sebesar 0,37 poin. Sedangkan pada tahun 2017 tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Kalimantan Tengah sebesar 0.84 atau naik 0,19 poin.

Grafik 2.1.3.  
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Kalimantan Tengah

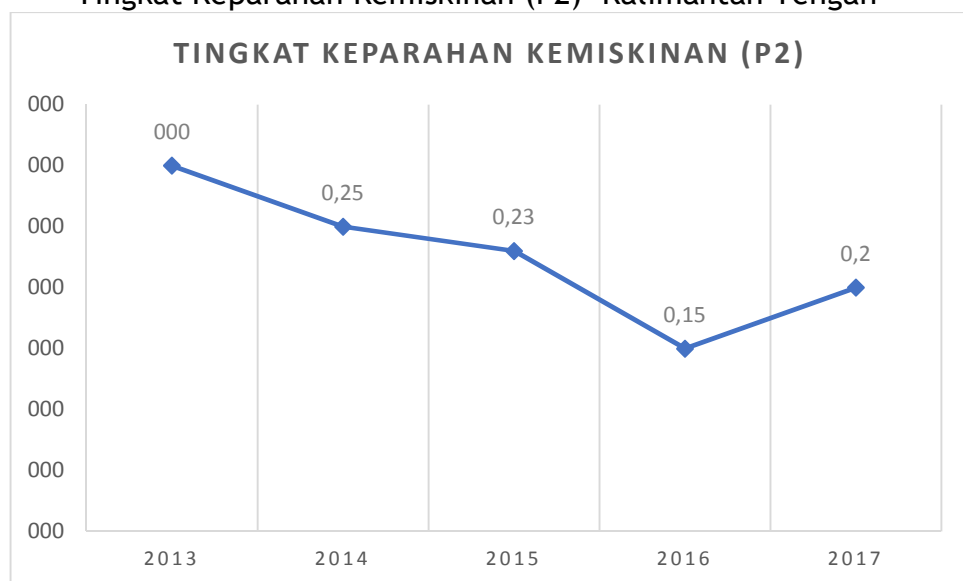


Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah.

#### 2.1.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Kalimantan Tengah 2013 - 2017

Tingkat keparahan kemiskinan merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Periode waktu 2013-2017 tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kalimantan Tengah cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013 tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kalimantan Tengah sebesar 0,30, sedangkan pada tahun 2014 tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kalimantan Tengah sebesar 0,25 atau turun sebesar 0,05 poin. Sedangkan pada tahun 2015 tingkat keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,23 atau turun sebesar 0,02 poin dibanding dengan tahun 2014. Pada tahun 2016 tingkat keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,15 atau turun sebesar 0,08 poin. Sedangkan pada tahun 2017 tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kalimantan Tengah sebesar 0,20 atau naik sebesar 0,05 point.

Grafik 2.1.4.  
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Kalimantan Tengah



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah.



## 2.2. Tanpa Kelaparan

### 2.2.1 Menghilangkan Kelaparan

Dari aspek penanganan untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Salah satu indikator terkait langsung dengan tujuan SDGs tersebut yaitu status gizi yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual.

### 2.2.2 Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi

Berat badan yang rendah dapat disebabkan karena tubuh yang pendek (kronis) atau karena diare atau penyakit infeksi lain (akut). Oleh karena keseimbangan antara berat badan dengan tinggi badan sangat dipengaruhi oleh konsumsi gizi yang seimbang. Oleh karena itu program dan kegiatan bidang pangan dan kesehatan harus menjadi prioritas dalam pembangunan. Faktor makanan dan penyakit infeksi, sebagai penyebab langsung masalah gizi, keduanya saling berkaitan. Anak balita yang tidak mendapat cukup makanan bergizi seimbang memiliki daya tahan yang rendah terhadap penyakit sehingga mudah terserang infeksi. Sebaliknya penyakit infeksi seperti diare dan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dapat mengakibatkan asupan gizi tidak dapat diserap tubuh dengan baik sehingga berakibat gizi buruk. Oleh karena itu, mencegah terjadinya infeksi juga dapat mengurangi kejadian gizi kurang dan gizi buruk. BBLR akibat kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil, dapat meningkatkan angka kematian bayi dan anak balita. Anemia kurang zat besi pada ibu

hamil dapat meningkatkan resiko kematian waktu melahirkan dan melahirkan bayi yang juga menderita anemia. Kurang vitamin A (KVA) pada bayi dan anak balita dapat menurunkan daya tahan tubuh, meningkatkan resiko kebutaan, dan meningkatkan resiko kesakitan dan kematian akibat infeksi.

### 2.2.3 Menggandakan Produktivitas Pertanian dan Menjamin Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan

Untuk mencapai ketahanan pangan maka terdapat empat dimensi yang harus di perhatikan antara lain:

- a. Dimensi pertama yaitu ketersediaan pangan secara fisik dari sisi penyediaan dengan meningkatkan jumlah produksi, tingkat ketersediaan stok dan perdagangan bersih (net trade).
- b. Dimensi kedua akses pangan secara fisik dan ekonomi diperlukan kebijakan yang fokus peningkatan pendapatan, pengurangan belanja keluarga miskin, ketersediaan fasilitas pasar yang memadai dan harga yang terjangkau.
- c. Dimensi ketiga dengan memperhatikan penggunaan pangan artinya pangan yang dikonsumsi harus memberikan energi yang mencukupi (kkal/kapita/hari) dan protein (gram/kapita/hari) yang lengkap serta adanya variasi konsumsi pangan.
- d. Dimensi keempat perlunya stabilitas yang mempengaruhi ketiga dimensi tersebut di atas. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan rasio antara produksi pangan dan konsumsi pangan baik beras, jagung, sayur, buah-buahan, ruminansia, unggas dan ikan.

Upaya peningkatan produksi pangan harus didukung oleh adanya kebijakan peningkatan produksi pertanian yang berkelanjutan melalui peningkatan produktifitas secara maksimal dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekologi & biosfer dan keberlanjutan masyarakat. Keberlanjutan ekologi & biosfer meliputi keberlanjutan sumberdaya dan lingkungan sementara keberlanjutan masyarakat meliputi keberlanjutan cultural, keberlanjutan social, dan keberlanjutan politis serta

keberlanjutan institusi. Oleh karena itu program dan kegiatan pembangunan bidang penanganan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan harus tepat tujuan, sasaran dan strategi.



## 2.3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

### 2.3.1. Angka Kematian Bayi (AKB)

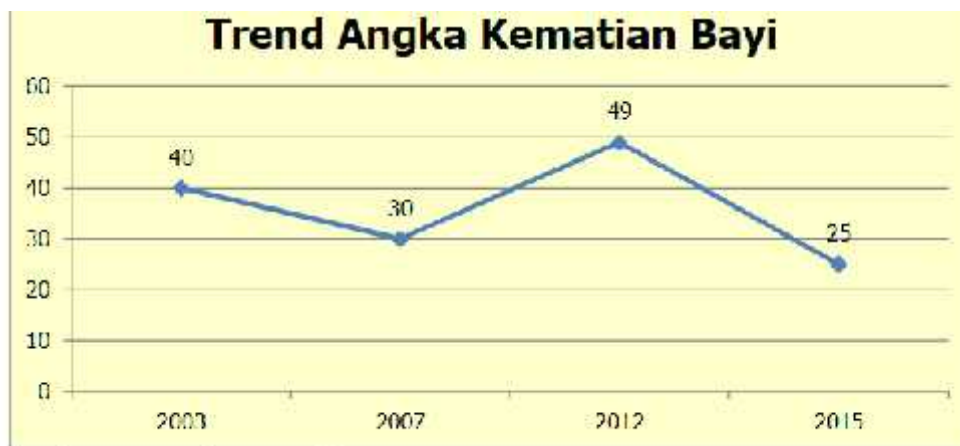
Keberhasilan program pembangunan kesehatan dan perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari angka kematian pada suatu wilayah yang dipantau dari waktu ke waktu. Angka kematian di komunitas pada umumnya diperoleh melalui data survey sedangkan data kematian yang ada di fasilitas kesehatan hanya memperlihatkan kasus rujukan. Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infan Mortality rate adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup (KH). Sedangkan Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum usia 5 tahun.

Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016. AKB dan AKABA dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak termasuk status gizi, sanitasi dan angka kesakitan lainnya. AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok usia yang paling rentan terkena dampak dari perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi. Indikator AKB terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial-ekonomi, lingkungan tempat tinggal dan kesehatannya. Pneumonia dan diare merupakan penyakit infeksi yang menjadi penyebab utama kematian bayi di Indonesia dengan lebih dari 50 ribu balita meninggal per tahun akibat penyakit tersebut. AKB Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi dari dalam kurun waktu 2003-2013. Menurut data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dikeluarkan oleh BPS menunjukkan bahwa di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2003 terdapat AKB sebesar 40/1000 kelahiran hidup kemudian mengalami penurunan pada tahun 2007 sebesar 30/1000 kelahiran hidup dan kembali mengalami penurunan yang



signifikan pada tahun 2010 sebesar 23/1000 kelahiran hidup. Namun berdasarkan hasil SDKI tahun 2012 angka kematian bayi mengalami peningkatan cukup besar menjadi 49/1000 kelahiran hidup, dan terakhir berdasarkan hasil SUPAS tahun 2015 menunjukkan angka kematian bayi mengalami penurunan menjadi 24.6 (25)/1000 kelahiran hidup. Tren data angka kematian bayi (AKB) Provinsi Kalimantan Tengah 2003 - 2015 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2.2.1



Sumber: SDKI Tahun 2012 dan SUPAS 2015

Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 menurunkan angka kematian bayi menunjukkan sudah semakin baiknya status kesehatan ibu dan bayi baru lahir; Semakin mudahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak; Peningkatan pengetahuan serta perilaku ibu hamil, keluarga, serta masyarakat yang belum mendukung perilaku hidup bersih dan sehat. Gambar diatas memperlihatkan bahwa Angka Kematian Bayi Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan penurunan yang cukup tinggi, namun diperlukan upaya yang sangat keras lagi untuk menurunkan AKB sehingga mencapai target. Berdasarkan perhitungan target yang ingin dicapai maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan target AKB yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 turun menjadi 23/1000 kelahiran hidup. Disamping itu pemerintah pusat juga telah menetapkan target yang ingin dicapai yaitu AKB turun menjadi 23/1000 kelahiran hidup.

Grafik 2.2.2



Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota Tahun 2017

Gambar diatas memperlihatkan gambaran jumlah kasus kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016. Jumlah total kematian bayi pada tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 392 kasus, lebih sedikit dibandingkan jumlah kematian bayi tahun 2015 berjumlah 407 kasus kematian. Kabupaten dengan jumlah kematian bayi paling sedikit adalah Kabupaten Barito Timur sebanyak 3 kasus, diikuti oleh Kota Palangka Raya sebanyak 6 kasus dan Kabupaten Barito Selatan serta Barito Utara dengan masing-masing sebanyak 14 kasus. Sedangkan Kabupaten dengan jumlah kasus kematian paling banyak adalah Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 78 kasus, diikuti oleh Kabupaten Kapuas sebanyak 51 kasus, dan Kabupaten Katingan sebanyak 42 kasus.

Jumlah kasus kematian bayi pada tahun 2016 berbanding lurus dengan hasil laporan SUPAS tahun 2015 Yang mengalami Penurunan angka kematian dari 30/1000 kelahiran menjadi 25/1000 kelahiran. Oleh karena itu perlu ditingkatkan berbagai upaya dalam penanggulangan jumlah kasus kematian bayi yang berasal dari kabupaten/kota.

### 2.3.2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Pelayanan kesehatan ibu meliputi pelayanan antenatal, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan, pelayanan terhadap ibu hamil risiko tinggi dirujuk, kunjungan neonatus dan kunjungan bayi. Berikut sasaran program Ibu dan Anak yang dijalankan yaitu

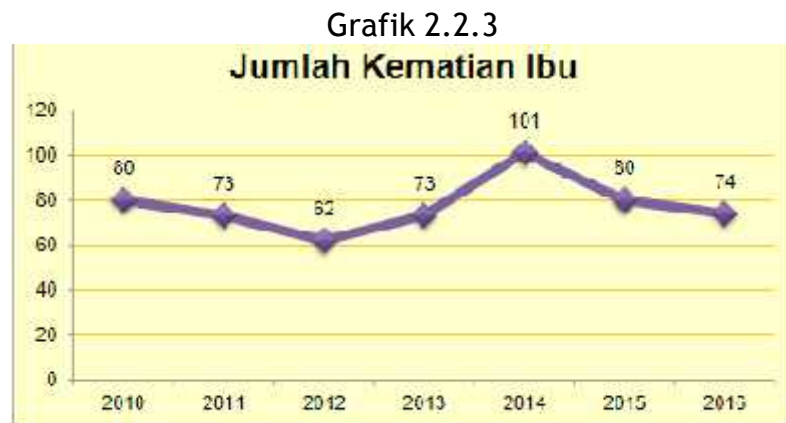
Meningkatnya pelayanan antenatal terpadu berkualitas; Meningkatnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama; Penanganan komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas di tingkat pertama dalam mendukung rujukan ke tingkat lanjutan; Meningkatnya Pelayanan KB berkualitas, terutama KB pasca persalinan; Meningkatnya pelayanan kesehatan reproduksi terpadu yang responsif gender; Penguatan manajemen program kesehatan ibu

Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 dan reproduksi. Dengan sasaran pelayanan adalah sebagai berikut : Ibu Hamil, bersalin dan nifas; Wanita Usia Subur; Pasangan Usia Subur; Pengelola program kesehatan ibu dan reproduksi; lintas program dan lintas sektor terkait serta Unsur organisasi profesi. Sejak tahun 1990 upaya strategis yang dilakukan dalam upaya menekan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah dengan pendekatan safe motherhood, dengan menganggap bahwa setiap kehamilan mengandung risiko, walaupun kondisi kesehatan ibu sebelum dan selama kehamilan dalam keadaan baik. Di Indonesia Safe Motherhood initiative ditindaklanjuti dengan peluncuran Gerakan Sayang Ibu di tahun 1996 oleh Presiden yang melibatkan berbagai sektor pemerintahan di samping sektor kesehatan. Salah satu program utama yang ditujukan untuk mengatasi masalah kematian ibu adalah penempatan bidan di tingkat desa secara besar-besaran yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir ke masyarakat. Di tahun 2000, Kementerian Kesehatan RI memperkuat strategi intervensi sektor kesehatan untuk mengatasi kematian ibu dengan mencanangkan strategi Making Pregnancy Safer. Pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan meluncurkan program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan neonatal sebesar 25%. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka kematian ibu (yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian jika mengacu pada hasil SUPAS tahun 2015 angka kematian ibu berada pada angka 305 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih cukup tinggi apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Penurunan AKI juga merupakan salah satu target MDGs yaitu tujuan ke 5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu dengan mengurangi sampai  $\frac{3}{4}$  resiko jumlah kematian ibu. Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian seorang ibu yang disebabkan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan 100.000 kelahiran hidup. Setiap periode kehamilan hingga masa nifas berisiko mengalami kematian maternal apabila mengalami komplikasi. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. Untuk mengurangi AKI telah dilakukan berbagai upaya diantaranya meningkatkan kesehatan ibu dimasyarakat dengan : (1) Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi; (2) Kelas ibu hamil; (3) Program kemitraan bidan dan dukun serta (4) Rumah tunggu kelahiran. Disamping itu juga dengan meningkatkan kesehatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan: (1) Pelayanan Antenatal terpadu (HIV-AIDS, TB dan Malaria, Gizi dan Penyakit tidak menular); (2) Pelayanan KB berkualitas dan berkesinambungan; (3) Pertolongan persalinan, nifas dan KB oleh tenaga kesehatan. AKI Kalimantan Tengah masih mengikuti angka nasional yaitu hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2007 sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup kemudian meningkat lagi angka kematian ibu (yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012. Kemudian hasil SUPAS 2015 AKI mengalami penurunan menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kasus kematian ibu maternal yang dilaporkan di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2016 sebanyak 74 kasus lebih sedikit dari jumlah kasus kematian ibu tahun 2015 sebanyak 80 kasus. Trend kasus kematian ibu dalam beberapa tahun terakhir sedikit mengalami penurunan jumlah kasus, ini menjadi tantangan bagi seluruh stakeholder yang berkecimpung di bidang kesehatan. Jumlah

kematian terbanyak pada masa ibu bersalin dan penyebab terbanyak akibat.

Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 komplikasi dalam persalinan seperti perdarahan dan kelahiran yang sulit. Jumlah kematian ibu maternal tertinggi di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 19 kasus, diikuti oleh Kotawaringin Barat sebanyak 11 kasus dan Kabupaten Kapuas serta Seruyan masing-masing 7 kasus. Jumlah kasus kematian ibu maternal pada setiap kabupaten kota masih belum bisa menggambarkan permasalahan kesehatan ibu pada suatu wilayah. Trend jumlah kematian ibu maternal dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota Tahun 2017

Dari gambar diatas jumlah kasus kematian ibu maternal secara umum mengalami sedikit penurunan Jumlah kasus kematian. Perlu adanya upaya-upaya yang inovatif untuk menurunkan AKI tersebut, salah satunya adalah Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Program ini menitik beratkan pada upaya perencanaan persalinan untuk mencegah terjadinya komplikasi di tingkat masyarakat. Penguatan primary health care (UKP dan UKM); beberapa aspek yang saling berinteraksi dalam kematian ibu perlu mendapat perhatian, antara lain aspek klinis, aspek pelayanan kesehatan dan faktor non kesehatan. Diperlukan kesamaan persepsi dan pengertian semua pihak mengenai pentingnya peran aspek klinik, aspek pelayanan kesehatan dan faktor non kesehatan dalam penanganan masalah kematian ibu sehingga strategi untuk mengatasinya harus merupakan integrasi yang menyeluruh dari berbagai aspek tersebut.

### 2.3.3. Angka Usia Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk suatu Negara atau wilayah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mencapai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Definisi Angka Harapan Hidup (AHH) pada suatu umur  $x$  adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur  $x$ , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Angka harapan hidup merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Proksi umur panjang dan sehat yang digunakan dalam pembangunan manusia adalah indikator angka harapan hidup saat lahir. Indikator ini menjadi salah satu indikator gambaran kesehatan masyarakat. Angka harapan hidup saat lahir terus menunjukkan peningkatan dari Tahun 2010 hingga 2016. Hal ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Intervensi pembangunan di bidang kesehatan, seperti peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat turut berperan dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat.

**Tabel 2.2.1**  
**Capaian Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dan 2016**

No	Kabupaten/Kota	Capaian Angka Harapan Hidup		Peningkatan	Peringkat
		2010	2016		
1	Kota Palangka Raya	72,57	73,05	0,48	1
2	Barito Utara	70,54	71,26	0,72	2
3	Sukamara	70,82	71,24	0,42	3
4	Kotawaringin Barat	69,41	70,21	0,8	4
5	Gunung Mas	69,23	70,02	0,79	5
6	Kotawaringin Timur	69,05	69,60	0,55	6
7	Murung Raya	68,75	69,30	0,55	7
8	Seruyan	68,23	69,22	0,99	8
9	Lamandau	68,71	69,20	0,49	9
10	Kapuas	67,94	68,49	0,55	10
11	Barito Timur	67,06	67,84	0,78	11
12	Pulang Pisau	67,09	67,75	0,66	12
13	Barito Selatan	65,74	66,63	0,89	13
14	Katingan	64,64	65,40	0,76	14
<b>Kalimantan Tengah</b>		<b>68,98</b>	<b>70,21</b>	<b>1,23</b>	

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2017

Pada tingkat kabupaten/kota, angka harapan hidup saat lahir pada tahun 2016 berkisar antara 65,40 tahun hingga 73,05 tahun. Angka harapan hidup tertinggi berada di Kota Palangka Raya (73,05 tahun). Selain itu, angka harapan hidup terendah masih berada di Kabupaten Katingan (65,40 tahun) dan terendah kedua di Kabupaten Barito Selatan (66,63 tahun). Jika dilihat pertumbuhan selama periode 2010-2016, Kabupaten Seruyan menjadi kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan angka harapan hidup tercepat (0,24 persen/tahun), disusul oleh Kabupaten Barito Selatan (0,23 persen/tahun) dan Kabupaten Katingan (0,20 persen/tahun). Jadi, meskipun Kabupaten Katingan dan Kabupaten Barito Selatan menjadi daerah dengan angka harapan hidup terendah, tetapi perkembangannya cukup cepat. Sebaliknya, Kota Palangka Raya menjadi daerah dengan pertumbuhan angka harapan hidup paling lambat di Kalimantan Tengah (0,11 persen/tahun). Hal ini cukup wajar karena mengingat lebih mudah meningkatkan capaian pada daerah-daerah yang masih rendah dibandingkan daerah-daerah dengan capaian tinggal.



### 2.3.4 Jumlah dan Jenis Rumah Sakit

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat juga diperlukan upaya kuratif dan rehabilitatif selain upaya promotif dan preventif. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2014 tentang klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit mengelompokkan rumah sakit berdasarkan kepemilikan, yaitu rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang dikelola Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Hukum yang bersifat nirlaba. Sedangkan rumah sakit privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.

#### 1. Jumlah dan Jenis Rumah Sakit

Rumah Sakit merupakan sarana kesehatan Strata dua dan strata 3. Indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana Rumah Sakit (RS) antara lain dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang biasanya diukur dengan jumlah Rumah Sakit dan tempat tidurnya serta rasio terhadap jumlah penduduk. Setiap Kabupaten memiliki rumah sakit dan jumlah seluruh Rumah Sakit di Propinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 yaitu sebanyak 22 buah dengan rincian kepemilikan sebagai berikut : Pemerintah Kab/Prov : 16 unit; TNI/Polri : 2 unit; rumah sakit jiwa 1 unit dan Swasta 2 unit dan rumah sakit ibu dan anak 1 unit.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengelompokkan rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Adapun rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Jumlah rumah sakit khusus yang ada

di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 sebanyak 2 unit yang terdiri dari rumah sakit jiwa dan rumah sakit khusus ibu dan anak.

## 2. Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan

Tabel 2.3.1  
Kepadatan tenaga kesehatan

Provinsi	Kepadatan Dan Distribusi Tenaga Kesehatan									
	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Pekarya
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
KALIMANTAN TENGAH	21	4	156	57	15	26	9	15	10	2

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Kepadatan dan distribusi Tenaga Kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2017 ini bisa di lihat pada table di atas.

### 2.3.1. Persentase RFT Rate Kusta

Penyebab kusta adalah *Mycobacterium leprae*, yang ditemukan oleh warganegara Norwegia, G.A Armauer Hansen pada tahun 1873 dan sampai sekarang belum dapat dibiakkan dalam media buatan. Keberadaan Kusta terdapat dimana-mana, terutama di Asia, Afrika, Amerika Latin, daerah tropis dan subtropis, serta masyarakat sosial ekonomi rendah, selain penyakit menyebarkan dan ditakuti oleh karena dapat terjadi ulserasi, mutilasi dan deformitas. Penderita kusta bukan menderita penyakitnya saja, tetapi juga karena dikucilkan masyarakat sekitarnya, hal ini diakibatkan kerusakan saraf besar yang irreversible diwajah dan ekstremitas, motorik dan sensoris, serta dengan adanya kerusakan yang berulang-ulang pada daerah yang anestetik disertai paralisis dan atropi otot.

#### 1). Prevalensi dan Angka Penemuan Kasus Baru (NCDR/New Case Detection Rate)

Pada tahun 2016 jumlah kasus baru kusta baik yang bertipe Pausi Basiler (PB) maupun Multi Basiler (MB) berjumlah 71 kasus, lebih rendah bila dibandingkan dengan jumlah kasus pada tahun 2015 yang berjumlah 76 kasus. Sedangkan New Case Detection Rate (NDCR) pada tahun 2016 sebesar 2,78/100.000 penduduk lebih sedikit bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 3,05/100.000 penduduk.

Sedangkan angka prevalensi kusta adalah 0.42 per 10.000 penduduk lebih tinggi bila dibandingkan dengan prevalensi pada tahun 2015 yang sebesar 0,39 per 10.000 penduduk dan telah memenuhi target < 1 per 10.000 penduduk (< 10 per 100.000 penduduk). Berdasarkan status eliminasi, kusta dibagi menjadi 2 kelompok yaitu provinsi yang belum eliminasi dan provinsi yang sudah mencapai eliminasi. Provinsi yang belum mencapai eliminasi jika angka prevalensi > 1 per 10.000 penduduk, sedangkan provinsi yang sudah mencapai eliminasi jika angka prevalensi < 1 per 10.000 penduduk. Provinsi Kalimantan Tengah sudah termasuk ke dalam Provinsi yang telah mencapai eliminasi.

## 2). Penderita Kusta Pada Anak dan Cacat Tingkat 2

Tingkat penularan di masyarakat menggunakan indikator proporsi anak (0-14 tahun) diantara penderita baru. Dilaporkan bahwa proporsi anak yang menderita kusta pada tahun 2016 sebesar 5.63% lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 3.95%. Pengendalian kasus kusta antara lain dengan meningkatkan deteksi kasus sejak dini. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan dalam mendeteksi kasus baru kusta yaitu angka cacat tingkat 2. Proporsi cacat tingkat 2 yang tercatat pada tahun 2016 sebesar 2.82% lebih tinggi bila dibandingkan pada tahun 2015 sebesar 2.63%, sedangkan Angka cacat tingkat 2 pada tahun 2016 sama dengan tahun 2015 sebesar 0.1 per 100.000 penduduk. Jumlah Release From Treatment / RFT PB 25%, sedangkan RFT MB adalah 47%.

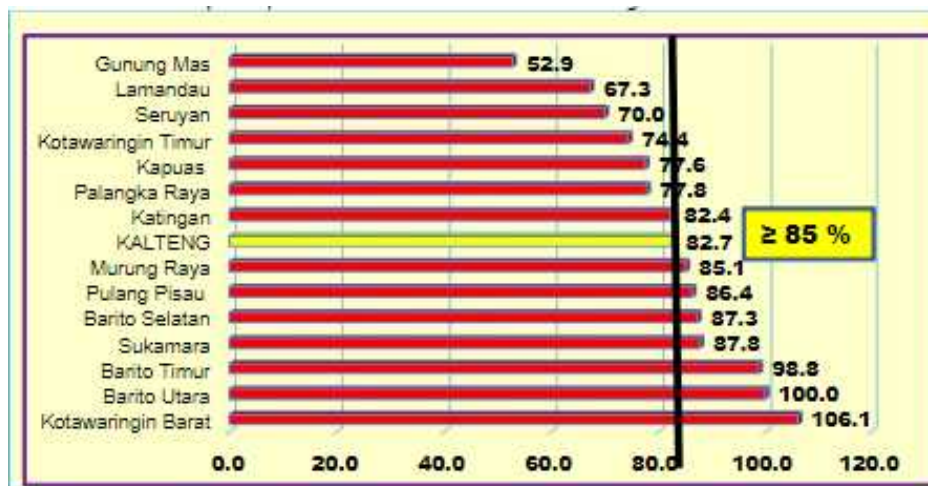
### 2.3.2. Persentase Keberhasilan Pengobatan TB

Tuberkulosis merupakan penyakit yang menjadi perhatian global. Dengan berbagai upaya pengendalian yang dilakukan, insidens dan kematian akibat tuberkulosis telah menurun, namun tuberkulosis diperkirakan masih menyerang 9,6 juta orang dan menyebabkan 1,2 juta kematian pada tahun 2014. India, Indonesia dan China merupakan negara dengan penderita tuberkulosis terbanyak yaitu berturut-turut 23%, 10% dan 10% dari seluruh penderita di dunia (WHO, Global Tuberculosis Report, 2015). Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Sumber penularan yaitu pasien

TB BTA (bakteri tahan asam) positif melalui percik renik dahak yang dikeluarkannya. TB dengan BTA negatif juga masih memiliki kemungkinan menularkan penyakit TB meskipun dengan tingkat penularan yang kecil. Beban penyakit yang disebabkan oleh tuberkulosis dapat diukur dengan Case Notification Rate (CNR), prevalensi, dan mortalitas/kematian.

Salah satu upaya untuk mengendalikan TB yaitu dengan pengobatan. Indikator yang digunakan sebagai evaluasi pengobatan yaitu angka keberhasilan pengobatan (success rate). Angka keberhasilan pengobatan ini dibentuk dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Pada tahun 2016 angka keberhasilan pengobatan adalah 82.7% jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 sebesar 57.41%. Capaian tersebut masih belum mencapai target nasional sebesar 85%. Berikut ini gambaran keberhasilan pengobatan penderita TB dalam kurun waktu 5 tahun dari 2012 - 2016.

Grafik 2.3.1  
 Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) TB Paru Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016



Sumber Data : Profil Kesehatan Kabupaten Kota dan Bidang P2P Tahun 2017

Dari Grafik di atas diketahui bahwa terdapat 7 kabupaten yang telah mencapai target nasional ( $\geq 85\%$ ) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 106.1%, Kabupaten Utara sebesar 100%, Kabupaten Barito Timur sebesar 98.8%, Sukamara sebesar 87.8%, Barito Selatan sebesar 87.3%, Pulang Pisau sebesar 86.4 dan Kabupaten Murung Raya sebesar 85.1%. Keberhasilan pengobatan kasus TB yang belum dicapai oleh semua

kabupaten/kota, merupakan masalah yang perlu kita pecahkan bersama baik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dan juga peran serta seluruh masyarakat serta para stakeholder yang berkepentingan terkait penanggulangan masalah TB paru.



Sumber Data : Profil Kesehatan Kabupaten Kota dan Bidang P2P Tahun 2017



## 2.4. Pendidikan Berkualitas

### 2.4.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Dalam melihat seberapa besar tingkat partisipasi penduduk usia 7 - 12 tahun dan 13-15 tahun dalam kegiatan belajar/ sekolah dapat dilihat dari besaran Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS usia 7 - 12 tahun adalah jumlah penduduk kelompok usia pendidikan dasar yang menempuh pendidikan dasar, sedangkan 13 - 15 tahun adalah jumlah penduduk kelompok usia pendidikan menengah yang masih menempuh pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan 13 - 15 tahun.

**Tabel.2.4.1**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kalimantan Tengah**

Jenjang Pendidikan	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
APS (Usia 7 - 12 tahun)	-	-	-	-	-	-	98,70
APS (Usia 13 - 15 tahun)	-	-	-	-	-	-	89,51

Sumber : KalTeng Dalam Angka

Angka partisipasi sekolah usia 7 - 12 tahun adalah 98,70 sedangkan usia 13 - 15 tahun di Kalimantan Tengah pada Tahun 2017 adalah 89,51. Tingginya angka APS usia 7 - 12 tahun dan 13 - 15 tahun ini merupakan gambaran semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi terutama jenjang SMA/SMK/MA. Peningkatan APS pada pendidikan menengah ini tidak terlepas dari banyaknya program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam memudahkan mereka bersekolah, terutama bagi golongan yang kurang mampu.

#### 2.4.2. Angka Putus Sekolah - SMA/MA/SMK

Gangguan belajar pada siswa sekolah, baik yang disebabkan oleh faktor internal (kurangnya motivasi sekolah, keterbatasan kemampuan belajar), maupun yang disebabkan faktor eksternal, dapat mengakibatkan siswa menjadi putus/berhenti sekolah. Kondisi ekonomi keluarga yang minim, menuntut siswa untuk bekerja membantu mencari nafkah keluarga, cara pandang yang sempit terhadap pendidikan menganggap pendidikan bukanlah yang utama, tidak ada sarana dan prasarana yang memadai merupakan beberapa alasan banyaknya siswa memutuskan untuk berhenti sekolah/putus sekolah.

Tabel.2.4.2.  
Angka Putus Sekolah - SMA/MA/SMK di Kalimantan Tengah

Jenjang Pendidikan	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na

Sumber : -

#### 2.4.3. Angka kelulusan sekolah SMA/SMK dan PKLK kualifikasi minimal S1/D4

Salah satu syarat kelulusan setiap siswa dari suatu jenjang pendidikan adalah mengikuti Ujian Akhir Nasional (UNAS). Namun UNAS bukanlah satu satunya syarat seorang siswa dinyatakan lulus. Unas disyaratkan bagi murid yang telah menduduki kelas tertinggi, untuk kelas reguler kelas 6 untuk SD sederajat & kelas 3 untuk SLTP dan SLTA sederajat, sedangkan untuk kelas akselerasi adalah menduduki kelas akhir. Besaran angka kelulusan mencerminkan tingkat kualitas jenjang pendidikan, suatu sekolah banyak siswa yang lulus tentunya sekolah tersebut mempunyai kualitas yang baik dibanding dengan sekolah yang siswanya sedikit lulus.

Tabel.2.4.3.  
Angka Kelulusan Sekolah - SMA/MA/SMK di Kalimantan Tengah

Jenjang Pendidikan	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kelulusan Sekolah SMA/MA/SMK	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na

Sumber : -



Angka kelulusan sekolah setingkat SMA/MA/SMK yang meningkat setiap tahunnya memberikan gambaran adanya peningkatan kualitas jenjang pendidikan, karena secara umum sekolah setingkat SD hingga setingkat SLTA angka kelulusan meningkat mendekati angka sempurna yaitu 100 persen.

#### 2.4.4. Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan PK-LK kualifikasi Minimal S1/D4

Keberadaan guru tidak hanya diperlukan dari sisi jumlahnya saja, tetapi juga kualitasnya. Kualitas seorang guru secara umum ditentukan dari tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan yang ditamatkan seorang guru akan sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mengajar murid, semakin tinggi pendidikan maka dia akan mempunyai kemampuan yang lebih dibanding yang pendidikannya rendah. Dengan tingginya pendidikan seorang tenaga pendidik pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Tabel 2.4.4.  
Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan PK-LK Berkualifikasi Minimal S1/D4 di Kalimantan Tengah

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jenjang SMA, SMK dan PK-PLK berkualifikasi min D4/S1	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na

Sumber : -

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S.1-D.IV pendidikan menengah terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hal ini merupakan suatu tuntutan dan juga dengan adanya pemberian tunjangan sertifikasi guru sehingga mau tidak mau seorang guru harus meningkatkan tingkat pendidikannya.

#### 2.4.5. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah perbandingan penduduk yang sedang sekolah dengan usia tertentu pada jenjang tertentu pula sesuai dengan peruntukannya. Dengan kata lain APM dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian usia dengan tingkat pendidikan yang dijalannya. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia

sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (Key Development Milestones) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan (Renstra Kemdiknas 2010-2014).

Tabel.2.4.5.  
Angka Partisipasi Murni (APM) - di Kalimantan Tengah

Angka Partisipasi Murni (APM)	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
APM SD/MI	-	-	-	-	98,54	98,67	98,90
APM SMP/MTs	-	-	-	-	75,76	75,92	76,00
APM SMA/MA/SMK	-	-	-	-	52,36	52,50	53,86

Sumber : BPS Prov Kalteng

Pada tahun 2011-2017, APM mengalami peningkatan, yaitu sekitar 54-68 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Peningkatan APM ini memberikan gambaran adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah.

#### 2.4.6. Rata-rata Lama Sekolah

Indikator rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam melihat kinerja penyelenggaraan pemerintah dalam dimensi pendidikan. Indikator ini menunjukkan peningkatan di setiap Kabupaten/Kota. Indikator rata-rata lama sekolah pertumbuhannya cenderung lebih lambat jika dibandingkan dengan harapan lama sekolah. Hal ini bisa disebabkan indikator ini merupakan indikator jangka panjang, sedangkan indikator harapan lama sekolah merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek dengan mengukur partisipasi sekolah penduduk umur 7 Tahun ke atas.

Tabel 2.4.6  
Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dan 2016

No	Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah		Peningkatan	Peringkat
		2010	2016		
1	Kota Palangkaraya	10,13	11,02	0,89	1
2	Barito Timur	8,31	9,03	0,72	2
3	Gunung Mas	8,57	8,94	0,37	3
4	Katingan	7,66	8,63	0,97	4
5	Barito Selatan	7,71	8,60	0,89	5
6	Barito Utara	7,43	8,34	0,91	6
7	Kotawaringin Barat	7,48	8,05	0,57	7

No	Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah		Peningkatan	Peringkat
		2010	2016		
8	Kotawaringin Timur	7,29	7,88	0,59	8
9	Sukamara	6,62	7,82	1,2	9
10	Lamandau	6,92	7,79	0,87	10
11	Pulang Pisau	7,18	7,66	0,48	11
12	Seruyan	6,66	7,49	0,83	12
13	Murung Raya	7,06	7,37	0,31	13
14	Kapuas	6,75	7,09	0,34	14
<b>Kalimantan Tengah</b>		<b>7,62</b>	<b>8,13</b>	<b>0,51</b>	

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, 2017; RKPD Prov Kalteng

Selama kurun waktu enam tahun, kesenjangan yang terjadi antara kabupaten/kota dengan capaian rata-rata lama sekolah tertinggi dengan terendah cenderung stagnan. Artinya, perubahan pendidikan di kabupaten terendah kurang menunjukkan perkembangan yang signifikan. Rata-rata lama sekolah tertinggi yaitu Kota Palangka Raya sedangkan untuk yang terendah yaitu Kabupaten Kapuas. Selama kurun waktu 2010 hingga 2016 rata-rata lama sekolah Kabupaten Sukamara tumbuh paling cepat dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu sebesar 3,02 persen per tahun. Rata-rata lama sekolah kabupaten tersebut mampu bertambah 1,20 tahun sejak tahun 2010 hingga tahun 2016. Dalam kurun waktu yang sama, Kabupaten Gunung Mas menjadi kabupaten dengan pertumbuhan rata-rata lama sekolah paling lambat di Kalimantan Tengah. Rata-rata lama sekolah kabupaten tersebut hanya mampu tumbuh 0,72 persen per tahun atau hanya bertambah 0,37 tahun sejak tahun 2010 hingga tahun 2016.

#### 2.4.7. Angka Harapan Lama Sekolah

Indikator lain dari dimensi pengetahuan dalam penghitungan IPM adalah harapan lama sekolah (HLS). Indikator harapan lama sekolah merupakan indikator proses pembangunan sebagai alat ukur keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek, salah satunya adalah program wajib belajar.

Tabel 2.4.7  
Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dan 2016

No	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Lama Sekolah 2010	Angka Harapan Lama Sekolah 2016	Peningkatan	Peringkat
1	Kota Palangka Raya	14,19	14,91	0,72	1
2	Barito Timur	10,88	12,79	1,91	2
3	Lamandau	10,99	12,44	0,93	3
4	Kotawaringin Barat	11,27	12,42	0,93	4
5	Pulang Pisau	11,37	12,32	0,95	5
6	Barito Selatan	10,61	12,30	1,69	6
7	Kotawaringin Timur	10,47	12,21	1,74	7
8	Katingan	10,58	12,19	1,61	8
9	Barito Utara	10,97	11,96	0,99	9
10	Kapuas	10,40	11,92	1,52	10
11	Gunung Mas	10,57	11,74	1,17	11
12	Murung Raya	9,64	11,71	2,07	12
13	Seruyan	10,32	11,61	1,45	13
14	Sukamara	10,56	11,55	0,94	14
<b>Kalimantan Tengah</b>		11,09	12,42	1,33	

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, 2017 ; RKPDP Prov Kalteng

Harapan lama sekolah di tingkat kabupaten/kota berkisar antara 11,61 tahun hingga 14,91 tahun pada tahun 2016. Kota/Kabupaten dengan harapan lama sekolah tertinggi berada di Kota Palangka Raya (14,91 tahun) sedangkan yang terendah yaitu Kabupaten Sukamara (11,55 tahun). Selama kurun waktu 2010 hingga 2016, harapan lama sekolah terus tumbuh. Harapan lama sekolah tumbuh paling lambat di Kota Palangka Raya, yaitu hanya sebesar 0,85 persen per tahun selama kurun waktu 2010 hingga 2016. Dalam kurun waktu yang sama, Kabupaten Murung Raya menjadi kabupaten dengan pertumbuhan harapan lama sekolah paling cepat di Kalimantan Tengah, yaitu sebesar 3,58 persen per tahun.

#### 2.4.8. Angka Partisipasi Kasar (APK) - SMA/MA/SMK

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid penduduk yang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase.

**Tabel.2.4.8.  
Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka Partisipasi Kasar (APK)	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
APK SD/MI	-	-	-	-	114,76	114,00	112,48
APK SMP/MTs	-	-	-	-	95,94	86,30	87,30
APK SMA/MA/SMK	-	-	-	-	70,70	78,44	80,38

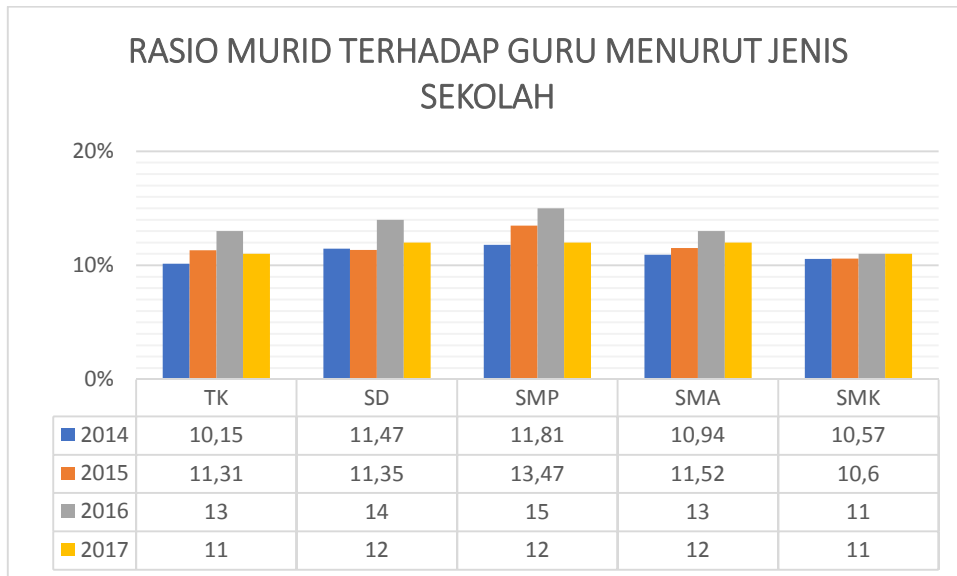
Sumber : BPS Prov Kalteng

Pada tahun 2011-2017, APK SMA/MA/SMK mengalami peningkatan, yaitu dari 73,78 persen pada tahun 2011 menjadi 82,80 persen tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk yang menempuh pendidikan tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolahnya di jenjang pendidikan tertentu.

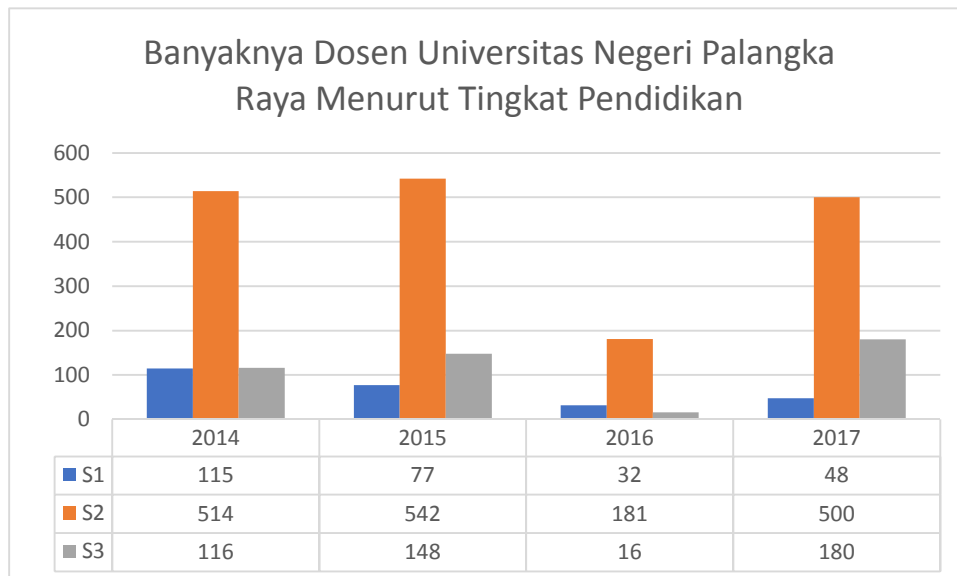
#### **2.4.9. Kualitas Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan**

Jumlah siswa dan guru yang terdata di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan trend peningkatan jumlah, namun peningkatan jumlah guru belum seimbang dengan trend peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah pada usia sekolah. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio jumlah guru terhadap murid/siswa yang semakin bertambah dari tahun 2014-2015, padahal tahun 2016 ke 2017 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Oleh karena itu diperlukan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan rasio murid terhadap ruang kelas dan guru dalam rangka menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

**Grafik 2.4.9.1 . Rasio Murid/Siswa Terhadap Guru Menurut Jenis Sekolah**



**Grafik 2.4.9.2 . Banyaknya Dosen Menurut Tingkat Pendidikan**





## 2.5 Kesetaraan Gender

Salah satu indikator pengukuran keberhasilan pembangunan pada saat ini adalah sejauh mana pembangunan tersebut melibatkan peran dan kesetaraan gender dalam proses maupun hasil-hasil pembangunan. Indikator utamanya adalah melalui pengukuran capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender).

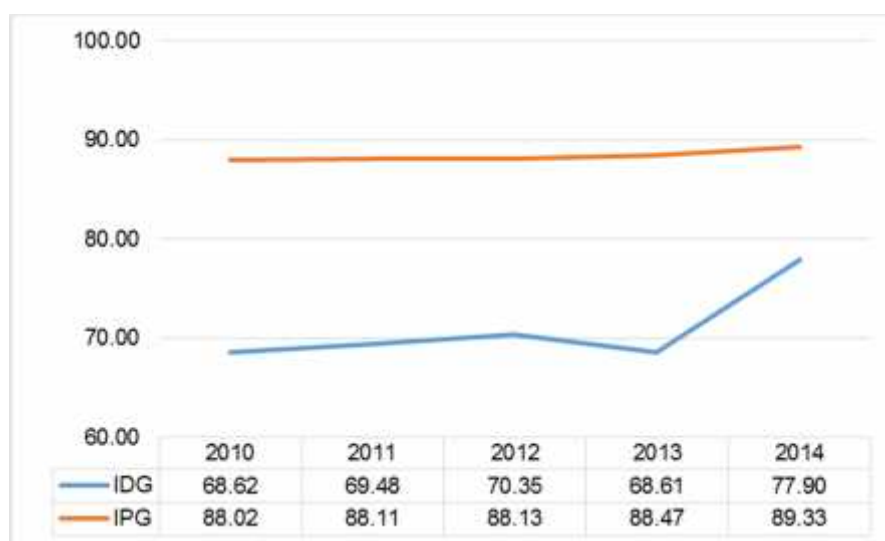
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender, juga merupakan ukuran pembangunan manusia, meliputi komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status perempuan khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. IPG adalah rasio IPM (Indeks Pembangunan Manusia) perempuan dengan laki-laki dimana komponen pembentuk IPM laki-laki dan perempuan sama dengan komponen pembentuk IPM yaitu : Angka harapan hidup (kesehatan), Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan), Sumbangan pendapatan (ekonomi), yang disajikan menurut jenis kelamin.

Sedangkan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) merupakan ukuran untuk menggambarkan persamaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam aspek kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. IDG menggambarkan besarnya peranan perempuan dalam hal pencapaian kapabilitas berdasarkan status dan kedudukan perempuan dibandingkan laki-laki.

Kondisi capaian IPG dan IDG Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2010-2014 tersaji dalam Grafik berikut.



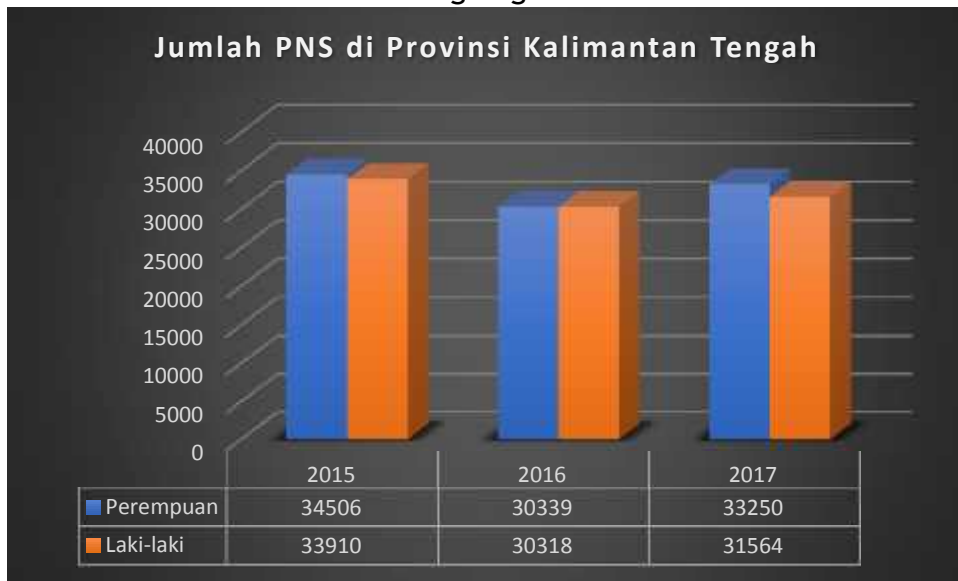
**Grafik 2.5.1**  
**Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**  
**Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2014**



Sumber : BPPPAKB Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

Sementara itu kesetaraan gender pada pegawai menunjukkan bahwa jumlah pegawai menurut jenis kelamin per kabupaten/kota, dimana secara tingkat provinsi yang jumlah pegawai laki-lakinya yang lebih banyak dibandingkan dengan pegawai perempuan. Oleh karena tingkat kesetaraan gender bidang pemerintahan menunjukkan bahwa peran kaum perempuan sama banyak dengan kaum laki-laki di Provinsi Kalimantan Tengah. Begitu juga dengan keberadaan perempuan di DPR, mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Namun demikian perlu perbaikan dari aspek managerial kepegawaian agar kinerja pemerintah dapat ditingkatkan.

Grafik 2.5.2 Jumlah PNS sesuai dengan gender di Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2015 - 2017

Grafik 2.5.2 Jumlah Perempuan yang menjadi anggota DPRD Prov dan Kab/Kota Se-Kalimantan Tengah



Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2013-2016



## 2.6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

### 2.6.1. Sanitasi dan Air Minum

Sungai memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, diantaranya sebagai air bersih untuk rumah tangga, air baku untuk industri, dan sebagainya. Di Kalimantan Tengah terdapat 1 (Satu) sumber air sungai utama, yaitu DAS Kahayan yang memegang peranan sangat penting sebagai sumber air baku namun di sisi lain juga sangat rentan terhadap adanya pencemaran kualitas air oleh limbah domestik dan industri. Penurunan kualitas air sungai akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya serta produktivitas dari sektor - sektor perekonomian. Oleh karena itu, kualitas air sungai merupakan salah satu indikator pembangunan Kalimantan Tengah untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

Tabel.2.6.1  
Kondisi Sanitasi Kalimantan Tengah

No	Kab/Kota	2014		2015		2016	
		Akses Layak	Akses Dasar	Akses Layak	Akses Dasar	Akses Layak	Akses Dasar
1.	Kotawaringin Barat	62.21%	9.91%	71.56%	13.71%	76.56%	14.93%
2.	Kotawaringin Timur	8.62%	8.64%	21.21%	6.06%	51.39%	21.39%
3.	Kapuas	5.44%	7.89%	1.54%	7.18%	26.39%	12.10%
4.	Barito Selatan	17.76%	0.42%	25.78%	2.32%	46.07%	12.60%
5.	Barito Utara	47.73%	6.05%	26.31%	5.23%	41.30%	25.12%
6.	Sukamara	41.77%	2.44%	39.09%	1.48%	52.00%	25.99%
7.	Lamandau	51.64%	12.06%	40.89%	15.62%	61.80%	18.24%
8.	Seruyan	27.73%	6.28%	33.21%	15.31%	43.51%	32.23%
9.	Katingan	16.57%	13.05%	8.69%	15.17%	33.24%	25.11%
10.	Pulang Pisau	16.82%	27.08%	27.72%	17.30%	39.37%	21.23%
11.	Gunung Mas	16.64%	3.85%	38.36%	5.60%	34.74%	31.28%
12.	Barito Timur	2.99%	5.21%	48.29%	2.71%	41.96%	45.01%
13.	Murung Raya	20.81%	7.24%	19.48%	5.24%	27.36%	16.78%
14.	Kota Palangka Raya	92.47%	0.16%	91.66%	3.41%	93.66%	2.54%

Sumber : Perumahan dan Permukiman Prov Kalteng

Tabel.2.6.2  
 Persentase (%) Cakupan Akses Air Minum Layak

No	Provinsi	2015	2016	2017
1	Kotawaringin Barat	75.89%	64.24%	73.66%
2	Kotawaringin Timur	64.52%	60.64%	54.43%
3	Kapuas	39.42%	38.10%	39.82%
4	Barito Selatan	50.63%	41.69%	42.63%
5	Barito Utara	58.72%	34.85%	35.18%
6	Sukamara	75.48%	69.25%	61.80%
7	Lamandau	60.83%	62.58%	67.85%
8	Seruyan	51.10%	32.08%	34.82%
9	Katingan	60.68%	40.55%	47.23%
10	Pulang Pisau	75.53%	32.15%	38.92%
11	Gunung Mas	45.75%	30.68%	37.23%
12	Barito Timur	58.23%	48.03%	53.47%
13	Murung Raya	37.97%	26.93%	39.80%
14	Kota Palangka Raya	89.96%	73.02%	78.78%
	KALIMANTAN TENGAH	61.26%	47.14%	52.44%

Sumber : Perumahan dan Permukiman Prov Kalteng



## 2.7 Energi Bersih dan Terjangkau

### 2.7.1 Kondisi Kelistrikan

Kondisi kelistrikan di Kalimantan Tengah sampai tahun 2015 mempunyai daya terpasang sebesar 253,929 MW mengalami peningkatan sebesar 21,858 MW atau 9,42% dibandingkan kondisi tahun 2011. Demikian juga Daya mampu, beban puncak, SUTR, SUTM dan Jumlah pelanggan mengalami peningkatan dibanding tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi kelistrikan Kalimantan Tengah saat ini telah mengalami perbaikan..

Kondisi Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah berdasarkan data tahun 2015 sebesar 69,8% dan Rasio Desa berlistrik 74,8% dari jumlah Desa di Kalimantan Tengah sebanyak 1.569 desa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 629.218 rumah tangga. Dimana desa yang sudah bisa menikmati aliran listrik baik dari PLN maupun dari sumber energi baru terbarukan sebanyak 1.173 desa atau sebanyak 439.049 rumah tangga.

Tabel 2.7.1  
Tabel Kondisi Kelistrikan Kalimantan Tengah Secara Umum

Jenis Jaringan	2011	2012	2013	2014	2015
Daya Terpasang ( MW)	232,071	258,36	262,959	261,412	253,929
Daya Mampu (MW)	151,811	156,045	174,037	187,178	196,613
Beban Puncak (Mw)	125,941	163,393	156,750	189,342	171,640
SUTR (Kms)	3.145,16	3.197,84	3.365,85	3.417,148	4.434,73
SUTM ( Kms)	3.838,93	4.309,02	4.351,81	4.777,50	5.288,69
Jumlah Pelanggan (RT)	318.246	362.458	408.335	451.256	471.124

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah, 2016



## 2.8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

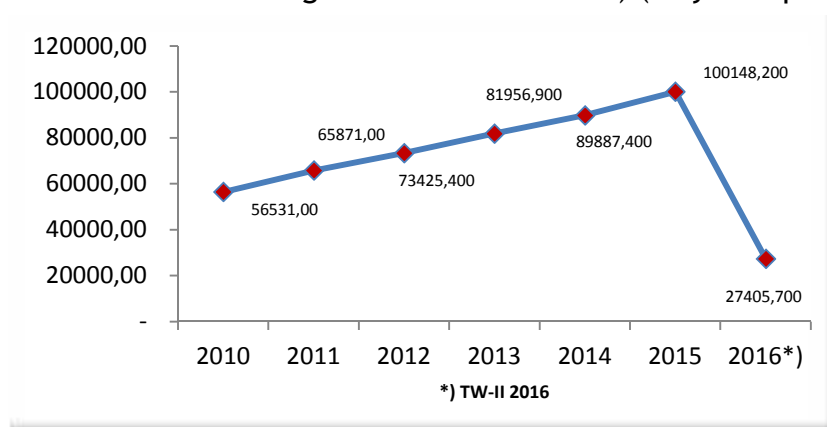
### 2.8.1 Pertumbuhan PDRB

Pembangunan daerah tidak pernah terlepas dari pertumbuhan ekonomi regional baik mikro maupun makro. Berkenaan dengan hal tersebut, sektor-sektor lapangan usaha yang memberikan nilai tambah bagi produksinya akan menjadikan roda penggerak ekonomi wilayah meskipun ada beberapa investasi yang berasal dari luar daerah. Kontribusi sektor ekonomi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan sektor andalan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi guna mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu ukuran untuk melihat perkembangan aktivitas perekonomian di masyarakat yang terlihat dari nilai tambah suatu produk/olahan produk di wilayah tersebut. Struktur ekonomi suatu wilayah juga dapat terlihat dari data PDRB karena setiap sektor ekonomi memiliki andil tersendiri dalam membentuk peta perekonomian wilayah.

Secara definisi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Di Provinsi Kalimantan Tengah, terjadi kenaikan nilai PDRB dari tahun ke tahun secara konsisten dimana pada tahun 2015, angka PDRB Provinsi Kalimantan Tengah yang diukur atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai 100.148,2 miliar rupiah. Sedangkan pada triwulan II tahun 2016 baru mencapai 27.405,7 miliar rupiah.

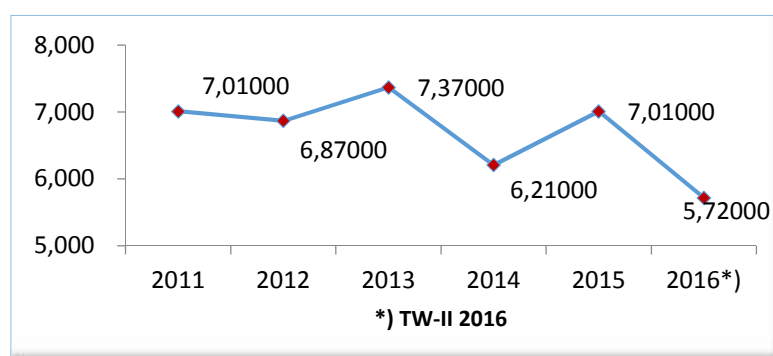
**Grafik 2.8.1**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2016\*) (Milyar Rupiah)**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016 (Tahun dasar 2010)

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah cukup stabil dengan kisaran 6 persen hingga 7 persen. Pada tahun 2015, perekonomian Kalimantan Tengah tumbuh 7,01 persen, mengalami percepatan perekonomian jika dibanding tahun 2014 sebesar 6,21 persen. Sedangkan pada triwulan II tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah mencapai 5,7 persen (*year on year*), meningkat dibanding capaian triwulan I tahun 2016 yang tumbuh 5,17 persen.

**Grafik 2.8.2**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah**  
**Tahun 2010-2016\*) (%)**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016 (Tahun dasar 2010)



**Tabel 2.8.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha**  
**di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2016\*) (%)**

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,75	5,32	(0,18)
2	Pertambangan dan Penggalian	(2,78)	2,04	11,89
3	Industri Pengolahan	12,31	6,41	4,03
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17,31	25,54	7,31
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	4,47	3,32	4,03
6	Konstruksi	9,51	9,62	8,01
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,74	8,28	5,99
8	Transportasi dan Pergudangan	2,17	13,57	10,47
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,21	8,28	7,04
10	Informasi dan Komunikasi	12,08	5,23	5,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,22	2,21	8,96
12	Real estate	7,11	8,56	7,16
13	Jasa Perusahaan	4,54	7,84	6,33
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,71	15,34	3,30
15	Jasa Pendidikan	9,67	10,47	6,58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,86	9,73	5,46
17	Jasa Lainnya	8,86	7,56	7,75
<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>		<b>6,21</b>	<b>7,01</b>	<b>5,72</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016*

*\*) TW-II 2016*

Jika dilihat berdasarkan kategori lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2015 dicapai oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 25,54 persen, diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 15,34 persen serta transportasi dan pergudangan sebesar 13,57 persen. Sedangkan pada triwulan II tahun 2016 pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 11,89 persen, diikuti sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,47 persen dan jasa keuangan sebesar 8,96 persen.

Pada sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 15,97 persen terjadi penurunan cukup besar yang mana pada tahun 2014 terdapat pertumbuhan negatif sebesar 2,87 persen, hal ini salah satunya disebabkan karena adanya pemberlakuan Undang Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang mengatur larangan ekspor mineral dalam bentuk mentah yang mulai berlaku 12 Januari 2014, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Dengan adanya Undang-undang ini, pengusaha dilarang mengekspor enam jenis bahan mentah yaitu emas, nikel, bauksit, bijih besi, tembaga, dan batu bara sebelum diolah. Namun pada tahun 2015, sektor pertambangan dan penggalian mulai tumbuh kembali dengan besaran mencapai 2,04 persen dan pada triwulan II tahun 2016 meningkat hingga mencapai 11,89 persen (Y on Y).

Tabel 2.8.2.  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah  
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2015

No	Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kotawaringin Barat	7,56	6,70	6,99	6,91	7,30
2	Kotawaringin Timur	7,11	7,01	7,79	7,37	7,62
3	Kapuas	5,85	6,48	6,81	7,00	7,26
4	Barito Selatan	7,06	5,32	5,24	5,32	5,59
5	Barito Utara	7,93	6,23	7,04	4,24	5,20
6	Sukamara	5,92	6,28	6,44	6,05	6,02
7	Lamandau	6,17	6,97	7,00	6,96	6,74
8	Seruyan	4,82	5,16	6,28	5,31	5,12
9	Katingan	6,14	6,23	6,33	6,54	6,52
10	Pulang Pisau	5,53	6,46	6,79	7,59	7,80
11	Gunung Mas	6,57	6,29	6,87	6,37	6,96
12	Barito Timur	6,98	6,04	6,73	5,26	5,15
13	Murung Raya	7,70	6,82	6,49	5,88	6,85
14	Kota Palangkaraya	7,27	7,29	7,53	6,97	7,18
<b>Kalimantan Tengah</b>		<b>7,01</b>	<b>6,87</b>	<b>7,37</b>	<b>6,21</b>	<b>7,01</b>

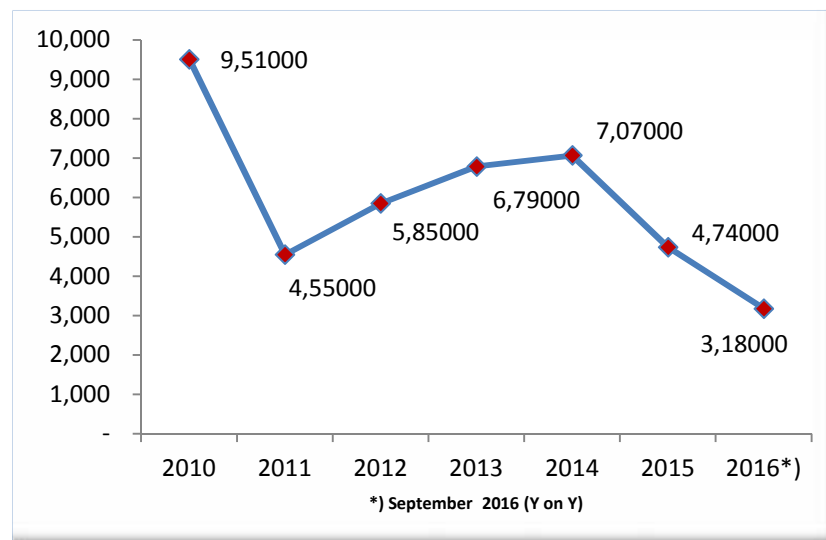
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

### 2.8.2 Laju Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus (*continue*). Selain itu, laju inflasi juga merupakan proses dari suatu peristiwa dalam pasar dan bukan tergantung tinggi-rendahnya tingkat harga (artinya tingkat harga tinggi belum tentu menunjukkan besaran inflasi). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi secara *series* dalam kurun waktu tertentu.

Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, dan/atau menurunnya produksi, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, inflasi Provinsi Kalimantan Tengah sedang menuju suatu kestabilan harga dimana laju inflasi berada pada tingkatan normal di kisaran  $\pm 6$  persen. Laju inflasi pada tahun 2014 mencapai 7,07 persen dan tahun sebelumnya 6,79 persen. Namun pada tahun 2015, laju inflasi menurun hingga 4,74 persen dan 3,18 persen pada September 2016 (Y on Y). Inflasi yang rendah dapat juga menjadi indikasi turunnya daya beli masyarakat, meskipun di sisi lain angka ini mengasumsikan rendahnya kenaikan harga. Diharapkan, capaian positif ini akan terus mendorong pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan inflasi akan memberikan kemampuan daya beli masyarakat karena harga tidak bergejolak dan perekonomian tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Grafik 2.8.3  
Laju Inflasi Tahunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2016\*) (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2016

Tabel 2.8.3  
Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009-2016 \*) (%)

Keterangan (Inflasi-yoy)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*)
Inflasi Tahunan Palangka Raya	1,39	9,49	5,28	6,73	6,45	6,63	4,20	3,09
Inflasi Tahunan Sampit	2,85	9,53	3,60	4,69	7,25	7,90	5,72	3,34
<b>Inflasi Kalimantan Tengah</b>	<b>2,02</b>	<b>9,51</b>	<b>4,55</b>	<b>5,85</b>	<b>6,79</b>	<b>7,07</b>	<b>4,74</b>	<b>3,18</b>
Inflasi Nasional	2,78	6,96	3,79	4,30	8,38	8,36	3,35	3,07

\*) September 2016 (Y on Y)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2016

Stabilnya laju inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah tidak terlepas dari realisasi inflasi Kota Palangka Raya sebesar 4,20 persen dan Sampit sebesar 5,72 persen pada tahun 2015 dan semakin menurun pada inflasi tahunan bulan September tahun 2016 menjadi sebesar 3,09 persen di Kota Palangka Raya dan Sampit sebesar 3,34 persen. Kedua kota tersebut merupakan Kota Indeks Harga Konsumen yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penghitungan laju inflasi. Sebagai salah satu acuan kebijakan perekonomian, inflasi merupakan salah satu penghambat perkembangan perekonomian skala mikro karena kenaikan harga pasar yang tinggi akan mengakibatkan penduduk semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, *stakeholder* yang menangani pengendalian inflasi daerah harus memiliki berbagai inovasi program dan kegiatan dalam menurunkan fluktuasi harga yang terjadi namun tetap tidak mengurangi daya beli masyarakat.

### 2.8.3 Jumlah Karya Seni Budaya Yang Mendapatkan Penghargaan Nasional Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya, dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan tersier. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial, budaya, dan keagamaan yaitu:

1. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; serta
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Kesadaran akan pentingnya seni dan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional dan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur

budaya bangsa serta menciptakan iklim kondusif dan harmonis. Sedangkan pembangunan dan kemajuan di bidang olahraga, selain mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan, juga meningkatkan martabat dan nama baik negara/daerah dalam pergaulan nasional dan daerah.

Pada tahun 2015, di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 343 grup kesenian/sanggar seni dengan penyelenggaraan festival seni dan budaya sekali dalam tahun tersebut. Selain itu, terdapat pula 490 benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

**Tabel 2.8.3**  
**Statistik Seni, Budaya, dan Olahraga**  
**Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015**

No	Indikator Kinerja	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah grup kesenian/sanggar seni (buah)	168	343	343	343	343	336
2	Jumlah gedung (unit)	10	19	19	19	19	19
3	Jumlah klub olahraga (buah)	50	-	-	26	46	46
4	Jumlah gedung olahraga (unit)	15	15	15	15	16	16
5	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	2	2	2	1	2	1
6	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)	490	487	487	487	490	490
7	Jumlah organisasi pemuda	62	66	66	66	66	66
8	Jumlah organisasi olahraga	42	42	42	42	43	42
9	Jumlah kegiatan kepemudaan	50	67	60	60	40	35
10	Jumlah kegiatan olahraga	27	31	35	45	76	60
11	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (buah)	33	33	34	37	37	37
12	Lapangan olahraga (lapangan Volly, sepak bola, bulu tangkis, basket) (buah)	207	210	289	289	289	289

*Sumber : Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2016;  
Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalteng, 2016*

Organisasi pemuda di suatu wilayah menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda akan menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberdayakan pemuda dalam partisipasi membangun daerah. Jumlah organisasi pemuda di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 66 organisasi

dengan 35 kegiatan kepemudaan pada tahun 2015. Selain itu, kegiatan kepemudaan juga difasilitasi 37 gelanggang/balai remaja.

Sedangkan banyaknya jumlah organisasi olahraga (yang berada dibawah naungan KONI kabupaten/kota) menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga di Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini, jumlah organisasi olahraga yang berada di bawah binaan KONI Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 42 organisasi olahraga dengan 60 kali kegiatan olahraga pada tahun 2015. Selain itu, kegiatan keolahragaan juga difasilitasi 16 gedung olahraga dan 289 lapangan olahraga.

#### 2.8.4 Persentase pertumbuhan sub kategori perikanan terhadap PDRB

Pada sub sektor perikanan juga memiliki prospek cerah karena Provinsi Kalimantan Tengah memiliki cukup banyak kawasan perairan danau yang dapat dikembangkan menjadi usaha perikanan air tawar. Pada subsektor ini, sebagian besar produksi dihasilkan dari budidaya perikanan kolam (35.543,76 ton) dan keramba (28.886,15 ton).

Tabel 2.8.4  
Produksi Budidaya Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

No	Jenis Budidaya	Jumlah Produksi (Ton)
1	Tambak	12.531,40
2	Kolam	35.543,76
3	Keramba	28886,15
4	Jaring Apung	326,60
5	Budidaya Laut	400,00
6	Sawah	0,62

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2017

#### 2.8.5 Pertumbuhan sektor pariwisata

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu pembangunan sektoral yang dapat melibatkan masyarakat dalam jumlah besar. Hal tersebut berdampak pada bidang ketenagakerjaan dimana akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang sekaligus meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan. Pengembangan pariwisata tidak akan

terlepas dari pembangunan di bidang lain, seperti pengembangan infrastruktur daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan.

Secara umum, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata terutama dikarenakan posisi geografis dan kondisi alamnya. Potensi pariwisata yang ada dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal sebagai sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Destinasi pariwisata di Kalimantan Tengah tersebar di 14 kabupaten/kota, salah satu destinasi wisata yang terkenal sampai ke manca negara adalah Taman Nasional Tanjung Puting yang terdapat di wilayah kabupaten Kotawaringin Barat dan kabupaten Seruyan, merupakan kawasan tempat perlindungan flora dan fauna, khususnya orang utan. Selain itu, beberapa destinasi wisata kini mulai berbenah untuk dikelola secara lebih baik, seperti: Pantai Ujung Pandaran, Arboretum Reintroduksi Orang Utan, Taman Wisata Tangkiling, dan termasuk pula wisata budaya, seperti: Rumah Betang dan Museum. Untuk menunjang pariwisata, setiap tahun digelar acara expo/pameran sebagai media promosi bagi kabupaten/kota untuk memperkenalkan potensi daerahnya.

Tabel 2.8.5  
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara di  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015

Wisatawan	2011	2012	2013	2014	2015
Wisatawan Mancanegara	1.213	2.052	12.557	14.014	15.017
Wisatawan Nusantara	197.964	194.721	205.688	238.887	358.593
Jumlah Wisatawan	199.177	196.773	218.245	252.901	373.610

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, 2016

### 2.8.6 Pertumbuhan Sub Kategori Tanaman Pangan

Melihat wilayah geografis dan sejarah sektor lapangan usaha di Provinsi Kalimantan Tengah selama ini, sektor yang paling memungkinkan untuk dikembangkan adalah sektor pertanian. Sektor tersebut memang menjadi sektor andalan mengingat ketersediaan lahan potensial masih cukup besar. Sektor yang berpeluang tinggi untuk dikembangkan adalah sub sektor



perkebunan yang terlihat dari kontribusi subsektor perkebunan tahunan dalam pembentukan PDRB mencapai 14,53 persen pada tahun 2014.

Tabel 2.8.6  
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun 2010-2016

No	Tahun	Luas Panen		Produksi (ton)		Total Luas Panen	Total Produksi	Produktivitas Padi (ton/ha)
		Padi Sawah	Padi Ladang	Padi Sawah	Padi Ladang			
1	2012	168.733	83.054	569.818	185.689	251.787	821.605	3,26
2	2013	171.467	78.257	614.884	178.732	249.724	864.608	3,46
3	2014	190.755	55.330	725.704	127.325	246.085	853.029	3,47
4	2015	183.416	71.254	725.755	167.447	254.670	893.202	3,51
5	2016	188.740	78.234	606.384	168.083	266.974	774.467	2,90

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Kalteng, 2017 & Kalteng Dalam Angka, 2016

Produktivitas padi (sawah maupun ladang) di Provinsi Kalimantan Tengah hingga pada tahun 2016 terus mengalami peningkatan mencapai produktivitas sebesar 3,51 ton/ha dengan total produksi 893.202 ton. Namun pada tahun 2016 mengalami penurunan produktivitas sebesar 0,61 ton/ha dan total produksi 118.735 ton, menjadi produktivitas sebesar 2,90 ton/ha dan total produksi sebesar 774.467 ton.

### 2.8.7 Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan

Dalam merealisasikan potensi perkebunan yang ada tersebut, saat ini sudah masuk permohonan investasi untuk mengembangkan pertanian di sub sektor perkebunan komoditas kelapa sawit, karet, dan singkong dalam skala cukup luas. Bahkan pada tahun 2016, jumlah lahan yang memproduksi aktif mencapai 635.486,23 ha untuk perkebunan rakyat dan mencapai 2.857.051,60 ha untuk perkebunan non rakyat.

Produktivitas terbesar pada komoditas subsektor perkebunan unggulan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah komoditas kelapa sawit yang mencapai 29,98 ton/ha. Nilai tersebut sangat mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,09 ton/ha. Tingginya produktivitas ini juga sejalan dengan tingginya produksi kelapa sawit dan luas tanamnya. Komoditas karet juga memiliki produksi yang cukup tinggi mencapai 145.227,42 ton pada tahun 2016 dengan produktivitas sebesar 3,22 ton/ha.

**Tabel 2.8.7**  
Luas Tanam, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Subsektor Perkebunan Unggulan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

No	Komoditas	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha/Thn)
1	Karet	450.625,03	145.227,42	3,22
2	Kelapa Kopra	28.980,10	14.689,68	5,06
3	Kopi	1.573,91	328,79	2,08
4	Lada	544,10	190,96	3,5
5	Kakao	1.912,06	399,77	2,09
6	Kelapa Sawit	1.495.605,89	4.485.167,20	29,98

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2017

### 2.8.8 Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan

Pada subsektor peternakan jenis ternak, populasi terbanyak pada ternak besar adalah ternak babi yang mencapai 200.720 ekor, diikuti oleh ternak sapi 73.424 ekor dan ternak kambing 45.409 ekor. Untuk populasi ternak kecil (unggas) didominasi oleh ternak ayam ras broiler yang mencapai 8.185.419 ekor diikuti ternak ayam buras 2.596.908 ekor, dan ternak itik 275.193 ekor.

Jika dilihat berdasarkan produksi daging, produksi daging paling banyak adalah ayam ras broiler yang mencapai 12.278.129 kg, diikuti daging sapi potong sebanyak 4.294.753 kg, dan daging babi sebanyak 1.912.051 kg.

**Tabel 2.8.8**  
Populasi dan Produksi Hasil Ternak Menurut Jenis Ternak Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

No	Jenis Ternak	Populasi (Ekor)	Produksi Daging (Kg)	Produksi Telur (Kg)
<b>A.</b>	<b>Ternak</b>			
1	Sapi Potong	73.424	4.294.753	-
2	Kerbau	11.994	49.277	-
3	Kambing	45.409	205.259	-
4	Domba	238	3.859	-
5	Babi	200.720	1.912.051	-
6	Kuda	33	-	-
7	Kelinci	1.623	7	-
<b>B.</b>	<b>Unggas</b>			
1	Ayam Buras/ Kampung	2.596.908	1.829.875	2.207.372
2	Ayam Ras/Petelur	138.323	25.092	1.735.954
3	Ayam Ras (Broiler)	8.185.419	12.278.129	1.617.997
4	Itik	275.193	146.047	60.916
5	Itik Manila	47.935	6.687	14.381
6	Burung Puyuh	101.022	2.743	-
7	Merpati	6.620	-	-

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2017

### 2.8.9 Pertumbuhan industri

Secara umum industri yang berkembang di provinsi Kalimantan Tengah meliputi industri pengolahan yang merupakan jenis usaha kecil, industri rumah tangga, dan industri menengah yang meliputi industri pangan, sandang, kerajinan, dan perkayuan. Dari beberapa jenis usaha kecil dan industri rumah tangga tersebut sudah dapat menampung tenaga kerja yang cukup besar sehingga sektor industri terutama mikro yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah berkembang dengan cukup baik.

Dalam sektor industri, peningkatan unit usaha terjadi pada industri besar dan sedang, dimana pada jumlah industri besar dan sedang mencapai 81 unit perusahaan dengan kapasitas tenaga kerja sebanyak 23.333 pekerja. Sejalan dengan industri besar dan sedang, pada industri kecil dan menengah mengalami kenaikan cukup signifikan hingga mencapai 5.164 unit padahal tahun sebelumnya hanya sebanyak 4.678 unit.

Tabel 2.8.9  
Jumlah Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	<b>Jumlah Industri</b>					
	Besar dan Sedang	59	73	66	80	81
	Kecil Menengah	4.461	4.401	4.807	4.678	5.164
2	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>					
	Besar dan Sedang	19.571	15.485	14.761	25.542	23.333
	Kecil Menengah	15.205	15.103	16.814	16.180	16.655

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2016

### 2.8.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dalam periode waktu tertentu. Dalam konteks pembangunan ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka baik dalam satuan orang maupun persen dapat digunakan sebagai acuan pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya membuka lapangan kerja baru. Tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan tingkat penyerapan angkatan kerja, semakin tinggi persentase tingkat pengangguran terbuka menunjukkan semakin banyak angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja.

Jika dilihat secara umum, tingkat pengangguran Provinsi Kalimantan Tengah tergolong rendah jika dibandingkan angka nasional, namun trend kenaikan jumlah pengangguran selama empat tahun terakhir perlu mendapat perhatian khusus oleh stakeholders ketenagakerjaan dalam mengantisipasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.8.10

Tabel 2.8.10  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota  
Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2017

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2017
1	Kotawaringin Barat	2.66	3.25	2.17
2	Kotawaringin Timur	4.11	3.53	4.92
3	Kapuas	2.5	4.07	5.42
4	Barito Selatan	3.77	9.99	4.09
5	Barito Utara	3.34	4.78	5.19
6	Sukamara	1.67	4.68	4.83
7	Lamandau	2.61	5	1.35
8	Seruyan	4.4	4.64	4.79
9	Katingan	5.23	5.97	3.81
10	Pulang Pisau	4.28	3.29	1.62
11	Gunung Mas	1.2	2.7	1.17
12	Barito Timur	2.46	2.14	4.68
13	Murung Raya	1.13	6.33	2.78
14	Kota Palangka Raya	3.36	6.3	7.26
<b>Kalimantan Tengah</b>		3.24	4.54	4.23

Sumber : BPS Kalteng (tidak terdapat data Tahun 2016)

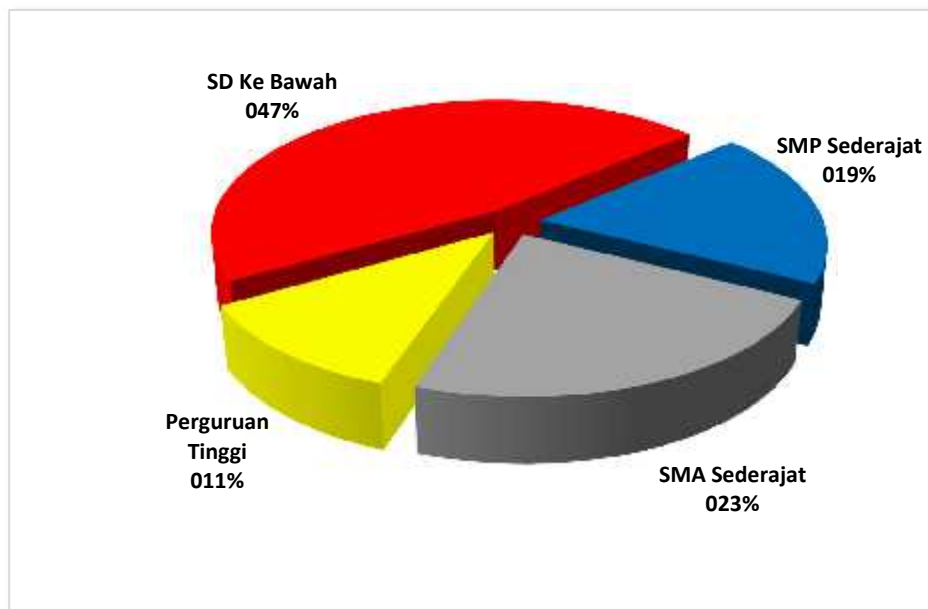
Pada periode periode tahun 2015-2017, tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan. Adapun wilayah kota/kabupaten yang tingkat penganggurannya tinggi di tahun 2017 adalah Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Kapuas. Pada tahun 2018 diharapkan tingkat pengangguran dapat menurun, dimana berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka di targetkan menurun menjadi 4,00. Dengan demikian penduduk yang termasuk angkatan kerja diharapkan dapat terserap di lapangan kerja.

### 2.8.11 Ketenagakerjaan

Hasil rilis ketenagakerjaan terakhir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan

Tengah pada Februari 2016 sebesar 1.238.677 orang. Jika dilihat dari struktur umurnya, sebagian besar penduduk yang bekerja berada pada usia 25 hingga 44 tahun yang merupakan masa produktif penduduk. Selain itu, berdasarkan jenjang pendidikannya, sebagian besar penduduk yang bekerja hanya memiliki pendidikan hingga jenjang SD sederajat yakni sebanyak 581.200 jiwa (46,92%) dan kemudian baru penduduk berpendidikan SLTA sederajat sebanyak 282.906 jiwa (22,84%).

Grafik 2.10.1  
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016



Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2016 (Kondisi Februari 2016)

Grafik 2.10.2  
Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015



Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2016

Jika dilihat berdasarkan sektor lapangan usahanya, sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian (dalam arti luas) yang mencapai 562.671 orang (46,32%) dimana angka ini menurun dari tahun sebelumnya. Sektor lapangan usaha lain yang menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yakni sektor perdagangan sebanyak 212.803 orang (17,52%) dan sektor jasa sebanyak 195.835 orang (16,12%).



## 2.9 Industri, Inovasi dan Infrastuktur

### 2.9.1 Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik/Mantap

Kriterianya adalah jalan provinsi yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Nilai maksimum IRI adalah 8 atau RCI minimum nilainya sedang. Menurut Peraturan Menteri PU No. 13 Tahun 2011 disebutkan kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, kriteria kondisi jalan tidak mantap meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Tabel 2.9.1.  
Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik/Mantap

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik/Mantap	63,96	79,92	86,72	87,05	87,52	87,52	66,60

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah

Dari total panjang jalan nasional dan provinsi sepanjang 3.102,08 km, kondisi permukaan jalan baik mengalami penurunan dari 1.694,71 km di tahun 2012 menjadi 1.635.51 km pada tahun 2015; kondisi sedang rusak mengalami kenaikan dari 662,89 km di tahun 2012 menjadi 1.133,64 km pada tahun 2015; kondisi rusak mengalami penurunan dari 312,69 km di tahun 2012 menjadi 246,14 km pada tahun 2015; dan kondisi rusak berat mengalami penurunan dari 144,54 km di tahun 2012 menjadi 86,79 km di tahun 2015, seperti yang terlihat pada tabel berikut:



Tabel 2.9.2.

**Panjang Jaringan Jalan Nasional dan Provinsi Berdasarkan Kondisi Tahun 2011-2015**

No	Jalan (Nasional dan Provinsi)	Panjang Jalan (km)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kondisi Baik	1.431,92	1.694,71	1.647,08	1.595,76	1.635,51
2.	Kondisi Sedang Rusak	1.063,91	662,89	817,52	933,09	1.133,64
3.	Kondisi Rusak	459,46	312,69	250,61	217,95	246,14
4.	Kondisi Rusak Berat	383,29	144,54	99,62	68,03	86,79
	Jalan secara keseluruhan (nasional dan provinsi)	3.338,5	2.814,8	2.814,8	2.814,8	3.102,08

Sumber: Kalteng Dalam Angka, 2016

### 2.9.2 Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer

Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat pusat kegiatan sebagai berikut:

1. Menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan;
2. Menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.

Tabel 2.9. 3

**Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Kolektor**

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer	-	-	86,72	87,05	87,52	87,52	66,60

Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Kalimantan Tengah

Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer pada tahun 2016 adalah sebesar 57,90 persen dan pada tahun 2017 adalah sebesar 59,16 persen mengalami peningkatan sebesar 1,26 persen. Peningkatan capaian sasaran tersebut dikarenakan ada rekonstruksi dan peningkatan jalan sepanjang 72,08 km.

### 2.9.3 Persentase Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan kawasan potensial adalah kawasan yang memiliki sumberdaya alam atau sumberdaya manusia baik yang telah di mobilisir maupun yang belum yang dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu kawasan.

Tabel 2.9. 4  
Persentase Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial	-	-	91,63	91,63	91,63	91,63	63,60

Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Kalimantan Tengah

Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial pada tahun 2016 adalah sebesar 91,63 % dan pada tahun 2017 adalah sebesar 63,60 %. Adanya penurunan presentase diakibatkan adanya penambahan ruas jalan menuju kawasan potensial, karena fokus terhadap pemenuhan jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan.



## 2.10 Berkurangnya Kesenjangan

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Di Kalimantan Tengah pada September 2017, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Tengah yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,327. Angka ini menurun sebesar 0,016 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,343. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0,347 turun sebesar 0,020 poin.

Sedangkan pada Maret 2018 Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Tengah yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,342. Gini Ratio di daerah perkotaan sebesar 0,387 dan di daerah perdesaan sebesar 0,295. Sementara itu, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 19,47 persen. Artinya pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.



## 2.11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan

### 2.11.1 Persentase capaian infrastruktur dasar perumahan dan permukiman

Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni (livible), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Rumah dan fasilitas perumahan yang memadai merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Di beberapa negara sedang berkembang, masalah kualitas perumahan dan fasilitas permukiman di kota-kota besar sangat terasa. Hal ini disebabkan oleh penambahan penduduk kota dan terbatasnya lahan yang diperuntukkan bagi perumahan yang memadai. Dalam dasar-dasar perencanaan perumahan harus memperhatikan standar sarana dan prasarana lingkungan perumahan. Sarana perumahan meliputi sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sedangkan prasarana perumahan adalah drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, listrik, telepon, dan jalan.

Tabel 2.11.1.

Presentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	na	na	na	na	na	na	na

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan

menghubungkan antarwilayah. Pembangunan sarana prasarana yang sesuai diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan mendukung daya saing nasional secara global.

Tabel 2.11.2.  
Capaian Pelayanan Air Minum Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Air Minum layak (%)	47.14	52.44	48.04	58.73	57.01	61.26	47.14

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

Backlog rumah di Kalimantan Tengah pada tahun 2017 sebanyak 72.899 unit.

Tabel 2.11.3.  
Realisasi Pembangunan RUSUNAWA Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Rusun	TB	Pelaksana	Peruntukkan
Rusunawa Kota Palangka Raya	-	Kota Palangka Raya	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
-	-	-	-
-	-	-	-

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

Di sisi lain jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kalimantan Tengah sampai tahun 2017 mencapai 43.427 unit



Pencapaian Indikator Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015

No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2010-2015					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aspek Pelayanan Umum							
3	Pekerjaan Umum						
3.15	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (km)	35,81	14,45	5,04	2,70	2,75	2,75
3.16	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota****	tad	tad	tad	tad	tad	tad
3.17	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	35.503,00	68.538,00	68.300,00	90.700,00	91.500,00	91.500,00
3.18	Lingkungan Pemukiman (Ha)	1.607.113	1.421.150	1.501.204	1.581.258	1.581.258	1.581.258
4	Perumahan						
4.1	Rumah tangga pengguna air bersih (Unit)	128.487	598.134	695.169	695.169	695.169	609.695
4.2	Rumah tangga pengguna listrik (Unit)	284.310	430.295	591.385	591.385	600.212	600.212
4.3	Rumah tangga bersanitasi (%)	24,01	82,61	85,10	87,59	88,1	88,1
4.4	Lingkungan pemukiman kumuh (%)	5	13,2	11,5	9,9	9,7	10
4.5	Rumah layak huni (Unit)	544,231	519,191	556,473	566,139	570,154	570,154

Sumber : RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015



## 2.12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

### 2.12.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) merupakan suatu bentuk penilaian yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan. Penetapan IKLHD sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan Provinsi Kalimantan Tengah tentang kondisi lingkungan di Kalimantan Tengah sebagai bahan untuk evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan dan bentuk pertanggungjawaban tentang pencapaian target program-program Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dilihat dari tabel di bawah ini, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2014 yaitu sebesar 70,37, yang termasuk tinggi di regional Kalimantan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan kualitas yang baik, sehingga di tahun-tahun mendatang perlu adanya upaya untuk memertahankan maupun meningkatkan IKLH.

Tabel 2.12.1  
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)  
Regional Kalimantan Tahun 2011-2014

Provinsi	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Kalimantan Barat	73,65	69,91	68,12	68,31
Kalimantan Tengah	75,02	70,84	69,53	70,37
Kalimantan Selatan	60,96	57,10	56,20	57,51
Kalimantan Timur & Kalimantan Utara	74,41	73,12	72,41	74,00

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016

### 2.12.3 Indeks Kualitas Air

Sungai memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, diantaranya sebagai air bersih untuk rumah tangga, air baku untuk industri, pertanian, pembangkit listrik, dan sebagainya. Di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mengalir beberapa sungai besar berdasarkan panjang dan lebarnya yaitu sungai Barito, Sungai Kapuas dan Sungai Kahayan yang berhulu di sektor utara. Sejalan dengan kondisi fisiografi wilayah, sungai-sungai utama mempunyai kemiringan yang rendah hingga ke sektor tengah sehingga jangkauan pengaruh pasang air laut (khususnya pada musim kemarau) relatif jauh. Sebaliknya di musim hujan, air sungai sering meluap ke wilayah dataran yang dilintasinya. Selain itu, rawa gambut terdapat hingga ke sektor tengah dan pada bagian yang lebih hilir terdapat rawa pasang surut. Sedangkan wilayah bagian hulu dialiri anak-anak sungai berpola dendritik dengan kemiringan tinggi bahkan beriam.

Tabel 2.12.2  
Nama-nama Sungai menurut Panjang, Kedalaman dan lebar  
di Provinsi Kalimantan Tengah

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Dapat dilayari (km)	Kedalaman (m)	Lebar (m)
1.	Sungai Jelai	200	150	8	150
2.	Sungai Arut	250	190	4	100
3.	Sungai Lamandau	300	250	6	150
4.	Sungai Kumai	175	100	6-9	250
5.	Sungai Seruyan	350	300	5	250
6.	Sungai Mentaya	400	270	6	350
7.	Sungai Katingan	650	520	3-6	250
8.	Sungai Sebangau	200	150	5	100
9.	Sungai Kahayan	600	500	7	450
10.	Sungai Kapuas	600	420	6	450
11.	Sungai Barito	950	700	6-14	350-500

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka 2016





### 2.13. Penanganan Perubahan Iklim

Sumber daya hutan yang selama ini menjadi pendukung utama pembangunan Kalimantan Tengah perlu diperhatikan keberlanjutan pengelolaannya agar dapat memenuhi kepentingan generasi saat ini dan masa depan. Sampai saat ini masih terjadi berbagai kerusakan lahan, pencemaran udara, kebakaran dan bencana alam lain akibat pengelolaan sumber daya hutan yang mengesampingkan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Dampak bencana asap akibat kebakaran lahan, hutan dan kebun yang terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangka Raya tahun 2015 yang lalu sangat mengganggu aktivitas ekonomi, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat. Bahkan indeks partikulat Kota Palangka Raya pernah mencapai 2.900 (angka 359 sudah dianggap berbahaya), mengakibatkan masyarakat tidak mendapat oksigen yang cukup dan inilah yang dirasakan ribuan keluarga yang terpapar kabut asap.

Langkah-langkah untuk perlindungan dan konservasi sumber daya hutan juga perlu dilanjutkan, antara lain: optimalisasi pencegahan kebakaran lahan dan hutan di semua sektor pada wilayah rawan kebakaran lahan dan hutan; optimalisasi pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan nilai ekonomi khususnya pada lahan kritis; perlindungan hutan terhadap kebakaran dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta secara aktif dalam penanggulangan kebakaran; pemantapan pengelolaan kawasan konservasi; pengembangan sumber benih dan usaha perbenihan tanaman hutan; pelaksanaan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha; pelibatan masyarakat sekitar hutan dan peningkatan efektifitas kawasan konservasi.

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, luas wilayah Kalteng sebesar 15.750.472 ha dikelompokkan berdasarkan fungsi lindung, yang dibagi ke dalam kawasan lindung 23 persen dan kawasan budidaya 77 persen. Di dalam luasan kawasan tersebut terkandung kekayaan sumberdaya alam yang memiliki nilai jasa ekosistem dalam menunjang perikehidupan manusia.

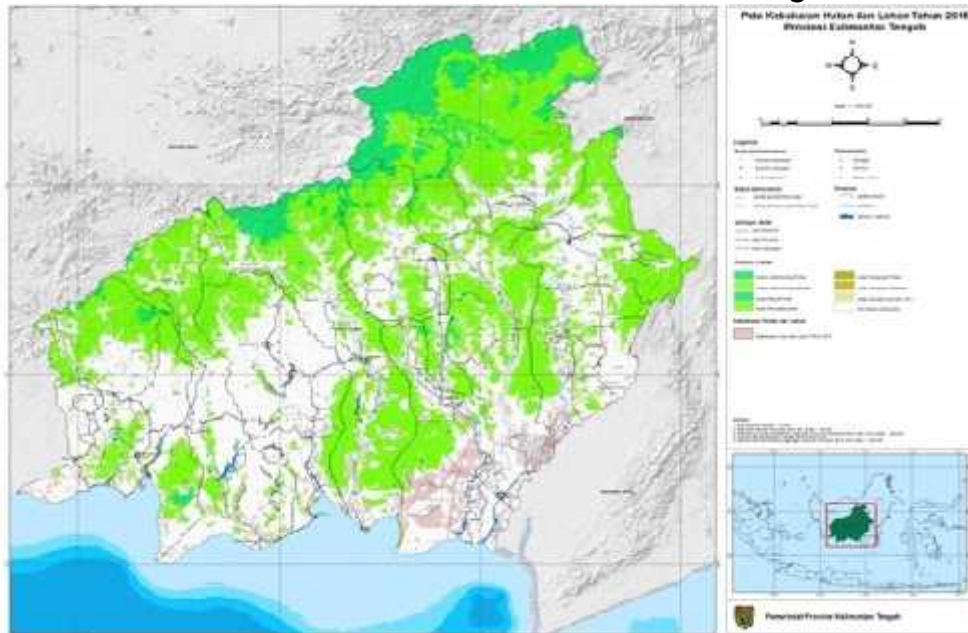
Isu strategis yang teridentifikasi dalam dokumen **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021**, antara lain kebakaran, alih fungsi lahan, dan pencemaran lingkungan hidup. Isu-isu ini muncul disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah masih memerlukan upaya yang kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

- **Kebakaran Hutan dan Lahan**

Sejak dibukanya Proyek Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah (Keputusan Presiden No. 82 Tahun 1995), setiap tahun Provinsi Kalimantan Tengah selalu terkena dampak kebakaran hutan dan lahan. Tiga dampak besar yang terjadi sejak pembukaan Eks Proyek Lahan Gambut (Eks PLG) selalu terulang secara periodik, yakni pada tahun 1997, 2006 dan yang terakhir pada tahun 2015. Sesuai dokumen KLHS RPJMD 2016-2021, luas kebakaran yang terjadi pada tahun 2015 mencapai 581.067,58 ha, sebagian besar terjadi di bagian selatan yang didominasi lahan gambut khususnya di lokasi Eks PLG. Dari luasan eks-PLG yang hanya 9% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah terbakar sekitar 46%-nya dan luas Eks PLG Blok C dengan luas hanya 3% dari Provinsi Kalimantan Tengah terbakar seluas 27% dari total luas kebakaran yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015. Peta kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 sebagaimana Grafik berikut berikut.

Grafik 2.13.1

Peta kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015



Sumber: Hasil Analisis GIS USAID-Lestari Kalteng-2016 (Dokumen KLHS RPJMD Prov. Kalteng 2016-2021)

Berdasarkan implementasi dari PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 17 Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) yang berstatus sebagai KHG Lintas Kabupaten/Kota. Dari jumlah 17 KHG tersebut terdapat 4 KHG dengan prosentase tutupan vegetasi hutan minimal, yakni mulai dari yang terendah, KHG KT-KH19 tanpa tutupan hutan sama sekali (0%), KHG KT-KH17 dengan tutupan hutan hanya 4,27%, KHG KT-KH14 dengan tutupan hutan 8,17% dan KHG KT-KH18 dengan tutupan 8,76% berupa hutan.

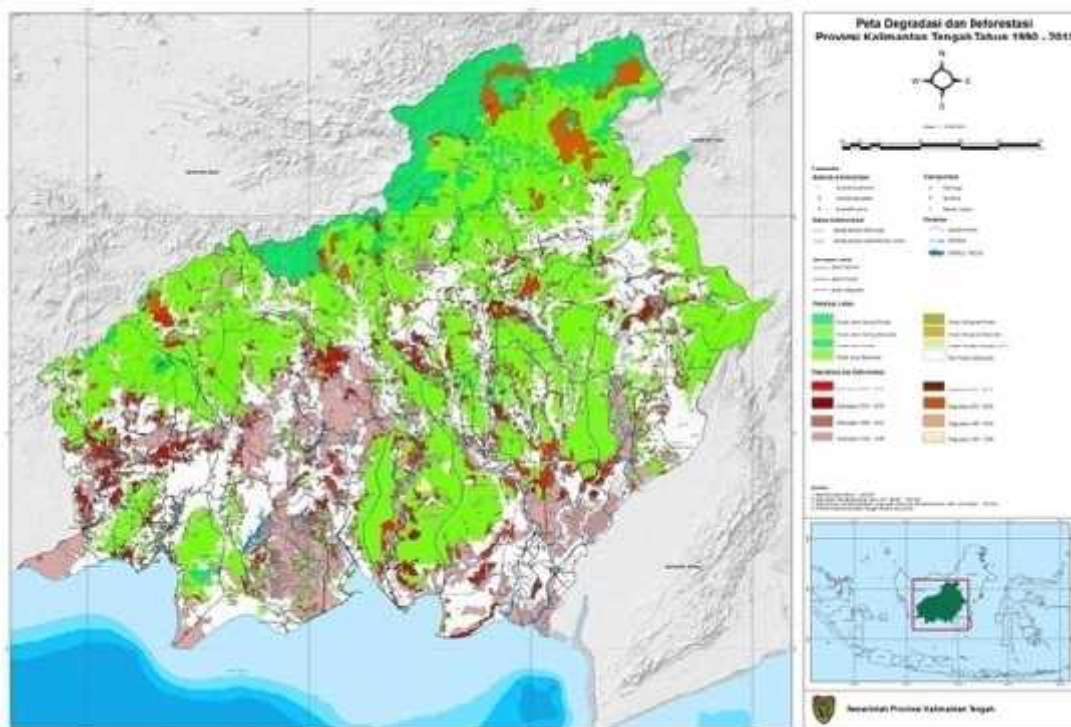
- **Alih Fungsi Lahan**

Berdasarkan hasil analisis interpretasi perubahan tutupan lahan antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2015, terlihat bahwa tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah telah berubah sebesar 3.921.959,26 ha. Tipe perubahan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah tersebut didominasi oleh perubahan Hutan Rawa Sekunder menjadi Belukar Rawa, yaitu sebesar 1.003.495,20 ha atau sebesar 25,6 persen dari total luas perubahan yang ada. Selanjutnya perubahan Hutan Lahan Kering Sekunder menjadi Perkebunan juga cukup besar, yaitu seluas 585.008,72 ha atau sebesar 14,9 persen dari

total perubahan lahan. Grafik 2.13.2 menunjukkan wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang mengalami deforestasi dan degradasi lahan.

Selanjutnya perubahan lahan yang paling kecil pada rentang tahun tersebut (1990 - 2015) di Provinsi Kalimantan Tengah adalah degradasi dari Hutan Lahan Kering Primer menjadi Kawasan Air, yaitu sebesar 5,83 ha dari total luas perubahan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Grafik 2.13.2  
Peta perubahan tutupan lahan Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun 1990 - 2015



Sumber: Hasil Analisis GIS USAID-Lestari Kalteng (2016)

- **Pencemaran Lingkungan Hidup**

Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan oleh berbagai pihak di Kalimantan Tengah. Namun, masih terdeteksi pencemaran lingkungan hidup baik pencemaran air, tanah dan udara. Data yang disajikan oleh BPS Kalimantan Tengah tahun 2014 menunjukkan ada 970 desa yang mengalami pencemaran lingkungan atau 61 persen desa (dari 1.569 desa) yang mengalami pencemaran lingkungan.



## 2.14. Ekosistem Lautan

### 2.14.1 Jumlah Luasan Konservasi Perairan (Ha/tahun)

Zonasi kawasan konservasi perairan adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang di kawasan konservasi perairan melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem sedangkan rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan adalah dokumen kerja yang dapat di mutakhirkan secara periodik, sebagai panduan operasional pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan. Setiap rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan harus memuat zonasi kawasan konservasi perairan.

Penetapan kawasan konservasi perairan dilaksanakan dengan tujuan melindungi dan melestarikan sumber daya ikan serta tipe-tipe ekosistem penting di perairan untuk menjamin keberlangsungan fungsi ekologisnya. Wilayah pesisir dan laut Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi yang cukup besar hal ini dibuktikan dengan tingginya potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimiliki meliputi habitat penting wilayah pesisir.

No	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Tahun 2015	Kondisi Kinerja Akhir Periode (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Luasan Konservasi Perairan (Ha/tahun)	171.679	171.679	171.679	171.679	171.679	171.679	171.679





## 2.15. Ekosistem Daratan

### 2.15.4 Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan

Subkategori kehutanan dan penebangan kayu meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun, getah, dan akar, termasuk jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicapuk juga jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.

Kondisi-kondisi fisik wilayah secara alamiah menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam kategori bio-region hutan. Selain itu, pola penggunaan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah juga masih menampilkan dominasi kelompok penggunaan hutan. Hingga saat ini, wilayah hutan mendominasi di semua kabupaten/kota (termasuk di wilayah Kota Palangka Raya) kecuali di Kabupaten Barito Timur dominasi wilayah hutan kurang dominan.

### 2.15.5 Indeks Tutupan Hutan

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Berdasarkan implementasi dari PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 17

Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) yang berstatus sebagai KHG Lintas Kabupaten/Kota. Dari jumlah 17 KHG tersebut terdapat 4 KHG dengan prosentase tutupan vegetasi hutan minimal, yakni mulai dari yang terendah, KHG KT-KH19 tanpa tutupan hutan sama sekali (0%), KHG KT-KH17 dengan tutupan hutan hanya 4,27%, KHG KT-KH14 dengan tutupan hutan 8,17% dan KHG KT-KH18 dengan tutupan 8,76% berupa hutan. Berdasarkan hasil analisis interpretasi perubahan tutupan lahan antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2015, terlihat bahwa tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah telah berubah sebesar 3.921.959,26 ha. Tipe perubahan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah tersebut didominasi oleh perubahan Hutan Rawa Sekunder menjadi Belukar Rawa, yaitu sebesar 1.003.495,20 ha atau sebesar 25,6 persen dari total luas perubahan yang ada.

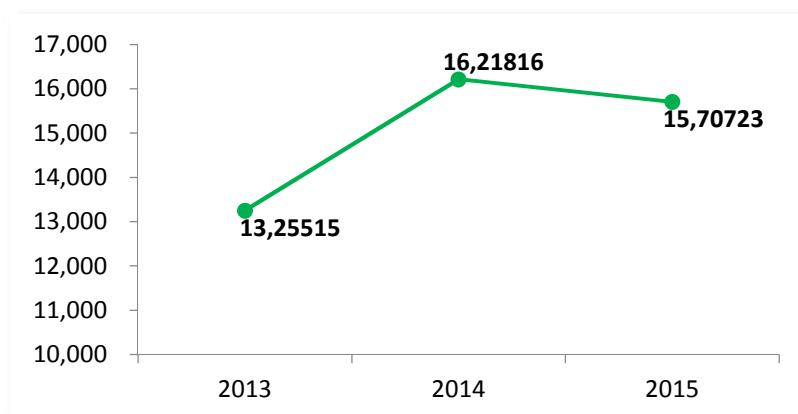


## 2.16 Kriminalitas

Tingginya kriminalitas di suatu wilayah akan memicu penurunan status kenyamanan dalam berinvestasi oleh para investor. Situasi wilayah akan menjadi damai dan aman jika pihak yang berwenang dapat meredam atau meminimalisir kriminalitas yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara umum, angka kriminalitas di Provinsi Kalimantan Tengah cukup fluktuatif meningkat dan menurun secara tidak konsisten. Oleh karena itu, perlu adanya pengamanan khusus dalam beberapa kasus terutama yang terkait SARA mengingat pernah terjadi kejadian luar biasa di Provinsi Kalimantan Tengah.

Angka kriminalitas Provinsi Kalimantan Tengah cukup fluktuatif, dimana pada tahun 2015 mencapai 15,71 yang berarti terdapat 15-16 tindak kriminalitas diantara 10.000 penduduk.

Grafik 2.16.1  
Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2015



Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2016 (diolah)



### 2.16.2 Nilai Opini BPK

Dari segi pengawasan terhadap rangkaian pengelolaan keuangan daerah, pada periode tahun 2011-2015 disusun laporan keuangan sebagai entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap PD dan dikoordinir oleh Badan Keuangan yang mengemban fungsi sebagai SKPKD.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca, hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh PD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh Badan Keuangan Daerah sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh Badan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dimana kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Pengelolaan Belanja Daerah secara umum telah sesuai dengan ketentuan SAP walaupun masih terdapat beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya mengikuti SAP.

Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan, Provinsi Kalimantan Tengah dapat dikatakan telah mencapai target dengan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari positifnya hasil opini audit BPK Provinsi Kalimantan Tengah pada Tabel Berikut

**Tabel 2.17.2**  
**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah**  
**Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015**

Tahun	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2012	Disclaimer
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 2016



## 2.17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

### 2.17.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2013, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 1.093.821,49 (juta rupiah) dan meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp. 1.233.094,36 (juta rupiah) Sementara itu pada tahun 2017, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 1.342.330,62 (juta rupiah). Semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2011-2015, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.17.1**  
**Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah**  
**Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2016 (Juta Rupiah)**

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (%)
2011	815.244,77	1.921.944,86	42,42%
2012	945.362,71	2.514.031,29	37,60%
2013	1.093.821,49	2.809.096,14	38,94%
2014	1.253.708,12	3.129.694,75	40,06%
2015	1.174.969,27	3.252.747,36	36,12%
2016	1.233.094,36	3.427.236,87	35,98%
Rata-rata	1.086.033,45	2.842.458,55	38,21%

Sumber: Buku RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

Dari tabel di atas tampak bahwa derajat otonomi fiskal Provinsi Kalimantan Tengah masih sangat kecil yaitu rata-rata 38,21 persen. Diharapkan di tahun - tahun mendatang, pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dapat meningkatkan peran Pendapatan Asli Daerah dalam era desentralisasi fiskal.

## BAB III

### TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs



#### 3.1 Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Tujuan 1 TPB/SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030, ditetapkan 7 target yang diukur melalui 33 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pemberantasan kemiskinan, penerapan perlindungan sosial, pemenuhan pelayanan dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta penguatan kebijakan dan mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

**Kebijakan Tujuan 1.** Dalam rangka mencapai tujuan dan target tanpa kemiskinan, RPJMN 2015-2019 diarahkan pada tiga kebijakan utama, yaitu:

1. **Pertama**, penyelenggaraan perlindungan sosial yang lebih komprehensif. Program jaminan dan bantuan sosial yang tepat sasaran dilaksanakan melalui penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran dengan satu kartu. Program ini diharapkan juga dapat memperluas inklusi keuangan dan kepesertaan jaminan sosial.
2. **Kedua**, perluasan dan peningkatan pelayanan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan melalui (i) perluasan penyediaan sarana dan prasarana dasar, (ii) peningkatan pelayanan dasar yang inklusif, dan (iii) peningkatan pemanfaatan Basis Data Terpadu untuk menyasar kebutuhan dasar 40,0% penduduk berpendapatan terendah, seperti kepemilikan dokumen kependudukan dan perumahan.

3. **Ketiga**, pengembangan penghidupan berkelanjutan. Perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi dilaksanakan melalui (i) peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil; (ii) peningkatan akses terhadap permodalan usaha; dan (iii) peningkatan kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha.

Strategi untuk mencapai target mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimana pun adalah :

1. Memperluas dan menyempurnakan pelaksanaan sistem jaminan sosial terutama jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan
2. Meningkatkan ketersediaan penyediaan pelayanan dasar yang disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya dan jangkauannya bagi masyarakat miskin dan rentan berupa pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan infrastruktur dasar. (Aspek mengurangi pengeluaran dalam pelayanan dasar)
3. Meningkatkan kemampuan penduduk miskin dalam mengembangkan penghidupan yang berkelanjutan melalui penguatan asset sosial penduduk miskin, peningkatan kemampuan berusaha dan bekerja penduduk miskin, dan peningkatan dan perluasan akses penduduk miskin terhadap modal. (aspek meningkatkan pendapatan)
4. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi PMKS
5. Meningkatkan keterpaduan antar kelompok program penanggulangan kemiskinan lintas sektor dengan fokus dan lokus tertentu, berbasis perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan akses, jangkauan dan fasilitas infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin

Arah kebijakan untuk mencapai target mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimana pun adalah :

1. Peningkatan dan penyempurnaan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di semua program yang ada di satuan kerja organisasi pemerintah daerah (OPD), sekaligus memperbaiki efektivitas program
2. Peningkatan dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan memangkas beban pengeluaran rumah tangga miskin

3. Peningkatan, dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin
4. Pengembangan dan perlindungan keberlangsungan usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan untuk mencegah terjadinya pemiskinan lebih parah akibat kehilangan sumber nafkah
5. Peningkatan perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap kredit mikro dengan suku bunga rendah
6. Peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan lainnya yang menghubungkan tempat produksi pertanian dan tujuan pasar untuk menekan biaya angkut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin
7. Peningkatan infrastruktur fisik seperti energi, terminal, pelabuhan, dan lainnya dalam rangka meningkatkan akses dan memudahkan jangkauan perekonomian masyarakat miskin maupun rentan
8. Peningkatan perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap kredit mikro dengan suku bunga rendah
9. Peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan tempat produksi pertanian dan tujuan pasar untuk menekan biaya angkut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin
10. Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, salah satu upaya yang dilakukan yaitu pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil
11. Peningkatan kapasitas lembaga - lembaga kemasyarakatan di desa dalam rangka menumbuhkan keberdayaan masyarakat desa.
12. Peningkatan kapasitas pengelolaan pemerintahan desa terutama dalam hal administrasi dan keuangan melalui pembinaan, fasilitasi dan pengawasan oleh pemerintah daerah
13. Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, satu upaya yang dilakukan yaitu pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui peningkatan perekonomian desa dan kawasan perdesaan baik melalui pengembangan ekonomi yang sudah ada maupun dari potensi ekonomi desa yang ada.

14. Peningkatan kualitas hidup PMKS, dan peran aktif masyarakat dalam penanganan kesejahteraan sosial.

**Program Tujuan 1.** Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMD 2016 - 2021 antara lain terkait dengan :

1. Program Penanggulangan Kemiskinan
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Target Indikator Serta program dan kegiatan Tujuan 1 TPB/SDGs yang dilaksanakan dapat di lihat pada daftar terlampir.





### 3.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 TPB/SDGs adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 20 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi, menggandakan produktivitas pertanian, menjamin pertanian pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, dan meningkatkan kapasitas produktif pertanian. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

**Kebijakan Tujuan 2.** Arah kebijakan RPJMN 2015-2019 untuk mencapai target TPB/SDGs Tujuan 2: Tanpa Kelaparan, meliputi: (1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, (2) stabilisasi harga bahan pangan, (3) perbaikan kualitas konsumsi pangan, (4) percepatan perbaikan gizi masyarakat, (5) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan, dan (6) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan.

Dalam upaya pencapaian TPB/SDGs tujuan 2, kebijakan produksi dan penyediaan pangan diarahkan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri yang berkualitas guna menyediakan pangan yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman, serta dengan harga yang terjangkau. Bersamaan dengan itu, upaya untuk meningkatkan kualitas permintaan pangan juga diperlukan agar terbentuk pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang serta aman.

Strategi untuk mencapai target menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan Gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan adalah :

1. Peningkatan produksi padi dan sumber pangan protein dari dalam negeri;
2. Peningkatan kelancaran distribusi dan penguatan stok pangan dalam negeri;
3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; dan
4. Mitigasi gangguan iklim terhadap produksi pangan.
5. Meningkatkan penanganan ketahanan pangan
6. Pengembangan sarana prasarana dan kapasitas nelayan, serta usaha ekonomi produktif masyarakat kawasan pesisir, dan kepulauan
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, dan balita

Arah kebijakan untuk mencapai target menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan Gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan adalah :

1. Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun melalui penguatan dan pengembangan "Taman Posyandu" disetiap desa/kelurahan yang mengintegrasikan Posyandu, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bina Keluarga Balita (BKB).
2. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis pangan lokal
3. Pengembangan pengawasan keamanan pangan
4. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan
5. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat
6. Peningkatan peran pasar induk dalam distribusi pangan

**Program Tujuan 2.** Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMD 2016 - 2021 antara lain terkait dengan :

1. Program Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Target Indikator Serta program dan kegiatan Tujuan 2 TPB/SDGs yang dilaksanakan dapat di lihat pada daftar terlampir.



### 3.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 TPB/SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 13 target yang diukur melalui 50 indikator. Target-target tersebut terdiri dari penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, penguatan pelaksanaan pengendalian tembakau (*tobacco control*), pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

**Kebijakan Tujuan 3.** Kebijakan dalam RPJMN diarahkan pada: 1) akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak remaja, dan lanjut usia yang berkualitas; 2) mempercepat perbaikan gizi masyarakat; 3) meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; 4) memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan; 5) meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; 6) meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas; 7) meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; 8) meningkatkan pengawasan obat dan makanan; 9) meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan; 10) meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 11) menguatkan manajemen, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi kesehatan; dan 12) mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.

Strategi untuk mencapai target Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia adalah :

1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas
2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas
5. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan
6. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan
7. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan
8. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
9. Memperkuat manajemen, penelitian pengembangan dan sistem informasi
10. Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan
11. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.
12. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, dan balita.
13. Meningkatkan standard kualitas pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya
14. Meningkatkan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif

Arah kebijakan untuk mencapai target Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia adalah :

1. Peningkatan standarisasi pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya secara merata
2. Peningkatan pelayanan Kesehatan komprehensif yang lebih mengedepankan upaya promotif preventif dengan tidak mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif

3. Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan

**Program Tujuan 3.** Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMD 2016-2021 antara lain terkait dengan :

1. Program Upaya Kesehatan Perorangan
2. Program standarisasi pelayanan kesehatan
3. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
4. Program Peningkatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan
5. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
6. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
7. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
8. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Target Indikator Serta program dan kegiatan Tujuan 3 TPB/SDGs yang dilaksanakan dapat di lihat pada daftar terlampir.



### 3.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 TPB/SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 23 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menjamin akses terhadap pengasuhan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan kejuruan termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dan meningkatkan jumlah guru berkualitas. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

**Kebijakan Tujuan 4.** Arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam rangka pencapaian TPB/SDGs, adalah sebagai berikut: (1) Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan menjamin hak seluruh anak Indonesia untuk dapat menyelesaikan pendidikan dasar, dan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas, antara lain melalui penyediaan bantuan untuk anak dari keluarga kurang mampu, pemberian peluang lebih besar bagi anak di daerah pasca konflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), dan perluasan pendidikan khusus dan layanan khusus termasuk pendidikan inklusif sebagai upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan; (2) Peningkatan kualitas pembelajaran, melalui penguatan jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan, penguatan kurikulum dan pelaksanaannya; dan penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; (3) Peningkatan kualitas, profesionalisme, pengelolaan dan penempatan guru yang merata; (4)

Peningkatan pemerataan akses dan kualitas serta relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; (5) Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja; (6) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini dalam rangka meningkatkan kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan kualitas Wajib Belajar 12 Tahun; (7) Peningkatan kualitas pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan; (8) Penumbuhan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa; dan (9) Peningkatan tata kelola pendidikan dan efisiensi pembiayaan pendidikan.

Strategi untuk mencapai target Menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua adalah:

1. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun;
2. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal dan Nonformal
3. Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan
4. Memperkuat kurikulum tambahan vokasional dan pelaksanaannya
5. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel (dual track)
6. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru
7. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan
8. Meningkatkan kualitas pendidikan berkarakter
9. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan SLTA dan SMK serta tata kelola kelembagaan
10. Meningkatkan akses sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan yang bermutu dan terjangkau, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependudukan serta kualitas layanan pendidikan.

Arah kebijakan untuk mencapai target Menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua adalah:

1. Peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
2. Peningkatan rasio perbandingan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Umum (SMU), 70% : 30%, untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah
3. Pengembangan "Sekolah Menengah Kejuruan Mini" atau Balai Latihan Kerja di pondok pesantren untuk menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah
4. Peningkatan dan pengembangan penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (bridging program) bagi lulusan sekolah kejuruan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi
5. Penurunan/penghilangan hambatan administratif pemberian bantuan bagi sekolah umum, sekolah agama, sekolah kejuruan dan sekolah khusus

**Program Tujuan 4.** Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMD 2016-2021 antara lain terkait dengan :

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pendidikan
  2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  3. Program Pendidikan SMA
  4. Program Pendidikan SMK
  5. Program Pendidikan Luar Biasa
  6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
  7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- Target Indikator Serta program dan kegiatan Tujuan 4 TPB/SDGs yang dilaksanakan dapat di lihat pada daftar terlampir.





### 3.5 Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Tujuan 5 TPB/SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan pada tahun 2030, ditetapkan 9 target yang diukur melalui 21 indikator. Target-target tersebut terdiri dari mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, menghapus praktik berbahaya, menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan, serta menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

**Kebijakan Tujuan 5.** Kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 untuk pencapaian Goal 5 berasal dari kebijakan di beberapa bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

**Pertama,** peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan yang mencakup: (1) peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; (2) penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan; (3) penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundangan dan kebijakan; (4) peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan; (5) penguatan kapasitas kelembagaan di semua tingkatan; dan (6) penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk pelaksanaan proses pembangunan.

**Kedua,** meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, melalui: (1) pengembangan kebijakan dan strategi yang

komprehensif dan terpadu tentang konseling kesehatan reproduksi remaja; (2) peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja; (3) pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok keluarga remaja; dan (4) peningkatan jumlah dan kompetensi SDM pemberi pelayanan.

**Ketiga**, melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas melalui: (1) pemberian dukungan bagi anak dari keluarga tidak mampu; (2) peningkatan pemahaman bagi orang tua tentang pentingnya pendidikan menengah; (3) peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan; (4) penyediaan bantuan operasional sekolah; (5) penyediaan layanan khusus bagi anak yang memerlukan pendidikan khusus.

**Keempat**, meningkatkan peran perempuan di bidang politik melalui: (1) penguatan UU Partai Politik; (2) peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30 persen keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif; (3) peningkatan kapasitas perempuan potensial, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif; (4) peningkatan pemahaman masyarakat dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik; dan (5) pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia.

**Kelima**, meningkatkan KIE dan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, melalui: (1) peningkatan sosialisasi, promosi, penyuluhan, penggerakan dan konseling tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga(KKBPK); dan (2) penguatan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas. 94

**Keenam**, meningkatkan jangkauan pelayanan internet berpita lebar dan peningkatan literasi digital melalui perluasan jaringan dan pendidikan.

Strategi untuk mencapai target Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan adalah :

1. Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah.

2. Penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di dalam berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, ekonomi, dan hukum.
3. Meningkatkan kualitas keadilan dan kesetaraan gender di segala sektor pembangunan.
4. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas.
5. Meningkatkan perlindungan bagi masa depan generasi muda.
6. Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai even.

Arah kebijakan untuk mencapai target Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan adalah :

1. Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan
2. Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan
3. Peningkatan perlindungan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan Napza, minuman keras, dan penyebaran HIV/AIDS
4. Peningkatan prestasi olahraga

**Program Tujuan 5.** Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMD 2016-2021 antara lain terkait dengan :

1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
3. Program Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olah Raga

Target Indikator Serta program dan kegiatan Tujuan 5 TPB/SDGs yang dilaksanakan dapat di lihat pada daftar terlampir.



### 3.6 Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan 6 TPB/SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 40 indikator. Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah

**Kebijakan Tujuan 6.** Tujuan 6 dari TPB/SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Tujuan 6 ini dicapai melalui pencapaian target-target sebagaimana telah diuraikan di atas. Untuk pencapaian target-target TPB/SDGs lima tahun pertama (2015-2019), indikator-indikator yang dikembangkan dijabarkan dari kebijakan RPJMN 2015-2019, yaitu prinsip-prinsip ketahanan air, sinergitas antara air minum dan sanitasi, efektivitas pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi dan pemeliharaan dan pemulihan sumber beserta ekosistemnya. Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang terkait Tujuan 6 adalah: (i) menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi; (ii) penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat; (iii) peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi; (iv) pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya; (v) pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; (vi) pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif; (vii) peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air

termasuk perubahan iklim; dan (viii) peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi.

Untuk mendukung pencapaian 100% akses air minum dan sanitasi selain kegiatan untuk menyediakan akses air minum dan sanitasi serta meningkatkan ketersediaan air baku, juga terdapat kegiatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat akan air minum dan sanitasi. Kegiatan yang terkait revolusi mental dalam pembangunan air minum dan sanitasi adalah sebagai berikut: perilaku hemat air, setop buang sampah di sungai dan saluran, setop buang air besar sembarangan (langsung dan tidak langsung), dan gerakan 3R (*reduce, reuse, recycle*). Kegiatan yang terakhir ini, meskipun lebih merupakan gerakan moral, apabila dilaksanakan secara masif dan sistematis, dapat menjadi pendorong percepatan pencapaian target-target TPB/SDGs yang tercermin dalam program-program pemerintah.

Strategi untuk mencapai target Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua adalah :

1. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi
2. Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi
3. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat
4. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi.
5. Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang provinsi
6. Meningkatkan penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis

Arah kebijakan untuk mencapai target Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua adalah :

1. Percepatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk dievaluasi oleh Gubernur

2. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan pemanfaatan ruang, Fasilitasi Upaya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang
3. Percepatan pembangunan infrastruktur sumber air, melalui penyelesaian hambatan perijinan, pembiayaan, penyediaan lahan dan penanggulangan masalah sosial.
4. Perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air serta sistem informasi sumber daya air.
5. Peningkatan pengelolaan infrastruktur sumber air, melalui operasional dan pemeliharaan infrastruktur sumber air guna mengembalikan fungsi & kapasitas tampungannya.
6. Pengembangan metode pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip zonasi pemanfaatan dan konservasi secara adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan ekologis secara berkelanjutan.
7. Peningkatan layanan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan melalui Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP).
8. Percepatan pembangunan & rehabilitasi infrastruktur pengendalian banjir untuk melindungi prasarana umum dan kawasan produktif.

**Program Tujuan 6.** Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMD 2016-2021 antara lain terkait dengan :

1. Program kesehatan lingkungan
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Target Indikator Serta program dan kegiatan Tujuan 6 TPB/SDGs yang dilaksanakan dapat di lihat pada daftar terlampir



### 3.7 Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Energi merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu strategi penyediaan serta distribusinya menjadi hal yang penting. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, dan sumber energi yang digunakan jumlahnya terbatas sehingga perlu dicari dan mulai digunakan energi alternatif yang lebih berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 6 indikator. Target-targetnya meliputi akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern, meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global dan melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 6 indikator. Target-targetnya meliputi akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern, meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global dan melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global.

**Kebijakan Tujuan 7.** Untuk meningkatkan ketersediaan energi, arah kebijakan dan kebijakan operasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 meliputi :

1. Meningkatkan produksi energi primer terutama minyak dan gas dari lapangan yang mengalami penurunan tingkat produksinya: (i) peningkatan kegiatan eksplorasi untuk menemukan lapangan baru; (ii) peningkatan penguasaan teknologi eksplorasi dan eksploitasi; (iii) peningkatan promosi dan penawaran lapangan baru termasuk dari lapangan gas non-konvensional

seperti *Coalbed Methane* (CBM) dan *shale gas*; dan (iv) penerapan *improved oil recovery* untuk lapangan produksi;

2. Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi, melalui: (i) meningkatkan kapasitas penyimpanan BBM dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG); (ii) mengembangkan bahan bakar sintetis, baik dalam bentuk gas maupun cair yang berasal dari batubara; (iii) meningkatkan produksi bahan bakar dan pengelolaan bahan bakar bersubsidi yang lebih tepat sasaran; (iv) melakukan penyesuaian harga energi terutama untuk listrik, BBM dan energi terbarukan; dan (v) pembuatan kontrak jangka menengah dengan produsen minyak mentah dan BBM langsung dari kilang-kilang besar;
3. Meningkatkan pasokan energi dan ketenagalistrikan dengan memperhatikan jaminan pasokan energi primer dan bauran energi dan pengendalian pemanfaatan yang sejalan dengan pelaksanaan konservasi energi, melalui: (a) perluasan jangkauan pelayanan ketenagalistrikan; dan (b) peningkatan bauran energi dan konservasi pemanfaatan energi;
4. Menyempurnakan kelembagaan dan regulasi energi dan ketenagalistrikan untuk menciptakan layanan yang andal termasuk perumusan kebijakan tarif dan subsidi yang berdasarkan nilai keekonomian, berkeadilan, dan keadaan spesifik wilayah, melalui: (a) penyempurnaan regulasi; dan (b) struktur industri penyempurnaan kelembagaan;
5. Meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi, melalui: (i) menerapkan kebijakan harga dan insentif yang tepat untuk mendorong investasi di bidang energi baru terbarukan; (ii) meningkatkan pemanfaatan aneka energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik; dan (iii) meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati untuk transportasi melalui *Fuel-Blending* biodiesel dan bioetanol;
6. Meningkatkan aksesibilitas energi, akan dilakukan dengan (i) meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit listrik melalui pembangunan pembangkit baru maupun *upgrading* pembangkit yang telah ada; (ii) memperluas cakupan wilayah pembangunan transmisi
7. Listrik dan penyediaan listrik untuk pulau-pulau dan desa-desa terpencil termasuk desa nelayan antara lain energi surya dan energi terbarukan



- lainnya; (iii) mempercepat pembangunan jaringan distribusi BBM (depo BBM) terutama di wilayah terpencil seperti di daerah perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan; (iv) meningkatkan pemanfaatan Bahan Bakar Gas (BBG) dan LPG sebagai alternatif BBM dan minyak tanah; (v) menambah dan memperluas cakupan pembangunan jaringan gas kota; dan (vi) melakukan konversi sumber energi pembangkit listrik dari bersumber BBM menjadi non-BBM;
8. Meningkatkan efisiensi penggunaan energi, melalui kebijakan operasional sebagai berikut: (i) meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghematan energi melalui kampanye hemat energi; (ii) mengembangkan insentif dan mekanisme pendanaan dalam pembiayaan upaya efisiensi energi; (iii) meningkatkan kemampuan teknis manajer dan auditor energi; (iv) meningkatkan peranan dan kapasitas perusahaan layanan energi (*Energy Service Company* - ESCO); dan (v) mengembangkan penggunaan sistem dan teknologi hemat energi terutama di kawasan industri; serta (vi) Optimalisasi instrumen kebijakan konservasi energi seperti yang tercantum pada PP No. 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi;
  9. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran, dengan melakukan: (i) peningkatan pengawasan dengan penggunaan teknologi informasi atau teknologi lainnya yang sesuai dan tepat guna; (ii) penegakan hukum atas penyelundupan BBM bersubsidi; dan (iii) perubahan mekanisme penentuan target sasaran penerima BBM bersubsidi; dan
  10. Memanfaatkan potensi sumberdaya air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA): (i) penyusunan Pedoman Perencanaan Pembangunan PLTA dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait; (ii) pemberian insentif untuk mempercepat pembangunan PLTA, diantaranya dengan memberikan dispensasi pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan PLTA, pengaturan harga jual listrik, dan penyediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur energi; (iii) penyederhanaan regulasi dan dokumen persyaratan perizinan pembangunan PLTA sehingga dapat mempercepat pembangunan PLTA khususnya yang berada di kawasan hutan; dan (iv) sinkronisasi pola dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)

serta alur perizinan pembangunan PLTA di Pusat dan Daerah, termasuk didalamnya koordinasi perizinan dan tata ruang dalam pembangunan infrastruktur energi.

Strategi untuk mencapai target Menjamin Akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua adalah :

1. Meningkatkan produksi energi primer terutama minyak dan gas dari lapangan yang mengalami penurunan tingkat produksinya
2. Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi
3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi; meningkatkan aksesibilitas energi
4. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik
5. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran
6. Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA.
7. Meningkatkan penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis

Arah kebijakan untuk mencapai target Menjamin Akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua adalah :

1. Peningkatan koordinasi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi dan ketenagalistrikan
2. Peningkatan koordinasi kegiatan pertambangan/SD Mineral dan Migas
3. Peningkatan pemeliharaan dan pemanfaatan air tanah
4. Peningkatan penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan aneka energi baru terbarukan

**Program Tujuan 7.** Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMD 2015-2019 antara lain terkait dengan :

1. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
2. Program Pengusahaan Listrik dan Energi
3. Program Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi

Target Indikator Serta program dan kegiatan Tujuan 7 TPB/SDGs yang dilaksanakan dapat di lihat pada daftar terlampir.



### 3.8 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Pada jangka waktu 5 tahun terakhir ini, PDB per kapita di Indonesia naik setiap tahunnya, namun hal ini tidak sejalan dengan laju pertumbuhannya. Sektor pariwisata, khususnya di Indonesia, memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu sektor pariwisata perlu diberdayakan karena dapat berkontribusi pada peningkatan kesempatan kerja. Namun selain jumlah kesempatan kerja yang meningkat, perlu diperhatikan juga kualitasnya yang diindikasikan dengan tingkat produktivitas, kondisi kerja, waktu kerja, upah serta perlindungan sosial bagi pekerja.

Peningkatan kesempatan kerja juga didukung oleh upaya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya dalam peningkatan kesempatan kerja adalah dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan, karena UMKM memiliki potensi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menjamin keberlanjutan UMKM, dibutuhkan akses terhadap pembiayaan serta perlindungan melalui regulasi.

Dalam pelaksanaan TPB/SDGs, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi merupakan fokus dalam Tujuan 8 yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target-target dari Tujuan 8 meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi, menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan.

**Kebijakan Tujuan 8** yang diarahkan untuk pencapaian target-target Tujuan 8 yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 meliputi kelompok kebijakan (1)

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan; (2) sektor ekonomi yang kokoh, serta (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

#### I. Pertumbuhan Ekonomi Makro

1. Mendorong investasi untuk tumbuh tinggi sehingga berdampak pada peningkatan ekspor barang dan jasa, serta konsumsi;
2. Optimalisasi realokasi belanja nonproduktif menjadi belanja investasi, penyerapan belanja pemerintah yang lebih merata di setiap kuartal dalam tahun anggaran, serta mendorong tingkat realisasi belanja pemerintah yang lebih tinggi;
3. Prioritas pembangunan pada proyek prioritas nasional yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta;
4. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui: (i) peningkatan ketersediaan lapangan kerja yang layak; (ii) fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); (iii) pengendalian harga, terutama harga barang-barang kebutuhan pokok; serta (iv) subsidi yang lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat miskin;
5. Diversifikasi ekspor dan pendalaman pasar yang sudah ada dalam rangka meningkatkan kinerja ekspor barang nonmigas;
6. Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan sektoral, seperti pembangunan *smelter*, waduk dan irigasi, alat tangkap ikan yang modern dan berkelanjutan, jaringan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya, serta fasilitas energi di kawasan industri;
7. Revitalisasi industri pengolahan dan upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang berkelanjutan.

#### II. Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif

1. Mendorong investasi, terutama investasi padat pekerja dengan mengedepankan kepastian berusaha, melalui dukungan regulasi yang mendorong arus investasi;
2. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan, serta pelayanan informasi pasar kerja;

3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan mendorong relevansi antara kurikulum lembaga diklat dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi pasar kerja di daerah untuk memfasilitasi bertemunya pekerja dengan pemberi kerja;
5. Melaksanakan perluasan akses usaha mikro kecil dan koperasi melalui kegiatan pengembangan keterampilan dan layanan usaha dan pengembangan kewirausahaan;
6. Mendorong terlaksananya hubungan industrial yang harmonis di perusahaan yang dilakukan melalui pemberdayaan serikat pekerja/serikat buruh untuk melakukan negosiasi bipartit dengan prinsip *collective bargaining* dan peningkatan kuantitas dan kualitas mediator hubungan industrial;
7. Meningkatkan perlindungan pekerja dengan mendorong perluasan cakupan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi pekerja;
8. Meningkatkan kelembagaan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan dengan penyederhanaan prosedur dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan peraturan ketenagakerjaan.

### III. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Mendorong kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha dengan membangun iklim usaha yang baik melalui peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan usaha yang sehat.
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan nonbank.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengembangan kewirausahaan.
4. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui pengintegrasian fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun ekspor.

#### IV. Peningkatan Promosi Pariwisata Berkelanjutan

1. Pemasaran pariwisata nasional melalui pembentukan pusat promosi pariwisata Indonesia di negara-negara terpilih, serta pemberdayaan kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri;
2. Pembangunan destinasi pariwisata yang diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata, sehingga berdaya saing di dalam dan luar negeri;
3. Pembangunan industri pariwisata yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional, serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran melalui: (i) pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal, (ii) fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata, serta (iii) fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata;
4. Pembangunan kelembagaan pariwisata diarahkan untuk membangun sumber daya manusia pariwisata, serta organisasi kepariwisataan nasional dengan kebijakan operasional sebagai berikut: (i) berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana di bidang kepariwisataan; (ii) meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan, memperluas jurusan dan peminatan, membangun sekolah pariwisata; serta (iii) turut serta menjaga kualitas pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan swasta.

#### V. Penguatan Kapasitas Lembaga Keuangan

1. Meningkatkan koordinasi kebijakan yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan dan penyusunan payung regulasi Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan;
2. Meningkatkan stabilitas sistem keuangan mencakup pula penguatan stabilitas subsistem keuangan mikro/Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan sistem peringatan dini (*early warning system*);
3. Penguatan daya saing dan ketahanan sektor keuangan nasional melalui penguatan struktur industri keuangan, permodalan nasional dan kualitas manajemen. Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2020 di sektor

- keuangan, dilakukan kebijakan penguatan sektor keuangan (termasuk perbankan) di bidang permodalan, aset, likuiditas dan strategi keuangan;
4. Kebijakan penguatan fungsi intermediasi melalui peningkatan akses layanan pemberian kredit/pembiayaan UMKM oleh bank umum dan BPR, serta perluasan akses layanan keuangan yang dilakukan tanpa melalui kantor bank (cara nonkonvensional) dengan pemanfaatan teknologi informasi;
  5. Pengembangan dan optimalisasi peran lembaga keuangan bukan-bank (antara lain: asuransi, pasar modal, dana pensiun, *investmen bank*) sebagai sumber pembiayaan pembangunan;
  6. Meningkatkan indeks literasi dan utilitas industri perbankan melalui upaya peningkatan kualitas pengetahuan pengguna jasa, khususnya pada industri asuransi, industri jasa pasar modal, industri jasa pembiayaan;
  7. Meningkatkan pembiayaan investasi melalui pengembangan lembaga yang sudah ada seperti perbankan, pasar modal melalui saham dan obligasi terutama surat perbendaharaan negara dan obligasi korporasi;
  8. Mengembangkan keuangan syariah melalui: (i) pembentukan komite nasional pengembangan keuangan syariah; (ii) sosialisasi dan kampanye mengenai keuangan syariah; (iii) edukasi keuangan syariah bagi masyarakat; (iv) penempatan sebagian dana pemerintah untuk ditempatkan di perbankan atau lembaga keuangan syariah; dan (v) mendorong transaksi keuangan pemerintah melalui lembaga keuangan syariah.

Strategi untuk mencapai target Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua adalah :

1. Mengoptimalkan kerjasama global dengan memperhatikan dimensi sosial dan budaya
2. Memperluas lapangan kerja
3. Meningkatkan iklim investasi dan promosi ekspor
4. Meningkatkan sinergi arah kebijakan industri
5. Meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja serta pengembangan sistem kerja yang layak

6. Pendalaman kapital dan pendidikan tenaga kerja
7. Peningkatan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja.
8. Meningkatkan kinerja sektor-sektor unggulan.
9. Meningkatkan penanganan ketahanan pangan.
10. Meningkatkan manajemen Aparatur Sipil Negara secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional.
11. Meningkatkan kualitas, produktivita, kompetensi tenaga kerja, dan memperluas kesempatan kerja.
12. Meningkatkan kinerja sektor-sektor unggulan.

Arah kebijakan untuk mencapai target Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua adalah :

1. Perluasan jaringan akses permodalan UKM melalui peran stimulasi pemerintah, lembaga keuangan bank dan non-bank, mengutamakan pendampingan kepada UKM untuk kelancaran pembiayaan usaha
2. Peningkatan peran Bank Indonesia maupun bank pelaksana untuk memperbesar pangsa kredit kepada UKM melalui pemanfaatan idle money
3. Peningkatan perluasan jaringan Bank UKM dan bank pelaksana lainnya di wilayah-wilayah strategis untuk mendukung kemudahan akses permodalan bagi UKM
4. Perluasan cakupan kelompok sasaran, substansi pendidikan dan pelatihan UKM untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran
5. Optimalisasi peran UKM terhadap pembentukan PDRB, dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan usaha koperasi
6. Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UKM dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar internasional
7. Peningkatan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai



8. Peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) pedesaan untuk mendukung pengembangan koperasi, serta usaha mikro dan kecil
9. Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi, termasuk Kopwan dan Kopontren
10. Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan lembaga keuangan non-perbankan
11. Peningkatan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan
12. Peningkatan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan
13. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kaum perempuan

**Program Tujuan 8.** Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMD 2016-2021 antara lain terkait dengan :

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
2. Program Peningkatan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan UMKM
3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
5. Program Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif
6. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
7. Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM
8. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
10. Program Peningkatan Daya Saing UMKM

Target Indikator Serta program dan kegiatan Tujuan 8 TPB/SDGs yang dilaksanakan dapat di lihat pada daftar terlampir.



### 3.9 Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastuktur

Tujuan 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, Target-target dari Tujuan 9 meliputi pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, meningkatkan infrastruktur dan *retrofit* industri agar dapat berkelanjutan, memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri, mendorong inovasi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet.

**Kebijakan Tujuan 9.** Sejalan dengan pelaksanaan RPJMN 2016-2021, kebijakan pencapaian TPB/SDGs yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, industri dan inovasi, diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas, mempromosikan industri inklusif, peningkatan akses industri kecil terhadap jasa keuangan, pelestarian sumber daya alam dan riset, teknologi dan inovasi.

1. Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda yang andal;
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia;
3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus,

- Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah nonkoridor ekonomi;
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
  6. Meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada pelanggan secara adil dan profesional, aman dan nyaman;
  7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan SDM;
  8. Mentransformasi kewajiban pelayanan universal (*Universal Service Obligation*) menjadi *broadband ready*;
  9. Mendorong pembangunan akses tetap pita lebar dan membangun prasarana pita lebar di daerah perbatasan negara; serta
  10. Menghilangkan kesenjangan antara *supply* dan *demand* serta efektifitas dan efisiensi penggunaan energi listrik.

Untuk membangun infrastruktur dan konektivitas, arah kebijakan RPJMN 2016-2021 yang selaras dengan tujuan TPB/SDGs tersebut di antaranya:

1. Pengembangan perwilayahan industri.  
Program pemerintah diarahkan pada pembangunan fasilitasi pembangunan 14 kawasan industri dan 22 sentra IKM, serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam hal penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung;
2. Penumbuhan populasi industri.  
Program pemerintah diarahkan pada penumbuhan 9.000 industri berskala besar dan sedang melalui investasi dan pembinaan IKM di seluruh Indonesia
2. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri.  
Program pemerintah diarahkan pada peningkatan efisiensi (revitalisasi permesinan, keterampilan SDM, klaster), penguasaan iptek dan inovasi (infrastruktur mutu, perekayasaan, riset, *technopreneur*), *new product development*, pembangunan faktor input: kualitas SDM, akses pembiayaan, dan penyediaan insentif untuk industri strategis berdasarkan Kebijakan Industri Nasional, industri maritim, dan industri padat karya.

Untuk meningkatkan akses industri kecil terhadap jasa keuangan, beberapa arah kebijakan dan kebijakan operasional untuk mendorong akses tersebut pada periode 2016-2021 dan sesuai dengan target TPB/SDGs, di antaranya:

1. Kebijakan penguatan fungsi intermediasi lembaga keuangan melalui (i) peningkatan akses layanan pemberian kredit/pembiayaan UMKM, termasuk di sektor industri, oleh bank umum, dan (ii) perluasan akses layanan keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi, *e-money* dan kerjasama keagenan (*branchless banking*).
2. Pembentukan lembaga keuangan khusus untuk pembiayaan prioritas pembangunan (pembiayaan infrastruktur, pertanian dan kemaritiman dan UMKM), yang disertai dengan revitalisasi dari skema-skema kredit pertanian dan perikanan, serta infrastruktur yang dikelola oleh bank umum dan BPR.

Sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2016-2021, kebijakan pemerintah terkait dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan target TPB/SDGs Tujuan 9 melingkupi:

1. Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan;
2. Perbaikan kualitas lingkungan hidup, termasuk peningkatan kualitas udara melalui (i) pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan, (ii) peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca, dan (iii) pemantauan kualitas udara ambien;
3. Peningkatan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati;
4. Penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
5. Penguatan instrumen pengelolaan lingkungan serta sistem insentif dan disinsentif, Pengelolaan lingkungan hidup; dan
6. Penegakan hukum lingkungan.

Untuk memperkuat riset ilmiah, peningkatan teknologi industri dan inovasi, kebijakan pemerintah RPJMN 2016-2021 yang selaras dengan tujuan TPB/SDGs tersebut di antaranya:

1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di berbagai sektor strategis seperti riset untuk ketahanan pangan, energi dan pertahanan dan keamanan; layanan perekayasa teknologi; layanan infrastruktur mutu;

- layanan pengawasan tenaga nuklir; penguatan kerjasama swasta-pemerintah-perguruan tinggi;
2. Peningkatan dukungan iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam (hayati, nirhayati), penginderaan jarak jauh, dan mitigasi penginderaan jauh;
  3. Penyelenggaraan riset sosial dan kemanusiaan untuk seluruh wilayah dan masyarakat Indonesia dengan membentuk 6 simpul (hub) penelitian sosial kemasyarakatan di seluruh Indonesia;
  4. Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar untuk (i) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Iptek; (ii) pembangunan sarana dan prasarana iptek antara lain revitalisasi Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek); (iii) pembangunan repositori dan diseminasi informasi iptek; serta (iv) peningkatan jaringan iptek melalui konsorsium riset; dan
  5. Pembangunan *Techno Park* dan *Science Centre*.

Strategi untuk mencapai target Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi adalah :

1. Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung sistem logistik nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global
3. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan industri khusus, kompleks industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi
4. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan

6. Mentransformasi kewajiban pelayanan universal (universal service obligation/USO) menjadi broadband-ready dengan cara reformulasi kebijakan penggunaan dana USO yang lebih berorientasi kepada ekosistem broadband (tidak hanya untuk penyediaan infrastruktur dan daerah perdesaan) dan memperkuat kelembagaan pengelola dana USO
7. Mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas
8. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband termasuk di daerah perbatasan negara
9. Mempercepat implementasi e-government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective
10. Mendorong tingkat literasi dan inovasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
11. Meningkatkan penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis
12. Meningkatkan kinerja sektor-sektor unggulan

Arah kebijakan untuk mencapai target Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industry inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi adalah :

1. Peningkatan, rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas ekonomi
2. Pembangunan jaringan jalan baru untuk menunjang aktivitas ekonomi

**Program Tujuan 9.** Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMD 2016-2021 antara lain terkait dengan :

1. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
2. Program Penggantian dan Pemeliharaan Jembatan Tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah
3. Program Peningkatan/Pembangunan Jalan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

Target Indikator Serta program dan kegiatan Tujuan 9 TPB/SDGs yang dilaksanakan dapat di lihat pada daftar terlampir.



### 3.10 Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Tujuan 10 yaitu “mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara” terdiri dari 10 target dan 11 indikator. Target-target dari Tujuan 10 meliputi mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab.

**Kebijakan Tujuan 10.** Dalam waktu yang hampir bersamaan dengan dimulainya TPB/SDGs, Pemerintah Indonesia juga menaruh perhatian lebih pada tren peningkatan kesenjangan<sup>21</sup> yang ada di Indonesia. Pengurangan kesenjangan menjadi salah satu target dalam dokumen utama perencanaan Pemerintah saat ini, yaitu RPJMN 2015-2019. Target pengurangan ketimpangan, dalam hal ini diukur dengan Koefisien Gini, menurun dari 0,41 di tahun 2014 menjadi 0,36 pada tahun 2019. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, target Koefisien Gini ditetapkan menjadi 0,38. Kebijakan penurunan ketimpangan dianggap memiliki implikasi jangka panjang yang baik untuk pertumbuhan ekonomi maupun stabilitas sosial. Jurang pendapatan yang semakin mengecil antara kelompok miskin dan kelompok sejahtera akan mampu mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dan juga menguatkan kohesi sosial di masyarakat.

Tiga isu utama kesenjangan yang berusaha diatasi oleh Pemerintah dan tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan pemerintah yaitu kesenjangan antarkelompok pendapatan, kesenjangan antarwilayah, dan kesenjangan kepemilikan aset tanah. Kebijakan untuk mengatasi tiga isu utama tersebut

perlu dipadukan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu melalui penguatan kebijakan ketenagakerjaan, peningkatan akses terhadap lahan dan modal bagi penduduk miskin dan rentan, peningkatan konektivitas antarwilayah terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta wilayah-wilayah tertinggal dan khusus pada kantong kemiskinan.

Dalam upaya penurunan ketimpangan antarkelompok pendapatan, kebijakan diarahkan untuk melakukan intervensi terutama bagi tiga kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada di bawah 40 persen berpendapatan terendah, yaitu petani (termasuk petani perkebunan dan nelayan), pekerja tidak penuh termasuk pekerja rentan, usaha mikro dengan pekerja keluarga, serta penduduk miskin tanpa kepemilikan aset. Penguatan kapasitas bagi masyarakat rentan tersebut dilakukan dengan strategi dan pendekatan yang komprehensif melalui pembekalan lima aset penting untuk dapat mandiri secara berkesinambungan, yaitu aset sumber daya alam, kohesi sosial, sarana dan prasarana, akses terhadap pembiayaan (finansial), penguatan sumber daya manusia; peningkatan akses terhadap lahan dan aset produktif bagi masyarakat (baik petani maupun nelayan budi daya) kurang mampu, peningkatan keterampilan dan keahlian melalui penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan/keahlian terutama pada sektor prioritas dan industri unggulan.

Kebijakan peningkatan pemerataan antarkelompok pendapatan juga diarahkan dengan menciptakan pertumbuhan inklusif. Arah kebijakan tersebut didukung dengan strategi seperti:

1. Peningkatan kualitas kebijakan fiskal melalui perbaikan sistem perpajakan yang memastikan kuintil teratas membayar pajak dengan semestinya, peningkatan *collection rate*, serta redistribusi sistem pendapatan yang merata.
2. Menciptakan pertumbuhan yang memihak kepada seluruh lapisan masyarakat (termasuk infrastruktur, sistem pajak berkeadilan yang mendukung redistribusi);
3. Memperbesar investasi padat pekerja;
4. Memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro;
5. Menyelenggarakan perlindungan sosial yang komprehensif;



6. Memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu;
7. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan dan kelautan perikanan;
8. Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi dengan membangun instrumen untuk menekan harga terutama bahan makanan serta melakukan verifikasi harga di pasar; dan
9. Meningkatkan keterampilan dan keahlian masyarakat melalui penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan/ keahlian terutama pada sektor prioritas dan industri unggulan.

Selain itu, kebijakan afirmatif yang secara khusus difokuskan untuk pemerataan antarkelompok pendapatan dan percepatan penurunan kemiskinan dilakukan melalui berbagai upaya terpadu berdasarkan tiga isu strategis, meliputi: (1) Penyempurnaan sistem perlindungan sosial yang komprehensif untuk mempertahankan daya beli dan menjaga tingkat pertumbuhan konsumsi; (2) Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan kehidupan terhadap berbagai guncangan ekonomi dan sosial; serta (3) Pengembangan penghidupan berkelanjutan untuk menumbuhkan kemampuan ekonomi produktif berdasarkan lima aset dasar yang dimiliki (aset alam, SDM, fisik, finansial, dan sosial).

Upaya tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dua sasaran utama, meliputi sasaran individu, keluarga, dan rumah tangga (*individual targeting*) untuk mengurangi ketimpangan individu dan sasaran wilayah (*geographic targeting*) dalam rangka mengurangi ketimpangan antarwilayah

Strategi untuk mencapai target Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara adalah :

1. Peningkatan kerjasama cluster kewilayahan dan eksplorasi potensi wilayah
2. Peningkatan penyerapan tenaga kerja miskin dan rentan produktif ke dalam sektor industri pengolahan unggulan / IKM.
3. Pengembangan aktivitas rantai pengolahan yang bersifat penambahan nilai (*value added*) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal dan komoditas unggulan berbasis agro industri

4. Perbaiki rantai distribusi komoditas unggulan yang berpihak kepada petani kecil
5. Pengembangan ekonomi lokal di pulau-pulau terluar berbasis potensi alam daerah setempat.
6. Meningkatkan kualitas, produktivita, kompetensi tenaga kerja, dan memperluas kesempatan kerja

Arah kebijakan untuk mencapai target Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara adalah :

1. Peningkatan akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja di sektor formal melalui pengembangan jejaring informasi pasar kerja, program AYO KERJA (bursa kerja online) , job fair, magang kerja, agar dapat meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
2. Pengembangan usaha produktif melalui kewirausahaan untuk menciptakan tenaga kerja mandiri (NAKERMAN) dan Desa Migran Produktif
3. Optimalisasi dan pengembangan kapasitas dan pendayagunaan UPT Pelatihan Kerja (Balai Latihan Kerja) menuju standar internasional, serta perluasan skala pelatihan keterampilan tenaga kerja yang berkualitas berbasis kompetensi serta penempatan alumni siswa UPT BLK melalui Bursa Kerja Khusus.
4. Strategi untuk menarik pekerja ke sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi serta mendukung "link and match" antara calon pekerja dan perusahaan dalam rangka melakukan perluasan dan penempatan tenaga kerja
5. Peningkatan pelatihan keterampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, untuk melakukan usaha produktif
6. Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang akan, dan sedang bekerja di luar negeri melalui pembinaan, perlindungan dan pengawasan terpadu serta melakukan fasilitasi dan pembinaan di sektor Penempatan TKI formal maupun informal

**Program Tujuan 10.** Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMD 2015-2019 antara lain terkait dengan :

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Target Indikator Serta program dan kegiatan Tujuan 10 TPB/SDGs yang dilaksanakan dapat di lihat pada daftar terlampir.



### 3.11 Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Tujuan 11 TPB/SDGs adalah menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 34 indikator. Target-target tersebut antara lain meliputi pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

**Kebijakan Tujuan 11.** Kebijakan pembangunan nasional untuk Tujuan 11 seperti yang tercantum di dalam RPJMN 2016-2021 tercakup dalam bidang: (1) pembangunan perkotaan; (2) pembangunan perumahan dan permukiman; (3) transportasi; serta (3) penanganan perubahan iklim dan peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.

Kebijakan Pembangunan Perkotaan, antara lain: (1) perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); (2) percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); (3) pembangunan kota hijau dan berketahanan iklim dan bencana; (4) pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; (5) peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan; dan (6) pengembangan wilayah perkotaan metropolitan dan besar, perkotaan sedang dan kecil, kota pusaka berbasis karakter sosial budaya, serta kawasan perkotaan di kabupaten.

Kebijakan pembangunan transportasi perkotaan, antara lain: (1) mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu; (2) meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kota; serta (3)

mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan. Kebijakan penanganan perubahan iklim dan peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan, antara lain: (1) penanganan perubahan iklim dan peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan: dan (2) penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana.

Strategi untuk mencapai target Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan adalah :

1. Perwujudan sistem perkotaan nasional (SPN)
2. percepatan pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni
3. Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana
4. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal
5. Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan
6. Meningkatkan penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis
7. Memperkuat tata kelola kelembagaan pemerintahan, koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca bencana)

Arah kebijakan untuk mencapai target Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan adalah :

1. Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air minum dengan harga terjangkau serta sanitasi yang layak
2. Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah
3. Peningkatan pelayanan perhubungan dan keselamatan transportasi
4. Pemenuhan sarana prasarana perhubungan dan peran serta masyarakat dan swasta
5. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang berbasis tata kelola pemerintahan, responsiv, transparan dan akuntabel.
6. Menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana.

7. Peningkatan pengembangan mekanisme perlindungan bagi masyarakat dari dampak bencana alam.
8. Pemenuhan kebutuhan pada saat status darurat bencana yang pendanaannya dialokasikan khusus untuk BPBD yang dititipkan melalui dana BTT (BPKAD) dan pencairannya melalui SK Status Keadaan Darurat Bencana.

**Program Tujuan 11.** Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMD 2016-2021 antara lain terkait dengan :

1. Program Terealisasinya Perencanaan tata Ruang Yang Akomodif dan Konsisten
2. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
3. Program Pengembangan Perumahan
4. Program Pertanahan Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan
6. Program Perencanaan Ketersediaan Lahan Perkotaan dan Perdesaan

Target Indikator Serta program dan kegiatan Tujuan 11 TPB/SDGs yang dilaksanakan dapat di lihat pada daftar terlampir.



### 3.12 Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

Tujuan 12 TPB/SDGs adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pada tahun 2030, ditetapkan 11 target yang diukur melalui 19 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pencapaian pelaksanaan 10 tahun kerangka kerja konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, serta pencapaian praktek usaha berkelanjutan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Penerapan SCP diperkuat dalam dokumen RPJMN 2015-2019 dengan masuknya penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan sebagai Agenda Pasca 2015 dan Perubahan Iklim, dan Agenda Pembangunan Nasional dengan arah kebijakan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan sebagai upaya efisiensi penggunaan sumberdaya dan pengurangan beban pencemaran terhadap lingkungan hidup serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Langkah ini didukung dengan kebijakan operasional:

1. Perubahan pola produksi dan konsumsi serta gaya hidup masyarakat melalui edukasi, kampanye;
2. Penerapan prinsip-prinsip pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dalam *business cycle* dan *business process*;
3. Pengembangan standar produk yang ramah lingkungan; dan
4. Pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi yang berkelanjutan

Selanjutnya, kebijakan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan juga diatur dalam Agenda Pembangunan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan arah kebijakan:

1. Menerapkan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dengan peningkatan kesadaran dan kapasitas para pihak terhadap pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;

2. Penyusunan konsep kebijakan operasional pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dan pengembangan sistem pendukungnya; dan
3. Penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan di sektor-sektor prioritas, serta pola konsumsi masyarakat yang berkelanjutan.

Adapun kebijakan operasional yang akan ditempuh yakni melalui:

1. Inventarisasi dan sinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas terkait dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
2. Penyediaan dan penyebaran informasi ketersediaan produk ramah lingkungan bagi konsumen/masyarakat melalui berbagai media;
3. Penyediaan pusat-pusat pelayanan masyarakat;
4. Penerapan prinsip-prinsip SCP dalam “*business cycle*” dan “*business process*” di pihak pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk dalam hal pendanaan;
5. Menggalakkan penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi limbah;
6. Pengembangan standar produk ramah lingkungan yang terukur; dan
7. Pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan.

Khusus terkait dengan upaya penerapan Program Proper, Pengelolaan B3 dan Sampah, pada RPJMN 2015-2019 terdapat arah kebijakan:

1. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, yang dilakukan salah satunya melalui kebijakan operasional: memperluas cakupan program Proper yang mengarah pada industri yang lebih ramah lingkungan;
2. Mengelola limbah dan bahan B3, melalui kebijakan operasional: (a) menerapkan standar/aturan mengenai limbah dan bahan B3; dan (b) memperkuat pengawasan limbah dan bahan B3.
3. Meningkatkan pengelolaan sampah yang terpadu, melalui kebijakan operasional: (a) pengembangan upaya 3R (*reduce, reuse, dan recycle*); (b) pengembangan bank sampah dan pengomposan; (c) pengembangan sistem pengolahan sampah yang terpadu, baik skala komunal maupun nasional; (d) peningkatan kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui “Gerakan Tiga Jari” pengelolaan sampah.



Strategi untuk mencapai target Menjamin produksi dan konsumsi yang berkelanjutan adalah :

1. Inventarisasi dan sinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas terkait dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan
2. Menggalakkan penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan mengurangi limbah
3. Penyebaran informasi ketersediaan produk ramah lingkungan bagi konsumen/ masyarakat mengenai manfaat produk tersebut
4. Pengembangan standar produk ramah lingkungan yang terukur
5. Pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan.
6. Meningkatkan penanganan kerusakan lingkungan akibat pembangunan

Arah kebijakan untuk mencapai target Menjamin produksi dan konsumsi yang berkelanjutan adalah :

1. Penguatan mekanisme pemantauan & sistem informasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan penyelesaian peraturan, sengketa, kasus, tindak pidana serta perdata lingkungan secara tuntas.
2. Peningkatan kualitas air dan kualitas udara
3. Peningkatan tutupan lahan/hutan, melalui penguatan upaya rehabilitasi hutan, peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan, rehabilitasi lahan kritis/terlantar, pengendalian kerusakan ekosistem dan pemulihan tutupan lahan/hutan, kawasan bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3 serta kawasan pesisir dan laut.
4. Pengelolaan bahan berbahaya & beracun (B3)

**Program Tujuan 12.** Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMD 2015-2019 antara lain terkait dengan :

1. Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah
2. Program Penumbuhan Industri agro, pertambangan, kehutanan dan perikanan

Target Indikator Serta program dan kegiatan Tujuan 12 TPB/SDGs yang dilaksanakan dapat di lihat pada daftar terlampir.



### 3.13 Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan 13 TPB/SDGs adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 8 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pengurangan risiko bencana (PRB), pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

**Kebijakan Tujuan 13.** Kebijakan dalam rangka mendukung TPB - Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim (Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya), telah tertuang dalam RPJMN 2015-2019, baik dalam Agenda Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Bidang, serta terinternalkan dalam pembangunan sektor. Selain itu, penanganan perubahan iklim juga dimuat dalam Pembangunan Lintas Bidang.

Sasaran (target) yang ingin dicapai pada penanganan perubahan iklim dan kebencanaan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penanganan perubahan iklim, baik berupa kegiatan mitigasi untuk menurunkan emisi GRK sebesar mendekati 26% pada tahun 2019 di lima sektor prioritas, yaitu: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, maupun kegiatan adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di 15 (lima belas) daerah rentan;
2. Meningkatnya sistem peringatan dini cuaca dan iklim, serta kebencanaan;
3. Tersedianya data dan informasi untuk mendukung penanganan perubahan iklim;
4. Meningkatnya kecepatan dan akurasi data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG); dan

5. Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dalam penanganan perubahan iklim dan penyediaan informasi iklim dan informasi kebencanaan adalah:

1. Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim, melalui kebijakan operasional: (i) mengembangkan dan mendukung pelaksanaan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon; (ii) melaksanakan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mengurangi/menurunkan emisi GRK; (iii) melaksanakan inventarisasi GRK yang berkesinambungan; (iv) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK; (v) mendorong pemerintah daerah menyusun strategi/rencana aksi adaptasi berdasarkan dokumen RAN-API dan kajian kerentanan daerah; (vi) melaksanakan upaya adaptasi berdasarkan dokumen Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), terutama di 15 (lima belas) daerah rentan; dan (vii) meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait dengan perubahan iklim.
2. Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana), melalui kebijakan operasional: (i) menambah kerapatan jaringan peralatan dan sensor; (ii) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia/*forecaster*; (iii) mengembangkan sarana/media komunikasi/diseminasi informasi peringatan dini; (iv) melakukan perawatan dan kalibrasi peralatan secara rutin; (v) meningkatkan koordinasi dan sinergisitas informasi peringatan dini gempa bumi dan tsunami antarinstansi terkait; dan (vi) meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam memahami informasi peringatan dini.
3. Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan, melalui kebijakan operasional: (i) mempercepat pengolahan data iklim secara terus menerus dan akurat; (ii) mendiseminasikan data dan informasi iklim kepada para pemangku kepentingan; dan (iii) mengembangkan proyeksi iklim untuk

seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung penanganan perubahan iklim; dan

4. Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi MKG yang mudah diakses dan berkesinambungan, melalui kebijakan operasional: (i) meningkatkan kualitas data dan informasi melalui instalasi peralatan otomasi/digital; (ii) meningkatkan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi yang mendukung kelancaran dan keselamatan penerbangan dan maritim, serta mendukung ketahanan pangan dan energi; (iii) memperkuat database MKG yang terintegrasi dan memperluas jaringan diseminasi informasi MKG; (iv) menambah kerapatan jaringan peralatan dan sensor peralatan MKG; dan (5) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola data dan informasi MKG.

Selanjutnya, khusus untuk penanggulangan bencana, arah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 adalah untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kebijakan operasional untuk penanggulangan bencana meliputi:

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah, melalui: pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah; pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap bencana; pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota; integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan reviu RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota; harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah; penyusunan rencana kontijensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.

2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui upaya antara lain: mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan; meningkatkan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi; menyediakan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat; meningkatkan kerja sama internasional, mitra pembangunan, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam; memelihara dan menata lingkungan di daerah rawan bencana alam; dan membangun serta menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.
3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui: penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penang-gulangan bencana di pusat dan daerah; penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana; penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik; pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; pelaksanaan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana; penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (*shelter*/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana; pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan pasca bencana; pengembangan Desa Tangguh Bencana di kawasan risiko tinggi bencana untuk mendukung Gerakan Desa Hebat; dan peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui

pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau, yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil.

Lebih jauh lagi, khusus untuk perubahan iklim, terdapat sasaran dan arah kebijakan dalam pembangunan lintas bidang yaitu:

1. Menurunnya emisi GRK untuk lima sektor prioritas: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, mendekati 26% pada tahun 2019.
2. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, khususnya terlaksananya langkah-langkah di 15 (lima belas) daerah rentan, yang merupakan daerah percontohan pelaksanaan RAN-API.

Sedangkan arah kebijakan Pembangunan Perubahan Iklim, yakni

1. Memperkuat koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan RAN/RAD-GRK, dengan kebijakan operasional: (i) meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim untuk sektor utama, melalui pelaksanaan kegiatan pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan, pencegahan penurunan dan peningkatan serapan karbon di bidang kehutanan, pemanfaatan energi terbarukan, diversifikasi bahan bakar, efisiensi dan konservasi energi, serta pengelolaan sampah domestik; (ii) meningkatkan pelibatan sektor-sektor terkait baik di pusat maupun di daerah untuk melaksanakan kegiatan penurunan emisi (RAN/RAD-GRK), dan pengalokasian pendanaannya; (iii) meningkatkan kontribusi swasta dan masyarakat dalam penurunan emisi GRK; (iv) mengembangkan insentif fiskal dan pengelolaan pendanaan hibah untuk penanganan perubahan iklim, termasuk melalui Lembaga Wali Amanah Perubahan Iklim (ICCTF); dan (v) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAN/RAD-GRK.
2. Menerapkan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) secara sinergis, terutama pelaksanaan upaya adaptasi di 15 daerah percontohan, dengan kebijakan operasional: (i) mengarusutamakan RAN-API ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah; (ii) melaksanakan rencana aksi adaptasi perubahan iklim seperti yang tercantum dalam RAN-API secara terkoordinasi antara K/L dan pemerintah daerah serta antar daerah; (ii) mengembangkan indikator kerentanan dan memperkuat proyeksi dan sistem informasi iklim dan cuaca; (iii) menyusun

kajian kerentanan dan meningkatkan ketahanan (resiliensi) pada sektor yang sensitif serta pelaksanaan upaya adaptasi di daerah percontohan; (iv) mensosialisasikan RAN-API kepada pemerintah daerah dan meningkatkan kapasitas daerah dalam upaya adaptasi; dan (v) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi, khususnya di 15 daerah percontohan.

Strategi untuk mencapai target Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya adalah

1. Peningkatan pelibatan sektor baik di pusat maupun di daerah untuk melaksanakan kegiatan penurunan emisi dan pengalokasian pendanaannya;
2. Standarisasi kegiatan penurunan emisi di setiap sektor.,
3. Meningkatkan kontribusi swasta dan masyarakat dalam penurunan emisi GRK;
4. Pengembangan dan penerapan insentif fiskal;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAN/RAD-GRK dan adaptasi;
6. Pelaksanaan kegiatan dan rencana aksi terkait dengan REDD+, baik yang berdampak langsung, maupun tidak langsung pada penurunan emisi GRK;
7. Pengembangan indeks dan indikator kerentanan, serta penguatan sistem informasi iklim dan cuaca;
8. Pelaksanaan kajian kerentanan dan peningkatan ketahanan (resiliensi) pada sektor yang sensitive serta pelaksanaan pilot adaptasi;
9. Sosialisasi RAN-API dan peningkatan kapasitas daerah dalam upaya adaptasi.
10. Memperkuat tata kelola kelembagaan pemerintahan, koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca bencana)

Arah kebijakan untuk mencapai target Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya adalah Revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, termasuk mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan penggunaan dan penyebaran narkoba, serta terorisme

**Program Tujuan 13.** Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMD 2016-2021 antara lain terkait dengan Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

1. Program Pencegahan Bencana
2. Program Pencegahan, Pengendalian Kebakaran hutan

Target Indikator Serta program dan kegiatan Tujuan 13 TPB/SDGs yang dilaksanakan dapat di lihat pada daftar terlampir.





### 3.14 Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Tujuan 14 TPB/SDGs adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem lautan pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 15 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan, penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman (MSY) dan pemberantasan IUU *fishing*, peningkatan kawasan konservasi perairan dan pemanfaatan berkelanjutan, serta dukungan dan perlindungan nelayan kecil. Upaya-Upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

**Kebijakan Tujuan 14.** Kebijakan pengelolaan ekosistem lautan yang dilakukan pemerintah telah termuat dalam RPJMN 2016-2021 yang merupakan bagian dari prioritas pembangunan nasional dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Prioritas pembangunan nasional ini diwujudkan dalam bentuk agenda pembangunan nasional terkait pengembangan ekonomi maritim dan kelautan.

Tujuan 14 Ekosistem Lautan merupakan bagian dari pembangunan nasional bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam rangka pemeliharaan sumber daya sebagai aset pembangunan nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan, serta peningkatan produksi dan kesejahteraan nelayan, arah kebijakan pembangunan terkait pengelolaan Tujuan 14 - Ekosistem Lautan difokuskan pada dua arah kebijakan utama, yaitu: (1) peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan; serta (2) peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan/pengolah dan

pemasar hasil perikanan/petambak garam. Arah kebijakan tersebut, dilaksanakan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola sumber daya kelautan, termasuk upaya penataan ruang laut dan harmonisasinya;
2. Meningkatkan konservasi, rehabilitasi dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut, dengan strategi, termasuk penambahan luasan kawasan konservasi perairan dan penguatan kelembagaan serta efektivitas pengelolaannya;
3. Mengendalikan IUU *fishing* dan kegiatan yang merusak di laut;
4. Memperkuat peran SDM dan iptek kelautan serta budaya maritim.
5. Meningkatkan produktivitas, optimalisasi kapasitas dan kontinuitas produksi perikanan, termasuk alokasi yang proporsional antara stok sumber daya ikan, serta penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan yang efisien dan ramah lingkungan;
6. Mengelola perikanan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya ikan (SDI) berbasis WPP, pemberantasan IUU *fishing*, hingga pemanfaatan potensi ZEE dan laut lepas (*high seas*);
7. Memperbaiki tata kelola perikanan, untuk terciptanya iklim yang kondusif guna mewujudkan kinerja, efektivitas kerja sama kelembagaan dan perbaikan tata kelola perikanan, yang dilakukan antara lain melalui reformasi pengelolaan perikanan tangkap berbasis WPP;

Strategi untuk mencapai target Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan Samudra untuk pembangunan berkelanjutan adalah :

1. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung konektivitas laut;
2. Peningkatan sdm, iptek, wawasan dan budaya bahari;
3. Peningkatan tata kelola dan pengamanan wilayah yurisdiksi dan batas laut Indonesia;
4. Peningkatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan pengendalian kegiatan illegal;
5. Pengelolaan pulau-pulau kecil, terutama pulau-pulau terluar. pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar; (6) peningkatan pengamanan pesisir dan konservasi perairan

Arah kebijakan untuk mencapai target Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan Samudra untuk pembangunan berkelanjutan adalah : Pengembangan sarana prasarana dan kapasitas nelayan, serta usaha ekonomi produktif masyarakat kawasan pesisir, dan kepulauan.

**Program Tujuan 14.** Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMD 2016-2021 antara lain terkait dengan :

1. Program Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir
  2. Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- Target Indikator Serta program dan kegiatan Tujuan 14 TPB/SDGs yang dilaksanakan dapat di lihat pada daftar terlampir.



### 3.15 Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Tujuan 15 TPB/SDGs adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem daratan pada tahun 2030, ditetapkan 12 target yang diukur melalui 25 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, penegakan hukum bidang lingkungan hidup, karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

**Kebijakan Tujuan 15.** Kebijakan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan yang tercantum dalam RPJMN 2016-2021 terdiri dari kebijakan tata kelola hutan, peningkatan konservasi dan keanekaragaman hayati, pelestarian dan pemanfaatan nilai ekonomi hayati, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Tata Kelola Kehutanan. Tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*) menjadi prinsip dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Untuk menuju hal tersebut, arah kebijakan sektor kehutanan adalah mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, pembentukan dan operasionalisasi KPH, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan mempermudah perizinan dalam melakukan investasi di sektor kehutanan.

Kerangka regulasi yang diperlukan, yaitu:

1. Perbaikan tata kelola hutan mengindikasikan perlunya revisi PP No. 6/2007 jo. PP No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Permenhut No. P.44/Menhut-II/2012 jo. Permenhut P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, Permenhut No. P.36/Menhut-1I/2010 tentang Tim Terpadu dalam rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Permenhut No. P.34/Menhut-II/2010 jo. PermenLHK No. P.16/MenLHK-II/2015 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Permenhut No. P.32/Menhut-II/2010 jo. Permenhut No. P.XX/Menhut-II/2012 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.
2. Revisi PP No. 38/2007 tentang Pembagian Wewenang Pusat-Daerah Bidang Kehutanan perlu dilakukan untuk meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pengelolaan sumber daya hutan dalam rangka pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
3. Tindak lanjut UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terkait dengan lembaga dan pengangkatan hakim perkara.
4. PP No. 104/2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagai pengganti PP No. 10/2010; serta PP No. 105/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagai tindak lanjut UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dalam rangka pembenahan peraturan penggunaan kawasan hutan.

Peningkatan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati. Untuk mencapai sasaran pengelolaan kawasan hutan konservasi yang telah ditetapkan selama 2016-2021, arahkebijakan yang ditetapkan adalah memberikan kewenangan dan keleluasan bagi pengelola kawasan hutan konservasi di tingkat tapak untuk melindungi, meningkatkan kualitas habitat, mengawetkan spesies serta sumber daya genetik dan mendorong terselenggaranya pemanfaatan jasa lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dan di

dalam kawasan hutan konservasi. Beberapa kerangka regulasi yang diperlukan, yaitu:

1. Revisi terhadap UU No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
2. Turunan regulasi yang mengatur tentang jasa lingkungan dari hutan dan kawasan konservasi pada khususnya.
3. Sinkronisasi antara peraturan mengenai kehutanan dan minerba dalam pemanfaatan panas bumi di kawasan konservasi (Revisi PP No. 28/2011 Tentang Pengelolaan KSA dan KPA sebagai turunan UU No. 2/1990).
4. Peraturan turunan dari *Protocol Cartagena* yang mengatur perlindungan dari keanekaragaman hayati meliputi perpindahan lintas batas, persinggahan, penanganan dan pemanfaatan semua Organisme Hasil Modifikasi Genetik yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati.

Melestarikan dan Memanfaatkan Nilai Ekonomi Kehati. Kerangka regulasi yang diperlukan: dalam mendukung upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan serta pelestarian dan pemanfaatan keekonomian kehati, yaitu: percepatan penyelesaian dan pengesahan Rancangan Undang-undang mengenai Pengelolaan Sumber Daya Genetik, sebagai tindak lanjut dan upaya koordinasi penerapan ratifikasi Protokol Nagoya (2010) dan *Convention on Biological Diversity* (CBD) di Indonesia.

Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup. Penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri, (2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, (5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut, saling terkait, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan faktor tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan

melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pilar penting dalam kegiatan penegakan hukum setelah sanksi administrasi, dan penegakan hukum perdata.

Strategi untuk mencapai target Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasilahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati adalah

1. Peningkatan instrumen penegakan hukum;
2. peningkatan efektivitas penegakan hukum;
3. peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan
4. Meningkatkan kinerja sektor-sektor unggulan

Arah kebijakan untuk mencapai target Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasilahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati adalah : Perluasan areal hutan rakyat, dan pemanfaatan lahan bawah tegakan, sekitar hutan, serta pengembangan usaha non-kayu di kawasan hutan

**Program Tujuan 15.** Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMD 2016-2021 antara lain terkait dengan :

1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan
2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Target Indikator Serta program dan kegiatan Tujuan 15 TPB/SDGs yang dilaksanakan dapat di lihat pada daftar terlampir.



### 3.16 Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 16 berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (*Peace*), terwujudnya penegakan keadilan (*Justice*) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (*Strong institutions*). Tujuan 16 memiliki 12 (dua belas) target dengan 34 indikator TPB/SDGs yang ingin dicapai pada tahun 2030.

Target yang akan dicapai adalah mengurangi tindak kekerasan yang berakibat kematian serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindakan kekerasan, penegakan hukum, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta terwujudnya akses pada keadilan melalui pemenuhan hak warga negara atas kepemilikan akta kelahiran. Lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif merupakan modal utama tercapainya pembangunan yang merata. Target yang akan dicapai dilaksanakan melalui pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas lembaga pemerintahan serta pelayanan kepada publik, dan menjaga iklim demokrasi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan Tujuan 16.

Target yang akan dicapai adalah mengurangi tindak kekerasan yang berakibat kematian serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindakan kekerasan, penegakan hukum, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta terwujudnya akses pada keadilan melalui pemenuhan hak warga negara atas kepemilikan akta kelahiran. Lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif merupakan modal utama tercapainya pembangunan yang merata. Target yang akan dicapai dilaksanakan melalui pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas lembaga pemerintahan serta pelayanan kepada publik, dan menjaga iklim demokrasi. Upaya-upaya yang



dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan Tujuan 16.

**Kebijakan Tujuan 16.** Tujuan 16 difokuskan pada tiga sasaran utama berikut: (1) secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait pembunuhan; (2) menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua; dan (3) mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan.

Dalam rangka untuk mencapai ketiga sasaran utama dari Tujuan 16 arah kebijakan berdasarkan RPJMN 2016-2021 yang selaras adalah:

**Pertama**, arah kebijakan untuk mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian meliputi: (1) meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dan mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup; (2) menguatkan sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; (3) meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak; dan (4) meningkatkan kualitas penegakan hukum, melalui peningkatan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana dan pelaksanaan sistem peradilan anak.

**Kedua**, arah kebijakan terkait jaminan kesamaan akses pada keadilan adalah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM melalui penegakan HAM, optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan pendidikan HAM.

**Ketiga**, arah kebijakan untuk mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat, meliputi: (1) peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, melalui efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi yang fokus kepada upaya pencegahan korupsi; (2) penerapan pengawasan yang independen, professional dan sinergis; (3) peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan; (4) peningkatan proses yang adil melalui transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa; (5) penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya; (6) penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang

efektif; (7) penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan; (8) meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil; (9) membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; (10) mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya; serta (11) menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan.

**Program Tujuan 16.** Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 16 TPB/SDGs, program yang terkait dengan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian dimanapun yang akan dilaksanakan kementerian/lembaga antara lain: (1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) perlindungan anak; (3) penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Upaya menggalakkan negara berdasarkan hukum dan akses yang sama terhadap keadilan bagi semua, beberapa program yang akan dilaksanakan ialah: (1) program pembinaan hukum nasional; (2) program peningkatan manajemen peradilan agama; (3) program peningkatan manajemen peradilan umum; (4) program penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; serta (5) program peningkatan pemajuan dan penegakan HAM.

Program untuk mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat, yang akan dilaksanakan yaitu: (1) program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; (2) program pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; (3) program pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah; (4) program bina otonomi daerah; (5) program pengawasan pelayanan publik; (6) program bina pembangunan daerah; (7) program pembinaan politik dan pemberdayaan pemerintah umum; (8) program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik; (9) program pengawasan penyelenggaraan pemilu; (10) program peningkatan koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan; (11) program perluasan pelayanan dasar; (12) program pemberantasan tindak pidana korupsi;

Strategi untuk mencapai target Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan adalah:

1. Mempromosikan proses pembangunan yang inklusif;
2. Menghormati hak-hak semua kelompok sosial-budaya, minoritas, masyarakat adat, agama;
3. Melestarikan seluruh budaya warisan dan sumber daya alam dan
4. Menghormati hak mereka untuk menentukan dan mewujudkan aspirasi pembangunannya.
5. Meningkatkan manajemen Aparatur Sipil Negara secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional

Arah kebijakan untuk mencapai target Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan adalah:

1. Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi, kesusulaan dan kepentingan umum
2. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu
3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat
4. Penguatan aksi anti-korupsi, dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
5. Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik
6. Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan
7. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia di dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum

8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan dan ketertiban melalui mekanisme *community policing*
9. Optimalisasi pencegahan terhadap pelanggaran Perda melalui peningkatan pengetahuan masyarakat serta penguatan aparatur penegakan perda

**Program Tujuan 16.** Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMD 2016-2021 antara lain terkait dengan :

1. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
2. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah
3. Program Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Pemberantasan KKN
4. Program Pendidikan Kedinasan
5. Program pembinaan dan pengembangan Aparatur
6. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
7. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9. Program Peningkatan dan Pembangunan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah)
10. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Target Indikator Serta program dan kegiatan Tujuan 16 TPB/SDGs yang dilaksanakan dapat di lihat pada daftar terlampir.



### 3.17 Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Tujuan 17 pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Hal ini tercermin dari TPB/SDGs 17 yang memiliki target dan indikator yang cukup luas dan beragam dengan 19 target, 25 indikator global yang di Indonesia dijabarkan ke dalam 32 indikator. Target Tujuan 17 terdiri atas (i) mobilisasi sumber daya domestik; (ii) kerjasama multipihak termasuk kemitraan global dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta; (iii) peningkatan dan saling berbagi dalam bidang teknologi khususnya informasi dan komunikasi; (iv) perdagangan internasional yang menitikberatkan pada ekspor dan peranannya dalam stabilitas makroekonomi; dan (v) monitoring, akuntabilitas serta ketersediaan data. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Target Tujuan 17 terdiri atas (i) mobilisasi sumber daya domestik; (ii) kerjasama multipihak termasuk kemitraan global dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta; (iii) peningkatan dan saling berbagi dalam bidang teknologi khususnya informasi dan komunikasi; (iv) perdagangan internasional yang menitikberatkan pada ekspor dan peranannya dalam stabilitas makroekonomi; dan (v) monitoring, akuntabilitas serta ketersediaan data. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

**Kebijakan Tujuan 17.** Tujuan 17 meliputi beberapa kluster kebijakan penting yaitu: (1) mobilisasi sumberdaya domestik; (2) kerjasama multipihak termasuk kemitraan global dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta; (3) peningkatan dan saling berbagi dalam bidang teknologi khususnya informasi dan komunikasi; (4) perdagangan internasional yang menitikberatkan pada ekspor

dan peranannya dalam stabilitas makroekonomi; dan (5) monitoring, akuntabilitas serta ketersediaan data.

Arah kebijakan RPJMN 2016-2021 yang selaras untuk mencapai target-target Tujuan 17 adalah:

Pertama, arah kebijakan fiskal untuk meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik adalah reformasi kebijakan secara komprehensif dan optimalisasi penerimaan perpajakan. Reformasi kebijakan secara komprehensif tersebut dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu: (a) bidang administrasi, yakni melalui modernisasi administrasi perpajakan; (b) bidang peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap undang-undang perpajakan beserta peraturan perundang-undangan yang terkait; dan (c) bidang pengawasan, dengan membangun bank data perpajakan nasional. Adapun reformasi perpajakan secara komprehensif dan optimalisasi perpajakan dilakukan dengan penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai, serta optimalisasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selain itu, penerimaan negara yang berasal dari remitansi didukung oleh upaya memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja dengan perluasan jaringan cabang bank dan ATM bank untuk memudahkan rumah tangga pekerja migran menerima remitansi.

Dalam rangka pengelolaan anggaran negara, arah kebijakan dalam RPJMN 2016-2021 adalah meningkatkan kualitas belanja negara melalui sinergitas perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah.

Kedua, fokus utama dalam Tujuan 17 bidang kerjasama multipihak meliputi Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) dan KPBU. KSST merupakan bagian pembangunan bidang politik luar negeri dengan arah kebijakan pada RPJMN 2016-2021 yaitu meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular. Kebijakan operasional yang akan dilakukan adalah (a) intervensi kebijakan pengembangan KSST; (b) pengembangan dan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga yang menangani KSST; (c) pengembangan dan pemantapan *eminent persons group* untuk membantu pemangku kepentingan KSST; (d) 159 promosi KSST di tingkat nasional dan internasional; dan (e) pengembangan model insentif bagi K/L, swasta, dan

masyarakat sipil yang terlibat KSST. KSST akan dilakukan melalui beberapa cara, yaitu (i) penyusunan mekanisme pemberian fasilitasi dan insentif kepada sektor swasta untuk melaksanakan KSST. Saat ini sedang dikembangkan model insentif bagi swasta melalui kajian *Private Sectors Engagement*, (ii) mendorong pelibatan universitas dalam penyusunan kajian tentang KSST serta pemberian beasiswa kepada mahasiswa dari negara-negara Selatan di Indonesia, (iii) penguatan kerangka regulasi melalui penyusunan Peraturan Presiden tentang pemberian bantuan internasional dan penguatan kerangka pendanaan melalui pembentukan unit khusus yang menjalankan fungsi pendanaan, (iv) pengembangan skema kerjasama pembangunan yang inovatif berupa kerangka kerjasama pembangunan *Reverse Linkage*.

Dalam rangka mencapai sasaran peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta antara lain dengan meningkatkan skema pembiayaan pembangunan alternatif melalui skema KPBU. Arah kebijakan dalam RPJMN 2016-2021 yang terkait bidang ini adalah meningkatkan peran serta badan usaha dalam pembangunan infrastruktur melalui (1) pengarusutamaan skema KPS sebagai salah satu pendekatan pembangunan infrastruktur; (2) penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan KPS; (3) pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur; (4) peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan KPS; (5) pengembangan proyek dan daftar proyek (*Project Development and Pipelines*); (6) Kerjasama Pemerintah dan Swasta skala kecil dan menengah; (7) implementasi prinsip *Value for Money* (VFM); dan (8) realisasi proyek investasi swasta strategis.

Sedangkan kebijakan operasional dalam rangka mencapai sasaran Kerjasama Pemerintah Swasta yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2016-2021 yang selaras dengan program Kerjasama Pemerintah Swasta dalam RPJMN 2016-2021 antara lain (i) mengadopsi sistem penganggaran tahun jamak jangka panjang (lebih dari 5 tahun); (ii) mengkaji dan menguji-cobakan berbagai model KPBU berbasis pendanaan pemerintah (*innovative financing scheme*); (iii) mendorong peningkatan kapasitas pendanaan BUMN/BUMD; (iv) menyempurnakan mekanisme pemberian berbagai bentuk dukungan pemerintah termasuk *viability gap funding* (VGF); (v) penyediaan dana untuk dukungan dan jaminan pemerintah untuk proyek KPBU; dan (vi)

pembentukan fasilitas pembiayaan infrastruktur berupa pembentukan bank pembangunan/infrastruktur, dana amanah (*trust fund*) infastruktur dan instrumen pembiayaan lain khusus untuk mendorong proyek-proyek dengan skema KPBU.

Ketiga, arah kebijakan dalam RPJMN 2016-2021 yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran bidang perdagangan luar negeri adalah (1) memperkuat daya saing ekspor produk nonmigas dan jasa bernilai tambah tinggi untuk meningkatkan kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan; dan (2) mendorong kerja sama ekonomi internasional yang lebih selektif dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya melalui peningkatan ekspor, pariwisata, dan investasi.

Arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) kebijakan operasional yaitu: (i) menjaga dan meningkatkan pangsa pasar produk Indonesia di pasar ekspor utama (*market maintenance*); (ii) meningkatkan pangsa pasar ekspor di pasar prospektif (*market creation*); (iii) mengidentifikasi peluang pasar ekspor produk dan jasa potensial (*product creation*); dan (iv) meningkatkan fasilitasi ekspor dan impor untuk mendukung daya saing produk nasional (*export facilitation and import management*).

Keempat, arah kebijakan dalam RPJMN 2016-2021 terkait dengan peningkatan TIK dan konektivitas di bidang informatika: (1) mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal 160 (*Universal Service Obligation/USO*) menjadi pitalebar-*ready* dengan cara reformulasi kebijakan penggunaan dana USO yang lebih berorientasi kepada ekosistem pitalebar (tidak hanya untuk penyediaan infrastruktur dan daerah perdesaan) dan memperkuat kelembagaan pengelola dana USO; (2) mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas; (3) mendorong pembangunan akses tetap pitalebar, arah kebijakan ini didasarkan pada pembangunan infrastruktur *wireline* memanfaatkan kabel optik dapat membuat kualitas akses koneksi lebih bagus dibandingkan dengan *wireless broadband*; (4) membangun prasarana pitalebar di daerah perbatasan negara; (5) mendorong penggunaan pitalebar khususnya di sektor pemerintahan dan layanan publik; (6) mendorong tingkat



literasi TIK; dan (7) mendorong kemandirian dan daya saing industri TIK dalam negeri.

Kelima, sejalan dengan arah RPJMN 2015 - 2019 yang terkait dengan pembangunan statistik, arah kebijakan antara lain mencakup (i) peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas; (ii) peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta; (iii) meningkatkan hubungan dengan responden dan pengguna data; (iv) peningkatan jumlah dan kompetensi SDM statistik yang profesional, integritas, dan amanah; serta (v) peningkatan kualitas, kuantitas, dan penggunaan sarana dan prasarana TIK dalam kegiatan statistik.

Strategi untuk mencapai target Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan adalah :

1. Meningkatkan peran dan kontribusi Jatim terhadap Nasional dan global;
2. Meningkatkan kesiapan SDM dan produk domestic Jatim ;
3. Memperluas jarring kemitraan;
4. Meningkatkan promosi Jatim dan penghargaan terhadap keberagaman;
5. Meningkatkan kerjasama ekonomi regional antar wilayah se Jatim dan atau antar pulau di Indonesia dengan prinsip saling menguntungkan, bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Jatim serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan kinerja sektor-sektor unggulan
7. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian secara terpadu antar dan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
8. Meningkatkan kualitas data dan informasi

Arah kebijakan untuk mencapai target Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan adalah :

1. Peningkatan koordinasi integrasi dan sinkronisasi serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
2. Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku lokal bagi PMA

3. Peningkatan kapasitas pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan
4. Peningkatan cakupan substansi pameran investasi berskala domestik, nasional, dan internasional
5. Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan terkini

**Program Tujuan 17.** Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMD 2016-2021 antara lain terkait dengan :

1. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
2. Program Pengembangan pemasaran pariwisata

Target Indikator Serta program dan kegiatan Tujuan 17 TPB/SDGs yang dilaksanakan dapat di lihat pada daftar terlampir.

## BAB IV

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari waktu ke waktu. Sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi pada tingkat nasional maupun daerah, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan dilaksanakan untuk setiap pemangku kepentingan yang melaksanakan TPB/SDGs.

**Landasan Peraturan.** Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Tim Pelaksanaan TPB/SDGs yang ditetapkan dalam pasal 7 butir b Peraturan Presiden 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara itu, pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs diamanatkan pada pasal 17 Peraturan Presiden tersebut, yang menugaskan setiap Menteri/Kepala Lembaga dan Gubernur wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional. Khusus untuk pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan landasan hukum yang diacu untuk pelaksanaan kegiatan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Untuk organisasi nonpemerintah yaitu organisasi kemasyarakatan serta media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme tersendiri.

**Tujuan Pemantauan dan Evaluasi.** Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.

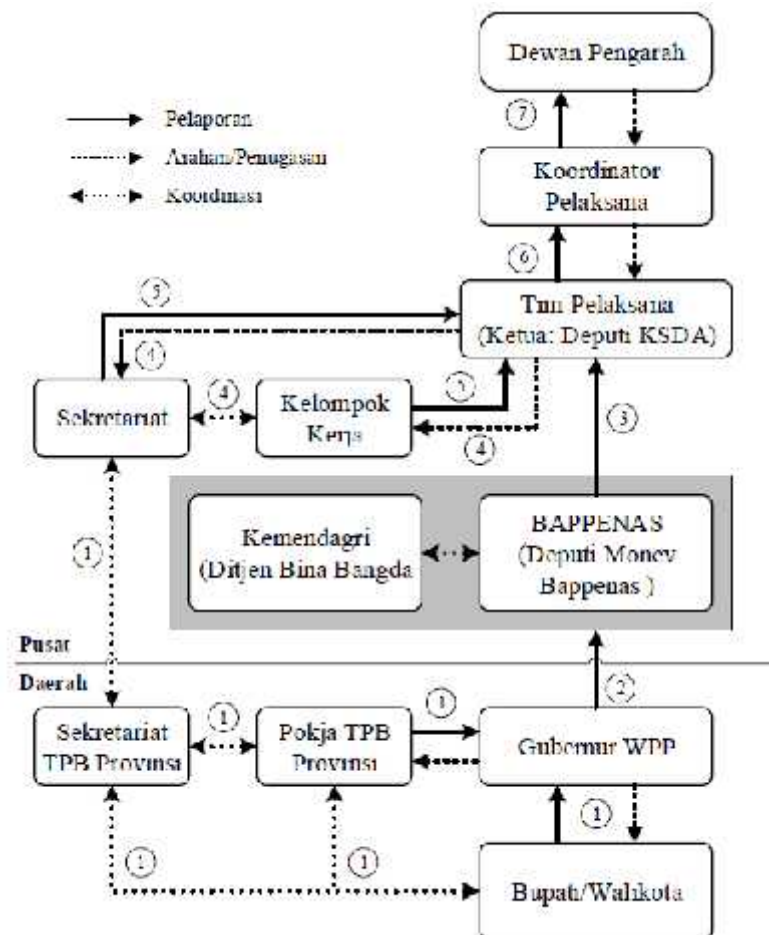
**Lingkup Pemantauan dan Evaluasi.** TPB/SDGs mencakup 17 tujuan global dan 94 target nasional yang selaras dengan target global yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Masing-masing target dilaksanakan oleh instansi pelaksana. Pencapaian 94 target nasional diukur dengan 319 indikator. Keseluruhan Tujuan, Target dan Indikator

tersebut dikategorikan ke dalam empat pilar. Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program-program yang dibiayai baik oleh APBN maupun APBD.

#### 4.1 Mekanisme Pemantauan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Amanat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB/SDGs dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 Perpres 59/2017. Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah, Gubernur bekerja bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Laporan pencapaian pelaksanaan Target TPB/SDGs di tingkat daerah disampaikan oleh Gubernur setiap tahun kepada Menteri PPN/BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga kepada Menteri Dalam Negeri sesuai pasal 17 ayat 2 Perpres 59/2017.

Gambar 4.1.1. Alur informasi untuk pemantauan RAD TPB/SDGs



Alur pemantauan RAD TPB/SDGs mengikuti langkah-langkah (Gambar 4.1.1.) sebagai berikut:

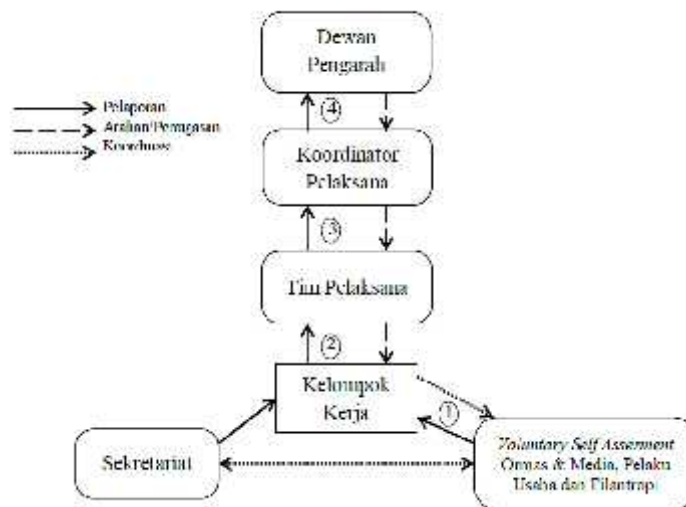
1. **Kelompok Kerja** yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi setiap enam bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat provinsi (termasuk tingkat kabupaten, dan kota bila ada) yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan. **Kelompok Kerja** yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melaporkan capaian RAD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat TPB/SDGs pusat (Langkah 1).
2. Gubernur selaku WPP menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/BAPPENAS melalui Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (*Langkah 2*).
3. **Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS** menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada **Tim Pelaksana** melalui ketua tim pelaksana yang dalam hal ini Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/BAPPENAS (*Langkah 3*).
4. **Ketua Tim Pelaksana** mengarahkan empat **Kelompok Kerja** untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai WPP dibantu oleh sekretariat SDGs (*Langkah 4*).
5. **Masing-masing Kelompok Kerja** yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 5*).
6. **Ketua Tim Pelaksana** melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional (*Langkah 6*).
7. **Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS** selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat daerah kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai pasal 17 ayat 3 Perpres 59/2017 (*Langkah 7*).

#### 4.2 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Renaksi Pihak NonPemerintah

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi

berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (*voluntary*), oleh karena itu mekanisme pelaporannya pun juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self assesment*) dengan menggunakan format laporan melalui *self assesment tool* (SAT) yang disepakati.

Gambar 4.2.1. Alur Informasi Monitoring Organisasi nonPemerintah



Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-langkah (Gambar 4.2.1.) sebagai berikut:

1. **Organisasi nonpemerintah** melakukan *voluntary self assesment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan *format self assesment tool*, lalu disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar terkait dengan tembusan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan. (*Langkah 1*).
2. Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat SDGs menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 2*).
3. **Ketua Tim Pelaksana** kemudian menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana (*Langkah 3*).
4. **Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS** selaku **Koordinator Pelaksana** melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat Nasional kepada Presiden/Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan (*Langkah 4*).

Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara *ad hoc* oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

#### 4.3 Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGs 2017-2019

Jadwal waktu kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan amanat Perpres 59/2017 khususnya pasal 20 dan ketentuan tentang periode penyampaian pelaporan, pemantauan dan evaluasi, sebagai berikut:

Enam bulan setelah Perpres 59/2017 diberlakukan, Rencana Aksi Nasional 2017-2019 harus dapat disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGS kepada Presiden RI, yaitu tanggal 10 Januari 2018. Sedangkan Rencana Aksi Daerah harus dilaporkan setelah satu tahun setelah Perpres 59/2017 diundangkan. Batas waktu penyerahan RAD TPB/SDGS provinsi adalah 10 Juli 2018. Perpres tersebut juga mengamanatkan bahwa Peta Jalan TPB/SDGS 2017-2030 harus sudah dapat diselesaikan dalam kurun waktu 12 bulan setelah Perpres 59/2017 diundangkan.

Dengan periode pelaporan dan pemantauan enam bulanan maka pemantauan RAN akan dilakukan pada bulan Juli 2018 dan pemantauan RAD akan dilakukan pada bulan Januari 2019, bersamaan dengan pemantauan/evaluasi tahunan RAN. Laporan pemantauan dari Kementerian dan Lembaga serta dari Gubernur disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri 15 hari setelah akhir bulan berkenaan.

Gambar 4.3.1. Diagram Jadwal Pelaporan & Pemantauan TPB/SDGs Nasional & Daerah



#### 4.4 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs dibantu oleh Sekretariat TPB/SDGS telah Menyiapkan laman [sdgs.BAPPENAS.go.id](http://sdgs.BAPPENAS.go.id) sebagai media publik untuk melakukan diseminasi informasi terkait dengan peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB/SDGS, dokumen dan informasi publik lainnya. Halaman ini akan terus dikembangkan sesuai muatan yang akan dihasilkan dari kegiatan pelaksanaan TPB/SDGs Indonesia.



## BAB V

### PENUTUP

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan nonpemerintah secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya berpegang atau mendasarkan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Prinsip integrasi dalam TPB/SDGs menekankan bahwa pencapaian target setiap indikator berkaitan atau tidak akan terlepas dari upaya dan pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu Tujuan/Goal tertentu juga menentukan keberhasilan dari Tujuan/Goal yang lainnya. Keterkaitan antartujuan tersebut menjadi salah satu penentu dalam pencapaian TPB/SDGs.

Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB/SDGs yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD TPB/SDGs, maka pelaksanaan untuk setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik untuk kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Apabila Dalam pelaksanaan tahun berjalan Pedoman Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan, akan dilakukan

penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Perluasan Penggunaan Teknologi.** Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan memerlukan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi atas target dan indikator TPB/SDGs dari 17 Tujuan yang saling terkait satu sama lainnya. Selain itu, teknologi informasi ini juga berfungsi untuk mendukung sinkronisasi berbagai capaian pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat pusat dan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi nonpemerintah. Pemanfaatan teknologi juga menjadi dasar untuk mendukung pengembangan data dasar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs.

**Kemitraan Multipihak.** Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat global, juga telah diterapkan Indonesia prinsip di tingkat nasional dan daerah. Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar Pemerintah, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi, serta Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan dengan ditematkannya wakil-wakil dari setiap pihak dalam keanggotaan Tim Koordinasi Nasional dan Daerah TPB/SDGs. Kemitraan ini memberikan ruang bagi para pihak untuk terlibat secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB/SDGs secara bersama, termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara daring (online) dan luring (offline).

**Penguatan Koordinasi.** Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah. Kementerian PPN/BAPPENAS di tingkat pusat dan BAPPEDA di tingkat daerah mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan TPB/SDGs.

Untuk aspek kerangka hukum, koordinasi koheren ini diatur dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) di tingkat nasional dan Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota di tingkat daerah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs. Kerangka hukum ini mengatur tentang kelembagaan, strategi implementasi target dan indikator, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan TPB/SDGs serta hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan organisasi nonpemerintah. Untuk aspek kelembagaan, telah ditetapkan organisasi Tim Koordinasi TPB/SDGs di tingkat pusat yang melibatkan peran dan posisi, baik wakil pemerintah maupun wakil organisasi nonpemerintah, serta tata cara kerjanya. Tim Koordinasi TPB/SDGs di tingkat daerah akan ditetapkan dengan peraturan gubernur (Pergub). Sementara itu, tata cara koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TPB/SDGs ditetapkan oleh Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS

Dalam aspek substansi program, telah disusun berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan organisasi nonpemerintah untuk mencapai target pelaksanaan TPB/SDGs. Dalam aspek pendanaan perlu dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB/SDGs, baik di tingkat nasional maupun daerah, sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dari dana pemerintah (APBN dan APBD) dan bantuan mitra pembangunan. Dalam hal ini, pembiayaan alternatif dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan.

Peningkatan Kapasitas. Untuk melaksanakan Rencana Aksi TPB/SDGs di tingkat pusat dan daerah diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik pada lingkup Kementerian/Lembaga/Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) maupun organisasi nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB/SDGs, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, seminar, workshop serta pertemuan tahunan di tingkat nasional dan daerah.

Pemberian Penghargaan Kepada Para Pihak. Penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi yang menunjukkan prestasi dalam melaksanakan TPB/SDGs. Kriteria penilaian dan Tim Penilai akan dibentuk oleh Tim Koordinasi TPB/SDGs.

Strategi Komunikasi. Agar TPB/SDGs menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat diperlukan strategi komunikasi yang kuat mencakup: isi pesan, cara penyampaian dan target yang akan disasar, media yang digunakan, serta pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan komunikasi.

Pemutakhiran Dokumen. Dokumen RAD TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji ulang secara bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik, baik secara daring (online) dan luring (offline). Pemutakhiran dokumen setiap enam bulan sejalan dengan jadwal pelaksanaan pemantauan.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



SUGIANTO SABRAN

**TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN**

Kode Indikator	Sasaran	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
						2017	2018	2019	2020	2021
<b>1.1. Menghapus kemiskinan ekstrim (penduduk di bawah garis kemiskinan) dengan dengan daya beli kurang dari \$1,25 PPP (Purchasing Power Parity) atau sekitar Rp 7.800 per hari.</b>										
1.1.1	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	BPS Provinsi	persen	7,01	6,5	6,5	7,0	7,0	7,5
		Tingkat Kemiskinan (%)	BPS Provinsi	dokumen	5,91	5,3	5,02	4,8	4,5	4,3
1.1.2	Meningkatnya daya beli masyarakat	Laju inflasi (%)	BPS Provinsi	dokumen	4,74	4,4 - 4,5	4,3 - 4,4	4,2 - 4,3	4,1 - 4,2	3,4

TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN

No	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	
				2017	2018	2019	2020	2021			
		<b>TPB 12.1</b>	: Menghapus kemiskinan ekstrim (penduduk di bawah garis kemiskinan) dengan dengan daya beli kurang dari \$1,25 PPP (Purchasing Power Parity) atau sek								
	1.1.1	<b>PROGRAM</b>	: Program Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan								
1	4.01.40.01	Fasilitas Pemberian Bantuan Sosial Bagi PMKS	Terlaksananya koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan	dokumen	222.290.000	290.000.000	300.000.000	330.000.000	350.000.000	1.492.290.000	APBD
2	4.01.40.02	Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD)	dokumen	75.000.000	160.000.000	150.000.000	200.000.000	255.000.000	840.000.000	APBD
3	4.01.40.03	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana Sosial	Tersedianya dokumen Rencana Aksi daerah tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB.SDG&#39;s)	dokumen	100.000.000	171.400.000	175.000.000	200.500.000	255.640.000	902.540.000	APBD
4	4.01.40.04	Pertindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center	Terlaksananya koordinasi percepatan pencapaian Target RAD.Pangan dan Gizi	dokumen	75.000.000	170.000.000	170.000.000	200.000.000	255.000.000	870.000.000	APBD

No	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan
					2017	2018	2019	2020	2021		
5	4.01.40.05	Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Terlaksananya koordinasi percepatan pencapaian target RAD.TPB/SDG&#39;s	dokumen	75.000.000	170.000.000	175.000.000	200.000.000	255.000.000	875.000.000	APBD
	1.06.37	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>								
6	1.06.37.01	Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya perlindungan sosial bagi PMKS	100 Orang	460.401.000	506.441.100	510.000.000	515.000.000	525.000.000	2.516.842.100	APBD
7	1.06.37.02	Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD)	Meningkatnya kemampuan fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar	13 Laporan	75.000.000	82.500.000	92.500.000	102.500.000	102.500.000	455.000.000	APBD
8	1.06.37.03	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/S DGs (RAD.TPB/SDG s)	Tertibnya pelaksanaan pengumpulan sumbangan sosial dan undian gratis berhadian	Laporan	75.000.000	82.500.000	9.250.000.000	102.500.000	102.500.000	9.612.500.000	APBD
9	1.06.37.04	Koordinasi Percepatan Pencapaian Target RAD.Pangan dan Gizi	Terwujudnya perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Orang	89.436.000	98.379.600	103.379.600	108.379.600	108.379.600	507.954.400	APBD

TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN

No	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan
					2017	2018	2019	2020	2021		
10	1.06.37.05	Koordinasi Percepatan Pencapaian Target RAD.TPB/SDGs	Tersedianya kampung siaga bencana di masing.masing kabupaten/kota	Orang	.	.	.	.	.	-	APBD
	1.06.15	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</b>								
11	1.06.15.01	Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS	Terlaksananya bimbingan teknis petugas pendamping fakir miskin	Orang	100.000.000	110.000.000	110.000.000	120.000.000	120.000.000	560.000.000	APBD
12	1.06.15.06	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Meningkatnya usaha bagi Fakir miskin	KK	100.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	3.100.000.000	APBD
13	1.06.15.08	Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan KAT	Tersedianya sarana dan prasarana untuk warga KAT	KK	-	-	-	-	-	-	APBD
	1.06.16	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>								
14	1.06.16.03	Pelaksanaan kie konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran bagi PMKS	Orang	75.000.000	82.500.000	92.500.000	102.500.000	102.500.000	455.000.000	APBD



No	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan
					2017	2018	2019	2020	2021		
15	1.06.16.07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah gedung panti yang direhabilitasi	Unit	-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4.000.000.000	APBD
16	1.06.16.12	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Anak dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi di PSBRKW	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi anak dan WRSE	Orang	1.000.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.500.000.000	1.800.000.000	6.800.000.000	APBD
17	1.06.16.18	Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Keluarga	Terpenuhinya kebutuhan dasar secara minimal bagi lanjut usia terlantar di dalam keluarga	Orang	76.625.000	84.287.500	94.287.500	104.287.500	104.287.500	463.775.000	APBD
18	1.06.16.20	Pembangunan Sarana Panti Sosial	Meningkatnya pelayanan dan Rehabilitasi sosial penyandang eks psikotik dalam panti	Unit	1.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	7.000.000.000	APBD
19	1.06.16.21	Pelayanan Panti Sosial Bina Laras Pabelum	Meningkatnya fungsi sosial penyandang eks psikotik	Orang	400.000.000	450.000.000	500.000.000	500.000.000	600.000.000	2.450.000.000	APBD

TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN

Instansi Pelaksana
itar Rp 7.800 per hari.
Dinas Sosial
Dinas Sosial
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dinas Sosial

<b>Instansi Pelaksana</b>
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dinas Sosial
Dinas Sosial
Dinas Sosial
Dinas Sosial

TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN

<b>Instansi Pelaksana</b>
Dinas Sosial
Dinas Sosial
Dinas Sosial
Dinas Sosial
Dinas Sosial

TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN

<b>Instansi Pelaksana</b>
Dinas Sosial
Dinas Sosial
Dinas Sosial
Dinas Sosial
Dinas Sosial

TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN

**TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN**

Kode Indikator	Sasaran	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
						2017	2018	2019	2020	2021
1.1. Menghapus kemiskinan ekstrim (penduduk di bawah garis kemiskinan) dengan dengan daya beli kurang dari \$1,25 PPP (Purchasing Power Parity) atau sekitar Rp 7.800 per hari.										
12:01:01	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	BPS Provinsi	persen	7,01	6,5	6,5	7,0	7,0	7,5
		Tingkat Kemiskinan (%)	BPS Provinsi	persen	5,91	5,3	5,02	4,8	4,5	4,3
12:01:01	Meningkatnya daya beli masyarakat	Laju inflasi (%)	BPS Provinsi	persen	4,74	4,4 - 4,5	4,3 - 4,4	4,2 - 4,3	4,1 - 4,2	3,4

TUJUAN 2 : TANPA KELAPARAN

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
		<b>TPB 12.1</b>		<b>: Menghapus kemiskinan ekstrim (penduduk di bawah garis kemiskinan) dengan dengan daya beli kurang dari \$1,25 PPP (Purchasing Power Parity) atau sekitar Rp 7.800 per hari.</b>								
	4.01.40	<b>PROGRAM</b>		<b>: Program Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan</b>								
1	4.01.40.01	Fasilitas Pemberian Bantuan Sosial Bagi PMKS	Terlaksananya koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan	dokumen	222.290.000	290.000.000	300.000.000	330.000.000	350.000.000	1.492.290.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	4.01.40.02	Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD)	dokumen	75.000.000	160.000.000	150.000.000	200.000.000	255.000.000	840.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	4.01.40.03	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana Sosial	Tersedianya dokumen Rencana Aksi daerah tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB.SDG&#39;s)	dokumen	100.000.000	171.400.000	175.000.000	200.500.000	255.640.000	902.540.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	4.01.40.04	Pertindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center	Terlaksananya koordinasi percepatan pencapaian Target RAD.Pangan dan Gizi	dokumen	75.000.000	170.000.000	170.000.000	200.000.000	255.000.000	870.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	4.01.40.05	Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Terlaksananya koordinasi percepatan pencapaian target RAD.TPB/SDG&#39;s	dokumen	75.000.000	170.000.000	175.000.000	200.000.000	255.000.000	875.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1.06.37	<b>PROGRAM</b>		<b>: Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>								
6	1.06.37.01	Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya perlindungan sosial bagi PMKS	Orang	460.401.000	506.441.100	510.000.000	515.000.000	525.000.000	2.516.842.100	APBD	Dinas Sosial
7	1.06.37.02	Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD)	Meningkatnya kemampuan fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar	laporan	75.000.000	82.500.000	92.500.000	102.500.000	102.500.000	455.000.000	APBD	Dinas Sosial
8	1.06.37.03	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/S DGs (RAD.TPB/SDGs)	Tertibnya pelaksanaan pengumpulan sumbangan sosial dan undian gratis berhadian	1 Laporan	75.000.000	82.500.000	9.250.000.000	102.500.000	102.500.000	9.612.500.000	APBD	Dinas Sosial

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
9	1.06.37.04	Koordinasi Percepatan Pencapaian Target RAD.Pangan dan Gizi	Terwujudnya perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Orang	89.436.000	98.379.600	103.379.600	108.379.600	108.379.600	507.954.400	APBD	Dinas Sosial
10	1.06.37.05	Koordinasi Percepatan Pencapaian Target RAD.TPB/SDGs	Tersedianya kampung siaga bencana di masing.masing kabupaten/kota	Orang	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Sosial
	1.06.15	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</b>									
11	1.06.15.01	Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS	Terlaksananya bimbingan teknis petugas pendamping fakir miskin	Orang	100.000.000	110.000.000	110.000.000	120.000.000	120.000.000	560.000.000	APBD	Dinas Sosial
12	1.06.15.06	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Meningkatnya usaha bagi Fakir miskin	KK	100.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	3.100.000.000	APBD	Dinas Sosial
13	1.06.15.08	Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan KAT	Tersedianya sarana dan prasarana untuk warga KAT	KK	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Sosial
	1.06.16	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>									
14	1.06.16.03	Pelaksanaan kie konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran bagi PMKS	Orang	75.000.000	82.500.000	92.500.000	102.500.000	102.500.000	455.000.000	APBD	Dinas Sosial
15	1.06.16.07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah gedung panti yang direhabilitasi	Unit	-	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4.000.000.000	APBD	Dinas Sosial
16	1.06.16.12	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Anak dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi di PSBRKW	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi anak dan WRSE	Orang	1.000.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.500.000.000	1.800.000.000	6.800.000.000	APBD	Dinas Sosial
17	1.06.16.18	Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Keluarga	Terpenuhinya kebutuhan dasar secara minimal bagi lanjut usia terlantar di dalam keluarga	Orang	76.625.000	84.287.500	94.287.500	104.287.500	104.287.500	463.775.000	APBD	Dinas Sosial



NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2017	2018	2019	2020	2021			
18	1.06.16.20	Pembangunan Sarana Panti Sosial	Meningkatnya pelayanan dan Rehabilitasi sosial penyandang eks psikotik dalam panti	Unit	1.000.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000	5.500.000.000	APBD	Dinas Sosial
19	1.06.16.21	Pelayanan Panti Sosial Bina Laras Pabelum	Meningkatnya fungsi sosial penyandang eks psikotik	Orang	400.000.000	450.000.000	500.000.000	500.000.000	600.000.000	2.450.000.000	APBD	Dinas Sosial

**TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA**

Kode Indikator	Sasaran	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
						2017	2018	2019	2020	2021
3.4. Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga dari kematian dini yang disebabkan oleh penyakit tidak menular, melalui tindakan pencegahan dan pengobatan serta menaikkan kesehatan mental dan kesejahteraan										
3.4.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	BPS Provinsi	persen	69,54	70,50	70,90	71,40	72,00	72,75

TUJUAN 3 : KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
		TPB 3.1	: Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga dari kematian dini yang disebabkan oleh penyakit tidak menular, melalui tindakan pencegahan dan pengobatan serta menaikkan kesehatan mental dan kesejahteraan									
	1.02.36	PROGRAM	: Program Upaya Kesehatan Perorangan									
1	1.02.36.02	Bimbingan akreditasi ke RS	Terakreditasinya RS yang ada di Kalimantan Tengah	RS	52.740.000	72.000.000	75.600.000	79.380.000	83.349.000	363.069.000	APBD	Dinas Kesehatan
2	1.02.36.03	Penilaian RSSI/B se Kalimantan Tengah	Terlaksananya penilaian RSSI/B di RS	Rumah Sakit	100.000.000	149.183.940	156.643.137	164.475.294	172.699.059	743.001.430	APBD	Dinas Kesehatan
3	1.02.36.20	Penilaian Puskesmas Berprestasi	Terlaksananya penilaian puskesmas berprestasi	Puskes mas	299.999.800	691.200.000	725.760.000	762.048.000	800.150.400	3.279.158.200	APBD	Dinas Kesehatan
4	1.02.36.21	Penilaian RS Pelayanan Prima	Terlaksananya Penilaian Rumah Sakit Pelayanan Prima di RS Kab/Kota	RS	199.995.925	801.950.960	842.048.508	884.150.933	928.358.480	3.656.504.806	APBD	Dinas Kesehatan
5	1.02.36.22	Bimbingan Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya bimbingan akreditasi puskesmas	Puskes mas	52.560.000	72.000.000	75.600.000	79.380.000	83.349.000	362.889.000	APBD	Dinas Kesehatan
6	1.02.36.23	Pendampingan Kab./Kota oleh Tim Pendamping Provinsi	Terlaksananya pendampingan pada Tim Kab/Kota oleh Tim Pendamping Provinsi	Puskes mas	80.920.000	120.000.000	126.000.000	132.300.000	138.915.000	598.135.000	APBD	Dinas Kesehatan
7	1.02.36.24	Workshop Persiapan Akreditasi	Terakreditasinya Workshop Persiapan Akreditasi puskesmas	kabupat en/kota	.	248.167.000	248.167.000	297.800.400	312.690.420	1.106.824.820	APBD	Dinas Kesehatan
8	1.02.36.25	Bimbingan dan Evaluasi Perkesmas	Terlaksananya kegiatan Perkesmas di kab/kota	OT	.	85.000.000	85.000.000	102.000.000	107.100.000	379.100.000	APBD	Dinas Kesehatan
9	1.02.36.26	Bimbingan dan Evaluasi Kesehatan Jiwa	Terlaksananya Program Jiwa di kab/kota	OT	.	85.000.000	85.000.000	102.000.000	107.100.000	379.100.000	APBD	Dinas Kesehatan
10	1.02.36.27	Pembentukan Koneksitas Jaringan SPGDT	Terbentuknya SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) Wilyah Kalteng	Rumah Sakit	.	110.000.000	110.000.000	180.000.000	189.000.000	589.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
11	1.02.36.29	Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Puskesmas	terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja puskesmas	kabupat en/kota	.	257.683.000	257.683.000	309.219.600	324.680.580	1.149.266.180	APBD	Dinas Kesehatan
12	1.02.36.30	Workshop Penguatan Pembinaan Puskesmas Bagi Kabupaten/Kota	terlaksananya Workshop penguatan pembinaan puskesmas bagi kabupaten/kota	kabupat en/kota	.	257.683.000	257.683.000	309.219.600	324.680.580	1.149.266.180	APBD	Dinas Kesehatan
13	1.02.36.31	Pendampingan Tim Pra Akreditasi Kabupaten/Kota Oleh Tim Akreditasi Provinsi	Terlaksananya Pendampingan Pra Akreditasi Puskesmas oleh Tim Pendamping Provinsi	Puskes mas	158.840.000	200.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000	1.020.865.000	APBD	Dinas Kesehatan

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
14	1.02.36.32	Pendampingan Tim Pasca Akreditasi Kabupaten/Kota Oleh Tim Akreditasi Provinsi	Terlaksananya Pendampingan Pasca Akreditasi Puskesmas oleh Tim Pendamping Provinsi	Puskes mas	155.550.000	200.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000	1.017.575.000	APBD	Dinas Kesehatan
15	1.02.36.33	Monev Puskesmas Siap Akreditasi	terlaksananya Monev Puskesmas siap akreditasi.	kabupaten/kota	.	180.000.000	180.000.000	200.000.000	210.000.000	770.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
16	1.02.36.34	Bimtek Manual Rujukan	terlaksananya manual rujukan di PKM Poned	kabupaten/kota	.	150.000.000	150.000.000	200.000.000	21	500.000.021	APBD	Dinas Kesehatan
17	1.02.36.35	Monev Manual Rujukan	terlaksananya manual rujukan di PKM Poned	kabupaten/kota	.	150.000.000	150.000.000	200.000.000	210.000.000	710.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
18	1.02.36.36	Peningkatan Kapasitas Rumah sakit Dalam Penerapan Integritasi Data Rekam Medis	terlaksananya RS Rujukan Provinsi dan rujukan regional yang menerapkan integrasi data rekam medis	kabupaten/kota	.	126.000.000	126.000.000	132.300.000	138.915.000	523.215.000	APBD	Dinas Kesehatan
19	1.02.36.37	Monev Pendampingan Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya Monev Pendampingan Akreditasi Puskesmas oleh Tim Pendamping Provinsi	Puskes mas	57.000.000	72.000.000	75.600.000	79.380.000	83.349.000	367.329.000	APBD	Dinas Kesehatan
20	1.02.36.38	Bimbingan Teknis Survei Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya Bimbingan Teknis Survei Akreditasi Puskesmas oleh Tim Pendamping Prov.	Puskes mas	58.560.000	72.000.000	75.600.000	79.380.000	83.349.000	368.889.000	APBD	Dinas Kesehatan
21	1.02.36.39	Pelatihan Pendampingan Akreditasi Fasyankes Tingkat Pertama Bagi Tim Dinkes Kabupaten/Kota	terlaksananya kabupaten kota yang siap akreditasi faskes primer	kabupaten/kota	.	180.000.000	180.000.000	200.000.000	210.000.000	770.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
22	1.02.36.41	Implementasi Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Melalui Public Safety Center (PSC) 119	tersedianya pelayanan kegawatdaruratan terpadu	Bulan	490.130.000	350.805.000	368.345.250	386.762.513	406.100.638	2.002.143.401	APBD	Dinas Kesehatan
	1.02.23	<b>PROGRAM</b>	<b>:</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>								

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2017	2018	2019	2020	2021			
23	1.02.23.08	Audit internal	Administrasi dan Teknis Seluruh Personel Mampu Menerapkan Dokumen Panduan Mutu, Prosedur Kerja, Instruksi Kerja dan Dokumen Pendukung dengan baik setiap tahun dalam bentuk hasil laporan Audit Internal	Orang	15.500.000	14.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	75.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
24	1.02.23.09	Kaji ulang manajemen (KUM)	Administrasi dan Teknis Seluruh Personel Mampu Menerapkan Dokumen Panduan Mutu, Prosedur Kerja, Instruksi Kerja dan Dokumen Pendukung dengan baik setiap tahun dalam bentuk hasil laporan KUM dan Memberikan Hasil Tindak Lanjut Audit Internal dan Rekomendasi Peningkatan SDM dan Peningkatan Sarana prasarana Laboratorium	Orang	15.500.000	14.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	75.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
25	1.02.23.10	Uji banding antar laboratorium	Seluruh Personil Teknis Laboratorium Mampu mempertahankan kinerja laboratorium dengan membandingkan kualitas dan mutu hasil pengujian specimen pelanggan	Laboratorium	14.999.900	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	84.999.900	APBD	Dinas Kesehatan
26	1.02.23.11	Pelatihan ISO/IEC 17025	Seluruh Personel Baik Administrasi dan Teknis Mampu meningkatkan, memahami, menerapkan standar operating prosedur mutu dan kualitas pelayanan laboratorium kepada pelanggan	Orang	16.611.500	17.500.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	88.111.500	APBD	Dinas Kesehatan
	1.02.26	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit</b>									

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
27	1.02.26.04	Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)	Bertambahnya ruang rawat inap RS (VIP, kelas I, II, III)	Gedung	1.750.000.000	10.345.132.000	10.920.000.000	4.000.000.000	2.000.000.000	29.015.132.000	APBD	RSUD dr. Doris Sylvanus
28	1.02.26.18	Pengadaan alat.alat rumah sakit	Tersedianya alat.alat kesehatan RS yang sesuai standar (DAK dan Non DAK)	Item	16.828.000.000	15.000.000.000	12.433.761.000	18.620.000.000	21.158.461.000	84.040.222.000	APBD	RSUD dr. Doris Sylvanus
29	1.02.26.20	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Tersedianya mobil ambulance/jenazah	Unit	.	.	1.600.000.000	.	800.000.000	2.400.000.000	APBD	RSUD dr. Doris Sylvanus
30	1.02.26.27	Kalibrasi peralatan medis , penunjang medis , keperawatan	Terkalibrasinya peralatan medis, penunjang medis dan keperawatan	Tahun	420.000.000	580.000.000	580.000.000	580.000.000	580.000.000	2.740.000.000	APBD	RSUD dr. Doris Sylvanus
	1.02.35	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Peningkatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan</b>									
31	1.02.35.01	Terlaksananya pelayanan kepada pasien miskin/tidak mampu/kelas III	Bertambahnya ruang rawat inap RS (VIP, kelas I, II, III)	Ruang	12.000.000.000	15.000.000.000	6.500.000.000	4.000.000.000	3.500.000.000	41.000.000.000	APBD	RSUD dr. Doris Sylvanus
	1.02.24	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>									
32	1.02.24.13	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Jumlah pasien SKTM yang dilayani	Orang	125.000.000	.	.	.	.	.	APBD	RSJ Kalawa Atei
	1.02.29	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita</b>									
33	1.02.29.19	Konsultasi dan Koordinasi Kesehatan Anak	Terlaksananya konsultasi program anak ke pusat	OT	60.399.900	118.000.000	123.900.000	130.095.000	136.599.750	568.994.650	APBD	Dinas Kesehatan
34	1.02.29.20	Pertemuan Pengembangan Model Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS	Terlaksananya Pertemuan Pengembangan Model Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS	Kabupaten		194.250.000	194.250.000	203.962.500	214.160.625	806.623.125	APBD	Dinas Kesehatan
35	1.02.29.21	Peningkatan Kapasitas R/R Terpadu Bagi Pengelola Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas R/R Terpadu bagi Pengelola Program Pelayanan Kesehatan Dasar	Orang		236.250.000	236.250.000	248.062.500	260.465.625	981.028.125	APBD	Dinas Kesehatan
36	1.02.29.22	Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Manajemen BBLR	Terlaksananya peningkatan manajemen BBLR bagi nakes	OT		105.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500	436.012.500	APBD	Dinas Kesehatan
37	1.02.29.24	Konsultasi dan Koordinasi Kesehatan Keluarga	Terlaksananya koordinasi Pemegang program pusat dan daerah		36.060.000					36.060.000	APBD	Dinas Kesehatan
38	1.02.29.25	Pertemuan Penguatan Program Kesehatan Keluarga	terlaksananya pertemuan penguatan program kesehatan keluarga	dokumen	115.000.000	185.000.000	194.250.000	203.962.500	203.962.500	902.175.000	APBD	Dinas Kesehatan
	1.02.19	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>									

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2017	2018	2019	2020	2021			
38	1.02.19.08	Iklan layanan masyarakat	Tersedianya informasi layanan RS bagi masyarakat melalui media cetak maupun elektronik		450.000.000	495.020.000	500.000.000	600.000.000	700.000.000	2.745.020.000	APBD	RSUD dr. Doris Sylvanus
39	1.02.19.36	Promosi dan Publikasi Rumah Sakit	Terlaksananya kegiatan promosi dan publikasi RS	dokumen	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.500.000.000	APBD	RSUD dr. Doris Sylvanus
	2.13.18	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</b>									
40	2.13.18.01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Terlaksananya penyuluhan pencegahan penggunaan Narkoba di kalangan Generasi Muda	Orang	150.000.000	130.000.000	140.000.000	150.000.000	160.000.000	730.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
41	2.13.18.13	Sosialisasi penanggulangan penyalahgunaan bahaya narkoba bagi pemuda	Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba/NAPZA bagi Generasi Muda	Orang		110.000.000	120.000.000	130.000.000	180.000.000	540.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
42	2.13.18.14	Lomba Pidato Anti Narkoba Bagi Pemuda Se. Kalimantan Tengah	Terlaksananya kegiatan lomba pidato anti narkoba	Orang	35.000.000	80.000.000	90.000.000	100.000.000	120.000.000	425.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga

**TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS**

Kode Indikator	Sasaran	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
						2017	2018	2019	2020	2021
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.										
4:01:01	Meningkatnya kualitas pendidikan	IPM	RPJMD	persen	68,53	69,30	70,00	70,70	71,60	72,50
		Rata-rata Lama Sekolah	RPJMD	persen	8,03	8,50	8,75	9,00	9,50	10,00
		Angka Harapan Usia Sekolah	RPJMD	persen	12,22	12,75	13,00	13,50	14,00	15,00



TUJUAN 4 : PENDIDIKAN BERKUALITAS

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
		<b>TPB 4.1</b>	: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.									
	1.01. 35	<b>PROGRAM</b>	: Program Pembinaan dan Fasilitasi Pendidikan									
1	1.01.35.24	Layanan Mobil Cerdas	Tertaksananya layanan mobil cerdas	desa tertinggal	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.500.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
2	1.01.35.30	Monitoring Penyelenggaraan Ujian Kesetaraan	Tertaksananya Monitoring pelaksanaan Ujian Kesetaraan	kelompok belajar	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	375.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
3	1.01.35.32	Pelayanan Pemanfaatan Rumah Pintar	Tertaksananya pelayanan pemanfaatan Rumah Harati (Rumah Pintar)	orang tenaga kontrak	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	4.750.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
4	1.01.35.38	Pengandaan Soal Ujian Sekolah (US) Paket A/ULA	Tertaksananya pengandaan Soal Ujian Sekolah (US) Paket A/ULA	eks soal	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
5	1.01.35.39	Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI Skala Provinsi	Tertaksananya ujian sekolah SD/MI skala provinsi	sekolah	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	1.000.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
6	1.01.35.40	Penyusunan soal ujian sekolah SD/MI Tingkat Provinsi	Tersedianya soal ujian sekolah SD/MI skala provinsi	orang	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	2.250.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
7	1.01.35.41	Pencetakan SKHUS SDLB sederajat	Tersedianya SKHUS SD dan SDLB	siswa	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	2.250.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
8	1.01.35.42	Pencetakan Soal Ujian Sekolah SDLB sederajat Provinsi Kalimantan Tengah	Tersedianya Dokumen Soal Ujian Sekolah SDLB sederajat Provinsi Kalimantan Tengah	sekolah	1.180.000.000	1.180.000.000	1.180.000.000	1.180.000.000	1.180.000.000	5.900.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
9	1.01.35.43	Pengelolaan Administrasi Kegiatan BAP PAUD dan PNF	Tertaksananya Pengelolaan Administrasi Kegiatan BAP PAUD dan PNF	orang	142.250.000	142.250.000	142.250.000	142.250.000	142.250.000	711.250.000	APBD	Dinas Pendidikan
10	1.01.35.44	Apresiasi Bunda PAUD dan Gugus PAUD	Tertaksananya Apresiasi Bunda PAUD dan Gugus PAUD	orang	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.250.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
11	1.01.35.45	Administrasi Pengelolaan BOS SD dan SMP Tingkat provinsi	Tertaksananya Administrasi Pengelolaan BOS SD dan SMP	orang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
12	1.01.35.46	Rapat Koordinasi Pengelolaan BOS SD dan SMP Tingkat Provinsi	Tertaksananya Rapat Koordinasi Pengelolaan BOS SD dan SMP Tingkat Provinsi	orang	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.250.000.000	APBD	Dinas Pendidikan

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
13	1.01.35.47	Rapat Koordinasi Pengawas Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) se	Terlaksananya Rapat Koordinasi antar pengawas se Provinsi Kalimantan Tengah	orang	-	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.200.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
14	1.01.35.48	Supervisi Pembinaan Sekolah SMA, SMK dan SLB	Terlaksananya Peremajaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan SMA, SMK dan SLB	kegiatan	-	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	3.800.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
	1.01. 21	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>									
14	1.01.21.24	Peningkatan pelayanan dan pengelolaan Penetapan Angka Kredit (PAK)	Meningkatnya kemampuan peserta pelayanan dan pengelolaan Penetapan Angka Kredit (PAK)	lembar	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	1.000.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
15	1.01.21.33	Bimbingan Teknis Pembinaan Pengurus KKG, MGMP, MKKS, KKPS/MKPS Kab./Kota Se Kalimantan Tengah	Terlaksananya Pengurus KKG, MGMP, MKKS, KKPS/ MKPS Kabupaten/ Kota se Kalimantan Tengah	orang	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.500.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
16	1.01.21.65	Pembinaan supervisi manajerial dan akademik	Terlaksananya supervisi ke sekolah	orang	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	875.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
17	1.01.21.101	Pengelolaan Administrasi Guru Tidak Tetap Agama dan Penjaskes	Meningkatnya pengelolaan administrasi kegiatan guru tidak tetap Agama dan Penjaskes	orang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
18	1.01.21.135	Diklat Supervisi dan evaluasi akademik bagi pengawas sekolah	Meningkatnya kemampuan peserta diklat Supervisi akademik dan Manajerial bagi pengawas sekolah	orang	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	875.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
	1.01. 17	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Pendidikan SMA</b>									
19	1.01.17.61	Penyediaan makan dan minum Sekolah unggulan Provinsi SMAN-5	Tersedianya makan Dan minum untuk Siswa SMAN-5 Palangka Raya yang di Asrama	orang	2.139.096.000	-	-	-	-	2.139.096.000	APBD	Dinas Pendidikan
20	1.01.17.70	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Debat Bahasa Inggris, Olimpiade Sains, dan Olahraga Siswa SMA	Meningkatnya kemampuan peserta 1 kegiatan FLS2N, Debat Bahasa Inggris 1 Kegiatan, Olimpiade Sains dan Olahraga 1 kegiatan	orang	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000	APBD	Dinas Pendidikan

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan		Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2017	2018	2019	2020	2021			
21	1.01.17.94	Lomba Bahasa Indonesia Siswa SMA	Meningkatnya kompetensi lomba Bahasa Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	orang	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	750.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
22	1.01.17.123	Pelatihan pembinaan OSIS dan LDK Siswa SMA Tingkat Provinsi	Tertindaknya pelatihan pembinaan OSIS dan LDK siswa SMA tingkat provinsi	orang	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	750.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
23	1.01.17.192	Pelatihan Jurnalistik Siswa SMA Tingkat Provinsi	Meningkatnya kemampuan peserta pelatihan jurnalistik siswa SMA tingkat nasional	orang	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	750.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
24	1.01.17.193	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA	Tertbangunnya ruang kelas baru SMA	ruang	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
25	1.01.17.193	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA	Tertbangunnya ruang kelas baru SMA	ruang	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
26	1.01.17.193	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA	Tertbangunnya ruang kelas baru SMA	ruang	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
27	1.01.17.193	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA	Tertbangunnya ruang kelas baru SMA	ruang	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	7.500.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
28	1.01.17.193	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA	Tertbangunnya ruang kelas baru SMA	ruang	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
29	1.01.17.193	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA	Tertbangunnya ruang kelas baru SMA	ruang	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.500.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
30	1.01.17.194	Administrasi Pengelolaan dan Monitoring pemberian Honorarium Guru Honor SMA	Tertindaknya Administrasi Pengelolaan dan Monitoring pemberian Honorarium Guru Honor SMA	orang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
31	1.01.17.196	Administrasi dan Seleksi Guru Non PNS SMA Penerima Insentif	Tersedianya Dokumen Data Guru SMA Non PNS hasil seleksi Penerima Insentif	orang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
32	1.01.17.197	Festival, Lomba-lomba dan Olimpiade Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten/Kota	Tertindaknya FLS2N, Debat Bahasa Inggris, Bahasa, Indonesia, Bahasa Jerman, Olahraga, OSN Siswa, OSN Guru, Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten/Kota	orang	396.702.100	396.702.100	396.702.100	396.702.100	396.702.100	1.983.510.500	APBD	Dinas Pendidikan
33	1.01.17.198	Pengadaan Meubelair Ruang Kelas Baru	Tertampungnya Siswa baru untuk melanjutkan sekolah di SMA	ruang	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	800.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
34	1.01.17.198	Pengadaan Meubelair Ruang Kelas Baru	Tertampungnya Siswa baru untuk melanjutkan sekolah di SMA	ruang	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	800.000.000	APBD	Dinas Pendidikan

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan		Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2017	2018	2019	2020	2021			
35	1.01.17.198	Pengadaan Meubelair Ruang Kelas Baru	Tertampungnya Siswa baru untuk melanjutkan sekolah di SMA	ruang	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	800.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
36	1.01.17.198	Pengadaan Meubelair Ruang Kelas Baru	Tertampungnya Siswa baru untuk melanjutkan sekolah di SMA	ruang	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	1.200.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
37	1.01.17.198	Pengadaan Meubelair Ruang Kelas Baru	Tertampungnya Siswa baru untuk melanjutkan sekolah di SMA	ruang	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	800.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
38	1.01.17.198	Pengadaan Meubelair Ruang Kelas Baru	Tertampungnya Siswa baru untuk melanjutkan sekolah di SMA	ruang	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	400.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
39	1.01.17.199	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas Negeri (DAK Non Fisik)	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas Negeri (DAK Non Fisik)	siswa	71.000.000.000	7.100.000.000	7.100.000.000	7.100.000.000	7.100.000.000	99.400.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
40	1.01.17.200	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta perabotnya (DAK)	ruang	734.718.140	734.718.140	734.718.140	734.718.140	734.718.140	3.673.590.700	APBD	Dinas Pendidikan
41	1.01.17.200	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta perabotnya (DAK)	ruang	734.718.140	734.718.140	734.718.140	734.718.140	734.718.140	3.673.590.700	APBD	Dinas Pendidikan
42	1.01.17.200	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta perabotnya (DAK)	ruang	734.718.140	734.718.140	734.718.140	734.718.140	734.718.140	3.673.590.700	APBD	Dinas Pendidikan
43	1.01.17.200	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta perabotnya (DAK)	ruang	979.624.180	979.624.180	979.624.180	979.624.180	979.624.180	4.898.120.900	APBD	Dinas Pendidikan
44	1.01.17.200	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta perabotnya (DAK)	ruang	734.718.140	734.718.140	734.718.140	734.718.140	734.718.140	3.673.590.700	APBD	Dinas Pendidikan
45	1.01.17.200	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta Perabotnya	Tersedianya Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta perabotnya (DAK)	ruang	734.718.140	734.718.140	734.718.140	734.718.140	734.718.140	3.673.590.700	APBD	Dinas Pendidikan
46	1.01.17.200	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta perabotnya (DAK)	ruang	734.718.140	734.718.140	734.718.140	734.718.140	734.718.140	3.673.590.700	APBD	Dinas Pendidikan

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
47	1.01.17.200	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta perabotnya (DAK)	ruang	734.718.140	734.718.140	734.718.140	734.718.140	734.718.140	3.673.590.700	APBD	Dinas Pendidikan
48	1.01.17.200	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta perabotnya (DAK)	ruang	734.718.140	734.718.140	734.718.140	734.718.140	734.718.140	3.673.590.700	APBD	Dinas Pendidikan
49	1.01.17.200	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta perabotnya (DAK)	ruang	734.718.140	734.718.140	734.718.140	734.718.140	734.718.140	3.673.590.700	APBD	Dinas Pendidikan
50	1.01.17.200	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta perabotnya (DAK)	ruang	734.718.140	734.718.140	734.718.140	734.718.140	734.718.140	3.673.590.700	APBD	Dinas Pendidikan
51	1.01.17.200	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta perabotnya (DAK)	ruang	734.718.140	734.718.140	734.718.140	734.718.140	734.718.140	3.673.590.700	APBD	Dinas Pendidikan
52	1.01.17.200	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta perabotnya (DAK)	ruang	734.718.140	734.718.140	734.718.140	734.718.140	734.718.140	3.673.590.700	APBD	Dinas Pendidikan
53	1.01.17.200	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) SMA beserta perabotnya (DAK)	ruang	734.718.140	734.718.140	734.718.140	734.718.140	734.718.140	3.673.590.700	APBD	Dinas Pendidikan
54	1.01.17.201	Pembangunan Ruang Laboratorium SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya ruang Laboratorium SMA beserta perabotnya (DAK)	ruang	1.053.448.026	1.053.448.026	1.053.448.026	1.053.448.026	1.053.448.026	5.267.240.130	APBD	Dinas Pendidikan
55	1.01.17.201	Pembangunan Ruang Laboratorium SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya ruang Laboratorium SMA beserta perabotnya (DAK)	ruang	702.298.684	702.298.684	702.298.684	702.298.684	702.298.684	3.511.493.420	APBD	Dinas Pendidikan
56	1.01.17.201	Pembangunan Ruang Laboratorium SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya ruang Laboratorium SMA beserta perabotnya (DAK)	ruang	1.053.448.026	1.053.448.026	1.053.448.026	1.053.448.026	1.053.448.026	5.267.240.130	APBD	Dinas Pendidikan
57	1.01.17.201	Pembangunan Ruang Laboratorium SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Laboratorium SMA beserta perabotnya (DAK)	ruang	1.404.597.368	1.404.597.368	1.404.597.368	1.404.597.368	1.404.597.368	7.022.986.840	APBD	Dinas Pendidikan
58	1.01.17.201	Pembangunan Ruang Laboratorium SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya ruang Laboratorium SMA beserta Perabotnya (DAK)	ruang	1.053.448.026	1.053.448.026	1.053.448.026	1.053.448.026	1.053.448.026	5.267.240.130	APBD	Dinas Pendidikan
59	1.01.17.201	Pembangunan Ruang Laboratorium SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya ruang Laboratorium SMA beserta perabotnya (DAK)	ruang	1.053.448.026	1.053.448.026	1.053.448.026	1.053.448.026	1.053.448.026	5.267.240.130	APBD	Dinas Pendidikan

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
60	1.01.17.201	Pembangunan Ruang Laboratorium SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya ruang Laboratorium SMA beserta perabotnya (DAK)	ruang	1.053.448.026	1.053.448.026	1.053.448.026	1.053.448.026	1.053.448.026	5.267.240.130	APBD	Dinas Pendidikan
61	1.01.17.201	Pembangunan Ruang Laboratorium SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Laboratorium SMA beserta perabotnya (DAK)	ruang	702.298.688	702.298.688	702.298.688	702.298.688	702.298.688	3.511.493.440	APBD	Dinas Pendidikan
62	1.01.17.201	Pembangunan Ruang Laboratorium SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya ruang Laboratorium SMA beserta perabotnya (DAK)	ruang	1.053.448.026	1.053.448.026	1.053.448.026	1.053.448.026	1.053.448.026	5.267.240.130	APBD	Dinas Pendidikan
63	1.01.17.201	Pembangunan Ruang Laboratorium SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Laboratorium SMA beserta perabotnya (DAK)	ruang	1.053.448.026	1.053.448.026	1.053.448.026	1.053.448.026	1.053.448.026	5.267.240.130	APBD	Dinas Pendidikan
64	1.01.17.201	Pembangunan Ruang Laboratorium SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Laboratorium SMA beserta perabotnya (DAK)	ruang	1.053.448.026	1.053.448.026	1.053.448.026	1.053.448.026	1.053.448.026	5.267.240.130	APBD	Dinas Pendidikan
65	1.01.17.201	Pembangunan Ruang Laboratorium SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya ruang Laboratorium SMA beserta perabotnya (DAK)	ruang	702.298.684	702.298.684	702.298.684	702.298.684	702.298.684	3.511.493.420	APBD	Dinas Pendidikan
66	1.01.17.201	Pembangunan Ruang Laboratorium SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Laboratorium SMA beserta perabotnya (DAK)	ruang	702.298.684	702.298.684	702.298.684	702.298.684	702.298.684	3.511.493.420	APBD	Dinas Pendidikan
67	1.01.17.201	Pembangunan Ruang Laboratorium SMA beserta Perabotnya	Terbangunnya Ruang Laboratorium SMA beserta Perabotnya (DAK)	ruang	702.298.684	702.298.684	702.298.684	702.298.684	702.298.684	3.511.493.420	APBD	Dinas Pendidikan
68	1.01.17.202	Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA (DAK)	ruang	225.204.800	225.204.800	225.204.800	225.204.800	225.204.800	1.126.024.000	APBD	Dinas Pendidikan
69	1.01.17.202	Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA (DAK)	ruang	112.602.360	112.602.360	112.602.360	112.602.360	112.602.360	563.011.800	APBD	Dinas Pendidikan
70	1.01.17.202	Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA (DAK)	ruang	225.204.720	225.204.720	225.204.720	225.204.720	225.204.720	1.126.023.600	APBD	Dinas Pendidikan
71	1.01.17.202	Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA (DAK)	ruang	225.204.720	225.204.720	225.204.720	225.204.720	225.204.720	1.126.023.600	APBD	Dinas Pendidikan
72	1.01.17.202	Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA (DAK)	ruang	225.204.720	225.204.720	225.204.720	225.204.720	225.204.720	1.126.023.600	APBD	Dinas Pendidikan
73	1.01.17.202	Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA (DAK)	ruang	225.204.720	225.204.720	225.204.720	225.204.720	225.204.720	1.126.023.600	APBD	Dinas Pendidikan
74	1.01.17.202	Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA (DAK)	ruang	225.204.720	225.204.720	225.204.720	225.204.720	225.204.720	1.126.023.600	APBD	Dinas Pendidikan

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
75	1.01.17.202	Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA (DAK)	ruang	225.204.720	225.204.720	225.204.720	225.204.720	225.204.720	1.126.023.600	APBD	Dinas Pendidikan
76	1.01.17.202	Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA (DAK)	ruang	112.602.360	112.602.360	112.602.360	112.602.360	112.602.360	563.011.800	APBD	Dinas Pendidikan
77	1.01.17.202	Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA (DAK)	ruang	225.204.720	225.204.720	225.204.720	225.204.720	225.204.720	1.126.023.600	APBD	Dinas Pendidikan
78	1.01.17.202	Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA (DAK)	ruang	112.602.360	112.602.360	112.602.360	112.602.360	112.602.360	563.011.800	APBD	Dinas Pendidikan
79	1.01.17.202	Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA (DAK)	ruang	112.602.360	112.602.360	112.602.360	112.602.360	112.602.360	563.011.800	APBD	Dinas Pendidikan
80	1.01.17.202	Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA (DAK)	ruang	112.602.360	112.602.360	112.602.360	112.602.360	112.602.360	563.011.800	APBD	Dinas Pendidikan
81	1.01.17.202	Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Belajar dan Ruang Penunjang SMA (DAK)	ruang	112.602.360	112.602.360	112.602.360	112.602.360	112.602.360	563.011.800	APBD	Dinas Pendidikan
82	1.01.17.203	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran SMA	Tersedianya Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran	ruang	201.042.276	201.042.276	201.042.276	201.042.276	201.042.276	1.005.211.380	APBD	Dinas Pendidikan
83	1.01.17.203	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran SMA	Tersedianya Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran	ruang	201.042.276	201.042.276	201.042.276	201.042.276	201.042.276	1.005.211.380	APBD	Dinas Pendidikan
84	1.01.17.203	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran SMA	Tersedianya Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran	ruang	201.042.276	201.042.276	201.042.276	201.042.276	201.042.276	1.005.211.380	APBD	Dinas Pendidikan
85	1.01.17.203	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran SMA	Tersedianya Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran	ruang	201.042.276	201.042.276	201.042.276	201.042.276	201.042.276	1.005.211.380	APBD	Dinas Pendidikan
86	1.01.17.203	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran SMA	Tersedianya Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran	ruang	201.042.276	201.042.276	201.042.276	201.042.276	201.042.276	1.005.211.380	APBD	Dinas Pendidikan
87	1.01.17.203	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran SMA	Tersedianya Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran	ruang	301.563.412	301.563.412	301.563.412	301.563.412	301.563.412	1.507.817.060	APBD	Dinas Pendidikan
88	1.01.17.203	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran SMA	Tersedianya Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran	ruang	201.042.276	201.042.276	201.042.276	201.042.276	201.042.276	1.005.211.380	APBD	Dinas Pendidikan
89	1.01.17.203	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran SMA	Tersedianya Peralatan pendidikan dan Media Pembelajaran SMA (DAK)	ruang	201.042.276	201.042.276	201.042.276	201.042.276	201.042.276	1.005.211.380	APBD	Dinas Pendidikan

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
90	1.01.17.203	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran SMA	Tersedianya Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran	ruang	201.042.276	201.042.276	201.042.276	201.042.276	201.042.276	1.005.211.380	APBD	Dinas Pendidikan
91	1.01.17.203	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran SMA	Tersedianya Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran	ruang	201.042.276	201.042.276	201.042.276	201.042.276	201.042.276	1.005.211.380	APBD	Dinas Pendidikan
92	1.01.17.203	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran SMA	Tersedianya Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran	ruang	201.042.276	201.042.276	201.042.276	201.042.276	201.042.276	1.005.211.380	APBD	Dinas Pendidikan
93	1.01.17.203	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran SMA	Tersedianya Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran	ruang	201.042.276	201.042.276	201.042.276	201.042.276	201.042.276	1.005.211.380	APBD	Dinas Pendidikan
94	1.01.17.203	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran SMA	Tersedianya Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran	ruang	201.042.276	201.042.276	201.042.276	201.042.276	201.042.276	1.005.211.380	APBD	Dinas Pendidikan
95	1.01.17.203	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran SMA	Tersedianya Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran	ruang	201.042.276	201.042.276	201.042.276	201.042.276	201.042.276	1.005.211.380	APBD	Dinas Pendidikan
96	1.01.17.204	Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SMA	Tersosialisasinya a Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SMA	sekolah	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.250.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
97	1.01.17.205	Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik SMA	Tersosialisasinya a Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik SMA	sekolah	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.500.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
98	1.01.17.206	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SMA	Tertindakannya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SMA	laporan	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.500.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
	1.01. 18	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Pendidikan SMK</b>									
99	1.01.18.01	Lomba Keterampilan Siswa SMK	Meningkatnya kompetensi lomba keterampilan siswa tingkat provinsi 1 kegiatan dan Pembinaan Siswa yang juara	orang	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	3.500.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
100	1.01.18.03	Pelaksanaan Ujian Kompetensi Siswa SMK	Meningkatnya kemampuan peserta Ujian Praktek dan Teori Kompetensi bagi Siswa SMK sesuai dengan Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional.	orang	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	4.500.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
101	1.01.18.05	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK	Terbangunnya ruang kelas baru SMK	ruang	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	3.750.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
102	1.01.18.05	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK	Terbangunnya ruang kelas baru SMK	ruang	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	3.750.000.000	APBD	Dinas Pendidikan



NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
103	1.01.18.06	Pengadaan Meublair Sekolah SMK	Tertindakannya penggantian dan penambahan meublair ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium SMK	ruang	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	400.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
104	1.01.18.06	Pengadaan Meublair Sekolah SMK	Tertindakannya penggantian dan penambahan meublair ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium SMK	ruang	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	400.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
105	1.01.18.06	Pengadaan Meublair Sekolah SMK	Tertindakannya penggantian dan penambahan meublair ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium SMK	ruang	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	400.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
106	1.01.18.06	Pengadaan Meublair Sekolah SMK	Tertindakannya penggantian dan penambahan meublair ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium SMK	ruang	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	200.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
107	1.01.18.06	Pengadaan Meublair Sekolah SMK	Tertindakannya penggantian dan penambahan meublair ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium SMK	ruang	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	400.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
108	1.01.18.06	Pengadaan Meublair Sekolah SMK	Tertindakannya penggantian dan rlaksananya penggantian dan penambahan meublair ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium SMK	ruang	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	200.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
109	1.01.18.11	Pelatihan dan Pengelolaan Manajemen Dapodik SMK	Tertindakannya Pelatihan dan Pengelolaan Manajemen Dapodik SMK	orang	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.500.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
110	1.01.18.12	Re-engineering Paket Keahlian SMK	Tertindakannya Re-engineering Paket Keahlian SMK	orang	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.500.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
111	1.01.18.13	Olimpiade dan Lomba-lomba Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten/Kota	Tertindakannya OSN Guru, Debat Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, LKS, Olahraga, Gelar Prestasi dan Olimpiade Sains terapan Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten/Kota	sekolah	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.500.000.000	APBD	Dinas Pendidikan

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
112	1.01.18.14	Pembangunan Ruang Asrama	Tersediannya Asrama bagi siswa SMK Negeri 1 Kapuas Kuala (SMKN 1 Maritim)	unit	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	6.750.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
113	1.01.18.15	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (DAK Non Fisik)	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri se Kalimantan Tengah (DAK Non Fisik)	siswa	37.000.000.000	37.000.000.000	37.000.000.000	37.000.000.000	37.000.000.000	185.000.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
114	1.01.18.16	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK beserta Perabotnya	Terbangunnya ruang kelas baru beserta perabotnya (DAK)	ruang	1.254.000.000	1.254.000.000	1.254.000.000	1.254.000.000	1.254.000.000	6.270.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
115	1.01.18.16	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK beserta Perabotnya	Terbangunnya ruang kelas baru SMK beserta perabotnya (DAK)	ruang	627.000.000	627.000.000	627.000.000	627.000.000	627.000.000	3.135.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
116	1.01.18.16	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK beserta Perabotnya	Terbangunnya ruang kelas baru SMK beserta perabotnya (DAK)	ruang	2.090.000.000	2.090.000.000	2.090.000.000	2.090.000.000	2.090.000.000	10.450.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
117	1.01.18.16	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK beserta Perabotnya	Terbangunnya ruang kelas baru SMK beserta perabotnya (DAK)	ruang	1.463.000.000	1.463.000.000	1.463.000.000	1.463.000.000	1.463.000.000	7.315.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
118	1.01.18.16	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK beserta Perabotnya	Terbangunnya ruang kelas baru SMK beserta perabotnya (DAK)	ruang	2.090.000.000	2.090.000.000	2.090.000.000	2.090.000.000	2.090.000.000	10.450.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
119	1.01.18.16	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK beserta Perabotnya	Terbangunnya ruang kelas baru SMK beserta perabotnya (DAK)	ruang	836.000.000	836.000.000	836.000.000	836.000.000	836.000.000	4.180.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
120	1.01.18.17	Rehabilitasi Ruang Kelas SMK beserta Perabotnya	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SMK Beserta Perabotnya (DAK)	ruang	424.000.000	424.000.000	424.000.000	424.000.000	424.000.000	2.120.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
121	1.01.18.17	Rehabilitasi Ruang Kelas SMK beserta Perabotnya	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SMK Beserta Perabotnya (DAK)	ruang	477.000.000	477.000.000	477.000.000	477.000.000	477.000.000	2.385.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
122	1.01.18.17	Rehabilitasi Ruang Kelas SMK beserta Perabotnya	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SMK Beserta Perabotnya (DAK)	ruang	265.000.000	265.000.000	265.000.000	265.000.000	265.000.000	1.325.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
123	1.01.18.17	Rehabilitasi Ruang Kelas SMK beserta Perabotnya	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SMK Beserta Perabotnya (DAK)	ruang	742.000.000	742.000.000	742.000.000	742.000.000	742.000.000	3.710.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
124	1.01.18.17	Rehabilitasi Ruang Kelas SMK beserta Perabotnya	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SMK Beserta Perabotnya (DAK)	ruang	371.000.000	371.000.000	371.000.000	371.000.000	371.000.000	1.855.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
125	1.01.18.17	Rehabilitasi Ruang Kelas SMK beserta Perabotnya	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SMK Beserta Perabotnya (DAK)	ruang	1.060.000.000	1.060.000.000	1.060.000.000	1.060.000.000	1.060.000.000	5.300.000.000	APBD	Dinas Pendidikan

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
126	1.01.18.17	Rehabilitasi Ruang Kelas SMK beserta Perabotnya	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SMK Beserta Perabotnya (DAK)	ruang	954.000.000	954.000.000	954.000.000	954.000.000	954.000.000	4.770.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
127	1.01.18.17	Rehabilitasi Ruang Kelas SMK beserta Perabotnya	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SMK Beserta Perabotnya (DAK)	ruang	477.000.000	477.000.000	477.000.000	477.000.000	477.000.000	2.385.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
128	1.01.18.17	Rehabilitasi Ruang Kelas SMK beserta Perabotnya	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SMK Beserta Perabotnya (DAK)	ruang	583.000.000	583.000.000	583.000.000	583.000.000	583.000.000	2.915.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
129	1.01.18.17	Rehabilitasi Ruang Kelas SMK beserta Perabotnya	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SMK Beserta Perabotnya (DAK)	ruang	212.000.000	212.000.000	212.000.000	212.000.000	212.000.000	1.060.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
130	1.01.18.17	Rehabilitasi Ruang Kelas SMK beserta Perabotnya	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SMK Beserta Perabotnya (DAK)	ruang	106.000.000	106.000.000	106.000.000	106.000.000	106.000.000	530.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
131	1.01.18.17	Rehabilitasi Ruang Kelas SMK beserta Perabotnya	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SMK Beserta Perabotnya (DAK)	ruang	530.000.000	530.000.000	530.000.000	530.000.000	530.000.000	2.650.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
132	1.01.18.17	Rehabilitasi Ruang Kelas SMK beserta Perabotnya	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SMK Beserta Perabotnya (DAK)	ruang	159.000.000	159.000.000	159.000.000	159.000.000	159.000.000	795.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
133	1.01.18.17	Rehabilitasi Ruang Kelas SMK beserta Perabotnya	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SMK Beserta Perabotnya (DAK)	ruang	318.000.000	318.000.000	318.000.000	318.000.000	318.000.000	1.590.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
134	1.01.18.18	Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK beserta Perabotnya	Terlaksananya Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK beserta Perabotnya (DAK)	ruang	3.822.000.000	3.822.000.000	3.822.000.000	3.822.000.000	3.822.000.000	19.110.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
135	1.01.18.18	Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK beserta Perabotnya	Terlaksananya Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK beserta Perabotnya (DAK)	ruang	2.184.000.000	2.184.000.000	2.184.000.000	2.184.000.000	2.184.000.000	10.920.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
136	1.01.18.18	Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK beserta Perabotnya	Terlaksananya Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK beserta Perabotnya (DAK)	ruang	4.368.000.000	4.368.000.000	4.368.000.000	4.368.000.000	4.368.000.000	21.840.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
137	1.01.18.18	Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK beserta Perabotnya	Terlaksananya Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK beserta Perabotnya (DAK)	ruang	1.911.000.000	1.911.000.000	1.911.000.000	1.911.000.000	1.911.000.000	9.555.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
138	1.01.18.18	Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK beserta Perabotnya	Terlaksananya Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMK beserta Perabotnya (DAK)	ruang	1.365.000.000	1.365.000.000	1.365.000.000	1.365.000.000	1.365.000.000	6.825.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
139	1.01.18.19	Pengadaan Peralatan Praktik Peserta Didik SMK	Tersedianya Peralatan Praktik Peserta Didik SMK (DAK)	ruang	1.057.000.000	1.057.000.000	1.057.000.000	1.057.000.000	1.057.000.000	5.285.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
140	1.01.18.19	Pengadaan Peralatan Praktik Peserta Didik SMK	Tersedianya Peralatan Praktik Peserta Didik SMK (DAK)	ruang	1.208.000.000	1.208.000.000	1.208.000.000	1.208.000.000	1.208.000.000	6.040.000.000	APBD	Dinas Pendidikan

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan		Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2017	2018	2019	2020	2021			
141	1.01.18.19	Pengadaan Peralatan Praktik Peserta Didik SMK	Tersedianya Peralatan Praktik Peserta Didik SMK (DAK)	ruang	1.057.000.000	1.057.000.000	1.057.000.000	1.057.000.000	1.057.000.000	5.285.000.000	APBD	Dinas Pendidikan

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
142	1.01.18.19	Pengadaan Peralatan Praktik Peserta Didik SMK	Tersedianya Peralatan Praktik Peserta Didik SMK (DAK)	ruang	1.510.000.000	1.510.000.000	1.510.000.000	1.510.000.000	1.510.000.000	7.550.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
143	1.01.18.19	Pengadaan Peralatan Praktik Peserta Didik SMK	Tersedianya Peralatan Praktik Peserta Didik SMK (DAK)	ruang	604.000.000	604.000.000	604.000.000	604.000.000	604.000.000	3.020.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
144	1.01.18.19	Pengadaan Peralatan Praktik Peserta Didik SMK	Tersedianya Peralatan Praktik Peserta Didik SMK (DAK)	ruang	302.000.000	302.000.000	302.000.000	302.000.000	302.000.000	1.510.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
145	1.01.18.19	Pengadaan Peralatan Praktik Peserta Didik SMK	Tersedianya Peralatan Praktik Peserta Didik SMK (DAK)	ruang	2.869.000.000	2.869.000.000	2.869.000.000	2.869.000.000	2.869.000.000	14.345.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
146	1.01.18.19	Pengadaan Peralatan Praktik Peserta Didik SMK	Tersedianya Peralatan Praktik Peserta Didik SMK (DAK)	ruang	453.000.000	453.000.000	453.000.000	453.000.000	453.000.000	2.265.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
147	1.01.18.20	Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SMK	Tersosialisasinya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SMK	sekolah	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	1.000.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
148	1.01.18.21	Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik SMK	Tersosialisasinya Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik SMK	sekolah	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.500.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
149	1.01.18.22	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SMK	Tertindakannya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SMK	laporan	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.500.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
	1.01.20	<b>PROGRAM : Program Pendidikan Luar Biasa</b>										
150	1.01.20.59	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tertindakannya monitoring pelaksanaan Program dan kegiatan pada SLB	orang	84.000.000	84.000.000	84.000.000	84.000.000	84.000.000	420.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
151	1.01.20.64	Gebyar PK dan PLK	Tertindakannya Lomba Sekolah Sehat PK dan PLK	orang	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	4.000.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
152	1.01.20.86	Festival dan Lomba-Lomba PK-PLK	Tertindakannya Festival dan Lomba-lomba PK-PLK yaitu FLS2N,O2SN dan Jambore	orang	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
153	1.01.20.103	Pengadaan Alat Keterampilan	Tersedianya alat keterampilan SLB	paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	250.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
154	1.01.20.103	Pengadaan Alat Keterampilan	Tersedianya alat keterampilan SLB	paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	250.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
155	1.01.20.103	Pengadaan Alat Keterampilan	Tersedianya alat keterampilan SLB	paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	250.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
156	1.01.20.103	Pengadaan Alat Keterampilan	Tersedianya alat keterampilan SLB	paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	250.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
157	1.01.20.103	Pengadaan Alat Keterampilan	Tersedianya alat keterampilan SLB	paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	250.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
158	1.01.20.103	Pengadaan Alat Keterampilan	Tersedianya alat keterampilan SLB	paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	250.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
159	1.01.20.104	Pencetakan Raport	Tertindakannya pengadaan raport	sekolah	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	750.000.000	APBD	Dinas Pendidikan

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan		Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2017	2018	2019	2020	2021			
160	1.01.20.106	Bimtek Dapodik Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Terselenggaranya a kegiatan Bimtek Dapodik PK-LK	orang	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.500.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
161	1.01.20.107	Seleksi Kepala Sekolah, Pengawas dan Guru SLB Berprestasi	Terselenggaranya Seleksi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Guru PK dan PLK Berprestasi dan Berdedikasi	orang	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	1.000.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
162	1.01.20.108	Penjaringan Data Anak Berkebutuhan Khusus	Terselenggaranya Penjaringan Data ABK	orang	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	2.000.000.000	APBD	Dinas Pendidikan

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
	1.01. 22	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>									
	1.01.22.18	Sosialisasi Gerakan Literasi Sekolah	Terlaksananya Gerakan Literasi di Sekolah Dasar	orang	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	875.000.000	APBD	Dinas Pendidikan
	2.17. 15	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>									
	2.17.15.02	Pengembangan minat dan budaya baca	Meningkatnya daya pelayanan perpustakaan pada pemustaka untuk peningkatan minat dan budaya baca yang lebih baik	dokumen	260.800.000	280.000.000	290.000.000	300.000.000	310.000.000	1.440.800.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	2.17.15.03	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Terwujudnya pembinaan pelayanan dan stimulasi pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan juga perpustakaan masyarakat	dokumen	52.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000	70.000.000	302.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	2.17.15.08	Pembinaan publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Meningkatnya cakupan publikasi dan sosialisai perpustakaan	dokumen	146.500.000	160.000.000	165.000.000	170.000.000	175.000.000	816.500.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	2.17.15.09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Tercapainya berbagai ragam bahan penunjang stabilitas kelengkapan bahan pustaka	dokumen	80.000.000	82.000.000	85.000.000	87.000.000	90.000.000	424.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	2.17.15.11	Penerbitan literatur sekunder	Meningkatnya informasi data/sarana penelusuran koleksi deposit bibliografi, indeks dan KCKR	terbitan	48.300.000	49.300.000	50.300.000	55.300.000	57.300.000	260.500.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	2.17.15.12	Pengembangan akses layanan perpustakaan	Terfasilitasnya layanan perpustakaan/informasi untuk pemustaka	dokumen	62.726.000	70.000.000	75.000.000	80.000.000	85.000.000	372.726.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	2.17.15.13	Promosi dan Informasi Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Pameran Buku (book fair) se Kalimantan	Terpromosinya koleksi perpustakaan, arsip dan dokumentasi provinsi Kalimantan tengah	dokumen	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	800.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Arsip

TUJUAN 5 : KESETARAAN GENDER

Kode Indikator	Sasaran	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
						2017	2018	2019	2020	2021
5.5 Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik										
5:05:01	Meningkatnya kualitas pendidikan	IPM	RPJMD	persen	68,53	69,30	70,00	70,70	71,60	72,50



TUJUAN 5 : KESETARAAN GENDER

NO	KODE	kegiatankegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
		<b>TPB 5.5</b>	: Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik									
	<b>2.02. 18</b>	<b>PROGRAM</b>	: Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan									
1	2.02.18.07	Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan	kegiatan	kegiatan	100.000.000	137.285.715	137.285.715	137.285.715	137.285.715	649.142.860	APBD	Dinas P3APPKB
2	2.02.18.08	kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	orang	-	60.000.000	60.000.000	-	-	120.000.000	APBD	Dinas P3APPKB
3	2.02.18.11	Pelatihan Keterampilan Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Keluarga Untuk Menuju Keluarga Yang Berkualitas	Jumlah Perempuan	orang	-	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.000.000.000	APBD	Dinas P3APPKB
4	2.02.18.12	Pelatihan Pemanfaatan Limbah Menuju Lingkungan Sehat Bagi Rumah Tangga	Jumlah Peserta	orang	-	60.000.000	60.000.000	-	-	120.000.000	APBD	Dinas P3APPKB
5	2.02.18.13	Pengembangan Forum Pemberdayaan Produktifitas Ekonomi Perempuan (F-PPEP)	dokumen	dokumen	-	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	240.000.000	APBD	Dinas P3APPKB
6	2.02.18.14	Sosialisasi Tentang Akses Permodalan Untuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	dokumen	dokumen	-	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	240.000.000	APBD	Dinas P3APPKB
7	2.02.18.15	Monitoring dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	dokumen	dokumen	-	31.916.500	31.916.500	31.916.500	31.916.500	127.666.000	APBD	Dinas P3APPKB

NO	KODE	kegiatankegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
8	2.02.18.16	Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Jumlah Peserta	orang	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000	APBD	Dinas P3APPKB
9	2.02.18.17	Penilaian Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	dokumen	dokumen	-	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	560.000.000	APBD	Dinas P3APPKB
10	2.02.18.18	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan HARGANAS, (Hari Keluarga Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional )	kegiatan	dokumen	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	APBD	Dinas P3APPKB
11	2.02.18.19	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan Dalam Menunjang PM2L	Jumlah Desa PM2L	desa lokasi PM2L	150.000.000	298.457.850	298.457.850	298.457.850	298.457.850	1.343.831.400	APBD	Dinas P3APPKB
12	2.02.18.25	Promosi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Jumlah Promosi	kali	-	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.000.000.000	APBD	Dinas P3APPKB
13	2.02.18.26	Capacity Building Bagi Perempuan	dokumen	dokumen	-	-	60.000.000	60.000.000	60.000.000	180.000.000	APBD	Dinas P3APPKB
	2.13.16	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>									
14	2.13.16.02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	orang-orang	orang	-	150.000.000	200.000.000	220.000.000	240.000.000	810.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
15	2.13.16.03	Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan	Tertindakannya aksi bhakti sosial kepemudaan melalui kemah bhakti	orang	50.000.000	75.000.000	85.000.000	95.000.000	105.000.000	410.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
16	2.13.16.04	Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda	kegiatan Temu Wicara Antar Pemuda	orang	-	110.000.000	120.000.000	130.000.000	140.000.000	500.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
17	2.13.16.14	kalimantan Tengah	kalimantan Tengah	orang	100.000.000	145.000.000	180.000.000	220.000.000	250.000.000	895.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga

NO	KODE	kegiatankegiatan		Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2017	2018	2019	2020	2021			
18	2.13.16.15	kalimantan Tengah	kalimantan Tengah	orang	-	120.000.000	200.000.000	220.000.000	240.000.000	780.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
19	2.13.16.16	kegiatan OKP	kegiatan OKP	OKP	-	50.000.000	120.000.000	140.000.000	180.000.000	490.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
20	2.13.16.19	Seleksi peserta pertukaran pemuda antar provinsi dan antar negara	Terlaksananya seleksi pertukaran pemuda antar provinsi dan antar negara	orang	50.000.000	80.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	580.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
21	2.13.16.24	Penyuluhan bidang politik bagi pemuda.	kegiatan Penyuluhan Bidang Politik bagi Pemuda se Kalteng	orang	-	120.000.000	130.000.000	140.000.000	150.000.000	540.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
22	2.13.16.31	Penugasan paskibraka pada HUT Kemerdekaan RI	kalimantan Tengah	orang	800.000.000	950.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	5.050.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
23	2.13.16.34	kegiatan Kemah Bhakti Pramuka	kegiatan Kemah Bhakti Pramuka	orang	-	160.000.000	200.000.000	220.000.000	230.000.000	810.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
24	2.13.16.35	Pendidikan Karakter Bangsa bagi Pramuka	kegiatan Pendidikan Karakter Bangsa bagi Pramuka	orang	50.000.000	100.000.000	140.000.000	180.000.000	200.000.000	670.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
25	2.13.16.36	Pelatihan kepemimpinan bagi pramuka	kegiatan Pelatihan Kepemimpinan bagi Pramuka	orang	-	100.000.000	140.000.000	180.000.000	200.000.000	620.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
26	2.13.16.37	Jambore Pemuda Daerah (JPD) tingkat Prov. Kalteng	kalimantan Tengah	orang	-	430.000.000	445.000.000	460.000.000	475.000.000	1.810.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
27	2.13.16.41	Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara Pemuda Tingkat Daerah	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara Pemuda Tingkat Daerah	orang	-	190.000.000	200.000.000	210.000.000	220.000.000	820.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
28	2.13.16.43	Pelatihan Peningkatan wawasan Pemuda Daerah tertinggal dan daerah rawan konflik	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Wawasan Pemuda Daerah Tertinggal dan Rawan Konflik	orang	-	170.000.000	180.000.000	190.000.000	200.000.000	740.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
29	2.13.16.45	Pendataan Organisasi Kepemudaan	kegiatan Pendataan organisasi kepemudaan	laporan	25.000.000	55.000.000	70.000.000	90.000.000	100.000.000	340.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
30	2.13.16.46	Ikrar Anak Bangsa	kegiatan Ikrar Anak Bangsa	orang	-	210.000.000	250.000.000	280.000.000	300.000.000	1.040.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga

NO	KODE	kegiatankegiatan		Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2017	2018	2019	2020	2021			
31	2.13.16.47	Pengiriman Duta Belia	Terlaksananya Pengiriman PPI Kalteng ke luar daerah	orang	-	800.000.000	1.087.100.000	1.150.000.000	1.273.000.000	4.310.100.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
32	2.13.16.48	kalimantan Tengah	kalimantan Tengah	orang	-	110.000.000	150.000.000	200.000.000	220.000.000	680.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
33	2.13.16.50	Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional	kegiatan Jambore Pemuda (JPI) Indonesia Tingkat Nasional	orang	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
34	2.13.16.51	Peningkatan Wawasan Pemuda Melalui Sosialisasi 4 (empat) Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	Terlaksananya sosialisasi 4 (empat) kosensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dikalangan generasi muda	orang	50.000.000	90.000.000	100.000.000	110.000.000	120.000.000	470.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
35	2.13.16.52	Lomba Keterampilan Baris Berbaris (LKBB) bagi Pemuda	kegiatan Lomba Keterampilan Baris Berbaris (LKBB) bagi Pemuda	pleton	-	220.000.000	230.000.000	250.000.000	260.000.000	960.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
36	2.13.16.53	Festival Lomba Vocal Solo bagi Pemuda se-Kalteng	kegiatan Festival Lomba Vocal Solo Bagi Pemuda	orang	-	-	80.000.000	-	100.000.000	180.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
37	2.13.16.55	Seminar Loka Karya Pencerahan Kebangsaan Bagi Pramuka	kegiatan Seminar Loka Karya Pencerahan Kebangsaan Bagi Pramuka	orang	-	110.000.000	120.000.000	140.000.000	160.000.000	530.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
38	2.13.16.56	Gerakan Tanam dan Peliharaan Pohon Bagi Pramuka	Terlaksananya Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon Bagi Pramuka	pohon	-	80.000.000	100.000.000	150.000.000	180.000.000	510.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
39	2.13.16.57	Festival Lomba Band Bagi Pemuda se-Kalteng	kegiatan Festival Lomba Band Bagi Pemuda	kegiatan	-	100.000.000	-	155.000.000	-	255.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
40	2.13.16.58	Penyuluhan dan Aksi Pemuda Terhadap Lingkungan Hidup	kegiatan Penyuluhan dan Aksi Pemuda Terhadap Lingkungan Hidup	orang	-	100.000.000	100.000.000	120.000.000	150.000.000	470.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
41	2.13.16.59	Penyuluhan Bidang Hukum Bagi Pemuda	Terlaksananya Penyuluhan Bidang Hukum Bagi Pemuda	orang	-	100.000.000	100.000.000	120.000.000	140.000.000	460.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga

NO	KODE	kegiatankegiatan		Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2017	2018	2019	2020	2021			
42	2.13.16.60	Pelatihan Peningkatan Wawasan Pemuda Daerah Rawan Bencana	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Wawasan Pemuda Daerah Rawan Bencana	orang	-	100.000.000	100.000.000	120.000.000	150.000.000	470.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
43	2.13.16.61	Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda	Terlaksananya Lomba Kreaso dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda	orang	-	100.000.000	100.000.000	120.000.000	150.000.000	470.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
44	2.13.16.62	Lomba Cipta Lagu Daerah Bagi Pemuda	Terlaksananya Lomba Cipta Lagu Bagi Pemuda	orang	-	100.000.000	100.000.000	120.000.000	150.000.000	470.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
45	2.13.16.63	Sosialisasi Cinta Damai Lintas Agama Bagi Pemuda	Terlaksananya Sosialisasi Cinta Damai Lintas Agama bagi Pemuda	orang	-	150.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000	700.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
46	2.13.16.64	Penyuluhan Wawasan Pemuda Terhadap Pornografi dan Pornoaksi	Meningkatnya Pengetahuan Pemuda akan Bahaya Pornografi dan Pornoaksi	orang	-	150.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000	700.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.13. 28	<b>PROGRAM</b>	<b>: kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan</b>									
47	2.13.28.01	kegiatan-Kegiat an Kepemudaan dan Keolahragaan	kegiatan keolahragaan dan kepemudaan bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	laporan	294.197.000	300.000.000	330.000.000	350.000.000	400.000.000	1.674.197.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
48	2.13.28.02	Penyusunan Bulletin Dinas Pemuda dan Olahraga	Terlaksananya penyusunan buletin Dinas Pemuda dan Olahraga	buku	30.000.000	40.000.000	45.000.000	47.000.000	60.000.000	222.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
49	2.13.28.03	Pengembangan dan Penguatan Informasi Data Base Dinas Pemuda dan Olahraga	Terlaksannanya pengembangan dan penguatan informasi data base pemuda dan olahraga	dokumen	-	-	350.000.000	100.000.000	100.000.000	550.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2.13. 24	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Pembinaan dan pengembangan Prestasi Olah Raga</b>									
50	2.13.24.03	kalimantan	Terlaksananya kompetisi klub olahraga pelajar se Kalteng	kompetisi	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga

NO	KODE	kegiatankegiatan		Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2017	2018	2019	2020	2021			
51	2.13.24.05	Pelatihan Peningkatan Kualitas Pelatih Pemandu Bakat Bagi Guru Olahraga Sekolah Dasar	kegiatan pelatihan peningkatan kualitas pemandu bakat bagi Guru Olahraga	orang	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	APBD	Dinas Pemuda dan Olah Raga

**TUJUAN 6 : AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK**

Kode Indikator	Sasaran	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian			
						2017	2018	2019	2020
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang da ulang yang aman secara global.									
6.3.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	RPJMD	persen	69,54	70,50	70,90	71,40	72,00

2021
kimia laur
72,75



TUJUAN 6 : AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
		<b>TPB 6.1</b>	<b>: Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua</b>									
	1.02 . 52	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program kesehatan lingkungan</b>									
1	1.02 .52.05	Pengawasan kualitas air	Terpantaunya kualitas air minum di masyarakat	sampel	50.000.000	175.000.000	250.000.000	300.000.000	315.000.000	1.090.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
2	1.02 .52.08	Pendekatan Perubahan Perilaku Melalui STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	Didapatnya perubahan perilaku dimasyarakat desa yang melaksanakan STBM	desa	80.000.000	350.000.000	300.000.000	350.000.000	367.500.000	1.447.500.000	APBD	Dinas Kesehatan
3	1.02 .52.09	Seminar dan Pemilihan Duta STBM se Kalimantan Tengah	Didapatnya Duta STBM Kalteng dan tersosialisasinya program STBM	orang	65.000.000	250.000.000	135.000.000	145.000.000	152.250.000	747.250.000	APBD	Dinas Kesehatan
4	1.02 .52.10	Pembelajaran Kegiatan Penyehatan Lingkungan	Didapatnya informasi tentang keberhasilan program penyehatan lingkungan	OT	45.000.000	185.000.000	65.000.000	75.000.000	78.750.000	448.750.000	APBD	Dinas Kesehatan
5	1.02 .52.11	Peningkatan Kegiatan Penyehatan Lingkungan	Diperolehnya data Penyehatan lingkungan	OT	-	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	215.506.250	APBD	Dinas Kesehatan
6	1.02 .52.12	Pertemuan Lintas Sektor Dalam Pencapaian Universal Akses Sanitasi 2019	Didapatnya komitmen lintas sektor dalam mendukung kegiatan sanitasi	orang	-	115.000.000	115.000.000	120.000.000	126.000.000	476.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
7	1.02 .52.13	Pertemuan Evaluasi PLR (Pengamanan Limbah dan Radiasi)	Terevaluasinya program PLR (Pengamanan Limbah dan Radiasi) dalam pencapaian persentasi RS yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai peraturan	orang	-	115.000.000	115.000.000	120.000.000	126.000.000	476.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
8	1.02 .52.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis RS	Persentasi RS yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai peraturan	rumah	50.000.000	160.000.000	168.000.000	176.400.000	185.220.000	739.620.000	APBD	Dinas Kesehatan
9	1.02 .52.16	Pengawasan Rumah Sehat	Terpantaunya Rumah Sehat di Kalteng	rumah	-	250.000.000	250.000.000	300.000.000	315.000.000	1.115.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
	1.03 . 27	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah</b>									

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
10	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan IPAL Terpusat Skala Kawasan	unit	-	-	500.000.000	-	1.000.000.000	1.500.000.000	APBD	Dinas PUPR
11	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan Jamban dan Air Bersih di Sekolah	unit	250.000.000	300.000.000	300.000.000	-	-	850.000.000	APBD	Dinas PUPR
12	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan IPAL Terpusat, Kab. Kotim	unit	-	30.000.000.000	-	-	-	30.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
13	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan Sistem Perpipaan Sekunder dan Tersier, Kab. Kotim	unit	-	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-	10.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
14	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pemasangan Pipa Pengumpul, Kab. Kotim	unit	500.000.000	500.000.000	750.000.000	-	-	1.750.000.000	APBD	Dinas PUPR
15	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan Instalasi Pengolah Leachate, Kab. Kotim	unit	-	-	4.325.000.000	-	-	4.325.000.000	APBD	Dinas PUPR
16	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan IPAL Komunal, Kab Sukamara	unit	-	-	300.000.000	150.000.000	300.000.000	750.000.000	APBD	Dinas PUPR
17	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan Jaringan Perpipaan IPAL Komunal Kawasan, Kab. Katingan	unit	-	-	-	150.000.000	150.000.000	300.000.000	APBD	Dinas PUPR
18	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan IPAL Komunal, Kab. Bartim	unit	-	-	3.000.000.000	-	-	3.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
19	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembuatan Jembatan Timbang, Kab. Bartim	unit	-	-	300.000.000	-	-	300.000.000	APBD	Dinas PUPR
20	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan Sarana Penunjang IPLT, Kab. Seruyan	unit	-	-	1.200.000.000	-	-	1.200.000.000	APBD	Dinas PUPR
21	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan Fasilitas Penunjang IPAL Kawasan, Kab. Seruyan	unit	-	-	800.000.000	-	-	800.000.000	APBD	Dinas PUPR
22	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan Septiktack Komunal Jaringan Perpipaan, Kab. Kobar	unit	5.100.000.000	5.100.000.000	-	-	-	10.200.000.000	APBD	Dinas PUPR
23	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan Jaringan Perpipaan IPAL , Kab. Kobar	unit	1.600.000.000	1.600.000.000	-	-	-	3.200.000.000	APBD	Dinas PUPR

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
24	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan IPLT, Kab. Gunung Mas	unit	-	-	-	-	6.000.000.000	6.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
25	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan Tankiseptic, Desa Batu Raya Satu, Kab. Barito Utara	unit	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-	-	1.200.000.000	APBD	Dinas PUPR
26	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan Tankiseptic, Desa Batu Raya Dua, Kab. Barito Utara	unit	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-	-	1.200.000.000	APBD	Dinas PUPR
27	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan Jaringan Perpipaan IPAL Komunal, Kab. Barito Utara	unit	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	-	450.000.000	APBD	Dinas PUPR
28	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan IPAL Kawasan, Kab. Kapuas	unit	-	-	-	10.000.000.000	20.000.000.000	30.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
29	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan IPAL Komunal, Kab. Pulang Pisau	unit	-	-	8.450.000.000	-	-	8.450.000.000	APBD	Dinas PUPR
30	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan IPAL Komunal, Kab. Murung Raya	unit	-	-	-	8.450.000.000	-	8.450.000.000	APBD	Dinas PUPR
31	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan IPAL Komunal, Kab. Lamandau	unit	-	-	-	4.000.000.000	-	4.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
32	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan Jaringan IPAL Komunal, Kab. Lamandau	unit	-	-	-	-	400.000.000	400.000.000	APBD	Dinas PUPR
33	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan - Pagar Pengaman Jalan (Guardraiel) Mentawa baru ketapang	meter persegi	-	300.000.000	-	-	-	300.000.000	APBD	Dinas PUPR
34	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Kecamatan Sematu Jaya	paket	-	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
35	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Kecamatan Bulik Timur	paket	-	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
36	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Kecamatan Mentohi Raya	paket	-	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	APBD	Dinas PUPR

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
37	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Kecamatan Delang	unit	-	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
38	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Kecamatan Belantikan Raya	unit	-	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
39	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Kecamatan Lamandau	unit	-	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
40	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Kecamatan Bulik	unit	-	3.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
41	1.03 .27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Kecamatan Batang Kawa	unit	-	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
42	1.03 .27.10	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi	Pengadaan dan pemasangan Jaringan Distribusi	meter	3.000.000.000	7.500.000.000	5.000.000.000	5.500.000.000	6.000.000.000	27.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
43	1.03 .27.10	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi	Pembangunan Sarana Air Bersih Kecamatan Sematu Jaya Sematu jaya	paket	-	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
44	1.03 .27.10	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi	Pembangunan Sarana Air Bersih Kecamatan Delang	paket	-	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
45	1.03 .27.10	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi	Pembangunan Sarana Air Bersih Kecamatan Belantikan Raya	paket	-	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
46	1.03 .27.10	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi	Pembangunan Sarana Air Bersih Kecamatan Bulik	paket	-	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
47	1.03 .27.10	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi	Pembangunan Sarana Air Bersih Kecamatan Batang Kawa	paket	-	3.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
48	1.03 .27.10	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi	Pembangunan Sarana Air Bersih Kecamatan Lamandau	paket	-	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	APBD	Dinas PUPR

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
49	1.03 .27.10	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi	Pembangunan Sarana Air Bersih Kecamatan Mentohi Raya	paket	-	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
50	1.03 .27.10	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi	Pembangunan Sarana Air Bersih Kecamatan Bulik Timur	paket	-	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
51	1.03 .27.10	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan - Pengadaan/Pas angan Pipa Jaringan Distribusi 200 mm, 160 mm dan 110 mm dan 63 mm, Teluk sampit, Mentaya hilir selatan	meter	-	7.000.000.000	-	-	-	7.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
52	1.03 .27.10	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan - Pasangan Sambungan Rumah ( SR ), Mentaya hilir utara	unit	-	262.500.000	-	-	-	262.500.000	APBD	Dinas PUPR
53	1.03 .27.10	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan - Pengadaan/Pas angan Pipa Jaringan Distribusi 110, 90 dan 63 mm, Mentaya hilir utara	meter	-	1.500.000.000	-	-	-	1.500.000.000	APBD	Dinas PUPR
54	1.03 .27.10	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi	Penyediaan sarana dan Prasarana air Limbah Sebangau, Pahandut	unit	-	1.460.000.000	-	-	-	1.460.000.000	APBD	Dinas PUPR
55	1.03 .27.10	Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Pahandut, Bukit batu	unit	-	4.450.000.000	-	-	-	4.450.000.000	APBD	Dinas PUPR
56	1.03 .27.12	Penyediaan Air Bersih Kawasan Pesisir	pembangunan infrastruktur penunjang kawasan pesisir desa Kuala Jelai, Sei Baru, Seibundung, Seiraja Kab. Sukamara	unit	-	-	5.000.000.000	-	-	5.000.000.000	APBD	Dinas PUPR

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
57	1.03 .27.12	Penyediaan Air Bersih Kawasan Pesisir	pembangunan infrastruktur penunjang kawasan pesisir desa Seidamar, Seinibung, Seitabuk, Seipinang, Seicabang barat Kab. Sukamara	kegiatan	-	-	-	7.500.000.000	-	7.500.000.000	APBD	Dinas PUPR
58	1.03 .27.12	Penyediaan Air Bersih Kawasan Pesisir	pembangunan infrastruktur penunjang kawasan pesisir desa Lunci, Seibutu, Seipasar, Kab. Sukamara	kegiatan	-	-	4.300.000.000	-	-	4.300.000.000	APBD	Dinas PUPR
59	1.03 .27.12	Penyediaan Air Bersih Kawasan Pesisir	pembangunan infrastruktur penunjang kawasan pesisir desa Tanjung Putri, Sebuai, Keraya, Bakau, Kab. Kotawaringin Barat	kegiatan	-	5.700.000.000	-	-	-	5.700.000.000	APBD	Dinas PUPR
60	1.03 .27.12	Penyediaan Air Bersih Kawasan Pesisir	pembangunan infrastruktur penunjang kawasan pesisir desa Teluk Bogam, Kubu, Kapitan, Teluk Pulai, Seihadang/Seicabang, Kab. Kotawaringin Barat	kegiatan	-	7.000.000.000	-	-	-	7.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
61	1.03 .27.12	Penyediaan Air Bersih Kawasan Pesisir	pembangunan infrastruktur penunjang kawasan pesisir desa Bakau Kab. Seruyan	kegiatan	-	-	-	-	1.400.000.000	1.400.000.000	APBD	Dinas PUPR
62	1.03 .27.12	Penyediaan Air Bersih Kawasan Pesisir	pembangunan infrastruktur penunjang kawasan pesisir desa Ujung pandaran, Lempuyang, Bapinang Hilir Laut Kab. Kotawaringin Timur	kegiatan	-	-	-	4.300.000.000	-	4.300.000.000	APBD	Dinas PUPR
63	1.03 .27.12	Penyediaan Air Bersih Kawasan Pesisir	pembangunan infrastruktur penunjang kawasan pesisir desa Parebok Kab. Kotawaringin Timur	kegiatan	-	-	-	-	1.400.000.000	1.400.000.000	APBD	Dinas PUPR
64	1.03 .27.12	Penyediaan Air Bersih Kawasan Pesisir	pembangunan infrastruktur penunjang kawasan pesisir desa Kampung Keramat, Pagatan Hulu, Pagatan, Pagatan Hilir Kab. Katingan	kegiatan	-	-	-	-	5.700.000.000	5.700.000.000	APBD	Dinas PUPR
65	1.03 .27.12	Penyediaan Air Bersih Kawasan Pesisir	pembangunan infrastruktur penunjang kawasan pesisir desa Cemantan, Seirungun, Kiapak, Kab. Pulang Pisau	kegiatan	-	-	-	-	1.400.000.000	1.400.000.000	APBD	Dinas PUPR

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
66	1.03 .27.12	Penyediaan Air Bersih Kawasan Pesisir	pembangunan infrastruktur penunjang kawasan pesisir desa Batanjung, Cemaralabat, Palampai Kab. Kapuas	kegiatan	-	-	-	1.400.000.000	-	1.400.000.000	APBD	Dinas PUPR
	1.03 . 24	<b>PROGRAM</b>	: <b>Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</b>									
67	1.03 .24.18	Perencanaan dan supervisi kegiatan sumber daya air	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	dok	4.997.656.000	19.200.000.000	23.000.000.000	24.000.000.000	25.000.000.000	96.197.656.000	APBD	Dinas PUPR
68	1.03 .24.19	Pembangunan jaringan irigasi /rawa	Jumlah jaringan irigasi/rawa yang terbangun	Ha	-	21.000.000.000	10.000.000.000	11.000.000.000	12.000.000.000	54.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
69	1.03 .24.20	Rehabilitasi Jaringan Irigasi/Rawa	Jumlah jaringan irigasi/rawa yang dibangun	ha	14.124.000.000	37.000.000.000	27.600.000.000	29.000.000.000	89.000.000.000	196.724.000.000	APBD	Dinas PUPR
70	1.03 .24.22	OP Bendung	Jumlah Bendung yang dipelihara	bh	200.000.000	800.000.000	850.000.000	870.000.000	880.000.000	3.600.000.000	APBD	Dinas PUPR
71	1.03 .24.23	Rapat teknis OP tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah laporan kegiatan yang dihasilkan	keg	250.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000	300.000.000	1.250.000.000	APBD	Dinas PUPR
72	1.03 .24.24	Rapat regional OP tingkat nasional	Jumlah laporan kegiatan yang dihasilkan	keg	200.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000	300.000.000	1.200.000.000	APBD	Dinas PUPR
73	1.03 .24.26	Lomba Pengamat dan Juru Pengairan se Kalimantan Tengah	Jumlah peserta lomba pengamat dan juru pengairan	keg	300.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000	300.000.000	1.300.000.000	APBD	Dinas PUPR
74	1.03 .24.27	Pendukung DAK Bidang Pengairan	Jumlah jaringan irigasi/rawa yang dibangun/ditingkatkan dan direhabilitasi	ha	10.048.500.000	-	-	-	-	10.048.500.000	APBD	Dinas PUPR
75	1.03 .24.28	Survey dan Inventarisasi Usulan Kegiatan	Jumlah laporan survey yang dilaksanakan	dok	141.034.000	400.000.000	500.000.000	500.000.000	600.000.000	2.141.034.000	APBD	Dinas PUPR
76	1.03 .24.29	Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Data Sumber Daya Air	Jumlah laporan data yang dihasilkan	lap	-	250.000.000	300.000.000	300.000.000	350.000.000	1.200.000.000	APBD	Dinas PUPR
77	1.03 .24.30	OP Jaringan Pengairan Kota Palangka Raya	Jumlah jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara	ha	435.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.435.000.000	APBD	Dinas PUPR
78	1.03 .24.31	OP Jaringan Pengairan Kabupaten Barito Timur	Jumlah jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara	ha	500.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	2.300.000.000	APBD	Dinas PUPR

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
79	1.03 .24.33	OP Jaringan Pengairan Kabupaten Pulang Pisau	Jumlah jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara	ha	1.520.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000	11.720.000.000	APBD	Dinas PUPR
80	1.03 .24.34	OP Jaringan Pengairan Kabupaten Kapuas	Jumlah jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara	ha	1.150.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.200.000.000	4.200.000.000	17.550.000.000	APBD	Dinas PUPR
81	1.03 .24.35	OP Jaringan Pengairan Kabupaten Katingan	Jumlah jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara	ha	750.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.750.000.000	APBD	Dinas PUPR
82	1.03 .24.36	OP Jaringan Pengairan Kabupaten Kotawaringin Timur	Jumlah jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara	ha	2.450.000.000	4.700.000.000	4.700.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	21.850.000.000	APBD	Dinas PUPR
83	1.03 .24.38	OP Jaringan Pengairan Kabupaten Sukamara	Jumlah jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara	ha	-	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
84	1.03 .24.39	OP Jaringan Pengairan Kabupaten Seruyan	Jumlah jaringan irigasi/rawa yang di operasi dan dipelihara	ha	950.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	2.750.000.000	APBD	Dinas PUPR
85	1.03 .24.43	DAK Bidang Pengairan	Jumlah jaringan irigasi/rawa yang dibangun/ditingkatkan dan direhabilitasi	ha	-	30.000.000.000	10.500.000.000	24.400.000.000	26.000.000.000	90.900.000.000	APBD	Dinas PUPR
86	1.03 .24.44	Rapat Koordinasi Komisi Irigasi Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah laporan kegiatan yang dihasilkan	keg	-	200.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	950.000.000	APBD	Dinas PUPR



**TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU**

Kode Indikator	Sasaran	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
						2017	2018	2019	2020	2021
<b>7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern</b>										
7:01:01	Meningkatnya ketercukupan energi	Rasio elektrifikasi	RPJMD	persen	69,8	75,5	79,5	83,5	87,5	92,5

TUJUAN 7 : ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
		<b>TPB 7.1</b>	: Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern									
	3.05.17	<b>PROGRAM</b>	: Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan									
1	3.05.17.31	Pra Rapat Kerja Kelistrikan	Meningkatnya pemahaman antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam rangka mewujudkan kalteng tarang	orang	50.000.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000	80.000.000	310.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2	3.05.17.33	Sosialisasi Penghematan Energi Listrik	Meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat dalam rangka pentingnya penghematan energi	orang	-	100.000.000	-	-	-	100.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	3.05.17.35	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemegang Izin Operasi Bidang Ketenagalistrika	perusahaan	perusahaan	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
4	3.05.17.36	gedung Bangunan Pemerintah	gedung bangunan pemerintah	gedung	-	300.000.000	300.000.000	350.000.000	350.000.000	1.300.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.05.22	<b>PROGRAM</b>	: Program Pengusahaan Listrik Dan Energi									
5	3.05.22.13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemegang Ijin Usaha Ketenagalistrika	Terbina dan terawasinya pemegang ijin usaha ketenagalistrikan	dokumen	90.000.000	90.000.000	60.000.000	60.000.000	30.000.000	330.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
6	3.05.22.16	Monitoring Pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi 150 KV	Jumlah Laporan kegiatan	dokumen	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
7	3.05.22.17	Sosialisasi Pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi 150 KV	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan jaringan transmisi tegangan tinggi 150 KV	dokumen	-	60.000.000	60.000.000	70.000.000	75.000.000	265.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
8	3.05.22.19	dokumen Pengelolaan Lingkungan	dokumen Pengelolaan Lingkungan	dokumen	0	150000000	150000000	150000000	150000000	600.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
9	3.05.22.21	Inventarisasi Captive Power Ketenagalistrikan di Kalimantan Tengah	Tersedianya data captive power ketenagalistrikan Kalimantan Tengah	dokumen	-	140.000.000	140.000.000	105.000.000	105.000.000	490.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
10	3.05.22.22	Monitoring dan Evaluasi Dampak Lingkungan Pada Jalur Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi 150 KV	Termonitor dan Terevaluasinya Dampak Lingkungan pada Jalur Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi 150 KV	dokumen	-	90.000.000	90.000.000	60.000.000	90.000.000	330.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.05.23	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Pengembangan Listrik Dan Pemanfaatan Energi</b>									
11	3.05.23.01	Pembangunan pembangkit dan jaringan (pembangunan PLTS)	Jumlah PLTS yang diadakan	desa	2.387.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	11.000.000.000	12.000.000.000	45.387.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
12	3.05.23.32	Pembangunan lampu penerangan jalan	Jumlah tiang	paket	150.000.000	250.000.000	300.000.000	400.000.000	500.000.000	1.600.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
13	3.05.23.33	Pemeliharaan dan pembenahan PJU dan JTM	Jumlah Laporan kegiatan	dokumen	200.000.000	300.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000	1.550.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
14	3.05.23.35	Survei Potensi energi listrik dari limbah cair kelapa sawit	Data potensi listrik dari limbah cair kelapa sawit	dokumen	-	60.000.000	60.000.000	-	-	120.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
15	3.05.23.39	Penyediaan Sarana dan Prasarana Listrik Dalam Rangka Mendukung Kelancaran pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar di Lokasi Pameran temanggung Tilung	Jumlah Laporan kegiatan	laporan	60.000.000	80.000.000	85.000.000	90.000.000	95.000.000	410.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
16	3.05.23.45	Koordinasi dalam Rangka Rintisan Pembangunan PLTU Mulut Tambang dan Penyaluran Melalui jaringan Listrik Kabel Bawah Laut Lintas Provinsi Kalimantan Tengah - Provinsi Jawa Tengah	Terkoordinasinya rintisan pembangunan PLTU mulut tambang	lokasi	-	400.000.000	400.000.000	-	-	800.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
17	3.05.23.51	Vertifikasi Lokasi Rencana Pembangunan Listrik Desa Dengan Sumber Energi baru Terbarukan	jumlah desa yang diverifikasi	desa	175.000.000	350.000.000	400.000.000	450.000.000	350.000.000	1.725.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
18	3.05.23.54	Pembuatan Peta Informasi	Jumlah peta yang dibuat	dokumen	140000000	0	0	0	0	140.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
19	3.05.23.61	Sosialisasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan PLTS	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan PLTS dan hasil pembangunan PLTS yang baik	kabupaten	-	400.000.000	400.000.000	450.000.000	500.000.000	1.750.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
20	3.05.23.62	Pemeriksaan dan Serah Terima Pelaksanaan Pembangunan PLTS	Jumlah Laporan kegiatan	dokumen	270.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	375.000.000	1.545.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
21	3.05.23.63	Pembangunan PLTS Terpusat	Jumlah PLTS yang terbangun	lokasi	-	24.000.000.000	24.000.000.000	21.000.000.000	15.000.000.000	84.000.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
22	3.05.23.64	Pembangunan Instalasi Bio Gas	Terbangunnya instalasi bio gas	lokasi	-	1.500.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
23	3.05.23.65	Pembuatan FS dan DED PLTS Terpusat	dokumen FS dan DED PLTS terpusat	lokasi	-	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000	12.800.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
24	3.05.23.66	Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana penunjang kegiatan DAK	dokumen	400.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	12.400.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
25	3.05.23.67	Pembuatan FS dan DED PLTS Terpusat 1 MW yang bersumber dari APBD	Tersedianya FS dan DED PLTS Terpusat 1 MW	dokumen	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	800.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
26	3.05.23.69	Inventarisasi Rencana Rehabilitasi Pembangkit Listrik Bersumber Dari Energi Baru dan Terbarukan	dokumen rencana rehabilitasi pembangkit listrik bersumber dari EBT	dokumen	90.000.000	150.000.000	100.000.000	150.000.000	170.000.000	660.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
27	3.05.23.70	Rapat dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Bioenergi Lestari di Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Kegiatan	dokumen	150.000.000	200.000.000	220.000.000	260.000.000	300.000.000	1.130.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
28	3.05.23.71	Rapat dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Revisi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) di Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Laporan Kegiatan	dokumen	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
29	3.05.23.72	Pembuatan FS dan DED PLTS Terpusat Bersumber Dari Dana APBD	dokumen FS dan DED PLTS Terpusat	dokumen	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	4.500.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
30	3.05.23.73	Pembuatan FS dan DED PLTS Terpusat Rooftop Dari Dana APBD	dokumen	dokumen	400.000.000	700.000.000	800.000.000	900.000.000	1.000.000.000	3.800.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
31	3.05.23.74	Seminar Nasional Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Provinsi Kalimantan Tengah	Pengetahuan Tentang Pengembangan Energi Baru Terbarukan	dokumen	-	100.000.000	120.000.000	-	140.000.000	360.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
32	3.05.23.76	Survey Potensi Energi Baru Terbarukan	Data potensi EBT untuk pembangkit listrik	dokumen	80.000.000	100.000.000	-	-	-	180.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
33	3.05.23.77	Pembangunan Instalasi Pemanfaatan Energi Skala Kecil Baru Terbarukan (DAK)	Terbangunnya instalasi pemanfaatan energi skala kecil baru terbarukan	-	39.376.000.000	-	-	-	-	39.376.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
34	3.05.23.79	Pembuatan Peta Geodatabase Pembangunan Listrik Desa	Peta Geodatabase Pembangunan Listrik Desa	dokumen	-	250.000.000	300.000.000	-	-	550.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
35	3.05.23.80	Pembuatan Perencanaan Rehabilitasi Hasil Pembangunan Pembangkit Listrik dari Sumber EBTE	dokumen Rencana Rehabilitasi Hasil Pembangunan Pembangkit Listrik dari Sumber EBT	dokumen	-	100.000.000	-	-	-	100.000.000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI**

Kode Indikator	Sasaran	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
						2017	2018	2019	2020	2021
<b>8.1 Memelihara pertumbuhan ekonomi perkapita sesuai dengan situasi nasional dan, khususnya, setidaknya mempertahankan 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto pertahunnya di negara-negara kurang berkembang</b>										
8:01:01	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Laju pertumbuhan ekonomi(%)	RPJMD	persen	7,01	6,5	6,5	7,0	7,0	7,5
<b>8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan</b>										
8:03:01	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Laju pertumbuhan ekonomi(%)	RPJMD	persen	7,01	6,5	6,5	7,0	7,0	7,5

TUJUAN 8 : PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
		<b>TPB 8.1</b>	<b>: tahunnya di negara-negara kurang berkembang</b>									
	4.01.22	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>									
1	4.01.22.19	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, Penanaman Modal, Pariwisata	Tersusunnya Rancangan Renja PD, Renja P-Renja PD, RKPD, P-RKPD, PPAS, PPAS-P dan Usulan Kegiatan APBN PD lingkup bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, Penanaman Modal, Pariwisata	Dokumen	140.000.000	-	-	-	-	140.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	4.01.22.20	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Tersusunnya Rancangan Renja PD, P-Renja RKPD, P-RKPD, PPAS, P-PPAS dan Usulan Kegiatan APBN PD lingkup bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	140.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	940.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	4.01.22.21	Penyusunan Rencana Kaji Ulang RAD GRK Tahun 2016-2030 dan Laporan PEP RAD GRK Kalteng	Tersedianya dokumen/laporan RAD-GRK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2030	Dokumen	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	4.01.22.22	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan	Tersusunnya Rancangan Renja PD, P-Renja, RKPD, P-RKPD, PPAS, P-PPAS dan Usulan Kegiatan APBN PD lingkup bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan	Dokumen	140.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	940.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	4.01.22.23	Asistensi Program Kegiatan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, SDA dan Kerjasama	Terlaksananya Asistensi program dan kegiatan perangkat Daerah Bidang Perekonomian, SDA dan Kerja sama	Dokumen	100.000.000	150.000.000	150.000.000	180.000.000	180.000.000	760.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
6	4.01.22.24	Koordinasi dan Konsultasi Analisis Ekonomi Regional	Hasil kesepakatan konsultasi regionla PDRB se Kalteng dan se-Kalimantan	Dokumen	108.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	200.000.000	758.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	4.01.22.25	Penyusunan Laporan PEP RAD GRK Kalteng	Tersusunnya dokumen laporan PEP RAD-GRK Kalteng Tahun 2018	Dokumen	-	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	600.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	4.01.22.26	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM dan Penanaman Modal	Tersusunnya Rancangan Renja PD, P-Renja, RKPD, P-RKPD, PPAS, P-PPAS, Usulan Kegiatan APBN PD lingkup bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM dan Penanaman Modal	Dokumen	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	800.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2.11.20	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM</b>									
9	2.11.20.01	Koordinasi perencanaan penyusunan program/pemberdayaan koperasi dan UMKM	Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi perencanaan penyusunan program pemberdayaan KUMKM dengan Kab/kota dalam mewujudkan sinergitas dan Harmonisasi program/kegiatan pemberdayaan KUMKM di Kalimantan Tengah	orang	128.527.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	828.527.000	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10	2.11.20.02	Rakor evaluasi program pemberdayaan koperasi dan UMKM	Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi pemberdayaan koperasi dan UMKM	orang	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	525.000.000	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11	2.11.20.14	Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Bantuan Perkuatan permodalan	Jumlah KUMKM yang di monev	KUMKM	45.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	245.000.000	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12	2.11.20.18	Forum koordinasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi lintas instansi / stakeholders pemberdayaan koperasi dan UMKM	orang	-	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	180.000.000	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
13	2.11.20.19	Pemetaan UMKM	Jumlah UMKM formal / informasi yang terdata up to date	Kab/Kota	-	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	700.000.000	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
14	2.11.20.30	Roadmap Masterplan Pengembangan Koperasi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pengembangan Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15	2.11.20.31	Roadmap Masterplan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Koperasi dan UMKM Kalimantan Tengah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pusat Pertumbuhan Ekonomi Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	-	300.000.000	-	-	-	300.000.000	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
16	2.11.20.32	Pengawasan dan Pengendalian KSP/ USP-Koperasi, KJKS lintas Kabupaten	Jumlah KSP/USP-Koperasi, KJKS yang diawasi oleh satgas	-	125.000.000	-	-	-	-	125.000.000	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17	2.11.20.34	Koordinasi Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah peserta dan dokumen perda pembentukan BLUD di bidang KUMKM	orang dan dokumen	-	400.000.000	-	-	-	400.000.000	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18	2.11.20.36	Perlindungan/Ad vokasi Produk KUMKM (Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah)	Jumlah koperasi dan UMKM yang diberikan perlindungan/Ad vokasi produk KUMKM	unit	-	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	360.000.000	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3.06.15	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan</b>									
19	3.06.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terselenggaranya kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa	Dokumen	65.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	665.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
20	3.06.15.05	Pasar Murah Menjelang Hari Besar Keagamaan	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan pasar murah di kab/kota dan pelaksanaan pasar murah di ibukota provinsi	kali	75.000.000	80.000.000	82.687.500	86.821.875	91.162.969	415.672.344	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
21	3.06.15.06	Bimtek kebijakan perdagangan dalam negeri	Jumlah aparat yang mengikuti Bimtek Kebijakan PDN	orang	-	73.500.000	77.175.000	81.033.750	85.085.438	316.794.188	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
22	3.06.15.07	Rapat koordinasi dan sinkronisasi program perindustrian dan perdagangan se Kalimantan Tengah	Tersusunnya program dan kegiatan Indag se-kalteng sebagai bahan pelaksanaan kegiatan	kali	122.280.000	128.394.000	134.813.700	141.554.385	148.632.104	675.674.189	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
23	3.06.15.09	Pembinaan dan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha (penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi perlindungan konsumen)	Terbinanya konsumen dan pelaku usaha melalui sosialisasi UU No.8 Th 1999 tentang perlindungan konsumen	orang	65.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	385.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
24	3.06.15.10	Pembentukan pos penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	Terfasilitasi pengaduan konsumen melalui Pos Pengaduan Komsumen	pos	70.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	470.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
25	3.06.15.11	Koordinasi pendistribusian barang sembako dan barang strategis di Kalimantan Tengah	Mengantisipasi kelangkaan pasokan bahan pokok dan bahan strategis di Kab/Kota	kali	75.000.000	80.000.000	82.687.500	86.821.875	91.162.969	415.672.344	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
26	3.06.15.13	Verifikasi dan sertifikasi alat standar UPTD metrologi Palangka Raya	Tertaksananya verifikasi dan sertifikasi alat standar lab. UPTD. Metrologi di Palangka Raya	jenis	40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.305.000	48.620.250	221.025.250	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
27	3.06.15.14	Pengawasan preventif alat UTTP di kabupaten/kota se Kalimantan Tengah	Jumlah pedagang yang telah memahami UU Metrologi legal	kab/kota	-	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	226.281.563	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
28	3.06.15.15	Pengawasan pos ukur ulang di kabupaten/kota Kalimantan Tengah	Jumlah konsumen yang telah memahami UU Metrologi Legal,	kab/kota	-	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	226.281.563	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
29	3.06.15.16	Konsultasi dan Koordinasi Teknis Kemetrolgian	Tertaksananya konsultasi dan koordinasi teknis kemetrolgian	Dokumen	20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500	24.310.125	110.512.625	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
30	3.06.15.17	Pengawasan Berkala Tim Terpadu Khusus Pangan	Tertaksananya pengawasan tim terpadu (Disperindag Prov. Kalteng, BPOM, YPK)	toko dan pelaku usaha	60.000.000	73.000.000	73.000.000	73.000.000	73.000.000	352.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
31	3.06.15.18	Pengujian dan Pembelian Sampel Ikan	Terselenggaranya a pengujian dan pembelian sampel ikan kering dan basah untuk mengetahui kandungan bahan berbahaya seperti formalin	sampel	60.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	660.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
32	3.06.15.19	Koordinasi program industri dan perdagangan di Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen hasil koordinasi program indag di Kalteng	tahun	-	105.000.000	110.250.000	115.762.500	121.550.625	452.563.125	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
33	3.06.15.22	Bimtek Penyuluhan BDKT Bagi Aparat Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah	Jumlah peserta Bimtek penyuluhan UTPP dan BDKT	orang	-	-	75.000.000	-	-	75.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
34	3.06.15.24	Peningkatan pengawasan peredaran cukai rokok	Mencegah tindakan penggunaan pita cukai rokok palsu di Kalimantan Tengah	toko dan pelaku usaha	50.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	650.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
35	3.06.15.29	Sosialisasi Peningkatan dan Pengawasan Peredaran Cukai Rokok Bagi Pelaku Usaha	Pelaku usaha dan komsumen yang mengikuti sosialisasi peningkatan pengawasan peredaran cukai rokok	orang	50.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	350.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
36	3.06.15.32	Sosialisasi Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen (Siswas-PK)	Pelaku usaha, konsumen dan aparat pembina Disperindag yang mengikuti sosialisasi sistem pengawasan penyelesaian sengketa konsumen	orang	50.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	350.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
37	3.06.15.36	Lomba Cipta Menu Produk Pangan Khas Kalimantan Tengah	Menggali potensi menu masakan khas Kalteng	kali	60.000.000	65.000.000	66.150.000	69.457.500	72.930.375	333.537.875	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
38	3.06.15.37	Monitoring dan evaluasi penerbitan SIUP dan TDP	Mengetahui pertumbuhan sektor usaha perdagangan melalui penerbitan SIUP dan TDP yang dilaksanakan oleh PTSP di Kabupaten/Kota	tahun	60.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	460.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
39	3.06.15.39	Pengawasan peredaran bahan berbahaya	Mencegah peredaran bahan berbahaya secara ilegal di Kalimantan Tengah	toko	60.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	660.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan		Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2017	2018	2019	2020	2021			
40	3.06.15.42	Revitalisasi sarana perdagangan (pasar rakyat)	Revitalisasi sarana perdagangan 1 lokasi	paket	-	1.100.000.000	1.155.000.000	1.212.750.000	1.273.387.500	4.741.137.500	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
41	3.06.15.43	Pengumpulan Data Sarana Perdagangan Berupa Pasar dan Gudang	Menjaga kelancaran distribusi barang pokok dan barang strategis serta tersedianya fasilitas perdagangan yang memadai	Dokumen	45.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	385.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
42	3.06.15.48	Pasar Peyeimbang Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Tersedianya komoditas yang dapat mempengaruhi inflasi di daerah dan peblikasi melalui media videotron	tahun	50.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	750.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
43	3.06.15.52	Pemasaran Produk Potensial Daerah Melalui Pasar Lelang	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemasaran produk potensial melalui pasar lelang	kali	-	105.000.000	110.250.000	115.762.500	121.550.625	452.563.125	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
44	3.06.15.53	Misi Dagang Lokal Produk Unggulan Kalimantan Tengah	Terfasilitasinya pemasaran bagi pelaku usaha/UKM produk rotan melauai kegiatan misi dagang lokal	kali	40.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	340.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
45	3.06.15.56	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang Perlindungan Konsumen	Jumlah dokumen rapat koordinasi dan konsultasi bidang PK	tahun	-	55.000.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	228.781.563	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
46	3.06.15.58	Pembuatan Iklan Layanan Konsumen Cerdas Melalui Media Elektronik/Cetak /Spanduk/Baliho	Jumlah tayangan iklan dalam setahun	kali	-	45.000.000	45.000.000	46.305.000	48.620.250	184.925.250	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
47	3.06.15.60	Pengawasan Berkala Tim Terpadu Gula Rafinasi	Mencegah peredaran gula rafinasi dalam kemasan eceran	toko	50.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	450.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
48	3.06.15.61	Pengawasan Berkala Tim Terpadu Minuman Beralkohol	Mencegah peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	toko dan pelaku usaha	60.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000	600.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
49	3.06.15.62	Penilaian UPTD. metrologi Kabupaten/Kota	Terbentuknya UPTD. Metrologi di Kabupaten/Kota	kali	40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.305.000	48.620.250	221.025.250	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan		Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2017	2018	2019	2020	2021			
50	3.06.15.63	Pembinaan dan Penyuluhan UPTD. Metrologi Kabupaten/Kota	Persiapan pembentukan UPTD. Metrologi Kabupaten/Kota	kali	40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.305.000	48.620.250	221.025.250	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
51	3.06.15.65	Pendataan UTTP (Ukuran Takaran Timbang dan Perlengkapannya)	Jumlah dokumen kegiatan pendataan UTTP se-Kalteng	Dokumen	-	52.500.000	50.000.000	-	55.125.000	157.625.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
52	3.06.15.66	Pengawasan Berkala Tim Terpadu Bahan Berbahaya	Tersedianya dokumen Pengawasan Tim Terpadu Bahan Berbahaya	Dokumen	-	110.000.000	115.000.000	120.000.000	125.000.000	470.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
53	3.06.15.67	Pembangunan Pasar Penyeimbang di Kota Palangka Raya	Tersedianya pasar penyeimbang di Palangka Raya	paket	-	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	600.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
54	3.06.15.72	Sosialisasi Bahan Berbahaya	Jumlah peserta sosialisasi bahan berbahaya	orang	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	300.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
55	3.06.15.73	Bimbingan Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar	Sosialisasi peraturan baru tentang perlindungan konsumen	orang	40.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	240.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
56	3.06.15.74	Sosialisasi Pencantuman Klausula Baku Bagi Pelaku Usaha	Sosialisasi mengenai pencantuman kalimat yang merugikan konsumen yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha	orang	40.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	340.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
57	3.06.15.75	Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	Terselesainya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha diluar pengadilan	sengketa	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
58	3.06.15.76	Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Konsumen	Sosialisasi mengenai keberadaan BPSK yang ada di Kabupaten Kobar	orang	50.000.000	55.000.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	278.781.563	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
59	3.06.15.77	Peningkatan SDM/PPB dan Magang Sampel	Tersedianya dokumen kegiatan peningkatan SDM/PPB	Dokumen	-	37.800.000	39.690.000	41.674.500	43.758.225	162.922.725	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
60	3.06.15.79	Bimtek Cinta Produk Indonesia	Jumlah peserta Bimtek Cinta Produk Indonesia	orang	-	80.000.000	80.000.000	81.033.750	85.085.438	326.119.188	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
61	3.06.15.80	Pemeliharaan Pasar Penyeimbang	Terpeliharanya kondisi fisik keberlangsungan Pasar Penyeimbang	tahun	60.000.000	65.000.000	66.150.000	69.457.500	72.930.375	333.537.875	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
62	3.06.15.81	Pasar Tertib Ukur dan Daerah Tertib Ukur	Meningkatnya fasilitas pasar tertib ukur di Kalteng	tahun	-	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	226.281.563	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
63	3.06.15.82	Sinkronisasi dan Sinergitas Bidang Kemetrolgian	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi dan sinergitas program kegiatan kemetrolgian di Kalteng	Dokumen	-	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	226.281.563	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
64	3.06.15.84	Identifikasi Persiapan Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah dokumen identifikasi persiapan pembangunan pusat distribusi provinsi	unit	-	100.000.000	-	-	-	100.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
65	3.06.15.85	Perencanaan Pembangunan Pusat Pemasaran Produk Unggulan Kalteng	Terwujudnya tempat pemasaran produk unggulan UKM potensial dari Kabupaten/Kota Se-Kalteng	Dokumen	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
66	3.06.15.86	Pembangunan Gerai Penjualan Produk UKM	Tersedianya fasilitas pemasaran produk UKM di lokasi wisata dan sebagai sumber PAD	lokasi	100.000.000	300.000.000	-	-	-	400.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
67	3.06.15.87	Koordinasi dan Fasilitasi Perusahaan BUMD untuk Bermitra Dengan Pengusaha Sektor Perdagangan	Meningkatnya PAD melalui BUMD sektor industri dan sektor perdagangan	kali	80.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	680.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
68	3.06.15.88	Pertemuan teknis kemetrolgian, konsultasi dan identifikasi cap	Jumlah dokumen kegiatan pertemuan teknis kemetrolgian	Dokumen	-	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	226.281.563	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
69	3.06.15.91	Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	Jumlah dokumen BPSK Kalteng	Dokumen	-	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	10.000.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
70	3.06.15.93	Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah bangunan pusat distribusi	unit gedung	-	3.500.000.000	-	-	-	3.500.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
71	3.06.15.94	Fasilitasi Pusat Pemasaran Produk Unggulan Kalteng	Jumlah fasilitasi pemasaran produk unggulan	tahun	-	-	50.000.000	52.500.000	55.125.000	157.625.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
72	3.06.15.95	Pengumpulan Data Distributor dan Pedagang Besar se-Kalteng	Jumlah dokumen Pengumpulan Data Distributor dan Pedagang Besar Se-Kalteng	Dokumen	-	80.000.000	82.687.500	86.821.875	91.162.969	340.672.344	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
73	3.06.15.96	Pengawasan Tim Terpadu Bahan Berbahaya	Jumlah dokumen Pengawasan Tim Terpadu Bahan Berbahaya	Dokumen	-	100.000.000	115.000.000	120.000.000	125.000.000	460.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
74	3.06.15.97	Pengawasan SNI dan Label	Jumlah dokumen Pengawasan SNI dan Label	Dokumen	-	75.000.000	75.000.000	80.000.000	85.000.000	315.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
75	3.06.15.98	Sosialisasi SNI Pasar Rakyat	Jumlah peserta Sosialisasi SNI Pasar rakyat	orang	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
76	3.06.15.99	Fasilitasi Pemasaran Produk Komoditi pada Gudang SRG	Frekuensi kegiatan fasilitasi	kali	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	800.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
77	3.06.15.100	Pembuatan Pasar Penyeimbang dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Bertambahnya pasar penyeimbang di Palangka Raya	unit	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	800.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
78	3.06.15.101	Pembangunan Pusat Pemasaran Produk Unggulan Kalimantan Tengah	Jumlah bangunan Pusat Pemasaran Produk Unggulan Kalimantan Tengah	unit	-	5.000.000.000	-	-	-	5.000.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian



NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				2017	2018	2019	2020	2021					
79	3.06.15.102	Promosi Produk Unggulan Kalteng	Jumlah fasilitasi dan promosi produk unggulan Kalteng	kali	-	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	720.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
80	3.06.15.103	Pemutakhiran Data SIUP/TDP/Bimtek	Mendapatkan data yang akurat dari pertumbuhan usaha perdagangan serta menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman yang lebih komprehensif dalam penyusunan data	orang	-	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	600.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
81	3.06.15.104	Koordinasi dan Pemantauan Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK)	Terkoodinirnya program kerja berbasis DAK dan mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan	tahun	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
82	3.06.15.105	Melaksanakan Promosi dalam rangka Hari Pangan Sedunia	Tertaksananya promosi produk pangan khas Kalteng	kali	-	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	360.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
83	3.06.15.106	Koordinasi dan Konsultasi Program Perdagangan Dalam Negeri	Terkoodinirnya sinergitas antara pusat dengan provinsi dan kab/kota	tahun	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	300.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
84	3.06.15.107	Evaluasi dan Pengawasan Stok Barang dalam Gudang	Terpantaunya stok barang untuk di distribusikan ke pasar	tahun	-	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	360.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
85	3.06.15.108	Pengawasan Distribusi Perdagangan antar Pulau	Terpantaunya aliran perdagangan antar pulau Provinsi Kalimantan Tengah	tahun	-	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	360.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
86	3.06.15.109	Peningkatan SDM/PBB dan Magang Sampel	Jumlah dokumen kegiatan peningkatan SDM/PPB	Dokumen	-	37.800.000	37.800.000	37.800.000	37.800.000	37.800.000	151.200.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3.06.18	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>										
87	3.06.18.06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Tertaksananya peningkatan sistem dan jaringan informasi Indag	tahun	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313		276.281.563	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
88	3.06.18.08	Partisipasi pada Pekan Raya Jakarta	Fasilitasi dalam rangka meningkatkan segmen dan perluasan pasar bagi UKM	UKM	100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500	121.550.625	552.563.125	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
89	3.06.18.09	Kalteng Expo	Meningkatnya segmen pasar dan perluasan pasar bagi UKM	UKM	250.000.000	262.500.000	275.625.000	289.406.250	303.876.563	1.381.407.813	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
90	3.06.18.18	Pengolahan dan analisis data industri dan perdagangan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah	Tersedianya dokumen hasil pengolahan data indag kab/kota di Kalteng	tahun	75.000.000	78.750.000	82.687.500	86.821.875	91.162.969	414.422.344	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
91	3.06.18.43	Partisipasi Pada Jabar Expo	Jumlah kegiatan pelaksanaan partisipasi pada pameran Jabar Expo	kali	-	80.000.000	-	-	-	80.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
92	3.06.18.45	Partisipasi Pada Pameran Produk, Industri Agro dan Food Expo	Jumlah kegiatan pelaksanaan Partisipasi pada Pameran Produk, Industri Agro dan Food Expo	kali	-	85.000.000	-	-	-	85.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
93	3.06.18.46	Pertemuan antar Pelaku dan Instansi Terkait	Jumlah peserta pertemuan antar pelaku dan instansi terkait	orang	-	63.000.000	66.150.000	69.457.500	72.930.375	271.537.875	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
94	3.06.18.48	Partisipasi Pada Jogja Expo	Jumlah kegiatan pelaksanaan Partisipasi pada Pameran Jogja Expo	kali	-	-	85.000.000	89.250.000	93.712.500	267.962.500	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
95	3.06.18.49	Partisipasi Pada Pameran Solo Inafact	Jumlah kegiatan pelaksanaan Partisipasi pada Pameran Solo Inafact	kali	-	80.000.000	-	-	-	80.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
96	3.06.18.50	Partisipasi Pada Pameran Indag	Jumlah kegiatan pelaksanaan Partisipasi pada Pameran Indag	kali	-	75.000.000	85.000.000	90.000.000	90.000.000	340.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
97	3.06.18.51	Pelatihan Bintek Pengrajin UKM tentang Pengembangan Usaha	Jumlah dokumen kegiatan pelatihan bimtek pengrajin UKM tentang pengembangan usaha	Dokumen	-	68.250.000	71.662.500	75.245.625	79.007.906	294.166.031	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
98	3.06.18.53	Monitoring dan Evaluasi Pengrajin UKM di 14 Kab./Kota se-Kalteng	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengrajin UKM di 14 kab/kota se-Kalteng	Dokumen	-	89.250.000	93.712.500	98.398.125	103.318.031	384.678.656	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
99	3.06.18.54	Partisipasi Pada Pameran Kemilau Kaltim Nasional Expo	Jumlah kegiatan pelaksanaan Partisipasi pada Pameran Kemilau Kaltim nasional Expo	kali	-	60.000.000	-	70.000.000	73.500.000	203.500.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
100	3.06.18.55	Partisipasi Pada Festival Budaya Isen Mulang	Dalam rangka memperingati dan memeriahkan HUT Kalteng	kegiatan	75.000.000	78.750.000	82.687.500	86.821.875	91.162.969	414.422.344	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
101	3.06.18.59	Magang Untuk Pengrajin UKM Ke Luar Daerah	Jumlah dokumen kegiatan magang untuk pengrajin UKM ke luar daerah	Dokumen	-	60.000.000	63.000.000	66.150.000	-	189.150.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
102	3.06.18.61	Pengembangan dan Peningkatan Usaha Bagi Generasi Muda	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengembangan dan peningkatan usaha bagi generasi muda	Dokumen	-	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500	258.607.500	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
103	3.06.18.62	Magang Dalam Rangka Peningkatan Usaha Bagi Pelaku Usaha pangan	Jumlah Dokumen Magang	Dokumen	-	-	85.000.000	89.250.000	93.712.500	267.962.500	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
104	3.06.18.63	Partisipasi pada Pameran Produkai Industri Agro	Jumlah kegiatan pelaksanaan Partisipasi pada Pameran Industri Agro	kali	-	-	85.000.000	89.250.000	93.712.500	267.962.500	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
105	3.06.18.64	Partisipasi pada Pameran Produksi Agribisnis dan Pangan Indonesia di Jogja	Jumlah kegiatan pelaksanaan Partisipasi pada Pameran Produk Agribisnis dan Pangan Indonesia di Jogja	kali	-	-	85.000.000	89.250.000	93.712.500	267.962.500	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
106	3.06.18.65	Partisipasi Gelar Produk Daerah GPD Expo di Mega Mall Batam Center	Jumlah kegiatan pelaksanaan Partisipasi pada Gelar Produk Daerah GPD Expo di Mega Mall Batam Center	kali	-	-	85.000.000	89.250.000	93.712.500	267.962.500	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
107	3.06.18.66	Magang untuk Pengrajin UKM ke Tasikmalaya Jawa Barat	Jumlah dokumen Magang untuk Pengrajin UKM ke Tasikmalaya Jawa Barat	Dokumen	-	-	85.000.000	89.250.000	93.712.500	267.962.500	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	2.11.21	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program peningkatan akses terhadap sumber daya produktif</b>									

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
108	2.11.21.08	Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha KUMKM	Jumlah Koperasi dan UMKM anggotanya yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha	orang	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	425.000.000	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
109	2.11.21.09	Pendampingan UMKM Melalui PLUT	Jumlah Usaha Mikro yang mendapat pen-dampingan Pengembangan Usaha melalui Konsultan PLUT-KUMKM	UMK	500.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	1.300.000.000	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
110	2.11.21.14	Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah peserta UMKM dan anggota koperasi yang mengikuti sosialisasi KUR	orang	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	300.000.000	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		<b>TPB 8.3</b>	<b>: Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan</b>									
	3.07.16	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>									
111	3.07.16.07	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan sentra IK	Peningkatan peranan sentra IK di Kalteng dalam produksi dan pemasaran	tahun	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500	72.930.375	331.537.875	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
112	3.07.16.09	Mengikuti pameran produk mutu manikam binaan dekranasda Kalimantan Tengah	Jumlah kegiatan pelaksanaan partisipasi pada pameran produk mutu manikam binaan Dekranasda Kalteng	kali	-	-	85.000.000	90.000.000	100.000.000	275.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
113	3.07.16.10	Mengikuti pameran produk kerajinan/inacraft binaan dekranasda Kalimantan Tengah	Jumlah kegiatan pelaksanaan partisipasi pameran produk kerajinan INACRAFT binaan Dekranasda Kalteng	kali	-	-	90.000.000	100.000.000	110.000.000	300.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
114	3.07.16.11	Pemeliharaan dan penataan showroom dekranasda	Tertatanya showroom Dekranasda yang baik dan nyaman	tahun	75.000.000	78.750.000	82.687.500	86.821.875	91.162.969	414.422.344	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
115	3.07.16.31	Mengikuti Pameran Produk Kerajinan Unggulan Binaan Dekranasda	Meningkatnya promosi kerajinan khas Kalteng	kali	75.000.000	-	82.687.500	86.821.875	91.162.969	335.672.344	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
116	3.07.16.32	Pelatihan Industri Kreatif bagi Generasi Muda	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM generasi muda	orang	50000000	52500000	55125000	57881250	60775313	276.281.563	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
117	3.07.16.39	Lomba Menganyam Khas Kalteng	Jumlah peserta yang mengikuti lomba menganyam dan cenderamata khas Kalteng	orang	-	80.000.000	80.000.000	85.000.000	85.000.000	330.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
118	3.07.16.43	Pelatihan Anyaman Rotan Tingkat Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan anyaman rotan tingkat dasar	orang	-	73.500.000	77.175.000	81.033.750	85.085.438	316.794.188	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
119	3.07.16.44	Pelatihan Anyaman Rotan Tingkat Ahli	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan pengrajin rotan	orang	-	84.000.000	88.200.000	92.610.000	97.240.500	362.050.500	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
120	3.07.16.45	Magang anyaman rotan	Jumlah peserta magang anyama	orang	0	89250000	93712500	98398125	103318031	384.678.656	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
121	3.07.16.48	Pelatihan Teknik Pengelasan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM pengelasan	orang	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	276.281.563	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
122	3.07.16.49	Pameran Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI)	Meningkatnya promosi produk unggulan kreatif Kalteng	kali	75.000.000	-	82.687.500	86.821.875	91.162.969	335.672.344	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
123	3.07.16.50	Pelatihan teknik pembuatan meubelair rotan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknik pembuatan meubelair rotan	orang	-	252.000.000	264.600.000	277.830.000	291.721.500	1.086.151.500	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
124	3.07.16.52	Rapat Kerja Daerah Dekranasda Prov. Kalteng dan Rakernas Dekranas	Menignkatnya sinergitas program kerja Dekranasda pusat dengan daerah	kali	80.000.000	84.000.000	88.200.000	92.610.000	97.240.500	442.050.500	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
125	3.07.16.55	UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya operasional UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Disperindag Prov. Kalteng	tahun	-	750.000.000	800.000.000	825.000.000	850.000.000	3.225.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
126	3.07.16.58	Pelatihan pengembangan desain produk anyaman rotan	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pengrajin rotan	orang	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	276.281.563	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
127	3.07.16.66	Pengadaan alat pengolahan air minum isi ulang	Jumlah peralatan air minum isi ulang sebanyak	paket	332.520.000	-	-	-	-	332.520.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
128	3.07.16.73	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang Industri Kecil dan Menengah	Jumlah pelaku usaha IKM yang mengikuti Rakor IKM	Dokumen	-	100.000.000	125.000.000	125.000.000	130.000.000	480.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
129	3.07.16.80	Analisa Pasar/Kebutuhan Kemasan IKM Kalteng	Jumlah dokumen analisa pasar/kebutuhan kemasan IKM Kalteng	tahun	-	65.000.000	82.500.000	85.000.000	87.500.000	320.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
130	3.07.16.83	Pelatihan Pengolahan Pangan Berbasis Durian	Jumlah peserta Pelatihan pengolahan pangan berbasis durian	orang	-	80.000.000	-	-	-	80.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
131	3.07.16.92	Pelatihan Bordir Kain Bagi IKM Sandang	Jumlah peserta pelatihan bordir kain bagi IKM	orang	-	60.000.000	75.000.000	80.000.000	87.500.000	302.500.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
132	3.07.16.95	Mengikuti Pameran Indonesia Jewelry fair	Jumlah dokumen kegiatan pelaksanaan partisipasi pada pameran Indonesia Jewelry Fair	Dokumen	75.000.000	-	80.000.000	85.000.000	75.000.000	315.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
133	3.07.16.96	Pendataan Kerajinan Bahan Bangunan di Kab./Kota	Tersedianya data pengrajin Se-Kalimantan Tengah guna memudahkan pembinaan	IKM	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	276.281.563	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
134	3.07.16.99	Magang Desain Furniture Rotan	Jumlah peserta Magang Desain Furniture Rotan	orang	-	90.000.000	90.000.000	95.000.000	100.000.000	375.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
135	3.07.16.103	Pelatihan Bordir Kain	Jumlah peserta pelatihan bordir kain bagi IKM Sandang	orang	-	60.000.000	-	-	-	60.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
136	3.07.16.109	Pelatihan Teknik Pembuatan Perabotan Rumah Tangga Dari Aluminium	Jumlah peserta pelatihan teknik pembuatan perabotan aluminium	orang	-	60.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	315.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
137	3.07.16.110	Mengikuti Pameran Produk Unggulan Dekranasda	Meningkatnya promosi produk unggulan binaan Dekranasda Kalteng	kali	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
138	3.07.16.112	Pelatihan Diversifikasi Anyaman Purun	Jumlah peserta pelatihan diversifikasi anyaman purun	orang	-	80.000.000	85.000.000	90.000.000	90.000.000	345.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
139	3.07.16.113	Pelatihan Kerajinan Keset Kaki Dari Sabut Kelapa	Meningkatnya keterampilan pengrajin dari sabut kelapa	orang	-	80.000.000	85.000.000	85.000.000	90.000.000	340.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
140	3.07.16.115	Pelatihan Diversifikasi Produk Mebel Dari Bambu	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan pengetahuan pengrajin mebel dari bambu	orang	-	84.000.000	88.200.000	92.610.000	97.240.500	362.050.500	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
141	3.07.16.116	Pelatihan Kerajinan Dari Limbah Kulit Jagung	Meningkatnya keterampilan pengrajin limbah kulit jagung	orang	-	75.000.000	75.000.000	80.000.000	85.000.000	315.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
142	3.07.16.119	Sosialisasi/Promosi Pelayanan UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkatnya pelayanan publik di bidang kemasan	tahun	-	85.000.000	85.000.000	85.000.000	-	255.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
143	3.07.16.120	Peningkatan Kemampuan Operator Produksi UPT. Makanan, Minuman dan Kemasan Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkatnya keahlian operator produksi	tahun	0	80000000	80000000	80000000	80000000	320.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
144	3.07.16.121	Peningkatan Kemampuan dan Perlengkapan Produksi Kemasan UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Provinsi Kalimantan	Meningkatnya kemampuan desain kemasan	tahun	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	200.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
145	3.07.16.122	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Produksi UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Provinsi Kalimantan Tengah	Tersedianya mesin dan peralatan keperluan produksi makanan, minuman dan kemasan UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Disperindag Prov. Kalteng	paket	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
146	3.07.16.123	Bantuan Kemasan Bagi IKM Kalimantan Tengah	Meningkatnya kualitas kemasan dan daya saing produk IKM	paket	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	300.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
147	3.07.16.124	Pelatihan Pengemasan Bagi IKM Pangan	Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha tentang standar kemasan makanan yang baik dan benar	orang	50.000.000	65.000.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	288.781.563	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
148	3.07.16.125	Pendaftaran Merk/HKI Bagi IKM	Tertindunginya hak merk produk IKM	IKM	30.000.000	35.000.000	40.000.000	42.000.000	43.000.000	190.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
149	3.07.16.126	Pemberian Sertifikasi Halal	Tertindunginya konsumen dari makanan tidak halal	IKM	50.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	370.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
150	3.07.16.127	Pelatihan Teknik Produksi Olahan Hasil Agro Berstandarisasi GMP	Jumlah peserta pelatihan teknik produksi olahan hasil agro berstandarisasi GMP	orang	-	70.000.000	75.000.000	80.000.000	80.000.000	305.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
151	3.07.16.128	Magang Produk Olahan Agro Bagi IKM Gunung Mas	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan dalam pengolahan hasil agro	orang	-	70.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	295.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
152	3.07.16.129	Keikutsertaan IKM Dalam Pameran	Jumlah dokumen keikutsertaan IKM dalam pameran	Dokumen	-	60.000.000	80.000.000	80.000.000	85.000.000	305.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian



NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
153	3.07.16.130	Pengadaan Mesin Jahit dan Mesin Obras	Tersedianya fasilitas mesin jahit dan mesin obras	paket	-	100.000.000	-	-	-	100.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
154	3.07.16.131	Pengadaan Mesin Pengolahan Singkong	Tersedianya fasilitas mesin pengolahan singkong	paket	-	70.000.000	-	-	-	70.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
155	3.07.16.132	Lomba Desain Kemasan Kalimantan tengah	Meningkatkan keanekaragaman desain kemasan yang berkualitas	kegiatan	60.000.000	65.000.000	70.000.000	75.000.000	80.000.000	350.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
156	3.07.16.133	Penambahan Daya Listrik Kantor UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah	Penambahan daya listrik UPT	tahun	0	50000000	0	0	0	50.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
157	3.07.16.134	Rapat Koordinasi Bidang Industri Kecil dan Menengah	Jumlah pelaku usaha IKM yang mengikuti Rakor IKM	orang	0	100000000	105000000	110250000	115762500	431.012.500	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
158	3.07.16.135	Lomba Ikon Produk Makanan Khas Kalteng	Meningkatkan keanekaragaman ikon produk makanan khas Kalteng	kegiatan	80000000	85000000	85000000	85000000	85000000	420.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
159	3.07.16.136	Pengadaan Bahan Baku Produksi Kemasan UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Prov. Kalteng	Tersedianya kemasan bagi IKM	tahun	200000000	210000000	220500000	231525000	243101250	1.105.126.250	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
160	3.07.16.137	Pemeliharaan Mesin dan Pembelian Sparepart/Suku Cadang Mesin UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Prov. Kalteng	Meningkatkan kinerja mesin operasional	tahun	125000000	131250000	137812500	144703125	151938281	690.703.906	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
161	3.07.16.138	Magang Peningkatan Desain Produk Anyaman Rotan	Meningkatnya ketrampilan dan wawasan pengrajin anyaman rotan kalteng	orang	50000000	52500000	55125000	57881250	60775313	276.281.563	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
162	3.07.16.139	Promosi dan Kerjasama pada Industri Makanan dan Minuman (Pameran)	Meningkatnya daya saing industri makanan dan minuman	tahun	0	75000000	80000000	85000000	85000000	325.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
163	3.07.16.140	Standarisasi pada Industri Makanan dan Minuman (SNI wajib)	Meningkatnya daya saing industri makanan dan minuman	tahun	0	0	75000000	75000000	75000000	225.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
164	3.07.16.141	Pelatihan Kerajinan dari Tempurung Kelapa	Meningkatnya keterampilan pengrajin tempurung kelapa	orang	0	80000000	80000000	85000000	90000000	335.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
165	3.07.16.142	Magang Kerajinan dari Tempurung Kelapa	Meningkatnya wawasan pengrajin tempurung kelapa	orang	0	90000000	95000000	95000000	100000000	380.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
166	3.07.16.143	Magang Kerajinan Diversifikasi Produk Meubel dari Bambu	Meningkatnya wawasan dan keterampilan teknik pengrajin mebel dari bambu	orang	0	90000000	95000000	95000000	100000000	380.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
167	3.07.16.144	Pelatihan Kerajinan Produk Unggulan di Desa Tertinggal	Meningkatnya keterampilan pengrajin produk unggulan di desa tertinggal	orang	0	462000000	485100000	509355000	534822750	1.991.277.750	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
168	3.07.16.145	Mengikuti Pameran Khas Daerah	Meningkatnya promosi dan pengenalan produk khas daerah kalteng	Dokumen	0	100000000	100000000	110000000	115000000	425.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
169	3.07.16.146	Magang Pembuatan Mesi Peralatan Tepat Guna Pasca Panen Hasil Pertanian	Meningkatnya kemampuan peserta magang dalam pembuatan mesin alsintan	orang	0	125000000	0	135000000	0	260.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
170	3.07.16.147	Pengadaan Mesin Jahit	Tersedianya peralatan mesin jahit	buah	150000000	0	0	0	0	150.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
171	3.07.16.148	Pelatihan Ketrampilan Menjahit	Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan penjahit	orang	100000000	0	0	0	0	100.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
172	3.07.16.149	Pengadaan Mesin Penggiling Daging dan Pencetak Pentol	Tersedianya peralatan mesin penggiling daging dan pencetak pentol	paket	150000000	0	0	0	0	150.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
173	3.07.16.150	Pengadaan Mesin Pembuatan Kue Kering	Tersedianya mesin pembuatan kue kering	paket	100000000	0	0	0	0	100.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
174	3.07.16.151	Pembangunan Gedung UPT. Industri makanan, Minuman dan kemasan Disperindag Provinsi Kalteng	Tersedianya gedung UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan	gedung	0	2000000000	0	0	0	2.000.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
175	3.07.16.152	Pelatihan Menjahit Level Terampil dan Fashion Design	Jumlah peserta pelatihan menjahit level terampil dan fashion design	gedung	0	70000000	70000000	70000000	70000000	280.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
176	3.07.16.153	Pelatihan Merangkai Payet bagi IKM	Jumlah peserta pelatihan merangkai payet bagi IKM	orang	0	70000000	70000000	70000000	70000000	280.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
177	3.07.16.154	Pelatihan Good Manufacturing Practices bagi IKM Pengolahan Industri Agro	Jumlah peserta pelatihan GMP bagi IKM	orang	0	75000000	75000000	75000000	75000000	300.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
178	3.07.16.155	Pelatihan Produk Olahan Hasil Kelapa bagi IKM	Jumlah peserta pelatihan produk olahan hasil kelapa bagi IKM	orang	0	70000000	70000000	70000000	70000000	280.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
179	3.07.16.156	Pelatihan Archievement Motivation Training (AMT) Bagi Pelaku Usaha	Jumlah peserta pelatihan AMT bagi pelaku usaha	orang	0	75000000	75000000	75000000	75000000	300.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
180	3.07.16.157	Bimbingan Teknis Sentra IKM	Jumlah peserta bimbingan teknis sentra IKM	orang	0	75000000	75000000	75000000	75000000	300.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
181	3.07.16.158	Pelatihan Pembuatan Kue dari Bahan Non Beras dan Non Terigu	Jumlah peserta pelatihan pembuatan kue dari bahan non beras dan non terigu	orang	0	70000000	70000000	70000000	70000000	280.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
182	3.07.16.159	Pelatihan Pembuatan Aneka Kue dan Manajemen Produksi	Jumlah peserta pelatihan pembuatan aneka kue dan manajemen produksi	orang	0	70000000	70000000	70000000	70000000	280.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
183	3.07.16.160	Pelatihan Teknis Pengolahan Produk dari Pisang	Jumlah peserta pelatihan teknis pengolahan produk dari pisang	orang	0	70000000	70000000	70000000	70000000	280.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
184	3.07.16.161	Magang Teknis Pengolahan Pangan Berbasis Pisang	Jumlah peserta magang pengolahan pangan berbasis pisang	orang	0	75000000	75000000	75000000	75000000	300.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
185	3.07.16.162	Pelatihan Pengolahan Produk Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah peserta pengolahan produk pangan berbasis sumber daya lokal	orang	0	70000000	70000000	70000000	70000000	280.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
186	3.07.16.163	Pelatihan Teknis Pengolahan Pangan dari Ikan	Jumlah peserta pelatihan teknis pengolahan pangan dari ikan	orang	0	70000000	70000000	70000000	70000000	280.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
187	3.07.16.164	Magang Teknis Pengolahan Pangan berbasis Ikan	Jumlah peserta magang teknis pengolahan pangan berbasis ikan	orang	0	75000000	75000000	75000000	75000000	300.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
188	3.07.16.165	Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Buah dan Sayur	Jumlah peserta pelatihan teknis pengolahan hasil buah dan sayur	orang	0	70000000	70000000	70000000	70000000	280.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
189	3.07.16.166	Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Berbasis Labu	Jumlah peserta pelatihan diversifikasi produk olahan berbasis labu	orang	0	70000000	70000000	70000000	70000000	280.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
190	3.07.16.167	Pelatihan Pengolahan Pangan Hasil Laut bagi Pelaku Usaha	Jumlah peserta pengolahan pangan hasil laut bagi pelaku usaha	orang	0	70000000	70000000	70000000	70000000	280.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
191	3.07.16.168	Partisipasi pada Agrinex Expo	Meningkatnya promosi produk berbahan baku agro khas Kalteng	kali	0	100000000	100000000	100000000	100000000	400.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
192	3.07.16.169	Pelatihan Pembuatan Produk Spa Tradisional	Jumlah peserta pembuatan produk spa tradisional	orang	0	70000000	70000000	70000000	70000000	280.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	2.11.23	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM</b>									
193	2.11.23.14	Bimbingan Teknis Penilai Kesehatan KSP/USP-Koper asi	Tertaksananya teknis penilaian kesehatan KSP/USP-Koper asi	orang	62.500.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	562.500.000	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
194	2.11.23.15	Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan KSP/USP-Koper asi	Jumlah Peserta dari Pengelola KSP/USP-Koper asi yang mengikuti Bimbingan Manajemen Pengelolaan KSP/USP-Koper asi se Kalimantan Tengah	orang	62.500.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	562.500.000	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
195	2.11.23.19	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM di Daerah (DAK)	Jumlah SDM Pengelola Koperasi dan UMKM yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM di Daerah	orang	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	10.000.000.000	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
196	2.11.23.21	Pelatihan Pengembangan Usaha Bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengembangan usaha bagi koperasi dan UMKM	orang	345.000.000	345.000.000	345.000.000	345.000.000	345.000.000	1.725.000.000	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
197	2.11.23.22	Bimbingan Teknis Tata Cara Pembuatan Akta Notaris dan Badan Hukum Koperasi Bagi Pembina KUMKM	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis tatacara pembuatan akta notaris dan badan hukum koperasi bagi pembina KUMKM	orang	62.500.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	522.500.000	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
198	2.11.23.23	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	orang	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.250.000.000	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2.01.16	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>									
199	2.01.16.10	Pemanduan dan terapan TPK	Terselenggaranya a Pemanduan dan Terapan Teknologi Padat Karya	orang	260.000.000	357.500.000	393.250.000	432.575.000	475.832.500	1.919.157.500	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
200	2.01.16.14	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Kepada Siswa SLTA	Terselenggaranya a Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	orang	90.000.000	165.000.000	181.500.000	199.650.000	219.615.000	855.765.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
201	2.01.16.15	Monitoring pengguna Tenaga Kerja Asing	Terselenggaranya a Monitoring Tenaga Kerja Asing yang bekerja di 6 Kabupaten	persh	90.000.000	154.000.000	169.400.000	186.340.000	204.974.000	804.714.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
202	2.01.16.21	Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal/Pencaker Melalui Penciptaan Tenaga Kerja Mandiri	Terciptanya kesempatan kerja pembukaan usaha mandiri	orang	350.000.000	473.000.000	520.300.000	572.330.000	629.563.000	2.545.193.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
203	2.01.16.22	Pengelolaan Kegiatan Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja Online	Pengelolaan kegiatan IPK dan BKOL	orang	75.000.000	159.500.000	175.450.000	192.995.000	212.294.500	815.239.500	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
204	2.01.16.23	Rapat Koordinasi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja/Petugas	Tertaksananya temu konsultasi pengantar kerja/petugas antar kerja	orang	65.000.000	82.500.000	90.750.000	99.825.000	109.807.500	447.882.500	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.01.16	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>									
205	2.01.15.14	Pemagangan tenaga kerja	Terselenggaranya a pemagangan tenaga kerja di 2 kabupaten	orang	84.502.000	143.000.000	157.300.000	173.030.000	190.333.000	748.165.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
206	2.01.15.15	Penyuluhan standarisasi sertifikasi	Terbentuknya TUK, dan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi	orang	80.000.000	132.000.000	145.200.000	159.720.000	175.692.000	692.612.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
207	2.01.15.17	Akreditasi lembaga pelatihan kerja	Terakreditasinya Lembaga Pelatihan Kerja di Kab. Kotim dan Bimtek Akreditasi	LPK	80.000.000	132.000.000	145.200.000	159.720.000	175.692.000	692.612.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
208	2.01.15.18	Pelatihan berbasis masyarakat	Terlatihnya Tenaga Kerja Terampil	orang	350.000.000	495.000.000	544.500.000	598.950.000	658.845.000	2.647.295.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
209	2.01.15.25	Pelatihan Keterampilan Di Desa Produktif	Tertaksananya Pelatihan Ketrampilan di Desa Produktif	kabupaten	75.000.000	82.500.000	90.750.000	99.825.000	109.807.500	457.882.500	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
210	2.01.15.28	Pelatihan Pendamping Peningkatan Produktivitas	Meningkatnya Produktifitas, Pengetahuan dan Keterampilan Petugas Pendamping	orang	85.000.000	187.000.000	205.700.000	226.270.000	248.897.000	952.867.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
211	2.01.15.29	Pelatihan Kewirausahaan dan Gugus Kendali Mutu	Terlatihnya tenaga kerja terampil	orang	100.000.000	225.500.000	248.050.000	272.855.000	300.140.500	1.146.545.500	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.11.24	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Peningkatan Daya Saing UMKM</b>									
212	2.11.24.02	Peningkatan Peran UMK Dalam Pengembangan Usaha	Jumlah Koperasi dan UMKM yang menerima Fasilitas Perkuatan Peralatan dan Sarana Usaha dalam pengembangan usahanya	unit	301.700.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	3.301.700.000	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
213	2.11.24.03	Informasi UMKM	Tersedianya Layanan Jaringan Internet untuk Pendataan UMKM dan IUMK yang terdata/Update melalui IT ( Website)	tahun	45.600.000	45.600.000	45.600.000	45.600.000	45.600.000	228.000.000	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
214	2.11.24.05	Sertifikasi Tanah Bagi KUMKM	Jumlah KUMKM yang difasilitasi mendapatkan SHAT	Paket (500 Bidang/ Persil)	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	7.500.000.000	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
215	2.11.24.06	Temu Kemitraan UMKM	Jumlah peserta yang berasal dari UMK yang mengikuti temu kemitraan dengan usaha besar	UMK	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	250.000.000	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

**TUJUAN 9 : INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR**

Kode Indikator	Sasaran	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
						2017	2018	2019	2020	2021
9.1 Membangun infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan, berkelanjutan dan tahan lama, termasuk infrastruktur regional dan antar batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan berfokus pada akses yang terjangkau dan sama rata bagi semua										
9:01:01	Meningkatnya konektivitas antar daerah	Prosentase jalan mantap	RPJMD	persen	47,52	59,7	67,78	75,85	83,93	92
		Persentase konektivitas jalan	RPJMD	persen	89,4	89,8	93,2	96,6	100	100



TUJUAN 9 : INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
		<b>TPB 9.1</b>	<b>: Membangun infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan, berkelanjutan dan tahan lama, termasuk infrastruktur regional dan antar batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan berfokus pada akses yang terjangkau dan sama rata bagi semua</b>									
	1.03.30	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program pembangunan infrastruktur pedesaan</b>									
1	1.03.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	Peningkatan Jalan Mendawai " Selat Jeruju, Mendawai	Meter	-	21.791.000.000	-	-	-	21.791.000.000	APBD	Dinas PUPR
2	1.03.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	Pembangunan Jalan Lingkungan Kebun Raya Katingan, Katingan kuala	Lokasi	-	3.500.000.000	-	-	-	3.500.000.000	APBD	Dinas PUPR
3	1.03.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	Pembangunan Jalan Lingkungan Komplek Umat Beragama di Kasongan, Katingan kuala	Kawasan	-	4.000.000.000	-	-	-	4.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
4	1.03.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	Pembangunan Jalan Penghubung Desa di Kec. Katingan Kuala	Kecamatan	-	3.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
5	1.03.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	Pembangunan Jalan Penghubung Desa di Kec. Katingan Tengah	Kecamatan	-	3.300.000.000	-	-	-	3.300.000.000	APBD	Dinas PUPR
6	1.03.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kecamatan Gunung Timang	Paket	-	350.000.000	-	-	-	350.000.000	APBD	Dinas PUPR
7	1.03.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kecamatan Teweh Baru	Paket	-	2.500.000.000	-	-	-	2.500.000.000	APBD	Dinas PUPR
8	1.03.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kecamatan Teweh Selatan	Paket	-	300.000.000	-	-	-	300.000.000	APBD	Dinas PUPR
9	1.03.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Pembangunan Prasarana Lingkungan. Peningkatan gg. Kutulang Baamang	Meter	-	500.000.000	-	-	-	500.000.000	APBD	Dinas PUPR
10	1.03.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Pembangunan Prasarana Lingkungan. Peningkatan jalan Taman Siswa I Baamang	Meter	-	950.000.000	-	-	-	950.000.000	APBD	Dinas PUPR
11	1.03.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Pembangunan Prasarana Lingkungan. Peningkatan gg. Haji Taufik Baamang	Meter	-	700.000.000	-	-	-	700.000.000	APBD	Dinas PUPR

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
12	1.03.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Pembangunan Prasarana Lingkungan. Peningkatan gg. Arman Jaya Baamang	Meter	-	650.000.000	-	-	-	650.000.000	APBD	Dinas PUPR
13	1.03.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Pembangunan Prasarana Lingkungan. Peningkatan Jalan Jaya Wijaya 8 Baamang	Meter	-	800.000.000	-	-	-	800.000.000	APBD	Dinas PUPR
14	1.03.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Pembangunan Prasarana Lingkungan. Peningkatan gg. Prona Baamang	Meter	-	500.000.000	-	-	-	500.000.000	APBD	Dinas PUPR
15	1.03.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Pembangunan Prasarana Lingkungan. Peningkatan Jalan Intan sari Baamang	Meter	-	850.000.000	-	-	-	850.000.000	APBD	Dinas PUPR
16	1.03.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Pembangunan Prasarana Lingkungan. Peningkatan gg. Adat Baamang	Meter	-	600.000.000	-	-	-	600.000.000	APBD	Dinas PUPR
17	1.03.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Pembangunan Prasarana Lingkungan. Peningkatan Jalan Hasupa Baamang Tengah Baamang	Meter	-	780.000.000	-	-	-	780.000.000	APBD	Dinas PUPR
18	1.03.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Pembangunan Prasarana Lingkungan. Peningkatan Jalan Dewi sartika Mentawa baru ketapang	Meter	-	1.500.000.000	-	-	-	1.500.000.000	APBD	Dinas PUPR
19	1.03.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Pembangunan Prasarana Lingkungan. Peningkatan gg. Kembali 4, 5 Mentawa baru ketapang	Meter	-	800.000.000	-	-	-	800.000.000	APBD	Dinas PUPR
20	1.03.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Pembangunan Prasarana Lingkungan. Peningkatan gg. Bina Karya Mentawa baru ketapang	Meter	-	620.000.000	-	-	-	620.000.000	APBD	Dinas PUPR
21	1.03.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Pembangunan Prasarana Lingkungan. Peningkatan gg. Mandiri Mentawa baru ketapang	Meter	-	500.000.000	-	-	-	500.000.000	APBD	Dinas PUPR
22	1.03.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Pembangunan Prasarana Lingkungan. Peningkatan gg. Mutiara Mentawa baru ketapang	Meter	-	580.000.000	-	-	-	580.000.000	APBD	Dinas PUPR

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
23	1.03.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Pembangunan Prasarana Lingkungan. Peningkatan gg. Karya Bersama Mentawa baru ketapang	Meter	-	620.000.000	-	-	-	620.000.000	APBD	Dinas PUPR
24	1.03.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Pembangunan Prasarana Lingkungan. Peningkatan gg. Damai Mentawa baru ketapang	Meter	-	600.000.000	-	-	-	600.000.000	APBD	Dinas PUPR
25	1.03.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Pembangunan Prasarana Lingkungan. Peningkatan gg. Pepaya Mentawa baru ketapang	Meter	-	530.000.000	-	-	-	530.000.000	APBD	Dinas PUPR
26	1.03.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Pembangunan Prasarana Lingkungan. Peningkatan gg. Tunas Baru Mentawa baru ketapang	Meter	-	550.000.000	-	-	-	550.000.000	APBD	Dinas PUPR
27	1.03.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Pembangunan Prasarana Lingkungan. Peningkatan gg. Nabawi Mentawa baru ketapang	Meter	-	500.000.000	-	-	-	500.000.000	APBD	Dinas PUPR
28	1.03.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Pembangunan Prasarana Lingkungan. Peningkatan gg. Guntur Baamang	Meter	-	650.000.000	-	-	-	650.000.000	APBD	Dinas PUPR
29	1.03.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Pembangunan Prasarana Lingkungan. Peningkatan gg. Swadaya Baamang	Meter	-	550.000.000	-	-	-	550.000.000	APBD	Dinas PUPR
30	1.03.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Peningkatan Jalan Raden Setia, Bulik	Kilometer	-	3.405.145.000	-	-	-	3.405.145.000	APBD	Dinas PUPR
31	1.03.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Purwareja, Sematu jaya	Meter	-	1.734.236.000	-	-	-	1.734.236.000	APBD	Dinas PUPR
32	1.03.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bumi Agung, Bulik	Meter	-	1.734.236.000	-	-	-	1.734.236.000	APBD	Dinas PUPR
33	1.03.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Sumber Mulya, Bulik	Meter	-	1.734.236.000	-	-	-	1.734.236.000	APBD	Dinas PUPR
	1.03.34	<b>PROGRAM : Program penggantian dan pemeliharaan jembatan tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah</b>										
34	1.03.34.01	Penggantian Jembatan	Berfungsinya kembali jembatan	Meter	14.138.400.000	11.800.000.000	12.500.000.000	13.000.000.000	13.670.000.000	65.108.400.000	APBD	Dinas PUPR

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
35	1.03.34.02	Pemeliharaan Jembatan Tersebar	Kondisi Jembatan yang terpelihara	Meter	1.000.000.000	10.500.000.000	11.000.000.000	11.500.000.000	12.000.000.000	46.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
36	1.03.34.04	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Muara Teweh. Jingah	Panjang jembatan yang dibangun	Meter	30.000.000.000	-	-	-	-	30.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
	1.03.43	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program peningkatan/pembangunan jalan Provinsi Kalimantan Tengah</b>									
37	1.03.43.36	Peningkatan jalan Pundu. Tumbang Samba	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	5.000.000.000	21.672.000.000	22.657.000.000	-	-	49.329.000.000	APBD	Dinas PUPR
38	1.03.43.37	Peningkatan Jalan Palantaran-Parenggean-Tb. Sangai	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	6.500.000.000	48.400.000.000	-	-	-	54.900.000.000	APBD	Dinas PUPR
39	1.03.43.39	Peningkatan Jalan Kuala Kurun. Linau. Tb. Jutuh	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	2.000.000.000	47.000.000.000	49.200.000.000	51.300.000.000	53.400.000.000	202.900.000.000	APBD	Dinas PUPR
40	1.03.43.44	Peningkatan Jalan Bukit Liti. Bawan	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	-	16.400.000.000	17.000.000.000	-	-	33.400.000.000	APBD	Dinas PUPR
41	1.03.43.47	Peningkatan jalan Bawan. Kuala Kurun	Panjang jalan yang ditingkatkan	Kilometer	-	16.800.000.000	17.500.000.000	-	-	34.300.000.000	APBD	Dinas PUPR
42	1.03.43.52	Peningkatan Jalan G. Obos Palangka Raya	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	-	4.882.000.000	12.900.000.000	-	-	17.782.000.000	APBD	Dinas PUPR
43	1.03.43.54	Peningkatan Jalan Pangkoh-Bahaur Hilir	Panjang jalan yang ditingkatkan&#13;&#10;Panjang jalan yang ditingkatkan (DAK)	Paket	24.250.000.000	24.000.000.000	25.000.000.000	-	-	73.250.000.000	APBD	Dinas PUPR
44	1.03.43.60	Peningkatan/Pe mbangunan Jalan Sampit. Samuda	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	5.000.000.000	15.400.000.000	-	-	-	20.400.000.000	APBD	Dinas PUPR
45	1.03.43.61	Peningkatan/Pe mbangunan Jalan Ujung Pandaran. Kuala Pembuang	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	5.000.000.000	-	-	-	-	5.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
46	1.03.43.62	Peningkatan/Pe mbangunan Jalan Riam Durian. Kotawaringin Lama	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	4.700.000.000	3.500.000.000	3.650.000.000	-	-	11.850.000.000	APBD	Dinas PUPR
47	1.03.43.64	Peningkatan/Pe mbangunan Jalan Pulang Pisau. Pangkoh	Panjang jalan yang ditingkatkan&#13;&#10;Panjang jalan yang ditingkatkan (DAK)	Paket	24.250.000.000	-	-	-	-	24.250.000.000	APBD	Dinas PUPR

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
48	1.03.43.67	Peningkatan/Pe mbangunan Jalan Pangkalan Bun. Kotawaringin Lama	Meningkatnya struktur jalan provinsi	-	12.000.000.000	-	-	-	-	12.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
49	1.03.43.71	Peningkatan/Pe mbangunan Jalan Palingkau-Dada hup	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	5.500.000.000	16.400.000.000	17.200.000.000	17.900.000.000	18.650.000.000	75.650.000.000	APBD	Dinas PUPR
50	1.03.43.72	Peningkatan Jalan Dadahup /G1-Lamunti	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	5.000.000.000	25.400.000.000	26.550.000.000	27.700.000.000	28.850.000.000	113.500.000.000	APBD	Dinas PUPR
51	1.03.43.75	Peningkatan/Pe mbangunan Jalan Simpang Bangkal. Bangkal. Telaga Pulang. Kuala Pembuang	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	12.460.000.000	13600000000 0	14220000000 0	14835000000 0	15455000000 0	12.460.000.000	APBD	Dinas PUPR
52	1.03.43.77	Peningkatan/Pe mbangunan Jalan Sukamara - Lunci	Panjang jalan yang ditingkatkan	-	4.000.000.000	-	-	-	-	4.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
53	1.03.43.81	Peningkatan Jalan Lingkar Dalam (Bundaran Burung- G.Obos)	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	2.000.000.000	-	-	-	-	2.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
54	1.03.43.83	Peningkatan Jalan Lingkar Selatan Kota Sampit	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	3.500.000.000	3.400.000.000	-	-	-	6.900.000.000	APBD	Dinas PUPR
55	1.03.43.86	Peningkatan Jalan Yos Sudarso (Palangka Raya)	Panjang jalan yang ditingkatkan	Kilometer	-	16.000.000.000	-	-	-	16.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
56	1.03.43.87	Peningkatan Jalan Set Adji (Palangka raya)	Panjang jalan yang ditingkatkan	Kilometer	3.000.000.000	-	-	-	-	3.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
57	1.03.43.88	Peningkatan/Pe mbangunan Jalan Simpang Kenawan. Riam Durian	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	4.000.000.000	7.685.000.000	8.100.000.000	-	-	19.785.000.000	APBD	Dinas PUPR
58	1.03.43.102	Peningkatan Jln. Patung. hayaping	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	3.000.000.000	7.250.000.000	7.600.000.000	8.000.000.000	8.250.000.000	34.100.000.000	APBD	Dinas PUPR
59	1.03.43.103	Peningkatan Jln. Hayaping. Bentot	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	3.000.000.000	5.000.000.000	5.150.000.000	5.400.000.000	-	18.550.000.000	APBD	Dinas PUPR

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
60	1.03.43.108	Peningkatan jalan Samuda. Ujung Pandaran	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	4.000.000.000	11.100.000.000	11.600.000.000	12.100.000.000	12.600.000.000	51.400.000.000	APBD	Dinas PUPR
61	1.03.43.112	Peningkatan jalan Tb. Sangai-Tb. Kalang	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	6.500.000.000	25.450.000.000	26.600.000.000	27.800.000.000	29.000.000.000	115.350.000.000	APBD	Dinas PUPR
62	1.03.43.116	Peningkatan jalan Basarang-Batanjung	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	2.500.000.000	-	-	-	-	2.500.000.000	APBD	Dinas PUPR
63	1.03.43.117	Peningkatan jalan Riam Durian. Sukamara	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	5.500.000.000	25.900.000.000	27.100.000.000	-	-	58.500.000.000	APBD	Dinas PUPR
64	1.03.43.125	Peningkatan Jalan Pasar Panas. Bentot-Kambitin /Batas Kalsel	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	3.000.000.000	2.900.000.000	3.050.000.000	3.200.000.000	-	12.150.000.000	APBD	Dinas PUPR
65	1.03.43.128	Peningkatan Jalan Kalampangan. Pelabuhan Tanjung Pinang	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	21.928.000.000	8.050.000.000	-	-	-	29.978.000.000	APBD	Dinas PUPR
66	1.03.43.131	Peningkatan Jalan Kuala Kapuas. Palingkau	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	5.000.000.000	14.900.000.000	15.600.000.000	16.300.000.000	17.000.000.000	68.800.000.000	APBD	Dinas PUPR
67	1.03.43.132	Peningkatan Jalan Tapin Bini - Suja. Penopa	Panjang jalan yang ditingkatkan	Kilometer	3.000.000.000	25.400.000.000	26.600.000.000	27.700.000.000	28.900.000.000	111.600.000.000	APBD	Dinas PUPR
68	1.03.43.134	Peningkatan Jalan Yos Sudarso (Puruk Cahu)	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	2.000.000.000	13.650.000.000	14.250.000.000	14.900.000.000	15.500.000.000	60.300.000.000	APBD	Dinas PUPR
69	1.03.43.135	Peningkatan Jalan Rajawali Palangka Raya	Panjang jalan yang ditingkatkan	-	2.000.000.000	-	-	-	-	2.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
70	1.03.43.139	Peningkatan jalan Sp. Patas - Tabak kanilan	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	2.692.000.000	-	-	-	-	2.692.000.000	APBD	Dinas PUPR
71	1.03.43.140	Peningkatan Jalan Tampa. Pinang Tunggal	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	2.500.000.000	16.100.000.000	16.850.000.000	17.600.000.000	18.300.000.000	71.350.000.000	APBD	Dinas PUPR
72	1.03.43.143	Peningkatan Jalan Lingkar Kota Muara Teweh	Panjang jalan yang ditingkatkan&#13;&#10;Panjang jalan yang ditingkatkan (DAK)	Paket	9.000.000.000	-	-	-	-	9.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
73	1.03.43.144	Peningkatan Jalan Pulang Pisau Menuju Pelabuhan	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	5.000.000.000	5.200.000.000	5.400.000.000	-	-	15.600.000.000	APBD	Dinas PUPR

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
74	1.03.43.149	Peningkatan Jalan Sp. Sepaku. Perigi. Beruta	panjang jalan yang ditingkatkan	Kilometer	2.500.000.000	32.400.000.000	33.800.000.000	35.300.000.000	36.750.000.000	140.750.000.000	APBD	Dinas PUPR
75	1.03.43.150	Peningkatan Jalan Dadahup /G1. A5	Panjang jalan yang ditingkatkan	Paket	5.000.000.000	18.600.000.000	19.500.000.000	20.300.000.000	21.150.000.000	84.550.000.000	APBD	Dinas PUPR
76	1.03.43.151	Peningkatan Jalan Mendawai/Kamp ung Melayu. Pagatan	panjang jalan yang ditingkatkan	-	7.500.000.000	-	-	-	-	7.500.000.000	APBD	Dinas PUPR
77	1.03.43.153	Peningkatan Jalan Telang Siong-Bangkuan g	Panjang jalan yang ditingkatkan	-	5.000.000.000	-	-	-	-	5.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
78	1.03.43.155	Peningkatan jalan Pangkut Arut Utara	Panjang jalan yang ditingkatkan	-	2.500.000.000	-	-	-	-	2.500.000.000	APBD	Dinas PUPR
	1.03.47	<b>PROGRAM</b>	: Program rehabilitasi / pemeliharaan rutin jalan dan jembatan									
79	1.03.47.01	Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota Palangka Raya	Panjang jalan yang dipelihara	Paket	1.000.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	2.000.000.000	1.800.000.000	8.200.000.000	APBD	Dinas PUPR
80	1.03.47.02	Pemeliharaan rutin jalan provinsi Wilayah Barito Utara dan Murung Raya	Panjang jalan yang dipelihara	Paket	500.000.000	505.000.000	930.000.000	930.000.000	930.000.000	3.795.000.000	APBD	Dinas PUPR
81	1.03.47.03	Pemeliharaan rutin jalan provinsi Wilayah Barito Selatan dan Barito Timur	Panjang jalan yang dipelihara	Paket	900.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	16.100.000.000	APBD	Dinas PUPR
82	1.03.47.04	Pemeliharaan rutin jalan provinsi Wilayah Kapuas dan Pulang Pisau	Panjang jalan yang dipelihara	Paket	1.000.000.000	8.040.000.000	8.040.000.000	8.040.000.000	8.040.000.000	33.160.000.000	APBD	Dinas PUPR
83	1.03.47.05	Pemeliharaan rutin jalan provinsi Wilayah Gunung Mas	Panjang jalan yang dipelihara	Paket	1.000.000.000	5.110.000.000	5.110.000.000	5.110.000.000	5.110.000.000	21.440.000.000	APBD	Dinas PUPR
84	1.03.47.06	Pemeliharaan rutin jalan provinsi Wilayah Katingan, Kotim dan Seruyan	Panjang jalan yang dipelihara	Paket	1.000.000.000	15.760.000.000	16.800.000.000	16.950.000.000	16.950.000.000	67.460.000.000	APBD	Dinas PUPR
85	1.03.47.07	Pemeliharaan rutin jalan provinsi Wilayah Kobar, Lamandau dan Sukamara	Panjang jalan yang dipelihara	Paket	1.000.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000	9.550.000.000	9.550.000.000	37.100.000.000	APBD	Dinas PUPR

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
86	1.03.47.11	Pemeliharaan Berkala Dalam Kota	Panjang jalan yang dipelihara	-	4.000.000.000	-	-	-	-	4.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
87	1.03.47.12	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi	Panjang jalan yang dipelihara	-	6.000.000.000	-	-	-	-	6.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
88	1.03.47.13	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kotawaringin Barat	panjang jalan yang dipelihara	-	8.424.000.000	-	-	-	-	8.424.000.000	APBD	Dinas PUPR
89	1.03.47.14	Pemeliharaan Berkala Jalan Bukit Liti. Bawan	Panjang jalan yang dipelihara	-	2.000.000.000	-	-	-	-	2.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
90	1.03.47.15	Pemeliharaan Berkala Jalan Bawan. Kuala Kurun	Panjang Jalan yang dipelihara	-	2.000.000.000	-	-	-	-	2.000.000.000	APBD	Dinas PUPR



**TUJUAN 10 : BERKURANGNYA KESENJANGAN**

Kode Indikator	Sasaran	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
						2017	2018	2019	2020	2021
<b>10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, dan secara progresif mencapai kesetaraan</b>										
10:04:01	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Tingkat kemiskinan (%)	RPJMD	persen	5,91	5,3	5,02	4,8	4,5	4,3

TUJUAN 10 : BERKURANGNYA KESENJANGAN

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2017	2018	2019	2020	2021			
		<b>TPB 10.4</b>		<b>: Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, dan secara progresif mencapai kesetaraan</b>							
	1.06. 37	<b>PROGRAM</b>		<b>: Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>							
1	1.06.37.01	Fasilitas Pemberian Bantuan Sosial Bagi PMKS	Orang	460.401.000	506.441.100	510.000.000	515.000.000	525.000.000	2.516.842.100	APBD	Dinas Sosial
2	1.06.37.02	Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Laporan	75.000.000	82.500.000	92.500.000	102.500.000	102.500.000	455.000.000	APBD	Dinas Sosial
3	1.06.37.03	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana Sosial	Laporan	75.000.000	82.500.000	9.250.000.000	102.500.000	102.500.000	9.612.500.000	APBD	Dinas Sosial
4	1.06.37.04	Perlindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center	Orang	89.436.000	98.379.600	103.379.600	108.379.600	108.379.600	507.954.400	APBD	Dinas Sosial
	2.01. 15	<b>PROGRAM</b>		<b>: Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>							
5	2.01.15.14	Pemagangan tenaga kerja	Orang	84.502.000	143.000.000	157.300.000	173.030.000	190.333.000	748.165.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi grasi
6	2.01.15.15	Penyuluhan standarisasi sertifikasi	Orang	80.000.000	132.000.000	145.200.000	159.720.000	175.692.000	692.612.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi grasi
7	2.01.15.17	Akreditasi lembaga pelatihan kerja	LPK	80.000.000	132.000.000	145.200.000	159.720.000	175.692.000	692.612.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi grasi
8	2.01.15.18	Pelatihan berbasis masyarakat	Orang	350.000.000	495.000.000	544.500.000	598.950.000	658.845.000	2.647.295.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi grasi
9	2.01.15.25	Pelatihan Keterampilan Di Desa Produktif	Kabupaten	75.000.000	82.500.000	90.750.000	99.825.000	109.807.500	457.882.500	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi grasi
10	2.01.15.28	Pelatihan Pendamping Peningkatan Produktivitas	Orang	85.000.000	187.000.000	205.700.000	226.270.000	248.897.000	952.867.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi grasi

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
11	2.01.15.29	Pelatihan Kewirausahaan dan Gugus Kendali Mutu	Terlatihnya tenaga kerja terampil	Orang	100.000.000	225.500.000	248.050.000	272.855.000	300.140.500	1.146.545.500	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi grasi
	2.01.16	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>									
12	2.01.16.10	Pemanduan dan terapan TPK	Terselenggarany a Pemanduan dan Terapan Teknologi Padat Karya	Orang	260.000.000	357.500.000	393.250.000	432.575.000	475.832.500	1.919.157.500	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi grasi
13	2.01.16.14	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Kepada Siswa SLTA	Terselenggarany a Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	90.000.000	165.000.000	181.500.000	199.650.000	219.615.000	855.765.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi grasi
14	2.01.16.15	Monitoring pengguna Tenaga Kerja Asing	Terselenggarany a Monitoring Tenaga Kerja Asing yang bekerja di 6 Kabupaten	Persen	90.000.000	154.000.000	169.400.000	186.340.000	204.974.000	804.714.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi grasi
15	2.01.16.21	Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal/Pencaker Melalui Penciptaan Tenaga Kerja Mandiri	Terciptanya kesempatan kerja pembukaan usaha mandiri	Orang	350.000.000	473.000.000	520.300.000	572.330.000	629.563.000	2.545.193.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi grasi
16	2.01.16.22	Pengelolaan Kegiatan Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja Online	Pengelolaan kegiatan IPK dan BKOL	Orang	75.000.000	159.500.000	175.450.000	192.995.000	212.294.500	815.239.500	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi grasi
17	2.01.16.23	Rapat Koordinasi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja/Petugas	Terlaksananya temu konsultasi pengantar kerja/petugas antar kerja	Orang	65.000.000	82.500.000	90.750.000	99.825.000	109.807.500	447.882.500	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmi grasi

**TUJUAN 11 : KOTA DAN PERMUKIMAN BERKELANJUTAN**

Kode Indikator	Sasaran	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
						2017	2018	2019	2020	2021
<b>11.2 Mengimplementasikan Kerangka Kerja 10 tahun dari program konsumsi dan produksi yang berkelanjutan</b>										
11:02:01	Terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodif dan konsisten	Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Kebutuhan Ruang	RPJMD	persen	22	25	32	40	42	45
11:02:02	Meningkatnya konektivitas antardaerah	Prosentase jalan mantap	RPJMD	persen	59,7	67,78	75,85	83,93	92	92
		Persentase konektivitas jalan	RPJMD	persen	89,8	93,2	96,6	100	100	100

TUJUAN 11 : KOTA DAN PERMUKIMAN BERKELANJUTAN

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
		<b>TPB 11.2</b>	<b>: Mengimplementasikan Kerangka Kerja 10 tahun dari program konsumsi dan produksi yang berkelanjutan</b>									
	<b>1.03 - 59</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>: Terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodif dan konsisten</b>									
1	1.03.59.03	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi	Orang	-	500.000.000	330.000.000	360.000.000	400.000.000	1.590.000.000	APBD	Dinas PUPR
2	1.03.59.25	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen	Dokumen	-	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	6.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
3	1.03.59.26	Pemantapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	Dokumen	1.900.000.000	1.500.000.000	650.000.000	750.000.000	850.000.000	5.650.000.000	APBD	Dinas PUPR
4	1.03.59.27	Updating Database Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Updating Database Tata Ruang	Dokumen	50.000.000	100.000.000	220.000.000	240.000.000	260.000.000	870.000.000	APBD	Dinas PUPR
5	1.03.59.28	Inventarisasi dan Pemetaan Desa/Kelurahan Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan	Jumlah Dokumen	Dokumen	4.000.000.000	-	-	-	-	4.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
6	1.03.59.29	Inventarisasi dan Pemetaan Lahan Kelola Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	Dokumen	750.000.000	-	-	-	-	750.000.000	APBD	Dinas PUPR
7	1.03.59.30	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Tengah Kawasan Ekonomi	Jumlah Dokumen	Dokumen	750.000.000	-	-	-	-	750.000.000	APBD	Dinas PUPR
8	1.03.59.31	Bimbingan Teknis Aparatur Tentang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)/Rencana Rinci Tata Ruang	Jumlah Orang	Orang	-	300.000.000	275.000.000	300.000.000	330.000.000	1.205.000.000	APBD	Dinas PUPR
9	1.03.59.32	Persiapan Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen	Dokumen	-	-	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	APBD	Dinas PUPR

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
10	1.03.59.33	Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata RUang Provinsi	Jumlah Dokumen	Dokumen	-	-	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
11	1.03.59.34	Revisi Rencana Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen	Dokumen	-	-	-	1.500.000.000	-	1.500.000.000	APBD	Dinas PUPR
	1.03.29	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</b>									
12	1.03.29.05	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman tradisional bersejarah / Tugu Soekarno (Lanjutan)	Tersedianya Penataan Lingkungan Permukiman Tradisional Bersejarah	Kawasan	750.000.000	6.000.000.000	-	-	-	6.750.000.000		Dinas PUPR
13	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Penanganan dan peningkatan kualitas Kws. Kumuh Kec. Maliku	Kegiatan	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000	3.500.000.000	5.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
14	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Penanganan dan peningkatan kualitas Kws. Kumuh Kec. Kahayan Hilir	Kegiatan	500.000.000	500.000.000	500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	7.500.000.000	APBD	Dinas PUPR
15	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Penanganan dan peningkatan kualitas Kws. Kumuh Kec. Jekan Raya	Kegiatan	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-	15.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
16	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Penanganan dan peningkatan kualitas Kws. Kumuh Kec. Sukamara	Kegiatan	500.000.000	500.000.000	500.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	5.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
17	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Penanganan dan peningkatan kualitas Kws. Kumuh Kec. Pahandut	Kegiatan	5.000.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	-	-	16.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
18	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Penanganan dan peningkatan kualitas Kws. Kumuh Kec. Jelai	Kegiatan	500.000.000	500.000.000	500.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	5.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
19	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Penanganan dan peningkatan kualitas Kws. Kumuh Kec. Timpah	Kegiatan	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
20	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Penanganan dan peningkatan kualitas Kws. Kumuh Kec. Baamang	Kegiatan	1.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	9.500.000.000	APBD	Dinas PUPR

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
21	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Penanganan dan peningkatan kualitas Kws. Kumuh Kec. Tamban Catur	Kegiatan	-	2.000.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	10.500.000.000	APBD	Dinas PUPR
22	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh Kec. Ketapang	Kegiatan	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	16.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
23	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Penanganan dan peningkatan kualitas Kws. Kumuh Kec. Selat	Kegiatan	2.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	5.000.000.000	16.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
24	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Penanganan dan peningkatan kualitas Kws. Kumuh Kec. Pasak Talawang	Kegiatan	-	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
25	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Penanganan dan peningkatan kualitas Kws. Kumuh Kec. Bataguh	Kegiatan	2.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	3.500.000.000	13.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
26	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Penanganan dan peningkatan kualitas Kws. Kumuh Kec. Mantangai	Kegiatan	2.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000	15.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
27	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Penanganan dan peningkatan kualitas Kws. Kumuh Kec. Mandau Talawang	Kegiatan	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
28	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Penanganan dan peningkatan kualitas Kws. Kumuh Kec. Kapuas Barat	Kegiatan	1.500.000.000	2.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	11.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
29	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Penanganan dan peningkatan kualitas Kws. Kumuh Kec. Kapuas Timur	Kegiatan	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000	6.000.000.000	18.500.000.000	APBD	Dinas PUPR
30	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Penanganan dan peningkatan kualitas Kws. Kumuh Kec. Kapuas Tengah	Kegiatan	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	5.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
31	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Penanganan dan peningkatan kualitas Kws. Kumuh Kec. Kapuas Hilir	Kegiatan	3.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	19.000.000.000	APBD	Dinas PUPR

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
32	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Penanganan dan peningkatan kualitas Kws. Kumuh Kec. Kapuas Murung	Kegiatan	1.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	10.500.000.000	APBD	Dinas PUPR
33	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Penanganan dan peningkatan kualitas Kws. Kumuh Kec. Kapuas Hulu	Kegiatan	500.000.000	500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3.500.000.000	APBD	Dinas PUPR
34	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Penanganan dan peningkatan kualitas Kws. Kumuh Kec. Kapuas Kuala	Kegiatan	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000	11.500.000.000	APBD	Dinas PUPR
35	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh. Peningkatan jalan lingkungan RT.13 Baamang Hilir Baamang	Meter	-	350.000.000	-	-	-	350.000.000	APBD	Dinas PUPR
36	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh. Peningkatan jalan lingkungan RT.20 Baamang Hilir Baamang	Meter	-	450.000.000	-	-	-	450.000.000	APBD	Dinas PUPR
37	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh. Peningkatan jalan lingkungan RT.06 Baamang Tengah Baamang	Meter	-	500.000.000	-	-	-	500.000.000	APBD	Dinas PUPR
38	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh. Peningkatan jalan lingkungan RT.03 Baamang Hulu Baamang	Meter	-	500.000.000	-	-	-	500.000.000	APBD	Dinas PUPR
39	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh. Peningkatan jalan lingkungan RT.16 Baamang Hilir Baamang	Meter	-	500.000.000	-	-	-	500.000.000	APBD	Dinas PUPR
40	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh. Peningkatan jalan lingkungan RT.04 Baamang Hilir	Meter	-	500.000.000	-	-	-	500.000.000	APBD	Dinas PUPR



NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
41	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh. Peningkatan jalan lingkungan RT.03 Baamang Hilir	Meter	-	400.000.000	-	-	-	400.000.000	APBD	Dinas PUPR
42	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh. Peningkatan jalan lingkungan RT.02 Baamang Hilir	Meter	-	450.000.000	-	-	-	450.000.000	APBD	Dinas PUPR
43	1.03.29.06	Dukungan PSD penataan lingkungan permukiman kumuh	Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh. Peningkatan jalan lingkungan RT.02 Baamang Hilir	Meter	-	450.000.000	-	-	-	450.000.000	APBD	Dinas PUPR
44	1.03.29.09	Pembangunan Tugu perbatasan kalteng. kassel di Anjir Sarapat	Terlaksananya Pembangunan Tugu, Pedestrian Pejalan Kaki dan RTH Kawasan Tugu Perbatasan Kalteng-Kassel Anjir Serapat 1 kawasan	Kawasan	2.000.000.000	5.000.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	10.500.000.000	APBD	Dinas PUPR
45	1.03.29.12	Dukungan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan	Pembuatan taman hijau di daerah perbatasan Kalteng-Kassel, Basarang, Kapuas timur	Paket	-	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
46	1.03.29.12	Dukungan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan	Penataan Kawasan Lapangan Sanaman Mantekei Sebangau, Pahandut, Rakumpit, Jekan raya, Bukit batu	Paket	-	15.000.000.000	-	-	-	15.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
47	1.03.29.14	OP. Kebersihan dan Pemeliharaan Taman	Terpeliharanya drainase, kebersihan dan perawata taman kota Palangka Raya	Kawasan	3.500.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000	24.500.000.000	APBD	Dinas PUPR
48	1.03.29.16	Pembuatan Taman Mahir Mahar (Lanjutan)	Terlaksananya Pembuatan Taman Mahir Mahar 1 kawasan	Unit	3.000.000.000	3.000.000.000	1.500.000.000	-	-	7.500.000.000	APBD	Dinas PUPR
49	1.03.29.20	Pembangunan Lapangan Futsal, Penataan Area Parkir dan Food Court, Spot Center Palangka Raya(Lanjutan)	Terlaksananya Pembangunan finishing, ipal, elektrikal sarana prasarana lingkungan	Kawasan	1.500.000.000	2.000.000.000	4.000.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	16.500.000.000	APBD	Dinas PUPR

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2017	2018	2019	2020	2021			
50	1.03.29.22	Pembangunan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB	Terlaksananya Pembangunan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB 1 unit	Unit	2.000.000.000	1.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
51	1.03.29.37	Pembuatan Taman Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 (Komplek Stadion Tuah Pahoe) Palangka Raya	Terlaksananya Pembuatan Taman Cilik Riwut Km 5,5 (Komplek Stadion Tuah Pahoe) Palangka Raya 1 kawasan	Kawasan	2.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	19.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
52	1.03.29.41	Pendampingan PPSP Sharing Investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Pendampingan PPSP Sharing Investasi Pemprov Kalteng dalam rangka MPS	Kawasan	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
53	1.03.29.45	BOP Kegiatan Pamsimas	Terlaksananya BOP Kegiatan Pamsimas	Kegiatan	100.000.000	100.000.000	-	-	-	200.000.000	APBD	Dinas PUPR
54	1.03.29.47	Pembangunan Pendukung Kolam Renang dan Perawatan Bangunan Korem 102/Pjg	Rehabilitasi Bangunan Korem 102/Pjg	Unit	2.000.000.000	5.000.000.000	-	-	-	7.000.000.000	APBD	Dinas PUPR
55	1.03.29.48	Pembangunan Trotoar Jogging Track di Kawasan Bandara Iskandar Pangkalan Bun	Pembangunan Trotoar Jogging Track di Kawasan Bandara Iskandar, Pangkalan Bun	Kawasan	1.500.000.000	5.000.000.000	-	-	-	6.500.000.000	APBD	Dinas PUPR

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
	1.04.15	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Pengembangan Perumahan</b>									
56	1.04.15.03	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Tersedianya program kerja untuk meningkatkan jumlah cakupan rumah bagi MBR	Tahun	-	12.260.000.000	6.260.000.000	6.260.000.000	6.260.000.000	31.040.000.000	APBD	Dinas PERKIM
57	1.04.15.10	Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman perkotaan	Terbangunnya Jalan atau drainase dilingkungan permukiman perkotaan	Meter	25.068.430.000	-	-	-	-	25.068.430.000	APBD	Dinas PERKIM
58	1.04.15.11	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Panjang jalan dan drainase yang dibangun dilingkungan pada kawasan RSH	Meter	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas PERKIM
59	1.04.15.13	Apraisal Survey dan Pengukuran	Tersusunnya dokumen perencanaan di Bidang Perumahan	Dokumen	200.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	7.200.000.000	APBD	Dinas PERKIM
60	1.04.15.15	Perencanaan Kegiatan Perumahan dan Permukiman	Dokumen Data Perumahan	Dokumen	105.000.000	-	-	-	-	105.000.000	APBD	Dinas PERKIM
61	1.04.15.18	Pembangunan Rumah Layak Huni (Stimulan)	Peningkatan cakupan rumah layak huni	Unit	-	27.260.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	72.260.000.000	APBD	Dinas PERKIM
	1.04.37	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Pertanahan Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>									
62	1.04.37.01	Perencanaan Pertanahan, Perumahan dan Kawasan permukiman	Jumlah dokumen data lahan	Dokumen	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	APBD	Dinas PERKIM
	1.04.38	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan</b>									
63	1.04.38.01	Pengembangan Pengendalian Kualitas Kawasan Permukiman Perkotaan	Panjang jalan dan drainase yang terbangun di kawasan permukiman perkotaan	Meter	-	36.200.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	126.200.000.000	APBD	Dinas PERKIM
64	1.04.38.02	Appraisal Survey dan Pengukuran	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman	Dokumen	-	400.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.300.000.000	APBD	Dinas PERKIM
65	1.04.38.03	Perencanaan dan Pendataan Bidang Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen hasil pendataan kawasan permukiman	Dokumen	-	750.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	6.250.000.000	APBD	Dinas PERKIM
	1.04.40	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Perencanaan Ketersediaan Lahan Perkotaan dan Perdesaan</b>									
66	1.04.40.01	Survey dan Konsolidasi Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Rumah, Perumahan dan Kawasan	Tersedianya Dokumen/Data Lahan	Laporan	-	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	28.000.000.000	APBD	Dinas PERKIM

**TUJUAN 12 : KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB**

Kode Indikator	Sasaran	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
						2017	2018	2019	2020	2021
<b>12.1. Mengimplementasikan Kerangka Kerja 10 tahun dari program konsumsi dan produksi yang berkelanjutan</b>										
12:01:01	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Kontribusi PDRB Kalimantan Tengah dalam pembentukan PDRB Kalimantan (%)	BPS Provinsi	persen	10,85	13	14	14	15	15

**TUJUAN 12 : KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB**

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
		<b>TPB 12.1</b>	<b>: Mengimplementasikan Kerangka Kerja 10 tahun dari program konsumsi dan produksi yang berkelanjutan</b>									
	3.07.16	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>									
1	3.07.16.07	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan sentra IK	Peningkatan peranan sentra IK di Kalteng dalam produksi dan pemasaran	tahun	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500	72.930.375	331.537.875	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2	3.07.16.09	Mengikuti pameran produk mutu manikam binaan dekranasda Kalimantan Tengah	Jumlah kegiatan pelaksanaan partisipasi pada pameran produk mutu manikam binaan Dekranasda Kalteng	Kegiatan	-	-	85.000.000	90.000.000	100.000.000	275.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	3.07.16.10	Mengikuti pameran produk kerajinan/inacraft binaan dekranasda Kalimantan Tengah	Jumlah kegiatan pelaksanaan partisipasi pameran produk kerajinan INACRAFT binaan Dekranasda Kalteng	Kegiatan	-	-	90.000.000	100.000.000	110.000.000	300.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4	3.07.16.11	Pemeliharaan dan penataan showroom dekranasda	Tertatanya showroom Dekranasda yang baik dan nyaman	tahun	75.000.000	78.750.000	82.687.500	86.821.875	91.162.969	414.422.344	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
5	3.07.16.31	Mengikuti Pameran Produk Kerajinan Unggulan Binaan Dekranasda	Meningkatnya promosi kerajinan khas Kalteng	Kegiatan	75.000.000	-	82.687.500	86.821.875	91.162.969	335.672.344	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
6	3.07.16.32	Pelatihan Industri Kreatif bagi Generasi Muda	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM generasi muda	Individu	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	276.281.563	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
7	3.07.16.39	Lomba Menganyam Khas Kalteng	Jumlah peserta yang mengikuti lomba menganyam dan cenderamata khas Kalteng	Individu	-	80.000.000	80.000.000	85.000.000	85.000.000	330.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
8	3.07.16.43	Pelatihan Anyaman Rotan Tingkat Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan anyaman rotan tingkat dasar	Individu	-	73.500.000	77.175.000	81.033.750	85.085.438	316.794.188	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9	3.07.16.44	Pelatihan Anyaman Rotan Tingkat Ahli	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan pengrajin rotan	Individu	-	84.000.000	88.200.000	92.610.000	97.240.500	362.050.500	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
10	3.07.16.45	Magang anyaman rotan	Jumlah peserta magang anyaman rotan	Individu	-	89.250.000	93.712.500	98.398.125	103.318.031	384.678.656	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
11	3.07.16.48	Pelatihan Teknik Pengelasan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM pengelasan	Individu	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	276.281.563	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
12	3.07.16.49	Pameran Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI)	Meningkatnya promosi produk unggulan kreatif Kalteng	Kegiatan	75.000.000	-	82.687.500	86.821.875	91.162.969	335.672.344	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
13	3.07.16.50	Pelatihan teknik pembuatan meubelair rotan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknik pembuatan meubelair rotan	Individu	-	252.000.000	264.600.000	277.830.000	291.721.500	1.086.151.500	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
14	3.07.16.52	Rapat Kerja Daerah Dekranasda Prov. Kalteng dan Rakernas Dekranas	Meningkatnya sinergitas program kerja Dekranasda pusat dengan daerah	Kegiatan	80.000.000	84.000.000	88.200.000	92.610.000	97.240.500	442.050.500	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
15	3.07.16.55	UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksanannya operasional UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Disperindag Prov. Kalteng	tahun	-	750.000.000	800.000.000	825.000.000	850.000.000	3.225.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
16	3.07.16.58	Pelatihan pengembangan desain produk anyaman rotan	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pengrajin rotan	Individu	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	276.281.563	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
17	3.07.16.73	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang Industri Kecil dan Menengah	Jumlah pelaku usaha IKM yang mengikuti Rakor IKM	dokumen	-	100.000.000	125.000.000	125.000.000	130.000.000	480.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
18	3.07.16.80	Analisa Pasar/Kebutuhan Kemasan IKM Kalteng	Jumlah dokumen analisa pasar/kebutuhan kemasan IKM Kalteng	tahun	-	65.000.000	82.500.000	85.000.000	87.500.000	320.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
19	3.07.16.83	Pelatihan Pengolahan Pangan Berbasis Durian	Jumlah peserta Pelatihan pengolahan pangan berbasis durian	Individu	-	80.000.000	-	-	-	80.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
20	3.07.16.92	Pelatihan Bordir Kain Bagi IKM Sandang	Jumlah peserta pelatihan bordir kain bagi IKM	Individu	-	60.000.000	75.000.000	80.000.000	87.500.000	302.500.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
21	3.07.16.95	Mengikuti Pameran Indonesia Jewelry fair	Jumlah dokumen kegiatan pelaksanaan partisipasi pada pameran Indonesia Jewelry Fair	dokumen	75.000.000	-	80.000.000	85.000.000	75.000.000	315.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
22	3.07.16.96	Pendataan Kerajinan Bahan Bangunan di Kab./Kota	Tersedianya data pengrajin Se-Kalimantan Tengah guna memudahkan pembinaan	IKM	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	276.281.563	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
23	3.07.16.99	Magang Desain Furniture Rotan	Jumlah peserta Magang Desain Furniture Rotan	Individu	-	90.000.000	90.000.000	95.000.000	100.000.000	375.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
24	3.07.16.103	Pelatihan Bordir Kain	Jumlah peserta pelatihan bordir kain bagi IKM Sandang	Individu	-	60.000.000	-	-	-	60.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
25	3.07.16.109	Pelatihan Teknik Pembuatan Perabotan Rumah Tangga Dari Aluminium	Jumlah peserta pelatihan teknik pembuatan perabotan aluminium	Individu	-	60.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	315.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
26	3.07.16.112	Pelatihan Diversifikasi Anyaman Purun	Jumlah peserta pelatihan diversifikasi anyaman purun	Individu	-	80.000.000	85.000.000	90.000.000	90.000.000	345.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
27	3.07.16.113	Pelatihan Kerajinan Kesenit Kaki Dari Sabut Kelapa	Meningkatnya keterampilan pengrajin dari sabut kelapa	Individu	-	80.000.000	85.000.000	85.000.000	90.000.000	340.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
28	3.07.16.115	Pelatihan Diversifikasi Produk Mebel Dari Bambu	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan pengetahuan pengrajin mebel dari bambu	Individu	-	84.000.000	88.200.000	92.610.000	97.240.500	362.050.500	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
29	3.07.16.116	Pelatihan Kerajinan Dari Limbah Kulit Jagung	Meningkatnya keterampilan pengrajin limbah kulit jagung	Individu	-	75.000.000	75.000.000	80.000.000	85.000.000	315.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
30	3.07.16.119	Sosialisasi/Prom osi Pelayanan UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkatnya pelayanan publik di bidang kemasan	tahun	-	85.000.000	85.000.000	85.000.000	-	255.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
31	3.07.16.120	Peningkatan Kemampuan Operator Produksi UPT. Makanan, Minuman dan Kemasan Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkatnya keahlian operator produksi	tahun	-	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	320.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
32	3.07.16.121	Peningkatan Kemampuan dan Perlengkapan Produksi Kemasan UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkatnya kemampuan desain kemasan	tahun	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	200.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
33	3.07.16.122	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Produksi UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Provinsi Kalimantan Tengah	Tersedianya mesin dan peralatan keperluan produksi makanan, minuman dan kemasan UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Disperindag Prov. Kalimantan Tengah	paket	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
34	3.07.16.123	Bantuan Kemasan Bagi IKM Kalimantan Tengah	Meningkatnya kualitas kemasan dan daya saing produk IKM	paket	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	300.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
35	3.07.16.124	Pelatihan Pengemasan Bagi IKM Pangan	Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha tentang standar kemasan makanan yang baik dan benar	Individu	50.000.000	65.000.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	288.781.563	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
36	3.07.16.125	Pendaftaran Merk/HKI Bagi IKM	Terlindunginya hak merk produk IKM	IKM	30.000.000	35.000.000	40.000.000	42.000.000	43.000.000	190.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
37	3.07.16.126	Pemberian Sertifikasi Halal	Terlindunginya konsumen dari makanan tidak halal	IKM	50.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	370.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
38	3.07.16.127	Pelatihan Teknik Produksi Olahan Hasil Agro Berstandarisasi GMP	Jumlah peserta pelatihan teknik produksi olahan hasil agro berstandarisasi GMP	Individu	-	70.000.000	75.000.000	80.000.000	80.000.000	305.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian



NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
39	3.07.16.128	Magang Produk Olahan Agro Bagi IKM Gunung Mas	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan dalam pengolahan hasil agro	Individu	-	70.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	295.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
40	3.07.16.129	Keikutsertaan IKM Dalam Pameran	Jumlah dokumen keikutsertaan IKM dalam pameran	dokumen	-	60.000.000	80.000.000	80.000.000	85.000.000	305.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
41	3.07.16.130	Pengadaan Mesin Jahit dan Mesin Obras	Tersedianya fasilitas mesin jahit dan mesin obras	paket	-	100.000.000	-	-	-	100.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
42	3.07.16.131	Pengadaan Mesin Pengolahan Singkong	Tersedianya fasilitas mesin pengolahan singkong	paket	-	70.000.000	-	-	-	70.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
43	3.07.16.132	Lomba Desain Kemasan Kalimantan Tengah	Meningkatkan keanekaragaman desain kemasan yang berkualitas	Kegiatan	60.000.000	65.000.000	70.000.000	75.000.000	80.000.000	350.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
44	3.07.16.133	Penambahan Daya Listrik Kantor UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah	Penambahan daya listrik UPT	tahun	-	50.000.000	-	-	-	50.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
45	3.07.16.134	Rapat Koordinasi Bidang Industri Kecil dan Menengah	Jumlah pelaku usaha IKM yang mengikuti Rakor IKM	Individu	-	100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500	431.012.500	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
46	3.07.16.135	Lomba Ikon Produk Makanan Khas Kalteng	Meningkatkan keanekaragaman ikon produk makanan khas Kalteng	Kegiatan	80.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	420.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
47	3.07.16.136	Pengadaan Bahan Baku Produksi Kemasan UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Prov. Kalteng	Tersedianya kemasan bagi IKM	tahun	200.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000	243.101.250	1.105.126.250	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
48	3.07.16.137	Pemeliharaan Mesin dan Pembelian Sparepart/Suku Cadang Mesin UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Prov. Kalteng	Meningkatkan kinerja mesin operasional	tahun	125.000.000	131.250.000	137.812.500	144.703.125	151.938.281	690.703.906	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
49	3.07.16.138	Magang Peningkatan Desain Produk Anyaman Rotan	Meningkatnya ketrampilan dan wawasan pengrajin anyaman rotan kalteng	Individu	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	276.281.563	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
50	3.07.16.139	Promosi dan Kerjasama pada Industri Makanan dan Minuman (Pameran)	Meningkatnya daya saing industri makanan dan minuman	tahun	-	75.000.000	80.000.000	85.000.000	85.000.000	325.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
51	3.07.16.140	Standarisasi pada Industri Makanan dan Minuman (SNI wajib)	Meningkatnya daya saing industri makanan dan minuman	tahun	-	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	225.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
52	3.07.16.141	Pelatihan Kerajinan dari Tempurung Kelapa	Meningkatnya keterampilan pengrajin tempurung kelapa	Individu	-	80.000.000	80.000.000	85.000.000	90.000.000	335.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
53	3.07.16.142	Magang Kerajinan dari Tempurung Kelapa	Meningkatnya wawasan pengrajin tempurung kelapa	Individu	-	90.000.000	95.000.000	95.000.000	100.000.000	380.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
54	3.07.16.143	Magang Kerajinan Diversifikasi Produk Meubel dari Bambu	Meningkatnya wawasan dan keterampilan teknik pengrajin mebel dari bambu	Individu	-	90.000.000	95.000.000	95.000.000	100.000.000	380.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
55	3.07.16.144	Pelatihan Kerajinan Produk Unggulan di Desa Tertinggal	Meningkatnya keterampilan pengrajin produk unggulan di desa tertinggal	Individu	-	462.000.000	485.100.000	509.355.000	534.822.750	1.991.277.750	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
56	3.07.16.145	Mengikuti Pameran Khas Daerah	Meningkatnya promosi dan pengenalan produk khas daerah kalteng	dokumen	-	100.000.000	100.000.000	110.000.000	115.000.000	425.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
57	3.07.16.146	Magang Pembuatan Mesi Peralatan Tepat Guna Pasca Panen Hasil Pertanian	Meningkatnya kemampuan peserta magang dalam pembuatan mesin alsintan	Individu	-	125.000.000	-	135.000.000	-	260.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
58	3.07.16.151	Pembangunan Gedung UPT. Industri makanan, Minuman dan kemasan Disperindag Provinsi Kalteng	Tersedianya gedung UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan	gedung	-	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
59	3.07.16.152	Pelatihan Menjahit Level Terampil dan Fashion Design	Jumlah peserta pelatihan menjahit level terampil dan fashion design	Individu	-	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	280.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
60	3.07.16.153	Pelatihan Merangkai Payet bagi IKM	Jumlah peserta pelatihan merangkai payet bagi IKM	Individu	-	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	280.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
61	3.07.16.154	Pelatihan Good Manufacturing Practices bagi IKM Pengolahan Industri Agro	Jumlah peserta pelatihan GMP bagi IKM	Individu	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	300.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
62	3.07.16.155	Pelatihan Produk Olahan Hasil Kelapa bagi IKM	Jumlah peserta pelatihan produk olahan hasil kelapa bagi IKM	Individu	-	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	280.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
63	3.07.16.156	Pelatihan Archievement Motivation Training (AMT) Bagi Pelaku Usaha	Jumlah peserta pelatihan AMT bagi pelaku usaha	Individu	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	300.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
64	3.07.16.157	Bimbingan Teknis Sentra IKM	Jumlah peserta bimbingan teknis sentra IKM	Individu	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	300.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
65	3.07.16.158	Pelatihan Pembuatan Kue dari Bahan Non Beras dan Non Terigu	Jumlah peserta pelatihan pembuatan kue dari bahan non beras dan non terigu	Individu	-	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	280.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
66	3.07.16.159	Pelatihan Pembuatan Aneka Kue dan Manajemen Produksi	Jumlah peserta pelatihan pembuatan aneka kue dan manajemen produksi	Individu	-	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	280.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
67	3.07.16.160	Pelatihan Teknis Pengolahan Produk dari Pisang	Jumlah peserta pelatihan teknis pengolahan produk dari pisang	Individu	-	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	280.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
68	3.07.16.161	Magang Teknis Pengolahan Pangan Berbasis Pisang	Jumlah peserta magang pengolahan pangan berbasis pisang	Individu	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	300.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
69	3.07.16.162	Pelatihan Pengolahan Produk Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah peserta pengolahan produk pangan berbasis sumber daya lokal	Individu	-	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	280.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
70	3.07.16.163	Pelatihan Teknis Pengolahan Pangan dari Ikan	Jumlah peserta pelatihan teknis pengolahan pangan dari ikan	Individu	-	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	280.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
71	3.07.16.164	Magang Teknis Pengolahan Pangan berbasis Ikan	Jumlah peserta magang teknis pengolahan pangan berbasis ikan	Individu	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	300.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
72	3.07.16.165	Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Buah dan Sayur	Jumlah peserta pelatihan teknis pengolahan hasil buah dan sayur	Individu	-	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	280.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
73	3.07.16.166	Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Berbasis Labu	Jumlah peserta pelatihan diversifikasi produk olahan berbasis labu	Individu	-	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	280.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
74	3.07.16.167	Pelatihan Pengolahan Pangan Hasil Laut bagi Pelaku Usaha	Jumlah peserta pengolahan pangan hasil laut bagi pelaku usaha	Individu	-	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	280.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
75	3.07.16.168	Partisipasi pada Agrinex Expo	Meningkatnya promosi produk berbahan baku agro khas Kalteng	Kegiatan	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
76	3.07.16.169	Pelatihan Pembuatan Produk Spa Tradisional	Jumlah peserta pembuatan produk spa tradisional	Individu	-	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	280.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	3.07.20	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program penumbuhan Industri agro</b>									
77	3.07.20.11	Rapat koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan industri aneka	Jumlah dokumen hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Pembinaan dan Pengembangan Industri Aneka	dokumen	-	50.000.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	223.781.563	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
1	3.07.20.13	Pendataan dan identifikasi industri aneka	Peningkatan Akurasi Data Industri Aneka di Kalteng	dokumen	-	42.000.000	-	-	-	42.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
78	3.07.20.14	Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha, dan Sarana Produksi di Bidang Aneka Industri	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha dan Sarana Produksi di Bidang Aneka Industri	Individu	-	70.000.000	73.500.000	77.175.000	81.033.750	301.708.750	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2	3.07.20.27	Magang Teknologi Industri Pengolahan Pangan Hasil Laut Bagi Pelaku Usaha di Bidang Aneka Industri	Jumlah peserta magang teknologi pengolahan pangan dari hasil laut	Individu	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500	72.930.375	331.537.875	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
79	3.07.20.28	Pendataan dan Identifikasi Industri Agro	Jumlah dokumen hasil pendataan industri agro	dokumen	-	50.000.000	55.125.000	57.881.250	60.775.313	223.781.563	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	3.07.20.34	Partisipasi Pada Pameran Pangan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Partisipasi Pameran Pangan	Kegiatan	-	80.000.000	84.000.000	88.200.000	92.610.000	344.810.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
80	3.07.20.36	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Komoditi Unggulan Rotan, Karet, Kelapa Sawit dan Hasil Laut	Jumlah dokumen RPIP Komoditi Unggulan Kalimantan Tengah	dokumen	250.000.000	-	-	-	-	250.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4	3.07.20.38	Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha dan Sarana Produksi di Bidang Aneka Industri Papan Rotan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimtek pengembangan usaha dan saran produksi di bidang aneka industri papan rotan	Individu	-	70.000.000	73.500.000	-	-	143.500.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
81	3.07.20.39	Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha dan Sarana Produksi di Bidang Aneka Industri Kelapa Sawit	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimtek pengembangan usaha dan sarana produksi di bidang aneka industri kelapa sawit	Individu	-	73.500.000	77.175.000	81.033.750	85.085.438	316.794.188	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
5	3.07.20.40	Pelatihan Pengolahan Produk Hilirisasi Kelapa	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan pengolahan produk hilirisasi kelapa	Individu	-	73.500.000	77.175.000	81.033.750	85.085.438	316.794.188	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
82	3.07.20.41	Pelatihan Pengolahan Industri Pakan Ternak dari Limbah Ikan Laut	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan pengolahan industri pakan ternak dari limbah ikan laut	Individu	-	63.000.000	66.150.000	69.457.500	72.930.375	271.537.875	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
6	3.07.20.47	Pendataan dan Identifikasi Potensi Industri Kayu dan Rotan	Jumlah dokumen pendataan dan identifikasi potensi industri kayu dan rotan	Individu	-	63.000.000	66.150.000	69.457.500	72.930.375	271.537.875	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
83	3.07.20.49	Magang Teknologi Industri Pengolahan Produk Hilirisasi Karet	Peningkatan pengetahuan bagi pelaku usaha karet	Individu	-	65.000.000	68.250.000	71.662.500	75.245.625	280.158.125	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
7	3.07.20.52	Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha, dan Sarana Produksi di Bidang Industri Kayu Sengon	Peningkatan kemampuan pelaku usaha di bidang meubel kayu	Individu	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500	72.930.375	331.537.875	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
84	3.07.20.54	Pendataan dan Identifikasi Potensi Komoditi Logam	Hilirisasi produk industri logam	Kegiatan	40.000.000	42.000.000	44.100.000	46.305.000	48.620.350	221.025.350	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
8	3.07.20.55	Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri di Pangkalan Bun, Seruyan dan Sampit	Jumlah dokumen Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri di Pangkalan Bun, Seruyan dan Sampit	dokumen	-	150.000.000	157.500.000	165.375.000	173.643.750	646.518.750	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
85	3.07.20.56	Studi Banding ke Kawasan Industri	Jumlah dokumen Studi Banding ke Kawasan Industri	Individu	-	100.000.000	105.000.000	-	-	205.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9	3.07.20.57	Partisipasi Pameran Furniture	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Partisipasi Pameran Furniture	Kegiatan	-	110.000.000	115.000.000	121.275.000	127.338.750	473.613.750	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
86	3.07.20.58	Pelatihan Teknologi Desain Furniture Kayu dan Rotan	Jumlah Peserta Pelatihan teknologi desain furniture kayu dan rotan	Individu	-	80.000.000	84.000.000	88.200.000	92.610.000	344.810.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
10	3.07.20.59	Pelatihan Teknologi Pengolahan Industri Pangan	Jumlah peserta Pelatihan Tekonologi Pengolahan Industri Pangan	Individu	-	75.000.000	78.750.000	82.687.500	86.821.875	323.259.375	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2017	2018	2019	2020	2021			
87	3.07.20.60	Magang Teknologi Pengolahan Furniture Rotan	Jumlah peserta Magang Teknologi Pengolahan Furniture Rotan	Individu	-	80.000.000	84.000.000	-	-	164.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
11	3.07.20.61	Magang Teknologi Pengolahan Furniture Kayu	Jumlah peserta Magang Teknologi Pengolahan Furniture Kayu	Individu	-	80.000.000	84.000.000	-	-	164.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
88	3.07.20.62	Bimbingan Teknis Pengolahan Kerajinan Perak	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengolahan Kerajinan Perak	Individu	-	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500	258.607.500	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
12	3.07.20.63	Magang Teknologi Pengolahan Kerajinan Perak	Jumlah peserta Magang Teknologi Pengolahan Kerajinan Perak	Individu	-	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500	258.607.500	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
89	3.07.20.64	Magang Teknologi Industri Pengolahan Papan Rotan	Jumlah peserta Magang Teknologi Industri Pengolahan Papan Rotan	Individu	-	70.000.000	73.500.000	-	-	143.500.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
13	3.07.20.65	Bantuan Mesin Peralatan dan Pendampingan Pengolahan Papan Rotan	Jumlah bantuan mesin peralatan pendampingan papan rotan	Individu	-	-	-	600.000.000	600.000.000	1.200.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
90	3.07.20.66	Pembuatan Peta Detai Kawasan Industri	Tersedianya peta kawasan industri di Kalimantan Tengah	dokumen	-	500.000.000	-	-	-	500.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
14	3.07.20.67	Pelatihan Teknologi Industri Pengolahan Papan Rotan	Jumlah peserta Pelatihan Tekonologi Industri Pengolahan Papan Rotan	Individu	-	-	90.000.000	94.500.000	-	184.500.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
91	3.07.20.68	Magang Teknologi Industri Pengolahan Kayu Sengon	Jumlah peserta magang teknologi industri pengolahan kayu sengon	Individu	-	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	260.000.000	APBD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

TUJUAN 13 : PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Kode Indikator	Sasaran	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
						2017	2018	2019	2020	2021
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.										
13.1	Menurunkan degradasi lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (nilai)	RPJMD Kalteng	Nilai	70,37	71,5	72	72,5	73	73,5



TUJUAN 13 : PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
		<b>TPB 13.1</b>	<b>: Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.</b>									
	1.05.16	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Pencegahan Bencana</b>									
1	1.05.39.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	1 (satu) dokumen kajian Peta resiko dan pengintegrasian kebijakan pengelolaan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
2	1.05.39.02	Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana	Dokumen database kejadian bencana dan potensi bencana Kab/Kota	Dokumen	130.000.000	150.000.000	175.000.000	200.000.000	300.000.000	955.000.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
3	1.05.39.03	Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi PRB Prov. Kalteng	100 (seratus) unit papan informasi/ sign board/ pamflet PRB tersebar di 14 Kab/Kota	Dokumen	50.000.000	150.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000	950.000.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
4	1.05.39.04	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	5 (lima) dokumen kajian risiko bencana kab/kota	Dokumen	-	200.000.000	250.000.000	250.000.000	300.000.000	1.000.000.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
5	1.05.39.05	Pelatihan Penyusunan Peta Risiko Bencana	100 (seratus) orang terlatih pembuatan peta risiko bencana	Individu	-	200.000.000	300.000.000	400.000.000	500.000.000	1.400.000.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
6	1.05.39.06	Penyusunan Profil Kebencanaan Prov. Kalteng	5 (lima) dokumen profil kebencanaan dan karakteristiknya Provinsi Kalteng	Dokumen	-	150.000.000	175.000.000	200.000.000	200.000.000	725.000.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
7	1.05.39.07	Mitigasi Struktural di Daerah Berpotensi Bencana	1 (satu) unit reservoir dan 50 (lima puluh) unit sumur bor	Unit Kabkota	-	1.000.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.750.000.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
8	1.05.39.08	Sosialisasi Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana di Kab/Kota	1100 (seribu seratus) orang memahami pencegahan dan pengurangan risiko bencana daerah	Individu	-	150.000.000	250.000.000	300.000.000	300.000.000	1.000.000.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
9	1.05.39.10	Penilaian Kapasitas lokal dalam Pengurangan Risiko Bencana (LG-SAT)	44 (empat puluh empat) SKPD membangun ketangguhan dalam kesenjangan pengurangan risiko bencana LG-SAT (local goverment self assessment tool) for disaster resilience	SKPD	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	200.000.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
10	1.05.39.11	Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana (SAB)	15 (lima belas) Sekolah/madrasah yang menerapkan pola aman bencana dan lingkungan sekitarnya (comprehensive safe school)	Sekolah/madrasah	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	200.000.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
	2.05.22	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Pengendalian kebakaran hutan</b>									
11	2.05.22.05	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	Terlaksananya sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	- Pertemuan	-	1.000.000.000	125.000.000	150.000.000	175.000.000	1.450.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12	2.05.22.09	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah pertemuan koordinasi lintas sektor yang dilakukan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan	- kali	100.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	350.000.000	1.350.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TUJUAN 14 : EKOSISTEM LAUT

Kode Indikator	Sasaran	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
						2017	2018	2019	2020	2021
14.2 Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.										
14.2.1	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP)	Nilai	103,84	104,9	105,45	105,9	106,26	107

TUJUAN 14 : EKOSISTEM LAUT

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
		<b>TBP 14.2</b>	:	<b>Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.</b>								
	3.01.26	<b>PROGRAM</b>	:	<b>Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir</b>								
1	3.01.26.08	Penyusunan Peraturan Daerah Zonasi WP3K Provinsi Kalimantan Tengah	Tersedia dokumen tata ruang zonasi wilayah pesisir Kalteng	Dokumen	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	3.750.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	3.01.26.10	Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Darat dan Laut	Kawasan Perairan Umum Daratan dan Perairan Laut di Kecamatan Timpah	Kawasan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	200.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.01.27	<b>PROGRAM</b>	:	<b>Program Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>								
3	3.01.27.01	Pengembangan Sarana Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana pengawasan	Paket	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	3.750.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	3.01.27.03	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah POKMASWAS yang berperan aktif dalam pengawasan	kelompok	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	3.01.27.06	Peningkatan Upaya Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan	Jumlah operasi pengawasan dan penyidikan kasus yang dilaksanakan	jumlah operasi	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	650.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2017	2018	2019	2020	2021			
6	3.01.27.07	Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi TIM	Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	250.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan

TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN

Kode Indikator	Sasaran	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
						2017	2018	2019	2020	2021
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.										
15.3.1	Menurunya degradasi lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (nilai)	RPJMD	Nilai	70,37	71,5	72	72,5	73	73,5

TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN

NO	KODE	Sasaran	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	
				2017	2018	2019	2020	2021			
		<b>TUJUAN 15.3.</b>	:	<b>Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan be</b>							
		<b>PROGRAM</b>	:	<b>Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan</b>							
1	3.04.15.08	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan	Jumlah IUPHHK yang dimonev produksi kayu bulatnya dan kewajiban Pembayaran PSDH dan DR nya	Unit	300.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.300.000.000	APBD
2	3.04.15.13	Monitoring dan evaluasi standar akutansi kehutanan	Jumlah IUPHHK yang dimonev dalam pelaksanaan penerapan standar akutansi kehutanan	Unit	40.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.040.000.000	APBD
3	3.04.15.15	Monitoring dan evaluasi kelola sosial/pmdh oleh pemegang iuphkh	Jumlah IUPHHK yang dimonev dalam pelaksanaan Kelola Sosial/PMDH	Unit	40.000.000	130.000.000	150.000.000	160.000.000	170.000.000	650.000.000	APBD
4	3.04.15.18	Monitoring peralatan perusahaan hutan	Jumlah IUPHHK yang dimonev dalam penggunaan peralatan berat perusahaan hutan	Unit	150.000.000	400.000.000	400.000.000	300.000.000	350.000.000	1.600.000.000	APBD
	3.04.15.19	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan TPTI, TPTII	Jumlah IUPHHK yang dimonev dalam pelaksanaan TPTI dan TPTII	Unit	40.000.000	133.100.000	146.741.000	160.741.000	176.825.000	657.407.000	APBD
	3.04.15.20	Pembinaan dan Monitoring Perizinan Industri Primer Hasil Hutan	Jumlah IPPHK yang dimonev perizinannya	Unit	80.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	880.000.000	APBD
	3.04.15.21	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Tanaman Industri	Jumlah laporan ; Jumlah Unit HTI	Laporan	40.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	480.000.000	APBD

NO	KODE	Sasaran	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	
				2017	2018	2019	2020	2021			
	3.04.15.22	Penyusunan Rencana Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen rencana pemanfaatan jasa lingkungan	dokumen	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.500.000.000	APBD
	3.04.15.24	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan PHPL pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUPHHK-RE	Jumlah IUPHHK yang dilaksanakan pembinaan dan pengendalian	Unit	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	750.000.000	APBD
	3.04.15.25	Pembinaan dan Pengendalian Izin Pemanfaatan Kayu Pada IPHHK, IPKH/TMKH dan APL	Jumlah unit usaha pemegang IPK yang dilakukan pembinaan dan pengendalian Ijin Pemanfaatan Kayu 30 Unit	Unit	40.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	640.000.000	APBD
	3.04.15.26	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Alam/Hutan Tanaman	Jumlah IUPHHK yang di monitoring dan evaluasi	Unit	40.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	640.000.000	APBD



NO	KODE	Sasaran	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	
				2017	2018	2019	2020	2021			
	3.04.15.30	Koordinasi dan Fasilitasi Perusahaan Daerah/ BUMD untuk Bermitra Dengan Pengusaha Sektor Kehutanan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi	Unit	120.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	720.000.000	APBD
	2.05.18	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam</b>								
	2.05.18.01	Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria, dan teluk	Terlaksananya pembinaan dengan sejumlah kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan dan rehabilitasi mangrove	Kab	50.000.000	200.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000	950.000.000	APBD
	2.05.18.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Terlaksananya pembinaan dengan kelompok masyarakat di kab yang mengembangkan varietas padi ladang lokal	Kab/kot a	50.000.000	150.000.000	175.000.000	200.000.000	225.000.000	800.000.000	APBD
	2.05.18.13	Inventarisasi ekosistem mangrove	Tersedianya data ekosistem mangrove	dokumen	50.000.000	150.000.000	175.000.000	200.000.000	225.000.000	800.000.000	APBD
	2.05.18.16	Rehabilitasi hutan dan lahan	Terlaksananya pembinaan terhadap komunitas lokal dalam melakukan rehabilitasi lahan gambut berbasis kearifan lokal	Komunitas lokal	50.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000	450.000.000	1.550.000.000	APBD
	2.05.17	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>								
	2.05.17.05	Pengendalian dampak perubahan iklim	Terlaksananya penyusunan dok inventarisasi GRK	dokumen	100.000.000	150.000.000	200.000.000	25.000.000	300.000.000	775.000.000	APBD

NO	KODE	Sasaran		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan
					2017	2018	2019	2020	2021		
	2.05.17.07	Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	Tersedianya Dokumen daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	dokumen	100.000.000	150.000.000	175.000.000	200.000.000	20.000.000	645.000.000	APBD
	2.05.17.10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah Kab/Kota yang melakukan Pengelolaan Kehati	Kab	75.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	1.175.000.000	APBD
	2.05.17.20	Pengendalian Kerusakan hutan dan lahan	Terlaksananya pemantauan terhadap unit usaha terhadap ketaatan dalam pengendalian kebakaran	Unit Usaha	100.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000	450.000.000	1.600.000.000	APBD
	2.05.17.22	Pemetaan Wilayah Adat yang Perlu di Konservasi	Jumlah wilayah adat yang mendapat pengakuan dari negara	Kab	125.000.000	150.000.000	175.000.000	200.000.000	250.000.000	900.000.000	APBD
	2.05.17.24	Pembebasan Lahan Taman Kehati	Terlaksananya pembebasan lahan untuk taman kehati.	lokasi	-	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	APBD
	2.05.17.25	Pembangunan Taman Kehati	Terlaksananya pembangunan taman kehati	%	-	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.000.000.000	APBD

Instansi Pelaksana
Perusahaan
Dinas Kehutanan
Dinas Kehutanan
Dinas Kehutanan
Dinas Kehutanan
Dinas Kehutanan
Dinas Kehutanan
Dinas Kehutanan

<b>Instansi Pelaksana</b>
Dinas Kehutanan
Dinas Kehutanan
Dinas Kehutanan
Dinas Kehutanan

<b>Instansi Pelaksana</b>
Dinas Kehutanan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

<b>Instansi Pelaksana</b>
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan an
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan an
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan an
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan an
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan an
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan an
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan an

**TUJUAN 16 : PERDAMAIAN Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh**

Kode Indikator	Sasaran	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
						2017	2018	2019	2020	2021
<b>16.5. Secara signifikan mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuk</b>										
16:05:01	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Opini BPK	RPJMD	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
<b>16.6. Membangun institusi-institusi yang akuntabel dan transparan di semua level</b>										
16:06:03	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	RPJMD	Nilai	47,52	65	70	75	80	85
16:06:04	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	RPJMD	Nilai	B	B	BB	BB	BB	A
		Predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah	RPJMD	Nilai	B	B	BB	BB	BB	A
<b>16.10. Memastikan akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan fundamental</b>										
16:10:02	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	RPJMD	Nilai	77,23	80	82	84	86	88

TUJUAN 16 : PERDAMAIAN Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2017	2018	2019	2020	2021			
		<b>TUJUAN 16.5</b>	: Secara signifikan mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuk								
	4.08.16	<b>PROGRAM</b>	: Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan								
1	4.08.16.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	: Jumlah Bimtek/PKS yang terlaksana Kab/Kota Jejaring	203.950.000	224.345.000	246.779.500	271.457.450	224.345.000	1.170.876.950	APBD	Inspektorat
	1.02.60	<b>PROGRAM</b>	: Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah								
2	1.02.60.01	Pengelolaan inventaris barang daerah	: Terlaksananya kegiatan pengelolaan aset/barang daerah dengan baik Dokumen	225.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	300.000.000	1.275.000.000	APBD	
	4.06.25	<b>PROGRAM</b>	: Program Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Pemberantasan KKN								
3	4.06.25.02	Pengelolaan administrasi LHKPN	: Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur dalam menyampaikan dokumen LHKPN orang	95.700.000	130.000.000	140.000.000	150.000.000	160.000.000	675.700.000	APBD	Biro Organisasi
4	4.06.25.03	Penyusunan Perjanjian Kinerja	: Tersedianya Dokumen Hasil Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Dokumen	73.114.650	300.000.000	350.000.000	400.000.000	400.000.000	1.523.114.650	APBD	Biro Organisasi
5	4.06.25.05	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Provinsi Kalimantan Tengah	: Terwujudnya pelaksanaan good governance di Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi, Kab/Kota	-	185.000.000	190.000.000	205.000.000	210.000.000	790.000.000	APBD	Biro Organisasi
6	4.06.25.06	Evaluasi dan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	: Terlaksananya evaluasi SPIP SKPD	-	350.000.000	400.000.000	450.000.000	450.000.000	1.650.000.000	APBD	Biro Organisasi
7	4.06.25.07	Pelaksanaan rapat PAN di daerah	: Terwujudnya pelaksanaan rapat PAN di daerah dan meningkatkan kompetensi ASN orang	107.450.000	130.000.000	140.000.000	150.000.000	160.000.000	687.450.000	APBD	Biro Organisasi
8	4.06.25.08	Penyusunan Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan Biro	: Tersusunnya program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Renja dan penyusunan laporan biro Dokumen	115.750.000	135.000.000	145.000.000	165.000.000	175.000.000	735.750.000	APBD	Biro Organisasi



NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
9	4.06.25.09	Workshop pelaksanaan Tata kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya pemahaman ASN dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik	orang	-	85.000.000	95.500.000	110.000.000	120.000.000	410.500.000	APBD	Biro Organisasi
10	4.06.25.10	Workshop Pendayagunaan Aparatur dalam rangka percepatan reformasi birokrasi	Jumlah PNS/SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengikuti workshop	orang	-	85.000.000	95.000.000	110.000.000	120.000.000	410.000.000	APBD	Biro Organisasi
11	4.06.25.13	Asistensi LHKPN	Terwujudnya penyelenggara negara yang taat dan sadar untuk menyampaikan LHKPN	orang	-	185.000.000	190.000.000	200.000.000	220.000.000	795.000.000	APBD	Biro Organisasi
12	4.06.25.14	Asistensi LHKASN	Terwujudnya ASN yang taat dan sadar untuk menyampaikan LHKASN	orang	-	180.000.000	190.000.000	200.000.000	220.000.000	790.000.000	APBD	Biro Organisasi
13	4.06.25.15	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Program dan Kegiatan Bidang Organisasi se Kalimantan	Terlaksananya sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan bidang organisasi se Kalimantan Tengah	orang	195.750.000	310.000.000	315.000.000	320.000.000	330.000.000	1.470.750.000	APBD	Biro Organisasi
	4.04.19	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Pendidikan Kedinasan</b>									
14	4.04.19.02	Pendidikan penjenjangan struktural	PNS Kab/Kota yang telah mengikuti Diklat PIM dan telah memperoleh STTPL dengan rincian PIM.III 160 Orang dan PIM.IV 240 Orang	Individu	7.770.015.000	7.770.015.000	5.000.000.000	5.000.000.000	7.770.015.000	33.310.045.000	APBD	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
15	4.04.19.03	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat	Dokumen	144.922.188	144.922.188	155.000.000	155.000.000	160.000.000	759.844.376	APBD	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	4.03.63	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>									
16	4.03.63.02	Seleksi penerimaan calon PNS	Terlaksananya kegiatan penerimaan CPNS tahun 2017	Individu	-	560.680.000	588.720.000	618.150.000	649.060.000	2.416.610.000	APBD	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
17	4.03.63.04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Sk Kenaikan pangkat periode april dan oktober dan peninjauan masa kerja PNS	Individu	150.000.000	388.500.000	407.930.000	428.320.000	449.740.000	1.824.490.000	APBD	Badan Kepegawaian Daerah
18	4.03.63.07	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	Terlaksananya seleksi administrasi tugas belajar bagi PNS Provinsi yang memenuhi syarat	Individu	-	36.230.000	38.000.000	39.940.000	41.930.000	156.100.000	APBD	Badan Kepegawaian Daerah
19	4.03.63.08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	PNS penerima Satyalancana Karya Satya	Individu	74.469.100	131.250.000	137.810.000	144.700.000	151.940.000	640.169.100	APBD	Badan Kepegawaian Daerah
20	4.03.63.09	Proses penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS	SK Pemberhentian PNS dan jumlah laporan yang berkaitan dengan kedisiplinan	Individu	265.538.160	381.530.000	400.600.000	420.630.000	441.670.000	1.909.968.160	APBD	Badan Kepegawaian Daerah
21	4.03.63.11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Terbantunya biaya pendidikan PNS tugas belajar S2, S3 dan atau dokter spesialis	Individu	330.000.000	588.000.000	617.400.000	648.270.000	680.680.000	2.864.350.000	APBD	Badan Kepegawaian Daerah
22	4.03.63.18	Ujian kenaikan pangkat penyelesaian ijazah	Terlaksananya ujian penyelesaian ijazah bagi PNS yang memenuhi syarat	Individu	100.000.000	120.750.000	126.790.000	133.130.000	139.780.000	620.450.000	APBD	Badan Kepegawaian Daerah
23	4.03.63.19	Ujian dinas kenaikan pangkat tingkat I dan II	PNS Yang mengikuti ujian dinas tingkat I dan II	Individu	100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.760.000	121.500.000	552.510.000	APBD	Badan Kepegawaian Daerah
24	4.03.63.20	Penyelesaian SK izin belajar dan SK tugas belajar	SK Ijin Belajar dan SK Tugas Belajar	Individu	-	30.190.000	31.700.000	33.280.000	34.950.000	130.120.000	APBD	Badan Kepegawaian Daerah
25	4.03.63.23	Penyelesaian pengangkatan CPNS dari umum atau honorer	Terselesainya a SK pengangkatan CPNS dan SK dari pelamar umum/honorer	Individu	-	18.460.000	19.380.000	20.350.000	21.370.000	79.560.000	APBD	Badan Kepegawaian Daerah
26	4.03.63.24	Peningkatan pelayanan pensiun	Terlaksananya proses penyelesaian SK Pensiun PNS	Individu	100.000.000	141.230.000	148.290.000	155.700.000	163.490.000	708.710.000	APBD	Badan Kepegawaian Daerah
27	4.03.63.25	Seleksi Penerimaan Capra IPDN	Capra IPDN yang lulus pantukir utusan provinsi Kalimantan Tengah	Individu	137.940.660	144.840.000	152.080.000	159.680.000	167.670.000	762.210.660	APBD	Badan Kepegawaian Daerah

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
28	4.03.63.26	Seleksi Diklat PIM III dan IV	PNS yang mengikuti seleksi Diklatpim III dan IV	Individu	-	-	105.000.000	-	110.250.000	215.250.000	APBD	Badan Kepegawaian Daerah
29	4.03.63.27	Penyusunan Pemberian Kesejahteraan Aparatur	PNS yang mengambil cuti PNS yang membuat karis/karsu PNS yang mendaftar menjadi peserta BPJS (Askes) dan Taspen PNS yang membuat SKP eselon II	Individu	100.000.000	126.000.000	132.300.000	138.920.000	145.860.000	643.080.000	APBD	Badan Kepegawaian Daerah
30	4.03.63.28	Penyusunan Rencana Karir PNS	Terlaksananya PNS yang menduduki jabatan struktural	Individu	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	3.500.000.000	APBD	Badan Kepegawaian Daerah
31	4.03.63.29	Penataan Jabatan Fungsional	Terlaksananya PNS yang menduduki jabatan fungsional	Individu	75.000.000	157.500.000	165.380.000	173.640.000	182.330.000	753.850.000	APBD	Badan Kepegawaian Daerah
32	4.03.63.30	Pembinaan dan Pengendalian Manajemen PNS	Terlaksananya kegiatan manajemen PNS	Individu	-	63.000.000	66.150.000	69.460.000	72.930.000	271.540.000	APBD	Badan Kepegawaian Daerah
33	4.03.63.31	Mutasi PNS	SK mutasi/pindah PNS	Individu	91.980.000	52.500.000	55.130.000	57.880.000	60.780.000	318.270.000	APBD	Badan Kepegawaian Daerah
34	4.03.63.32	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program/Kegiatan Kepegawaian	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan terhadap 4 Instansi Pusat, Provinsi, dan 14 Kabupaten/Kota	Individu	68.082.910	236.250.000	248.060.000	260.470.000	273.490.000	1.086.352.910	APBD	Badan Kepegawaian Daerah
35	4.03.63.34	Pelepasan Pensiun/Purna Tugas PNS BUP	PNS mengikuti pelepasan pensiun/purna tugas	Individu	75.000.000	84.000.000	88.200.000	92.610.000	97.240.000	437.050.000	APBD	Badan Kepegawaian Daerah
36	4.03.63.35	Pembekalan dan Orientasi PNS	PNS mengikuti pembekalan dan orientasi PNS	Individu	-	31.500.000	33.080.000	34.730.000	36.470.000	135.780.000	APBD	Badan Kepegawaian Daerah
37	4.03.63.36	Pengambilan Sumpah Janji PNS	Sumpah Janji dan Karpeg	Individu	-	55.040.000	57.790.000	60.680.000	63.720.000	237.230.000	APBD	Badan Kepegawaian Daerah
38	4.03.63.37	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	PNS yang mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi	Individu	696.471.050	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.696.471.050	APBD	Badan Kepegawaian Daerah
		<b>TUJUAN 16.6</b>	<b>: Membangun institusi-institusi yang akuntabel dan transparan di semua level</b>									
4.06 - 24		<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</b>									

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
39	4.06.24.01	Evaluasi perangkat daerah kabupaten/kota se Kalimantan Tengah	Tersedianya laporan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah	SKPD	47.077.353	120.000.000	130.000.000	140.000.000	150.000.000	587.077.353	APBD	Biro Organisasi
40	4.06.24.02	Pembinaan dan asistensi perangkat daerah kabupaten/kota	Terbinanya pejabat yang telah memahami tata kelembagaan Organisasi Pemerintah Daerah	Individu	42.544.043	120.000.000	130.000.000	140.000.000	150.000.000	582.544.043	APBD	Biro Organisasi
41	4.06.24.03	Penataan kelembagaan perangkat daerah	Tersedianya OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	SKPD	124.156.436	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	1.524.156.436	APBD	Biro Organisasi
42	4.06.24.04	Penyusunan tupoksi organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Tersedianya TUPOKSI OPD di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	SKPD	43.135.320	130.000.000	140.000.000	150.000.000	160.000.000	623.135.320	APBD	Biro Organisasi
43	4.06.24.05	Pelaksanaan analisis jabatan perangkat daerah	Tersedianya informasi jabatan dan peta jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Individu	83.662.500	300.000.000	320.000.000	340.000.000	350.000.000	1.393.662.500	APBD	Biro Organisasi
44	4.06.24.06	Penyusunan profil kelembagaan perangkat daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya laporan hasil profil kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota	SKPD	-	100.000.000	110.000.000	120.000.000	140.000.000	470.000.000	APBD	Biro Organisasi
45	4.06.24.07	Penyusunan formasi jabatan	Tersedianya data rekapitulasi Forjab struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Individu	65.992.430	170.000.000	190.000.000	210.000.000	220.000.000	855.992.430	APBD	Biro Organisasi
46	4.06.24.09	Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi proses penyusunan Perda OPD	SKPD	43.158.200	120.000.000	130.000.000	140.000.000	150.000.000	583.158.200	APBD	Biro Organisasi

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
47	4.06.24.10	Rapat pra rakor dan rakor regional bidang organisasi dan kepegawaian se Kalimantan sesuai agenda tiap tahun	Tertindakannya Pra Rakor dan Rakor Bidang Organisasi dan Kepegawaian 35 item masalah dan 500 orang peserta	Individu	357.594.196	300.000.000	325.000.000	350.000.000	375.000.000	1.707.594.196	APBD	Biro Organisasi
48	4.06.24.12	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tersedianya dokumen Administrasi kepegawaian dilingkungan Setda Prov. Kalteng	Dokumen	54.499.503	110.000.000	120.000.000	130.000.000	140.000.000	554.499.503	APBD	Biro Organisasi
49	4.06.24.13	Penataan UPTD Provinsi Kalimantan Tengah	Tertindakannya penataan UPTD sesuai kebutuhan daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	UPTD	36.659.150	170.000.000	180.000.000	190.000.000	200.000.000	776.659.150	APBD	Biro Organisasi
50	4.06.24.14	Pelaksanaan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen tentang informasi analisis beban kerja perangkat daerah	Individu	68.945.550	150.000.000	160.000.000	170.000.000	180.000.000	728.945.550	APBD	Biro Organisasi
51	4.06.24.15	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah	Tercapainya hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang optimal	Nilai	132.000.000	270.000.000	290.000.000	310.000.000	330.000.000	1.332.000.000	APBD	Biro Organisasi
52	4.06.24.16	Penyusunan Pergub tentang koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS) instansi vertikal dan SKPD Prov.Kalteng	Tersedianya PERGUB tentang jalur koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas instansi vertikal dan OPD Provinsi	Peraturan	-	120.000.000	130.000.000	140.000.000	150.000.000	540.000.000	APBD	Biro Organisasi
53	4.06.24.19	Evaluasi Jabatan	Terwujudnya pemeringkatan, nilai dan kelas jabatan	Individu	-	120.000.000	130.000.000	140.000.000	150.000.000	540.000.000	APBD	Biro Organisasi
54												
	4.06.26	<b>TUJUAN 16.10.</b>	: Memastikan akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan fundamental									
	4.06.26	<b>PROGRAM</b>	: Program Peningkatan kualitas pelayanan publik									

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
55	4.06.26.01	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Terlaksananya Penilaian Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	Provinsi, Kab/Kota	92.206.413	350.000.000	400.000.000	450.000.000	500.000.000	1.792.206.413	APBD	Biro Organisasi
56	4.06.26.05	Evaluasi tata naskah dinas	Terlaksananya Evaluasi Tata Naskah	Provinsi, Kab/Kota	54.944.250	350.000.000	400.000.000	450.000.000	450.000.000	1.704.944.250	APBD	Biro Organisasi
57	4.06.26.15	Asistensi dan Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Meningkatnya kemampuan aparatur dalam menyusun IKM	Individu	108.594.350	500.000.000	-	-	-	608.594.350	APBD	Biro Organisasi
58	4.06.26.16	Asistensi dan Survei IPM (Indeks Pengaduan Masyarakat)	Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam menyusun IPM	Individu	-	500.000.000	-	-	-	500.000.000	APBD	Biro Organisasi
59	4.06.26.18	Asistensi Standar Pelayanan Publik (SPP)	Meningkatnya kualitas aparatur dalam menyusun SPP	Individu	-	500.000.000	-	-	-	500.000.000	APBD	Biro Organisasi
60	4.06.26.19	Asistensi Standar Pelayanan Minimal	Jumlah dokumen SPM	Individu	-	500.000.000	-	-	-	500.000.000	APBD	Biro Organisasi
61	4.06.26.20	Asistensi Standar Operasional Prosedur (SOP)	Meningkatnya kualitas aparatur dalam menyusun SOP	Individu	102.331.650	500.000.000	-	-	-	602.331.650	APBD	Biro Organisasi
62	4.06.26.21	Rapat Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah pertemuan/rapat	Kegiatan	-	350.000.000	400.000.000	450.000.000	450.000.000	1.650.000.000	APBD	Biro Organisasi
63	4.06.26.22	Evaluasi IPM (Indeks Pengaduan Masyarakat)	Jumlah dokumen evaluasi IPM Kab/Kota	Provinsi, Kab/Kota	-	450.000.000	500.000.000	550.000.000	550.000.000	2.050.000.000	APBD	Biro Organisasi
64	4.06.26.23	Evaluasi IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Jumlah dokumen evaluasi IKM Kab/Kota	Provinsi, Kab/Kota	-	450.000.000	500.000.000	550.000.000	550.000.000	2.050.000.000	APBD	Biro Organisasi
65	4.06.26.23	Evaluasi IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Jumlah dokumen evaluasi IKM Kab/Kota	Provinsi, Kab/Kota	-	450.000.000	500.000.000	550.000.000	550.000.000	2.050.000.000	APBD	Biro Organisasi
2.10.21	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Peningkatan dan Pembangunan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah)</b>										
66	2.10.21.03	Pengembangan website pemda Kalimantan Tengah	tersedianya website pemda kalteng yang optimal&#13;&#10;tersedianya domain dan subdomain yang ada di kalteng	domain dan sub domain	100.000.000	150.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000	1.000.000.000	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.10.23	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>										

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
67	2.10.23.02	Pemeliharaan Mobile Community Acces Point (MCAP)	Terlaksananya pemanfaatan TIK dalam bentuk penggunaan internet bagi pelajar dan masyarakat umum	0 pelajar/ masyarakat	75.000.000	370.000.000	380.000.000	390.000.000	400.000.000	1.615.000.000	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
68	2.10.23.06	Biaya Bandwitch data Center	Tersedianya pemanfaatan TIK dalam bentuk internet	0 lokasi	380.000.000	500.000.000	700.000.000	900.000.000	1.100.000.000	3.580.000.000	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
69	2.10.23.11	Sosialisasi Internet Sehat	Terwujudnya pemanfaatan Internet yang aman dan sehat bagi para pelajar dan pelaku usaha internet.	0 Pelajar/ masyarakat	125.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	1.225.000.000	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
70	2.10.23.13	Pemberdayaan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Melalui Pusat Komunitas kreatif	Terwujudnya pemanfaatan TIK untuk pelaku UMKM dalam membantu pengembangan/ penjualan secara online, efektif dan efisien. ;Terwujudnya pemanfaatan TIK untuk aparatur	0 orang terlatih	100.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000	500.000.000	1.650.000.000	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
71	2.10.23.43	Bongkar dan Pemasangan Perangkat Jaringan Data Center	Terlaksananya bongkar pasang perangkat jaringan data center	0 tahun	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
72	2.10.23.44	Pemeliharaan dan Pengembangan Keamanan Jaringan	terpeliharanya jaringan LAN dan internet	0 tahun	20.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	60.000.000	200.000.000	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
73	2.10.23.45	Biaya Bandwitch Hotspot Gratis	terwujudnya pemanfaatan TIK dalam bentuk penggunaan internet di wilayah non komersial (sekolah,dll)	0 lokasi	-	180.000.000	190.000.000	210.000.000	230.000.000	810.000.000	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				2017	2018	2019	2020	2021				
74	2.10.23.46	Optimalisasi Perangkat Jaringan Data Center	Tersedianya optimalisasi perangkat jaringan data center	0 bulan	-	200.000.000	210.000.000	220.000.000	230.000.000	860.000.000	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
75	2.10.23.47	Pemasangan Media Informasi Publik	Tersedianya sarana informasi publik di lingkungan kantor Diskominfo, Persandian dan Statistik	0 paket	-	125.000.000	130.000.000	-	-	255.000.000	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
76	2.10.23.48	Pembuatan Master Plan e0Government Kalteng	Tersedianya Master Plan E0Government Kalteng	0 dokumen	-	500.000.000	-	-	-	500.000.000	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
77	2.10.23.49	Pembangunan Layanan Teleconference/ Video conference	Tersedianya Layanan Teleconference / Video Conference	0 set	-	190.000.000	-	-	-	190.000.000	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
78	2.10.23.50	Optimalisasi Teleconference/ Video Convergence	Terpeliharanya Layanan Teleconference / Video Conference menjadi lebih optimal	0 bulan	-	150.000.000	160.000.000	170.000.000	180.000.000	660.000.000	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
79	2.10.23.51	Optimalisasi Transponder Siaran TV Untuk Kerjasama Provinsi Kalteng Dengan Seluruh Kab/Kota di Kalteng	Tersedianya transponder siaran tv	0 bulan	-	150.000.000	160.000.000	170.000.000	180.000.000	660.000.000	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
80	2.10.23.52	Pengembangan dan Penyelarasan E0Government	Tersedianya layanan e0government yang optimal dan standar sesuai dengan master plan e0Government Kalteng	0 aplikasi	-	-	450.000.000	600.000.000	675.000.000	1.725.000.000	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik



NO	KODE	TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					2017	2018	2019	2020	2021			
81	2.10.23.53	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi E0Government	Tertindakannya bimtek dan pelatihan penggunaan aplikasi e0gov yang optimal dan standar sesuai dengan master plan e0Government Kalteng	0 peserta	-	150.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000	1.200.000.000	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
82	2.10.23.54	Pembangunan Infrastruktur Untuk Layanan Media Publik	Tersedianya infrastruktur untuk layanan media publik	0 lokasi	-	350.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.550.000.000	APBD	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

TUJUAN 17 : KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Kode Indikator	Sasaran	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Tahun Dasar	Target Pencapaian				
						2017	2018	2019	2020	2021
<b>17.2. Mengimplementasikan secara penuh komitmen ODA</b>										
17:02:01	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah	RJPMD	Persen	36,60	30-32	32-35	35-40	40-45	45-50
		Persentase PAD terhadap total pendapatan transfer	RJPMD	Persen	58,32	42,33	40-50	50-55	55-60	55-60
		Persentase belanja langsung terhadap APBD	RJPMD	Persen	47,38	33,3	45-50	45-50	50-55	55-60
		Persentase PAD terhadap total pendapatan transfer	RJPMD	Persen	58,32	42,33	40-50	50-55	55-60	55-60
		Persentase belanja langsung terhadap APBD	RJPMD	Persen	47,38	33,3	45-50	45-50	50-55	55-60
<b>17.3. Memobilisasi tambahan sumber daya finansial dari berbagai sumber</b>										
17:03:01	Terpasarkannya industri wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	RJPMD	Orang	373.000	433.000	493.000	553.000	613.000	673.000

TUJUAN 17 : KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

NO	KODE	Tujuan TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	
				2017	2018	2019	2020	2021			
		<b>TUJUAN 17.2.</b>	<b>: Mengimplementasikan secara penuh komitmen ODA</b>								
	4.02.61	<b>PROGRAM</b>	<b>: Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>								
1	4.02.61.01	Intensifikasi dan Koordinasi PKB dan BBNKB	Jumlah dokumen laporan kegiatan dalam rangka intensifikasi/koordinasi pajak daerah lainnya	dokumen	3.721.667.179	3.750.000.000	4.125.000.000	4.537.500.000	4.991.250.000	21.125.417.179	APBD
2	4.02.61.02	Intensifikasi dan Koordinasi Pajak Daerah Lainnya	Jumlah dokumen laporan kegiatan dalam rangka intensifikasi/koordinasi pajak daerah lainnya	dokumen	296.305.000	300.000.000	330.000.000	363.000.000	399.300.000	1.688.605.000	APBD
3	4.02.61.03	Intensifikasi dan Koordinasi Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Retribusi Daerah per triwulan	dokumen	200.000.000	220.000.000	242.000.000	266.200.000	292.820.000	1.221.020.000	APBD
4	4.02.61.04	Intensifikasi dan Koordinasi DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak	Persentase realisasi DBH	dokumen	400.000.000	440.000.000	484.000.000	532.400.000	585.640.000	2.442.040.000	APBD
5	4.02.61.05	Koordinasi dan Monitoring Pelaporan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan pendapatan daerah	dokumen	364.706.900	370.000.000	407.000.000	447.700.000	492.470.000	2.081.876.900	APBD
6	4.02.61.06	Pengembangan SIM SAMSAT	Jumlah Laporan	dokumen	495.481.050	500.000.000	550.000.000	605.000.000	665.500.000	2.815.981.050	APBD
7	4.02.61.07	Pembuatan Notice Pajak Kendaraan Bermotor (Blanko SKPD)	Jumlah Cetakan Blanko SKPD	dokumen	890.150.000	890.150.000	979.165.000	1.077.081.500	1.184.789.650	5.021.336.150	APBD
8	4.02.61.08	Koordinasi Produk Hukum Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan hukum pendapatan daerah	dokumen	190.000.000	200.000.000	220.000.000	242.000.000	266.200.000	1.118.200.000	APBD

NO	KODE	Tujuan TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan
					2017	2018	2019	2020	2021		
9	4.02.61.09	Pembinaan dan Pengendalian Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan penerimaan pendapatan daerah	dokumen	78.000.000	80.000.000	88.000.000	96.800.000	106.480.000	449.280.000	APBD
10	4.02.61.10	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka IKM	dokumen	460.000.000	460.000.000	506.000.000	556.600.000	612.260.000	2.594.860.000	APBD

NO	KODE	Tujuan TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan
				2017	2018	2019	2020	2021		
		<b>TUJUAN 17.3.</b>		<b>: Memobilisasi tambahan sumber daya finansial dari berbagai sumber</b>						
	3.02:15	<b>PROGRAM</b>		<b>: Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>						
11	3.02.15.01	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata	: jumlah kab/kota usaha pariwisata	40.000.000	300.000.000	400.000.000	400.000.000	100.000.000	1.240.000.000	APBD
12	3.02.15.11	Bahan Promosi Pariwisata dan Budaya	: jumlah bahan promosi Org	150.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	2.150.000.000	APBD
13	3.02.15.12	Borneo Extravaganza	: jumlah kegiatan Kegiatan	50.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	1.450.000.000	APBD
14	3.02.15.13	Mengikuti pasar wisata di provinsi lain	: jumlah pelaku usaha Kegiatan	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	800.000.000	APBD
15	3.02.15.20	Kalteng Expo	: jumlah pengunjung Kegiatan	50.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	450.000.000	APBD
16	3.02.15.35	Mengikuti/melaksanakan MICE di dalam dan luar negeri	: jumlah kegiatan Kegiatan	50.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	350.000.000	APBD
17	3.02.15.37	Mengikuti Travel mart	: jumlah kegiatan Kegiatan	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000	APBD
18	3.02.15.38	Promosi Pariwisata dan budaya ke Provinsi Lain	: jumlah kegiatan Kegiatan	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	800.000.000	APBD
19	3.02.15.39	Peliputan Peristiwa Pariwisata	: jumlah liputan Org	-	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	1.400.000.000	APBD

NO	KODE	Tujuan TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	
				2017	2018	2019	2020	2021			
20	3.02.15.41	Festival Borneo	: jumlah kegiatan	Org	50.000.000	300.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	800.000.000	APBD
21	3.02.15.43	Pameran Potensi Pariwisata Kalteng	: jumlah kegiatan	buku	40.000.000	350.000.000	350.000.000	400.000.000	400.000.000	1.540.000.000	APBD
22	3.02.15.45	Dialog Strategi Promosi Pemasaran Pariwisata	: Jumlah pelaku usaha	Org	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	800.000.000	APBD
23	3.02.15.46	Workshop Go Digital	: Jumlah peserta	Org	-	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	900.000.000	APBD
24	3.02.15.47	Profil Pariwisata Kalimantan Tengah	: Jumlah profil	Kab./Kota	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	800.000.000	APBD
25	3.02.15.48	Supervisi pengembangan segmen Pasar	: Jumlah peserta	Org	-	200.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000	900.000.000	APBD
26	3.02.15.49	Mengikuti Ajang Pemilihan Duta Bidang Pariwisata Tingkat Nasional.	: Jumlah duta	Org	75.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	675.000.000	APBD
27	3.02.15.50	Tourism go public	: Jumlah event	Org	-	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	300.000.000	APBD
28	3.02.15.51	Analisa data promosi dalam dan luar negeri	: Jumlah pelaku usaha	Org	-	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.000.000.000	APBD

NO	KODE	Tujuan TPB / Program / Kegiatan / Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahunan (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	
				2017	2018	2019	2020	2021			
29	3.02.15.52	Fun Bike Tour Wisata	: Jumlah peserta	Org	-	100.000.000	150.000.000	200.000.000	250.000.000	700.000.000	APBD
30	3.02.15.53	Boat Festival	: Jumlah peserta	Org	-	-	250.000.000	300.000.000	350.000.000	900.000.000	APBD
31	3.02.15.54	Branding Image Pariwisata Kalimantan Tengah	: Jumlah peserta	Org	-	300.000.000	-	-	-	300.000.000	APBD
32	3.02.15.55	Talkshow Kepariwisataaan	: Jumlah pelaku usaha	Org	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000	APBD
33	3.02.15.56	Bimtek pembuatan desain dan jurnalisme sarana promosi	: Jumlah peserta	Org	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000	APBD

<b>Instansi Pelaksana</b>
Badan Keuangan Daerah
Badan Keuangan Daerah
Badan Keuangan Daerah
Badan Keuangan Daerah
Badan Keuangan Daerah
Badan Keuangan Daerah
Badan Keuangan Daerah
Badan Keuangan Daerah
Badan Keuangan Daerah



<b>Instansi Pelaksana</b>
Badan Keuangan Daerah
Badan Keuangan Daerah

Instansi Pelaksana
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

<b>Instansi Pelaksana</b>
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

<b>Instansi Pelaksana</b>
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata